

การ เกาะ การ

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- 1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan;
- 3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumbersumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



กกา พยาทหูรุเพลารุเพลารุเทมี พลามพาพามาเกเท

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 249);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 581);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);



- 16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
- 17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 12);
- 18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 9);
- 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);
- 20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121);
- 21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
- 22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 114);
- 23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 130);
- 24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
- 25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- 26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 88);
- 27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 130);
- 28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
- 29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 75);
- 30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 90) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran



ก็ต่ำหูงพะกงพะกงตุนีทุยบทุพหฦหก์เก

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 91).

1.3 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Secara geografis DIY terletak pada bagian tengah Pulau Jawa, dengan sisi selatan dibatasi Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya berbatasan dengan enam kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- 1. Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah Timur Laut
- 2. Kabupaten Wonogiri di sebelah Timur dan Tenggara
- 3. Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- 4. Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut
- 5. Kabupaten Boyolali di sebelah Utara

DIY terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/ kelurahan, dengan perincian:

- 1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/ desa;
- 2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa;
- 3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/ desa;
- 4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/ desa;
- 5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/ desa.



Gambar 0-1. Peta Administrasi DIY

Sumber: Bappeda DIY

DIY posisinya terletak diantara 7°.33' - 8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00'- 110°.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²).

Pemda DIY menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemda DIY meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:



- 1. Urusan wajib meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum
 - d. Perumahan
 - e. Penataan Ruang
 - f. Perencanaan Pembangunan
 - g. Perhubungan
 - h. Lingkungan Hidup
 - i. Pertanahan
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - m. Sosial
 - n. Ketenagakerjaan
 - o. Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah
 - p. Penanaman Modal
 - q. Kebudayaan
 - r. Kepemudaan dan Olahraga
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - u. Ketahanan Pangan
 - v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - w. Komunikasi dan Informatika
 - x. Perpustakaan
- 2. Urusan pilihan meliputi:
 - a. Pertanian
 - b. Kehutanan
 - c. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - d. Pariwisata
 - e. Kelautan dan Perikanan
- 3. Urusan Keistimewaan meliputi:
 - a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - c. Kebudayaan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Tata Ruang.

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY Tahun 2019 mengacu pada Perda Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Entitas akuntansi pada Pemda DIY Tahun 2019 sebanyak 116 akuntansi terdiri dari 33 Pengguna Anggaran dan 83 Kuasa Pengguna Anggaran. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda DIY dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang berfungsi sebagai entitas pelaporan. Adapun rincian entitas akuntansi Pemda DIY adalah sebagai berikut:



การ เกาะ การ การ เกาะ การ เกา

Tabel 0-1. Entitas Akuntansi di DIY

1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan 8 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
2.	Dinas Kesehatan dengan 5 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran
	sebagai entitas akuntansi.
4.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Dinas Sosial dengan 6 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
13.	Dinas Perhubungan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16.	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal
17.	Dinas Kebudayaan dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi.
18.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
19.	Dinas Kelautan dan Perikanan dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
20.	Dinas Pariwisata
21.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan 2 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
23.	Gubernur dan Wakil Gubernur
24.	Sekretariat Daerah dengan 8 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
25.	Badan Penghubung Daerah
26.	DPRD
27.	Sekretariat DPRD
28.	Inspektorat
29.	Paniradya Kaistimewan
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
31.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset dengan 5 Kuasa Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi
32.	PPKD
33.	Badan Kepegawaian Daerah
34.	Badan Pendidikan dan Pelatihan

Setiap entitas akuntansi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola dalam bentuk laporan keuangan. Entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk mengkonsolidasikan semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran di bawahnya. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset akan melakukan konsolitasi semua laporan keuangan entitas akuntansi pada Pengguna Anggaran dan PPKD.



การ พยาทหูงพ๛ทงพ๛ทงเพาหูกูลเกา

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Umum dan Strategi dan Prioritas APBD
- 2.3. Tema Pembangunan Daerah Tahun 2020

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
- 3.2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan kententuan yang ada dalam SAP pada SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan-LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Surplus Defisit
 - 5.1.5 Pembiayaan Netto
 - 5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- 5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan SAL
- 5.3. Rincian dan Penjelasan Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.4.1. Pendapatan-LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3 Surplus Defisit Kegiatan Operasional



กลา พยาหญาพ๛ทางพาผูกของทุพทางทางพา

- 5.4.4 Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional
- 5.4.5 Surplus Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
- 5.4.6 Surplus Defisit LO
- 5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.6. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas
 - 5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
 - 5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
- 5.7. Peristiwa Setelah Laporan Keuangan
- Bab 6. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
- Bab 7. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN EKONOMI/KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET EKONOMI APBD

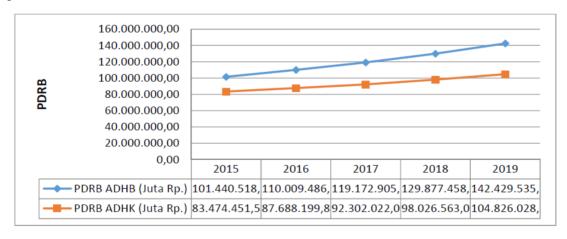
2.1 Informasi tentang Kebijakan Keuangan dan Ekonomi Makro

2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. World Health Organization (WHO) bahkan telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic pada tanggal 11 Maret 2020. Hal ini memberikan konsekuensi perlu dilakukannya langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis dalam upaya percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

A. PDRB dan Struktur Ekonomi

Kondisi perekonomian DIY selama periode 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 101,48 triliun rupiah meningkat menjadi 142,43 triliun rupiah pada tahun 2019. Sedangkan PDRB ADHK meningkat sebesar 21,35 triliun rupiah selama tahun 2015 – 2019.



Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan

Keterangan: Angka tahun 2019 adalah proyeksi

Gambar 2.1. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto

Empat lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB DIY adalah sektor industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum; konstruksi serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi masing-masing sektor tersebut adalah sektor industri pengolahan memiliki kontribusi tertinggi dimana pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar 12,83%. Sementara itu, sector penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi sebesar 10,46%, sector konstruksi 10,26% serta pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 9,57%. Kontribusi sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami tren penurunan.



(%) 121 10 8 6 4 4 2 2 2		*	*	-	*
0	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,64	10,41	10,01	9,78	9,57
Industri Pengolahan	13,11	13,22	13,12	12,99	12,83
— <u></u> Konstruksi	10,64	10,41	10,01	9,78	10,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,24	10,23	10,32	10,22	10,46

Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan Keterangan: Angka tahun 2019 adalah proyeksi

Gambar 2.2. Kontribusi Empat Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), 2015-2019

Tiga sektor yang memiliki kontribusi terendah dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor pengadaan air. Kontribusi ketiga sektor tersebut tercatat kurang dari 1%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian cenderung menurun sementara kedua sektor lainnya relatif stabil dari waktu ke waktu.



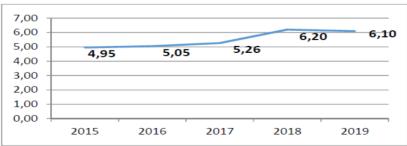
Sumber : BPS Provinsi DIY dan olahan

Keterangan: Angka tahun 2018 dan 2019 adalah proyeksi

Gambar 2.3. Kontribusi Tiga Sektor Terendah terhadap PDRB ADHK DIY menurut Sektor (%), 2015-2019

B. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) DIY selama periode 2015-2019 menunjukkan tren meningkat. Bahkan LPE setelah tahun 2015 selalu di atas 5% tiap tahunnya. Kenaikan LPE terbesar terjadi pada tahun 2018 yang meningkat sebesar 0,94 poin dari tahun 2017 sementara itu peningkatannya mengalami perlambatan sampai tahun 2019.



Sumber: BPS Provinsi DIY dan olahan

Keterangan: Angka tahun 2019 adalah proyeksi

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) DIY (%), 2015-2019



การและ การเกาะ การเกาะ

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan turun menjadi sekitar 5,99% seiring selesainya beberapa proyeksi infrastruktur besar dan pertumbuhan sektor-sektor lain yang tidak terlalu berubah dengan pola pertumbuhan di tahun 2019. Pertumbuhan 5,99% menyebabkan output daerah meningkat menjadi Rp110,234,865 juta.

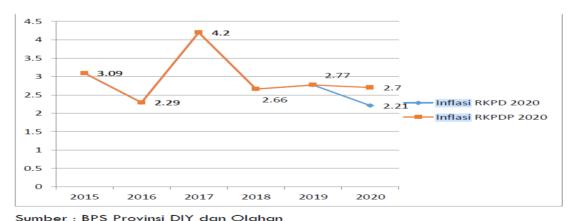
Kinerja pembangunan daerah pada semester 1, 2020 secara umum terdampak pandemi COVID-19 yang mulai ditemukan kasusnya pada awal Maret 2020. Hal tersebut secara makro dapat digambarkan dengan capaian Pertumbuhan ekonomi DIY mengalami kontraksi 6,74 (minus 6,74, TW II) lebih rendah dari rerata Pulau Jawa atau mengalami kontraksi sebesar 6,69 (BPS DIY, 2020). Indeks Gini DIY tertinggi se Indonesia sebesar 0,434 (naik sebesar 0,006 dibanding September 2019, TW I), Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,38 (meningkat 0,52 dibanding TPT Februari 2019; BPS DIY Februari 2020) dan Angka Kemiskinan meningkat sebesar 12,28 (naik 0,84 dibanding September 2019; TW I).

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada Triwulan III 2020 ekonomi DIY menunjukkan pemulihan. Realisasi pertumbuhan PDRB DIY naik 9,24% (qtq), setelah dua triwulan berturut turut mengalami kontraksi. Namun demikian bila dilihat secara tahunan, ekonomi DIY triwulan III masih mencatatkan kontraksi 2,84% (yoy). Kinerja perekonomian DIY ini, lebih baik jika dibandingkan Nasional dan Jawa, masing-masing kontraksi 3,49 (yoy) dan 4,00% (yoy).

C. Inflasi

Laju inflasi DIY selama kurun waktu lima tahun, 2012-2016, cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2.29%. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,2% kemudian menurun hingga tahun 2019 mencapai 2,57% dan diproyeksikan turun menjadi 2,21% di tahun 2020. Penurunan tersebut didukung oleh efektifnya pelaksanaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) dalam melakukan monitoring dan pengendalian harga barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Kinerja tersebut diperkirakan akan tetap dilaksanakan sejalan dengan masa pandemi dan pasca atau mitigasi pandemi Covid-19.

Khusus tahun 2020, pengaruh pandemi berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat maupun menurunnya kemampuan fiskal pemerintah yang akan berakibat pada melemahnya permintaan barang dan jasa. Di sisi lain, penawaran pada beberapa komoditas berpotensi menurun terutama disebabkan oleh berkurangnya bahan baku dan melemahnya kinerja sektor transportasi. Akumulasi dampak sisi permintaan dan penawaran mendorong tingkat inflasi DIY masih berkisar antara 2 sampai 3,2%.



omber : Dr 3 i Tovinsi Dr i dan Oldridii

Gambar 2.5. Laju Inflasi DIY (%), 2015-2019

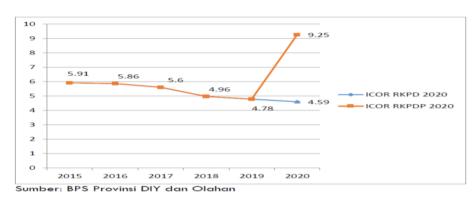


การและ การเกาะ การเกาะ

D. ICOR

Pada periode 2015-2019, nilai ICOR DIY relatif tinggi namun menunjukan perkembangan dengan trend yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan meningkat efisiensinya. Nilai ICOR turun dari 5.92 di tahun 2015 menjadi 4,78 di akhir periode. Pada awal tahun 2020, ICOR diproyeksikan menurun menjadi 4,59 yang didorong oleh kelancaran transportasi karena pengembangan infrastruktur jalan.

Peningkatan inefisiensi proses produksi di DIY terdampak COVID-19 dipengaruhi antara lain oleh menurunnya kinerja sektor transportasi dengan masalah suplai bahan baku. Proyeksi ICOR tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 menjadi sekitar 9,25.



Gambar 2.6. Perkembangan ICOR 2015-2019 dan Proyeksi ICOR Tahun 2020 dalam Persen

E. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan DIY tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja sedangkan jumlah pengangguran terbuka menurun. Indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Indikator Ketenagakerjaan DIY

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan Kerja	1.995.949	2.099.440	2.117.190	2.191.740	2.252.361
Pengangguran Terbuka	48.664	57.036	64.020	73.350	75.229
Tingkat Pengangguran Terbuka					
(TPT)	2,43	2,71	3,02	3,35	3,34

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

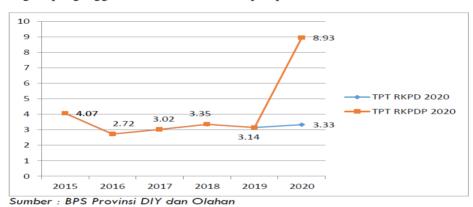
Keterangan : Angka Tahun 2019 adalah Proyeksi

Angkatan kerja di tahun 2019 berjumlah 2.252.361 orang dan meningkat sebanyak 60.620 orang dari 2.191.740 orang dari tahu sebelumya. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini diikuti dengan peningkatan perkiraan jumlah yang menganggur yaitu menjadi 75.229 pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 2,56% dari tahun 2018. Perkembangan pertumbuhan ekonomi DIY kurang berpengaruh pada tingkat pengangguran di DIY. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi DIY cenderung meningkat namun pengangguran terbuka juga mengalami peningkatan.



กกา พยาทหางพรางพรางพัฒฑยพางพางพางพา

Pada awal Tahun 2020 tingkat Pengangguran terbuka diperkirakan meningkat menjadi 3,33% mengingat pertumbuhan ekonomi DIY menurun dibandingkan tahun 2019 antara lain didorong oleh menurunnya pertumbuhan sektor konstruksi. Setelah terjadinya Pandemi COVID-19 maka diperkirakan tingkat pengangguran terbuka mulai tahun 2020 diperkirakan mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh melemahnya kinerja sektor yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja akibat dampak pandemi COVID-19. Sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor selama ini menyerap sekitar 19% dari total angkatan kerja, industri pengolahan 17,05% serta penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 9,53%. Penurunan kinerja unit-unit usaha tersebut berdampak pada potensi pengangguran yang meningkat mengingat sekitar separuh dari angkatan kerja bekerja sebagai karyawan atau buruh dan sekitar 933.833 orang bekerja di kelompok usaha manufaktur dan jasa. Tingkat pengangguran terbuka akibat dampak pandemi COVID-19 adalah 8,93%.



Gambar 2.7. Perkembangan TPT 2015-2019 dan Proyeksi TPT Tahun 2020 dalam Persen

F. Kemiskinan

Dalam periode lima tahun terakhir (2015 – 2019) jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta telah berkurang sebanyak 120,98 ribu penduduk. Penurunan jumlah kemiskinan yang cukup signifikan terjadi pada yahun 2016 dengan penurunan sebanyak 55 ribu orang.

Tabel 2.2. Indikator Ketenagakerjaan DIY

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	550.23	494.94	488.53	460.1	429.25
Tingkat Kemiskinan (%)	14.91	13.34	13.02	12.13	11.26

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2018

Keterangan : Angka Tahun 2019 adalah Proyeksi

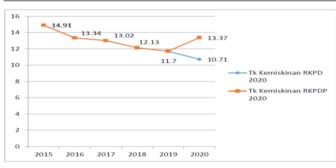
Persentase penduduk miskin mengalami tren menurun sampai dengan 2019. Pada 2019, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di D.I. Yogyakarta sebanyak 11,26% yang menurun terus dari 14,91% di tahun 2015.

Pada awal tahun 2020, proyeksi tingkat kemiskinan akan menurun sekitar 0,45 poin. Penurunan tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mencapai lebih dari 6% selama dua tahun sebelumnya. Penurunan tingkat kemiskinan juga didukung oleh konsistennya intervensi pemerintah baik dari pemerintah pusat, Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan program dan kegiatan yang mensasar kelompok warga miskin. Keefektifan intervensi tersebut juga didukung oleh semangat untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam penentuan kelompok sasaran baik dalam bentuk inclusion maupun exclusion error. Kondisi-kondisi tersebut mendorong penurunan kemiskinan menjadi sekitar 10,71% di tahun 2020.



กกา พยากษางพรางพรางพัฒฑยพากพาการ

Setelah terjadinya Pandemi Covid-19 maka proyeksi tingkat kemiskinan tahun 2020 diperkirakan meningkat dibandingkan capaian tahun 2019. Peningkatan tersebut didorong oleh potensi penurunan pendapatan per kapita masyarakat akibat pertumbuhan ekonomi yang menurun terutama di tahun 2020 serta meningkatnya angka pengangguran. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan tingkat kemiskinan menjadi 13,37%.



Sumber : BPS Provinsi DIY dan Olahan

Gambar 2.8. Perkembangan Tingkat Kemiskinan 2015-2019 dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Tahun 2020 dalam Persen

G. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah diukur menggunakan Indeks Williamson (IW). Nilai IW berkisar antara 0 sampai dengan 1 dan semakin tinggi nilai IW menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Dari nilai IW DIY untuk tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dan angka IW-nya masih di bawah 0,6. Pada tahun 2015, nilai IW adalah 0,4693 yang menurun sampai tahun 2018 menjadi 0,4595. Angka IW selanjutnya meningkat di tahun 2019.



Sumber: Bappeda DIY, 2018

Keterangan: Angka 2019 adalah proyeksi

Gambar 2.9. Indeks Williamson DIY, Tahun 2015-2019

Kenaikan proyeksi Indeks Williamson ini salah satunya diindikasikan dengan pertumbuhan di sektor dan sub-sektor perekonomian yang berkembang tidak dalam tingkatan yang setara. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya ketimpangan antar wilayah. Faktor lainnya yang dapat menyebabkan naiknya Indeks Williamson diantaranya adalah pertumbuhan penduduk kabupaten/kota yang tidak sama sehingga PDRB perkapita di kabupaten/kota relatif belum setara. Faktor lain yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah ini juga terkait dengan kapasitas ekonomi atau PDRB yang cukup berbeda karena perbedaan topografi dan lahan produktif. Angka Partisipasi Kerja (APK) dimasing-masing wilayah juga turut mempengaruhi angka ketimpangan antar wilayah tersebut.

Ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan indeks sebesar 0,4671, meningkat dari 0,4469 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ketimpangan wilayah didorong oleh masih dominannya dinamika perekonomian di daerah yang relatif lebih maju meskipun juga terdapat peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang relatif belum maju.



Sebagai contoh adalah Kabupaten Kulon Progo yang mengalami pertumbuhan tinggi akibat pembangunan fisik terutama Bandara YIA.

Secara tren, Indeks Williamson akan cenderung menurun berkaitan dengan PDRB kabupaten/kota. Dalam masa pandemi COVID-19, Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang paling terdampak karena basis sektornya adalah jasa pariwisata, sedangkan yang paling kuat adalah Kabupaten Sleman karena memiliki perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa banyak dan dapat mengungkit sektor-sektor lain ketika kegiatan perkuliahan dimulai. Daerah yang maju tersebut akan mengalami perlambatan aktivitas ekonomi sehingga dapat menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah se-DIY dan diperkirakan Indeks Williamson turun menjadi 0,4524.

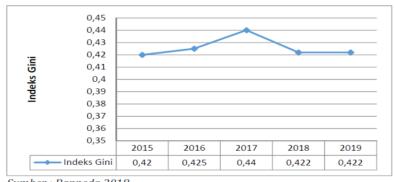


Sumber: BPS Provinsi DIY dan Olahan

Gambar 2.10. Perkembangan Indeks Williamson 2015-2019 dan Proyeksi Indeks Wiliamson Tahun 2020

H. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2017. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yang meningkat sebesar 0,015 poin dari 0,425 di tahun 2016. Pada tahun 2019, Rasio Gini relatif sama dengan tahun sebelumnya.



Sumber : Bappeda 2018

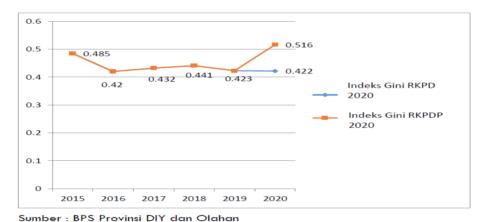
Keterangan: Angka 2019 adalah proyeksi

Gambar 2.11. Perkembangan Rasio Gini Tahun 2015-2019

Awal Tahun 2020 diproyeksikan ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY belum berubah signifikan selama dua tahun terakhir yaitu berkisar 0,422 yang turun sebesar 0,001 poin dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh tetap lebih cepatnya peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas dibandingkan dengan kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.



Selanjutnya dengan kondisi perekonomian terdampak pandemi COVID-19 maka ketimpangan pendapatan diperkirakan meningkat. Proyeksi Indeks Gini pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19 adalah 0,516. Hal ini disebabkan oleh terdampaknya kelompok masyarakat berpendapatan rendah terutama yang selama ini bekerja sebagai buruh, karyawan ataupun menjalankan usaha mikro dan kecil. Kelompok ini merupakan bagian dari separuh tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh atau karyawan dan bagian dari sekitar 41,86% kelompok angkatan kerja yang mempunyai usaha sendiri. Melemahnya kinerja sektor yang secara signifikan terdampak pandemi COVID-19 seperti industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum maupun perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor akan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan pengangguran. Dampak lainnya adalah adanya banyak usaha mikro dan kecil akibat menurunnya permintaan dan kesulitan bahan baku. Akhirnya tingkat pengangguran yang meningkat ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan.



Gambar 2.12. Perkembangan Indeks Gini Tahun 2015-2019 dan Proyeksi Indeks Gini Tahun 2020

I. Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian DIY sebagaimana kondisi Indonesia maupun dunia, diperkirakan mengalami kontraksi dan beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan pandemi global Covid-19. Kondisi ini berpengaruh pada proyeksi beberapa indikator makroekonomi DIY yang digunakan sebagai dasar kerangka ekonomi daerah dalam RKPDP DIY Tahun 2020 dengan memperhatikan beberapa asumsi akibat dampak pandemi. Proyeksi kinerja perekonomian DIY tahun 2020 menggunakan asumsi:

Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2020 didasarkan pada berlangsungnya masa pandemi menggunakan skenario pesimis dengan mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan diperkirakan tetap akan terjadi sampai akhir tahun 2020;

Dari sisi penawaran, sektor yang selama ini memiliki kontribusi signifikan dalam output daerah dan terdampak paling besar adalah konstruksi; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta transportasi dan pergudangan. Khusus sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan motor, diperkirakan relatif tidak terganggu karena ada potensi perpindahan pola pembelian dan transaksi dari fisik ke daring;

Dari sisi permintaan, penurunan konsumsi rumah tangga terjadi karena melemahnya daya beli dan praktek social/physical distancing, sedangkan penurunan ekspor terjadi karena melemahnya daya beli internasional. Di samping itu, pengeluaran konsumsi juga menurun disebabkan oleh masih belum meningkatnya aktifitas sektor pendidikan dan pariwisata.



กา

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, proyeksi beberapa indikator ekonomi tahun 2020 pasca pandemi Covid-19 yang dibandingkan dengan proyeksi sebelum pandemi yang tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3. Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2020 dan RKPDP 2020

Indikator	Proyeksi			
indikator	RKPD 2020	RKPD-P 2020		
LPE	5,99 %	0,50 %		
PDRB ADHK	Rp110.234.865 juta	Rp104.524.992 juta		
Inflasi	2,21 %	2,70 %		
ICOR	4,59	9,25		
TPT	3,33 %	8,93 %		
Tk. Kemiskinan	10,71 %	13,37 %		
Indeks Gini	0,422	0,516		
Indeks Williamson	0,4671	0,4524		

Sumber: Bappeda DIY 2019 dan 2020

2.2 Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD

2.2.1 Visi dan Misi Jangka Panjang

Visi Jangka Panjang

Cita-cita pembangunan DIY yang akan dicapai dalam dua puluh tahun mendatang tertuang dalam Rencana Pembangunan Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJPD DIY) 2005-2025 yang memiliki visi "Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".

DIY sebagai **pusat pendidikan terkemuka**, pada tahun 2025 diharapkan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama dan didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. Di samping itu, sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya merupakan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu. DIY sebagai pusat budaya terkemuka, dirancang menjadi tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya. Hal tersebut mendapat penguatan dengan implementasi kewenangan Urusan Kebudayaan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Cita-cita menjadi daerah tujuan wisata terkemuka dapat dimaknai sebagai daerah tujuan wisata yang diminati dari berbagai penjuru baik nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap menjunjung tinggi nilai moralitas.

Upaya mewujudkan visi dengan mengarusutamakan pendekatan pembangunan yang memiliki fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup warga DIY (people-centered development) melalui pembangunan di semua sektor dilaksanakan secara sinergis dan bertahap hingga terwujud masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Masyarakat yang maju dan mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan.



Misi Jangka Panjang

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, DIY menempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
- 2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
- 3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- 4. Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

2.2.2 Filosofi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dasar Filosofi

"Renaisans Yogyakarta" sebagai paradigma pembangunan DIY mengandung maksud sebagai pangkal berpikir perubahan ke depan berlandaskan pada nilai-nilai lama yang unggul atau nilai-nilai yang pernah menjadi rujukan bagi praktek kehidupan Yogyakarta dan telah membawa Yogyakarta pada posisi keistimewaannya dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia. Dibawah payung paradigma "Renaisans Yogyakarta", Yogyakarta akan bergerak maju ke depan menjadi Yogyakarta yang maju, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai keutamaan, dan nilai-nilai yang mencerminkan ke-Yogyakarta-an yang pernah menjadi penuntun gerak kehidupan Yogyakarta, sehingga Yogyakarta memiliki martabat yang istimewa dalam peta sejarah Indonesia.

Konsep "Renaisans Yogyakarta" atau "Jogja Renaisans" merupakan sintesa dari trilogi filosofi Keistimewaan Yogyakarta (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti), ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia: Pancasila, dan etos asli (Golong-Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh) dalam melahirkan kembali masa keemasan budaya klasik Yogyakarta. "Renaisans Yogyakarta" diwujudkan dengan semangat kolektif Jogja Gumregah untuk bergerak bersama membawa kebudayaan Yogyakarta ke tingkat yang lebih unggul. Semangat Jogja Gumregah tersebut dapat menjadi wahana penggerak masyarakat menuju pada peningkatan dimensi nilai, pencarian nilai-nilai kebenaran, dimensi ekonomi terkait nilai kegunaan, dimensi estetis pada keindahan, dimensi sosial pada nilai "trust", dimensi politik pada nilai kuasa, dimensi keagamaan, dan nilai ketuhanan yang berkebudayaan.

Dalam konteks "Renaisans Yogyakarta" sebagai "sintesa", ketika nilai-nilai Trilogi Filosofi Keistimewaan (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti) diletakkan sebagai "tesa" bagi pembangunan DIY, maka "anti-tesa" yang dihadapi dalam implementasinya adalah nilai-nilai pragmatis yang melahirkan gejala-gejala yaitu: (1) Bawana Yogyakarta tidak Hayu lagi baik dalam dimensi Bawana Alit-Bawana Ageng maupun Bawana Lahir-Bawana Batin; (2) pembangunan dan perubahan-perubahan yang terjadi di Yogyakarta telah menunjukkan gejala meninggalkan jati diri dan nilai-nilai kawitan atau nilai-nilai sangkan paraning dumadi-nya Yogyakarta; dan (3) gejala dikotomi yang semakin nyata dalam konteks hubungan antara pamong penyelenggara birokrasi dengan masyarakat atas nama nilai-nilai kebebasan, sehingga kepentingan-kepentingan bersama serta nilai-nilai kebersamaaan yang lebih luas menjadi terabaikan bahkan terkorbankan.

Konsep tersebut diatas mendasari tema visi pembangunan DIY tahun 2017-2022 yaitu "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja". Abad Samudera Hindia ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di kawasan selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta



กกา พยากหูรุพ๛ารุพ๛ารุตุผู้ๆผบางพาฦหาเก

mengurangi angka kemiskinan. Menyongsong Abad Samudera Hindia yang dimaksud dalam tema visi dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena Indian Ocean Rim Association (IORA), Kra-Canal/Thai Canal Project serta kemiskinan di kawasan selatan.

Harapan akan potensi dan tantangan masa depan dari Abad Samudera Hindia tentunya berada di wilayah selatan DIY. Kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah selatan DIY memiliki kesenjangan relatif tinggi dibanding wilayah utara dilihat dari angka kemiskinan. Fenomena kemiskinan dan kesenjangan di wilayah selatan DIY ini melatarbelakangi pentingnya memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan wilayah tersebut. Hal ini selaras dengan tema visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" juga untuk meningkatkan "Harkat dan martabat warga miskin di wilayah bagian selatan khususnya, dan di seluruh wilayah DIY pada umumnya". Dengan demikian, potensi wilayah selatan DIY perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar lebih memiliki harkat dan martabat mulia.

Kemuliaan martabat manusia Jogja dapat digambarkan dalam "Lima Kemuliaan" atau "Panca Mulia" yakni:

- 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing;
- 2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
- 3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;
- 4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
- 5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan substansi penting yang menggambarkan adanya tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab. Untuk itu strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat DIY, serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di DIY yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

Visi

Pada setiap tahapan RPJPD DIY 2005-2025 terdapat Penekanan 5 tahunan sebagai pedoman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Tabel 2.4. Penekanan 5 Tahun RPJPD DIY dan RPJMD DIY

Penekanan 5 Tahun Pertama 2005-2009	Penekanan 5 Tahun Kedua 2010-2014	Penekanan 5 Tahun Ketiga 2015-2019	Penekanan 5 Tahun Keempat 2020-2025
Pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensipotensi unggulan. Keyword: Menyiapkan fondasi/meletakkan dasar	Pembangunan fasilitas- Fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (backward effect and forward effect) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan ompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan.	Pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.	Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung oleh ketersediaan energi.
Toridad#moretatical*	Keyword: Membangun/melanjutkan pembangunan di atas fondasi/dasar yang telah diletakkan.	Keyword: Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun.	Keyword: Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah di dayagunakan untuk mewujudkan cita-cita.
Implementasi dalam RPJMD	DIY		
	RPJMD DIY 2009 -2013	RPJMD DIY 2012 -2017 "Jogja Renaisans"	RPJMD DIY 2017 -2022 "Abad Samudera Hindia" (Rancangan Awal)
Visi	"Pemerintah daerah yang katalistik dan masyarakat mandiri yang berbasis keunggulan daerah serta sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan beretika".	"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"	"Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk kemuliaan martabat manusia Jogja"

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022, diolah

Berangkat dari tinjauan filosofis, berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY, memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini masyarakat, serta selaras dengan uraian diatas tema visi "Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan DIY untuk mengangkat potensi selatan dalam kurun waktu 2017-2022 dengan visi:

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

Terwujudnya dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan untuk terlaksana atau terbukti melalui peningkatan, yaitu proses, cara, perbuatan meningkatkan suatu kondisi yang telah ada menuju kondisi yang lebih baik.

Kemuliaan dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia yakni dengan terpenuhinya:

- 1. Peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban;
- 2. Peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan berkeadilan;
- 3. Terwujudnya kondisi hidup dalam harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi;
- 4. Pelayanan publik dengan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
- 5. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas.



การ การเกาะ

Martabat adalah tingkat harkat kemanusiaan, atau harga diri. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang berumur panjang dan hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan, dan dapat hidup layak.

Manusia Jogja adalah insan di DIY yang menjadi subyek pembangunan. "Manusia Jogja" adalah semua individu yang hidup, berkehidupan dan berpenghidupan di wilayah DIY. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan manusia Jogja adalah:

- 1. Semua individu yang telah menggantungkan hidupnya pada sumberdaya yang berada di wilayah DIY.
- 2. Semua individu yang telah membangun jaringan dan juga telah dikuatkan serta dimuliakan oleh jaringan kehidupan sosial budaya masyarakat di wilayah DIY.
- 3. Semua individu yang telah membangun serta menggantungkan penghidupannya pada sumberdaya dan jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di wilayah DIY.

Sedangkan ciri khas manusia Jogja dalam perumusan visi "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja" adalah mencakup pengertian mulia martabat hidupnya, mulia martabat kehidupannya, dan mulia martabat penghidupannya. Secara lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1. Manusia Jogja yang memiliki hidup biologis yang mulia karena didukung oleh kualitas dan kuantitas asupan makanan yang baik, memiliki tingkat kesehatan yang baik, dan hidup dalam kualitas lingkungan fisik yang baik. Sebaliknya, manusia Jogja akan memiliki martabat yang buruk apabila kondisi fisik biologisnya buruk karena asupan makanan yang buruk serta memiliki tingkat kesehatan yang buruk, serta hidup dalam lingkungan fisik infrastruktur yang buruk. Sebagai catatan, bahwa di wilayah DIY masih terdapat kasus-kasus keluarga dan anak-anak yang memiliki tingkat kesehatan buruk akibat bergizi buruk.
- 2. Manusia Jogja yang memiliki kehidupan bermasyarakat yang mulia, termasuk: (i) mulia dalam berlalulintas (sopan santun, tenggang rasa serta taat disiplin pada peraturan lalulintas), (ii) mulia dalam perilaku berkehidupan bersama di ruang publik (perilaku memarkir kendaraan yang tidakmenzolimi orang lain sehubungan ukuran lebar jalan-jalan di Jogja relatif kecil, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau jalan atau ruang publik, tidak membuat atau memancing rasa permusuhan terhadap kelompok masyarakat lain), (iii) mulia dalam berkehidupan menjalankan agama (saling menghormati kehidupan beragama kelompok agama lain).
- 3. Manusia Jogja yang memiliki penghidupan yang mulia, mecakup: (i) cara-cara menjalankan kegiatan penghidupan yang mulia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (tidak merendahkan martabat dirinya, tidak melanggar hukum atau melakukan tindak pidana kriminal, tidak mengganggu kesehatan dirinya maupun orang lain), (ii) tempat menjalankan penghidupan yang mulia (tidak menjalankan usahanya pada tempat-tempat yang mengganggu atau menzolimi atau merugikan hak orang lain, (iii) sistem kerja yang mulia (tidak mengeksploitasi anak-anak dan perempuan, memberi atau mendapat imbalan sesuai ketentuan yang berlaku, tidak merusak dan mencemari alam serta warisan budaya).

Misi

Kemuliaan martabat manusia Jogja yang meningkat sebagai tujuan dari Visi digambarkan dalam rumusan Panca Mulia. Visi tersebut kemudian diselaraskan dengan data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya-upaya yang diterjemahkan dalam misi. Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat merepresentasikan penggambaran visi yang ingin dicapai.

Rumusan misi dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Rumusan misi tersebut diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:



- 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2. Memajukan daerah;
- 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 4. Menyelesaikan persoalan daerah;
- 5. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
- 6. Provinsi dengan nasional; dan
- 7. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Oleh karena itu perwujudan Panca Mulia dapat dirumuskan dalam dua misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1, 2 dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemda DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan dan akses infrastruktur dasar;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan;
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk didalamnya upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Indeks Gini), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (Index Williamson).
- d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga.

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;

Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya mewujudkan misi kedua ini sekurangnya melalui:

- a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
- b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembagalembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan perubahan persepsi (mind set) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang mengandung arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila



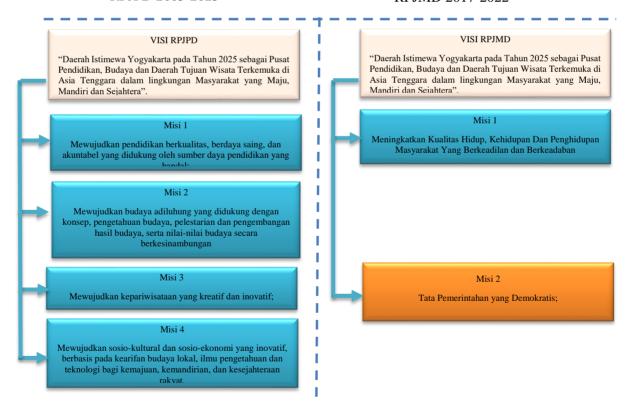
การ การกรุงพ๛ทางพ๛ทางตามีพลเกษาทางหา

melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran mind set, bahwa karya birokrasi tidak hanya dilihat sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lainnya (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Skandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memilki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi.

Misi kedua pada hakikatnya adalah penguatan secara menyeluruh kelembagaan Pemda DIY mulai dari kualitas individu, institusi hingga perbaikan pola kerja menjadi sebuah karya yang berkualitas tinggi yang untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Dalam pelaksanaanya misi kedua menjadi sebuah "initial condition" untuk terwujudnya Misi pertama yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban".

RPJPD 2005-2025

RPJMD 2017-2022



Gambar 2.13. Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD

Sumber: RPJMD DIY 2017-2022, diolah



การ เกาะ การ การ เกาะ การ เกา

Tujuan

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan misi selama kurun waktu lima tahun dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan DIY tahun 2017-2022 adalah:

Tabel: Tujuan yang hendak dicapai

Misi	Tujuan
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat
Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan	dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an
Berkeadaban	dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu
	menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta
Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good
	Governance)

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dalam rangka mengarahkan tujuan pembangunan agar lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran pembangunan DIY selama kurun waktu 2017-2022 adalah:

Tabel 2.5. Sasaran Pembangunan DIY

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	tatanan sosial yang menjamin menjamin ke- bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara	Meningkatnya Derajat ekonomi masyarakat.	Indeks Gini Persentase Angka Kemiskinan
	Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi
	mengembangkan budaya Yogyakarta	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
		Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson
Mewujudkan Tata Pemerintahan	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)
yang Demokratis	(Good Governance)	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.
		Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan



กกา พยากหูงพลางพลางตุญทุยเบทเพาฦมาเกเ

2.2.3 Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2018-2022

Pencapaian visi dan misi yang dioperasionalkan dengan tujuan serta sasaran pembangunan membutuhkan strategi dan arah kebijakan yang harus dilakukan. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Arah kebijakan sendiri merupakan kondisi yang dibutuhkan agar srategi yang telah ditentukan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam kontek pembangunan maka penting untuk memahami strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai pencapaian sasaran dan tujuan yang merupakan implementasi atas Visi Misi Pembangunan Daerah. Adapun strategi, arah kebijakan dan perwujudan atas program pada RPJMD DIY 2017-2022 dalam rangka implementasi dari strategi untuk mencapai sasaran yang ada adalah sebagai berikut:

A. Strategi

Strategi yang dijalankan dalam mendukung pencapaian misi, adalah sebagaimana di bawah ini:

MISI 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban				
Tujuan	Sasaran :	Strategi:		
Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke- bhineka-tunggal-ika-an	Meningkatnya derajat kualitas SDM	Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan		
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan engembangkan budaya Yogyakarta	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokalyang inklusif dan berkelanjutan Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi.		
	Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender Mengendalikan pertumbuhan penduduk Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum		
	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik)dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan)kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan		
	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan Pengurangan resiko bencana Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta		



กลานางพะกางเมื่อแลกแบบแบบแบบ

	Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
MISI 2 Mewujudkan Tata Pemerinta	han yang Demokratis	
Tujuan	Sasaran :	Strategi :
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan	Mewujudkan sinergitas kelembagaan pemerintah provinsi kabupaten kota sampai dengan desa Penguatan keistimewaan dalam perangkat daerah, kabupaten/kota, kecamatan, desa
	Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	Peningkatan kapasitas badan hukum (kasultanan dan kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, desa Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten

Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019, maka perlu diperhatikan fokus pembangunan yang mengarah pada aspek infrastruktur sebagai bagian fokus pembangunan yang membutuhkan pendanaan cukup besar. Hal tersebut menjadi penting mengingat terdapat beberapa mega proyek infrastruktur yang akan dibangun dan dikembangkan pada Tahun 2017-2022 sebagai keberlanjutan implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah pada Tahun 2012-2017 terkait 9 kawasan prioritas antara lain:

- 1. Penataan Kawasan Kraton,
- 2. Penataan Kawasan Sumbu Filosofi,
- 3. Pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh
- 4. Pengembangan Kawasan Pantai Samas Parangtritis,
- 5. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY,
- 6. Penataan Kawasan Puro Pakualaman
- 7. Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta
- 8. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Kulonprogo
- 9. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Bandara Baru Kulonprogo.

Serta 6 Infrastruktur prioritas antara lain:

- 1. Pembangunan Jalan Akses Temon-Borobudur
- 2. Pembangunan Underpass Kentungan,
- 3. Pembangunan Underpass Gejayan
- 4. Pembangunan SPAM Regional Sistim Bener, Sistim Kapet Kulonprogo,
- 5. Sistim Kartamantul
- 6. Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.

B. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah ditetapkan untuk memperjelas strategi yang harus dioperasionalkan sebagai penjabaran dari misi, melalui serangkaian kebijakan dibawah ini:



กลา ผลาหูเพลางผลางผมผู้ๆผบทุพทา

Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
Meningkatnya derajat kualitas SDM	Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY yang inklusif dan berkeadilan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan	Peningkatan aksesibilitas dan kulitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan. Peningkatan layanan pendidikan di DIY. Memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan). Peningkatan pelayanan medis, rehab medis, rehab sosial dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa. Peningkatan aksesibiltias dan pelayanan kesehatar yang berkualitas.
Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokalyang inklusif dan berkelanjutan Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proporsi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi.	Penumbuhan wirausaha baru yang mandiri Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosia masyarakat miskin Peningkatan penduduk berakses air bersih layak Peningkatan penduduk berakses energi Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi ruma tangga miskin Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial.
Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender Mengendalikan pertumbuhan penduduk Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Pengembangan keterlindungan warga, keamanan dan ketertiban umum	Perencanaan dan penganggaran responsif gender Pengendalian usia perkawinan pertama penduduk Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Peningkatan ketertiban masyarakat dan ketaatan pada hukum Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana
Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Meningkatkan pemeliharaan (pelindungan secara hukum dan fisik)dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan)kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan	Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder pembangunan budaya benda dan tak benda. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan pengelolaanfasilitas kebudayaan Memperkuat lembaga pelestari budaya dan mengembangkan budaya di kawasan cagar budaya saujana budaya, desa dan kelurahan budaya



5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Mengoptimalkan kinerja sektor Dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan dan ekonomi kreatif Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang berketahanan dan berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi cepat tumbuh Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan Pengurangan resiko bencana Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta	Peningkatan produksi, kualitas, inovasi dan nilai tambah produk-produk unggulan terutama pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian (PLP2B) Penyediaan ruang dan infrastuktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Memperkuat daya saing dan perlindungan tenaga kerja Penyiapan regulasi yang kondusif untuk perekonomian Mengembangkan sosial-ekonomi masyarakat dengan memberdayakan lembaga-lembaga organik lokal, mendayagunakan potensi wisata, budaya dan kearifan lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Memperkuat partisipasi warga dan kelembagaan lokal dalam industri wisata Memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam kegiatan perekonomian daerah Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan Pengurangan resiko bencana secara komprehensif. Menyediakan regulasi yang memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha/swasta Pembentukan lembaga yang khusus menangani
		usaha/swasta
6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Pengembangan kawasan selatan sebagai pusat pertumbuhan Pengembangan sektor pariwisata di kawasan prioritas yang terintegrasi dengan sektor lainnya. Penyiapan potensi dan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong realisasi dan pemerataan investasi

Adapun arah kebijakan terkait dengan Misi ke dua yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis yang telah disesuaikan dengan sasaran dan strategi sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

MISI 2 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis			
Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik	Optimalisasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah Menyusun regulasi pengelolan keuangan Membuat/mengembangkan sistem keuangan daerah yang terintegrasi Peningkatan efektivitas pengelolaan aset deaerah melalui pemanfaatan dan kerjasama pihak ketiga.	
Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan	Mewujudkan sinergitas kelembagaan pemerintah provinsi kabupaten kota sampai dengan desa Penguatan keistimewaan dalam perangkat daerah, kabupaten/kota, kecamatan, desa	Perumusan regulasi sebagai acuan pelaksanaan urusan keistimewaan di tingkat kabupaten/kota sampai dengan desa Internalisasi budaya pemerintahan pada pemda dan kabupaten/kota	



การและ การเกาะ การและ การและ

Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	Peningkatan kapasitas badan hukum (kasultanan dan kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, desa	Melakukan fasilitasi penata usahaan, pemeliharaan dokumen dan pengawasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa. Melakukan fasilitasi pelindungan, pemanfaatan dan pelepasan tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa
	Pengembangan struktur dan pola ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	

C. Program

Berikut kami sampaikan Program Pemerintah Daerah (Program Pemda) yang merupakan program yang menaungi program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan.

Adapun program Pemda yang terdapat dalam misi pertama yakni meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban dengan 5 sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	
MISI Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan	dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan da	ın Berkeadaban	
SASARAN Meningkatnya Derajat Kualitas SDM			
PROGRAM Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); Harapan Lama Sekolah	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat	
	Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif		
	Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju		
PROGRAM Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat	
PROGRAM Program Pembangunan Sosial	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat	
Masyarakat	Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif		
	Total Fertility Rate		
	Perkembangan desa/kelurahan kategori cepat berkembang		
	Angka kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate)		
SASARAN Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarak	at.		
PROGRAM Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan	
	Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)	Sumber Daya Masyarakat	
	Pengeluaran per kapita masyarakat		



กกา พยาหูเพลาเพลาเพนูกุยเบทพเพาหาเก

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	
SASARAN Terpelihara dan Berkembangnya Kebudaya	aan		
PROGRAM Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan	
rak Benda	Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan		
SASARAN Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang	g Berkelanjutan		
PROGRAM Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
	Jumlah desa mandiri budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima): Target 2022 : 1 Desa mandiri budaya		
PROGRAM	Indeks Kualitas Air	Sekretaris Daerah	
Program Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Asisten Bidang Perekonomian dan	
dan Penanggulangan Bencana	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Resiko Bencana	Pembangunan	
PROGRAM Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan	
SASARAN Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar	Vilayah		
PROGRAM Program Pengembangan Pusat	Persentase peningkatan PDRB pada Kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan	
Pertumbuhan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	Pembangunan	

Adapun program Pemda yang terdapat dalam misi kedua yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis, dimana terdapat 3 sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Misi/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	IndikatorKinerja (tujuan/impact/outcome)	Perangkat Daerah PenanggungJawab
1	2	3
MISI Mewujudkan Tata Pemerintahan yang De	mokratis	
SASARAN Meningkatnya kapasitas tata kelola pemer	rintahan	
PROGRAM	Kemampuan keuangan daerah	Sekretaris Daerah
Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuanRp)	Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
	Nilai eksternal pelayanan publik	Administrasi omani
	Nilai internal integritas organisasi	
	Nilai eksternal persepsi korupsi	



SASARAN Meningkatnya kapasitas pengelolaan keisi	timewaan			
PROGRAM	Terwujudnya penetapan kepala daerah sesuai	Sekretaris Daerah		
Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	UU Keistimewaan.	Paniradya Keistimewaan		
Tata Cara Pengisian Repaia Daeran	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan			
SASARAN Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa				
PROGRAM	Persentase tertib administrasi tanah	Sekretaris Daerah		
Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan,	kasultanan,kadipaten, dan tanah desa	Paniradya Keistimewaan		
Kadipaten dan tanah desa	Capaian pengelolaan (persen) ditambah			
	capaian pemanfaatan (persen)			

D. Indikator

Indikator sasaran dan Indikator Kinerja Program Pemerintah Daerah (Pemda) tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022. Indikator capaian tersebut merupakan target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2018)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MISI				
Meningkatkan Kualitas Hidup, Ke	hidupan dan Penghidupan Masyara	kat yang Berkeadila	an dan Berkeadabar	า
SASARAN Meningkatnya Derajat Kualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,38	80,29	Gubernur dan
SDM	,			Wakil Gubernur
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,80	69,91	
PROGRAM Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);	N/A	11,00	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya
	Harapan Lama Sekolah	15,23	15,51	Masyarakat
	Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	N/A	200	
	Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju	N/A	5,96	
PROGRAM Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	74,71	75,06	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
PROGRAM	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	N/A	2	Sekretaris Daerah



กลา พยาหญาพ๛ทางพลางเกมูกของกุพทางกา

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2018)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Program Pembangunan Sosial Masyarakat	Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	N/A	20,72	Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber Daya	
	Total Fertility Rate	N/A	2,1	- Masyarakat	
	Perkembangan desa/kelurahan kategori cepat berkembang	24	36		
	Angka kejahatan per 100.000 penduduk (crime rate)	N/A	12,59		
SASARAN	Indeks Gini	0,4400	0,3917	Gubernur dan	
Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	Persentase angka kemiskinan	12,36	11,23	Wakil Gubernur	
PROGRAM Program penanggulangan Kemiskinan	Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru	0,2	0,2	Sekretaris Daerah Asisten Bidang	
	Jumlah penduduk miskin (jumlah penduduk miskin (pada tahun n)	466.330	484.947	Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat	
	Pengeluaran per kapita masyarakat	13.229	13.552		
SASARAN Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah 10,98 budaya benda dan tak benda yang diapresiasi		11,46	Gubernur dan Wakil Gubernur	
PROGRAM Program Pelestarian budaya	Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	10,23%	11,22%	Sekretaris Daerah Paniradya	
benda dan tak benda	Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	N/A	12,99	Keistimewaan	
SASARAN Maninglyataya alatinitaa	Pertumbuhan Ekonomi.	5,21	5,24	Gubernur dan	
Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	2.IKLH(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	56,65	58,58	Wakil Gubernur	
	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75	76,5		
	4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	11,11	21,11		
PROGRAM Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)	Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY	42,32	42,32	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	2,72	2,78		
	Jumlah desa mandiri budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima): Target 2022 : 1 Desa mandiri budaya	N/A	0		



กกล พยาหูเพลาเพลาเพ่นๆผพาพพาหาเก

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 (2018)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
PROGRAM	Indeks Kualitas Air	29,17	34,20	Sekretaris Daerah	
Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan	Indeks kualitas Udara	86,39	87,06	Asisten Bidang Perekonomian dan	
Penanggulangan Bencana	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,84	55,50	Perekonomian dan Pembangunan	
	Indeks Resiko Bencana	165 (tinggi)	155 (tinggi)		
PROGRAM Peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan Ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang	N/A	74,7	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan	
SASARAN Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah	Indeks Williamson	0,4662	0,4559	Gubernur dan Wakil Gubernur	
PROGRAM Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Persentase peningkatan PDRB pada kabupaten yang belum maju (GK, KP, Bantul)	40,15	40,21	Sekretaris Daerah Asisten Bidang Perekonomian dan	
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi	N/A	61	Pembangunan	
MISI Mewujudkan Tata Pemerintahan	yang Demokratis				
SASARAN Meningkatnya kapasitas tata	Opini BPK	N/A	WTP	Gubernur dan	
kelola pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	N/A	А	Wakil Gubernur	
PROGRAM	Kemampuan keuangan daerah	Sedang	Sedang	Sekretaris Daerah	
Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY (satuan Rp)	N/A	9.424.672.744	Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	
	Nilai eksternal pelayanan publik	N/A	8,50	Administrasi Omdin	
	Nilai internal integritas organisasi	4,16	4,20	-	
	Nilai eksternal persepsi korupsi	5,21	5,40		
SASARAN Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan	N/A	N/A	Gubernur dan Wakil Gubernur	
PROGRAM Program Pengelolaan	Terwujudnya penetapan kepala daerah sesuai UU Keistimewaan.	100	100	Sekretaris Daerah Paniradya	
Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdais kelembagaan	N/A	N/A	Keistimewaan	
SASARAN Meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	5.369	7.919	Gubernur dan Wakil Gubernur	
PROGRAM Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan,kadipaten, dan tanah desa.	19,83%	31,57%	Sekretaris Daerah Paniradya Keistimewaan	



Adapun Sasaran Pembangunan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia/ IPM (%)	81,08
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,12
2.	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks GINI	0,3776
		Persentase Angka Kemiskinan (%)	9,11%
3.	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi (%)	11,72%
4.	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi.	5,29
		IKLH(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	62,44
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79,5%
		Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	40,69%
5.	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah	Indeks Williamson	0,4524
6.	Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan	Opini BPK	WTP
		Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	А
7.	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Sasaran Pelaksanaan Keistimewaan	73,91%
8.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	13.419

Dalam upaya penanganan Covid-19, sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY adalah:

- 1. Tercegahnya penyebaran COVID-19 dengan cepat dan tepat;
- 2. Pasien COVID-19 tertangani hingga sehat dan tuntas;
- 3. Terwujudnya ketangguhan sosial, ekonomi, dan pendidikan warga masyarakat menghadapi pandemi COVID-19;
- 4. Terjaminnya keterbukaan, kejelasan, kemudahan, partisipasi dan literasi informasi kepada warga masyarakat DIY dalam pencegahan dan penanganan COVID-19.

2.3 Tema Pembangunan Daerah Tahun 2020

Penyusunan tema pembangunan RKPD DIY 2020 mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 pada tahun perencanaan bersangkutan, mempertimbangkan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan didalam RPJPD DIY 2005-2025 dan tema indikatif pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta arah kebijakan umum pembangunan sebagai referensi tema indikatif. Pilihan tema pembangunan RKPD DIY 2020 yang ada memperhatikan internalisasi paradigma Abad Samudra Hindia dalam visi misi Gubernur DIY, aspek keistimewaan, mempedomani RKP 2020 beserta tema pembangunan nasional yang termuat, memperhatikan fokus tematik, serta identifikasi masalah yang telah dibahas pada awal bab dokumen ini sehingga diharapkan sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercapai. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut Tema RKPD DIY Tahun 2020 dapat dirumuskan sebagai berikut.

"Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas"



กกา พยาทหูรุเพลารุเพลารุเทมีพายณปพระการเก

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Percepatan Pembangunan Infrastruktur diharapkan menjadi pendorong pengurangan ketimpangan antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup, penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta. Selain itu, fenomena kemiskinan dan kesenjangan di Kawasan Selatan DIY mendorong fokus dan perhatian terhadap pembangunan Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta selaras dengan Tema Visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" juga untuk meningkatkan "Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh Wilayah Yogyakarta pada umumnya." Prioritas penyelesaian infrastruktur antara lain terkait Yogyakarta International Airport (YIA), JJLS, JATP dan infrastruktur pendukung terkait. Percepatan pembangunan infrastruktur dimaknai secara luas tidak hanya terkait dengan sarana prasarana tetapi juga aspek non sarana prasarana fisik. Diharapkan kata kunci tema ini dapat berkontribusi dalam rangka pencapaian target sasaran Meningkatnya Aktivitas

Perekonomian yang Berkelanjutan yang akan diukur dengan indikator:

- 1. Pertumbuhan Ekonomi
- 2. Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
- 3. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
- 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan kata kunci tema tersebut dirumuskan prioritas pembangunan pada tahun 2020 prioritas Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan yang berhubungan dengan prioritas RKP/nasional dalam rangka Pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan hidup dan prioritas Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja.

2. Peningkatan SDM

Pada tahun 2018, perekonomian tumbuh melampaui target namun belum optimal mengurangi ketimpangan antar kelompok pendapatan dan angka kemiskinan. Pertumbuhan Ekonomi DIY belum dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara merata. Indeks gini masih mencapai 0,441 dan Angka Kemiskinan 11,81% sementara itu IPM DIY melampaui rata-rata nasional. Ketimpangan juga terjadi pada capaian IPM yang masih timpang antar Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut memerlukan terobosan baru agar pembangungan daerah tidak hanya tumbuh, tetap memperhatikan dimensi pemerataan dan meningkatkan meningkatkan kualitas hidup, penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta sesuai misi ke-1 RPJMD DIY 2017-2022.

Keyword tema tersebut Peningkatan SDM sekurangnya dapat mendukung pencapaian 3 Sasaran RPJMD DIY pada tahun 2020 :

- 1) Meningkatnya Derajat kualitas SDM dengan indikator sasaran:
 - a. IPM dan
 - b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- 2) Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks Gini
 - b. Angka Kemiskinan
- 3) Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan dengan indicator sasaran Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi.



กา

Berdasarkan kata kunci tema dan penjelasan tersebut dirumuskan prioritas Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan yang sinergis dengan prioritas nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

3. Pertumbuhan Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi di DIY yang dicapai 6,20 (2018, BPS) belum merata apabila melihat capaian Indeks Williamson 0,4599 yang lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 0,4559 (tercapai 99,12%). Tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah DIY tahun 2012-2016 dilihat dari Tipologi Klassen menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah di DIY masih besar terlihat dari masuknya Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sebagai daerah maju dan cepat tumbuh, sementara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah tertinggal, dan Kabupaten Bantul sebagai daerah berkembang cepat. Ini diperkuat dengan hasil persebaran kabupaten/kota di DIY menurut ratarata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2012 hingga 2015 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul masuk kategori low growth - pro poor (kuadran II), Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman masuk kategori high growthless pro poor (kuadran IV), sementara Kabupaten Kulon Progo masuk kategori low growth - less pro poor (kuadran I). Apabila didasarkan pada analisis Shift Share yang berguna untuk mengkaji pergeseran serta peran perekonomian di suatu daerah untuk mengetahui ketimpangan sectoral dapat disimpulkan bahwa tidak ada kabupaten/kota dengan pertumbuhan pesat (kuadran III). Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul masuk kelompok daerah yang sedang berkembang. Kota Yogyakarta hanya menempati daerah yang cenderung berpotensi dan Kabupaten Kulon Progo masih merupakan daerah yang mempunyai daya saing lemah (kuadran IV) (Road Map Tematik RPJMD DIY 2017-2022).

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah merupakan masalah yang cukup sulit diatasi karena merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Ketimpangan distribusi pendapatan di DIY masih tinggi terlihat dari 80 persen penduduk berpendapatan menengah ke bawah yang hanya memperoleh 51 persen dari total distribusi pendapatan dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi memperoleh 49 persen dari total distribusi pendapatan. Terkait dengan permasalahan tersebut perlu dirumuskan program pembangunan yang mampu menggerakkan skala ekonomi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo untuk mengurangi jurang ketimpangan ekonomi dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Oleh karenanya perlu dilakukan:

- Perluasan sektor penggerak pertumbuhan dan area pembangunan mengarah ke wilayah yang relatif tertinggal, prioritas utamanya Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul;
- 2. Membuat kebijakan yang mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja, terutama di sektor-sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa keuangan, real estate, dan jasa perusahaan;
- 3. Meningkatkan kebutuhan investasi di kabupaten/kota secara proporsional dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki tiap daerah.

Sesuai arahan Pemerintah, Pemerintah Daerah perlu mendorong terjadinya pertumbuhan berkualitas yakni pertumbuhan yang yang inklusif dimana hasil pembangunan adalah pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan akan menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat. Pembangunan inklusif merupakan peningkatan laju pertumbuhan dan perluasan skala ekonomi, serta penciptaan lapangan investasi yang merata dan peningkatan kesempatan kerja yang produktif (Bank Dunia). Pertumbuhan berkualitas juga diharapkan memperhatikan kelestarian lingkungan dan aspek kesesuaian pemanfaatan ruang dalam upaya pencapaiannya. Pertumbuhan berkualitas tersebut diharapkan dapat memenuhi capaian Sasaran RPJMD DIY "Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah yang diukur dengan Indeks



^^ พยาหญาพ๛กางพลกางเพญายเบาเพาะการเก

williamson" diarahkan melalui strategi (1) penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru; (2) meningkatkan aksesibilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Adapun prioritas pembangunan pada tahun 2020 yang dirumuskan terkait kata kunci ini ialah prioritas Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah yang berhubungan dengan prioritas RKP/nasional Penguatan Konektivitas dan Pemerataan.

Ketiga Kata kunci tema tersebut masing-masing memiliki keterkaitan dengan prioritas daerah dan sasaran pembangunan DIY Tahun 2020 dan diselaraskan dengan tema RKP 2020 dan Prioritas Nasional. Ketiga kata kunci tersebut perlu didukung oleh Pendukung Prioritas berupa Sasaran-Sasaran pendukung Misi ke-2 RPJMD DIY 2017-2022. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis antara lain:

- 1) Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan dengan Indikator sasaran
 - a. Opini BPK
 - b. Nilai Akuntabilitas Pemerintah
- 2) Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan dengan Indikator Persentase capaian program urusan keistimewaan
- 3) Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kesultanan, Kadipaten dan tanah desa dengan indikator Bidang tanah kesultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan.

Setelah terjadinya Pandemi COVID-19, Pemda DIY melakukan penyesuaian tema pembangunan Tahun 2020 dari "Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas" menjadi "Penanganan Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan serta Upaya Penguatan Ekonomi Guna Meminimalisir Dampak Pandemi Covid-19". Penyesuaian tema pembangunan tersebut juga berdampak pada penyesuaian prioritas pembangunan Tahun 2020.

2.3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Berdasarkan tema RKPD DIY 2020 Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas dapat dirumuskan Prioritas Daerah DIY sebagai berikut.

Tabel: Rumusan Prioritas Daerah

No.	Kata Kunci Tema RKPD DIY 2020	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
1.	Peningkatan SDM	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM
			1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat
			1.1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan
2.	Pertumbuhan Berkualitas	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan wilayah	1.1.5. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah
3.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur (***Infrasuktur: Dimaknai luas tidak hanya terkait dengan sarpras tetapi juga aspek non sarpras).	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan



4.	Pendukung	Pendukung Prioritas	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
	Prioritas	Pembangunan	
	Pembangunan		
			2.1.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan
			2.1.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa

Prioritas Daerah tersebut diselaraskan dengan mempedomani prioritas nasional sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Rancangan RKP Tahun 2020), beserta indikator dapat disampaikan penyelarasan dengan Tema dan Prioritas RKPD DIY beserta Sasaran-Indikator Sasaran dan Program Pemda DIY sebagai berikut :

Tabel: Tema dan Prioritas pembangunan DIY

Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas.	untuk pert	peningkatan SDM umbuhan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda
Prioritas Nasional	Key Word Tema DIY	Prioritas DIY			
1.Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan SDM	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	1.1.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
					Program Peningkatan Usia Harapan Hidup
				1.1.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender	Program Pembangunan Sosial Masyarakat
			1.1.2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	1.1.2.1. Indeks Gini	Program Penanggulangan Kemiskinan
		untuk pertumbuhan berkualitas Sasaran Sasaran Promitias Permomenta of the promitias Promitias			
			Terpelihara dan Berkembangnya	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang	Program Pelestarian budaya benda dan tak benda
2.Penguatan Konektivitas Dan Pemerataan	Pertumbuhan Berkualitas	Konektivitas Dan Pemerataan	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar	indeks	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan



กลา ผลาหูเพลาเพลาเพนีย์ กลุ่ม กลุ่ม

3.Pemantapan ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan hidup.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur (***Infrasuktur: Dimaknai luas tidak hanya terkait dengan sarpras tetapi juga aspek non sarpras).	Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	1.1.4.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
	Pembangunan Infrastruktur ("Infrasuktur: Dimaknai luas tidak hanya terkait dengan sarpras tetapi juga aspek non sarpras). Pendukung Penangkatan nilai tambah ekonomi akemanan Pembangunan Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Pendukung Perdukung Pendukung Pioritas Pembangunan Pendukung Pen	Program peningkatan Keterpaduan program pemanfaatan ruang			
				Ruang Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis	
dan kesempatan				Pertumbuhan	Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa)
	Prioritas	Prioritas	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola		Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
	Pembangunan pangan, ir, nerergi dan elestarian Dimaknal luas tidak hanya terkait dengan sarpras tetapi juga aspek non sarpras). Pendukung Pendukung Pendukung Pembangunan Pem	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah			
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan	Persentase Capaian program Urusan	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan	Bidang Tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta	Program Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa



^^ พยาหญาพ๛กางพลกางเพญายเบาเพาะการ

RKPD DIY Tahun 2020 juga memperhatikan Rancangan RKP Tahun 2020 berkenaan dengan sasaran utama pengembangan wilayah Jawa-Bali pada tahun 2020 antara lain,

- 1. Mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah;
- 2. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan;
- 3. Memperluas kesempatan kerja; dan
- 4. Meningkatkan pembangunan manusia

Dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait penangan Covid-19 di daerah, maka penentuan Prioritas Pembangunan Tahun 2020 mengalami penyesuaian sebagai upaya sinkroniasi terhadap prioritas nasional tahun 2020. Prioritas pembangunan daerah di DIY disesuaikan agar sasaran pemerintah daerah guna penanganan Covid-19 dapat tercapai.

Prioritas Pembangunan DIY pada Tahun 2020 menjadi:

- 1. Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19
- 2. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/Social Safety Net antara lain melalui bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi Covid-19:
- 3. Penangan Dampak Ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Perubahan terhadap rencana program dan kegiatan APBD Perubahan Tahun 2020 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut :

- 1. Pergeseran: antar rekening belanja, antar program/kegiatan, antar sub kegiatan dan antar rekening;
- 2. Penambahan/pengurangan Tolok Ukur Kinerja (berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan);
- 3. Penambahan kegiatan baru (misal : karena ada ketentuan dari pusat);
- 4. Tambahan karena kebutuhan mendesak berkaitan dengan kerjasama pihak ketiga;
- 5. Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja, serta kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan,
- 6. dan lain sebagainya.

2.3.2 Kebijakan Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Daerah

2.3.2.1 Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.



การ การเกาะ

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui,

- 1. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasioanl alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;
- 2. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ditersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- 2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
- 3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- 4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- 5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
- 6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhadanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku. Seperti halnya dengan pajak, pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:
 - 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (Budgetary)
 - 2) Sebagai alat pengatur (Regulatory)

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut. Jenis retribusi dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa–jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokan sebagai berikut:



การและ การเกาะ การเกาะ

- 1) Retribusi yang dikenakan jasa umum
- 2) Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha
- 3) Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu

Retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri menjadi kewenangan propinsi/kabupaten kota. Retribusi yang menjadi kewenangan propinsi yaitu:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 4) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.

2. Dana Perimbangan, terdiri dari:

- a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) akan berkisar 33% dan Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus berkisar 36,68% pada tahun perencanaan 2020 menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU



กกา พยากหูรุพ๛ทรุพ๛ทรุพาผู้ๆผบากพาฦหาเก

secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2020 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
- 3) Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal;
- 4) Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti bus samsat keliling, pembayaran Pajak melalui ATM, dan sistem online kesamsatan yang telah dioperasikan saat ini (E-Posti), serta Samsat Desa untuk mendekatkan pelayanan. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi STS online berbasis accrual pada SIPKD untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah;
- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak;
- 6) Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di DIY sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment;
- 7) Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat;
- 8) Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;



กกลายเกรายนาว การเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกา

9) Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak.

Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Adapun langkah kebijakan dalam upaya mengoptimalkan dana perimbangan sebagai berikut:

- 1. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundangundangan yang berlaku;
- 2. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sementara itu sebagai upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota
- 2. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berkaitan dengan terjadinya Pandemi COVID-19 terdapat perubahan kebijakan pendapatan karena terjadi perubahan kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Perubahan kebijakan pendapatan tersebut berdampak pada penyesuaian target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2020.

2.3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum, listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, dan program/ kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik (1)Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Antar Kelompok Pendapatan; 2) Penurunan Ketimpangan Wilayah; 3) Dukungan Pembangunan Yogyakarta International Airport (Bandar Udara Internasional Yogyakarta); dan 4) Pembiayaan Pembangunan). Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan focus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masingmasing kabupaten/kota secara administratif.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga harus memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama



กกา พยากหูงพลางพลางตุมูกผบกพทากเก

pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran Bungan utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak menganggarkan belanja bunga.
- 3. Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. DIY menganggarkan belanja subsidi untuk membantu biaya operasi Trans Joga yang merupakan transportasi umum yang dibutuhkan masyarakat.
- 4. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- 5. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertunuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- 6. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupten/ Kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. DIY menganggarkan belanja bagi hasil yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di wilayah DIY yang besarnya proporsional dengan penerimaan pendapatan sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rertribusi Daerah.
- 7. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan fiskal bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.



กกา พยากหูงพลางพลางตุมูกผบกพทากเก

8. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 3. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuik digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sesuai dengan perencanaannya agar ouput dan outcome kegiatan tercapai. Penyusunan output dan outcome pada tolok ukur kinerja disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar.

b. Efisiensi Anggaran

Kegiatan yang dalam pelaksanaannya memiliki belanja yang dianggap tidak diperlukan maka tidak harus dibelanjakan. Salah satu jenis belanja yang biasanya bersifat tentatif adalah belanja perjalanan dinas. Perjalanan Dinas dilakukan secara selektif. Belanja alat tulis kantor pun dapat diefisiensi dengan memperhatikan data barang persediaan. Selain itu belanja sarana prasarana kantor disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang milik daerah.

c. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

1) Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur public dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.



กา

Dengan terjadinya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi makro ekonomi nasional dan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta maka dilakukan Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran yang diarahkan pada penanganan Covid-19 sesuai dengan prioritas penanganan yakni: Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial dan Penguatan Ekonomi. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui:

- 1. Rasionalisasi belanja pegawai
- 2. Rasionalisasi belanja barang/jasa
- 3. Rasionalisasi belanja modal

Hasil rasionalisasi belanja-belanja tersebut dialihkan pada Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan secara signifikan dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2020. Prioritas penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah untuk penanganan Pandemi Covid-19 sesuai arahan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran untuk Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 bagi dari sisi kesehatan, jaring pengaman sosial maupun upaya penguatan perekonomian daerah.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, pengendalian dan penegakan hukum serta penanggulangan bencana dalam upaya penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

2.3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan DIY menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA). Penganggaran SILPA untuk tahun 2020 mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun 2020 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMD diprioritaskan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Total penyertaan modal pada tahun 2020, sebesar Rp238.540.000.000. Penyertaan modal pada BUMD di tahun 2020 bukan hanya untuk menambah penyertaan modal pada BUMD yang sudah ada, yaitu PT Bank BPD DIY tapi juga untuk penyertaan modal pada BUMD baru yaitu Perusahaan Daerah Air Bersih (PD Air Bersih) serta BUKP.



กกา พยากษางพรางพรางพัฒฑยพากพาการ

Penambahan setoran modal pada PT Bank BPD DIY didasarkan atas Perda DIY Nomor 14 Tahun 2018. Pemda DIY berkewajiban melakukan penambahan penyertaan modal yang belum disetor sebesar Rp1.530.000.000.000,000 bersumber dari APBD dilakukan secara bertahap untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun. Pada tahun 2020, Pemda DIY akan menambahkan penyertaan modal pada BPD DIY sebesar Rp.222.040.000.000.

Berkaitan dengan PD Air Bersih, pada Tahun 2019 diharapkan telah berdiri. Sebelumnya, telah dilaksanakan kajian analisis kebutuhan daerah dan analisis kelayakan usaha pada tahun anggaran 2018. Triwulan I tahun anggaran 2019, PD Air Bersih (PDAB) tersebut direncanakan untuk dimintakan penilaian Menteri Dalam Negeri. Setelah selesai penilaian oleh Menteri Dalam Negeri dilakukan penyusunan Naskah Akademik untuk Perda Pendirian BUMD PD Air Bersih. Kemudian dilakukan penyusunan kajian investasi dan naskah akademik untuk Perda Penyertaan Modal BUMD PDAB. Pada tahun 2020 Pemda DIY mempunyai kewajiban melakukan penyetoran modal sebesar Rp12.500.000.000. Besaran penyertaan modal tersebut berdasarkan asumsi modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000.000,00 maka 25% dari modal dasar tersebut harus disetorkan pada saat pendirian yakni sebesar Rp12.500.000.000,00 (pasal 33 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT).

Badan Usaha Kredit Pedesaan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BUKP) yang didirikan berdasarkan PERDA DIY Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat dan murah. BUKP didirikan di tiap-tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten dan Kota se Provinsi DIY yang pendiriannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BUKP berkedudukan di ibukota kecamatan dengan wilayah usaha yang terbatas pada wilayah kecamatan dimana BUKP tersebut berkedudukan, sedangkan di tingkat desa dapat dibentuk unit-unit pelayanan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan BUKP yang berada dimasing-masing Kecamatan di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu tolok ukur keberhasilan Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di pedesaan yaitu seluruh masyarakat dalam wilayah Kecamatan dalam meningkatkan usaha telah menggunakan jasa intermediasi Lembaga Keuangan Mikro BUKP. Untuk itu dalam mewujudkan usaha Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menjadikan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan di pedesaan dengan menggunakan LKM BUKP terutama untuk menabung dan meminjamkan untuk usaha-usaha yang produktif. Pada tahun 2020, Pemda DIY menganggarkan penyertaan modal BUKP sebesar Rp4.000.000.0000.

Dalam APBD Perubahan Tahun 2020 Pengeluaran direncanakan turun menjadi Rp117,59 Milyar dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2020.



00 การและ การเกาะ การแก้ง ปลาย การแก้ง ปลาย การเกาะ การแก้ง ปลาย การเกาะ การเ

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp5.611.510.924.299,71 terdiri Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.876.706.829.354,71, Anggaran Dana Perimbangan sebesar Rp2.371.044.354.021,00, dan Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1.363.759.740.924,00. Untuk Anggaran Belanja ditetapkan sebesar Rp5.433.180.699.355,67 dengan rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3.626.221.964.680,02 dan Belanja Langsung sebesar Rp1.806.958.734.675,65. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp423.712.988.195,42 dan Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp117.590.000.000,00.

Adanya bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek social ekonomi yang luas di Indonesia. *World Health Organization (WHO)* bahkan telah menyatakan Covid-19 sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2O2O. Hal ini memberikan konsekuensi perlu dilakukannya langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis dalam upaya percepatan penanganan Covid-19. Setelah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur DIY tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY melakukan refocusing dan realokasi APBD TA 2020 untuk prioritas penanganan Covid-19 melalui Belanja Tidak Terduga dengan strategi:

- 1. Percepatan Perubahan Penjabaran APBD DIY 2020 dengan melakukan pencermatan dan indentifikasi terhadap kegiatan-kegiatan OPD yang :
 - a. Tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Dapat ditunda pelaksanaannya;
 - c. Dapat di redesign TUK dan outputnya;
 - d. Dapat diakselerasi pelaksanaannya.
- 2. Menghentikan seluruh proses pengadaan barang/jasa yang belum tanda tangan kontrak per 3 April 2020 kecuali untuk:
 - a. Pengadaan barang/jasa yang bersumber pada Dana Keistimewaan;
 - b. Pengadaan barang/jasa untuk Operasional OPD yang Wajib Mengikat;
 - c. Pengadaan barang/jasa untuk Operasi dan Pemeliharaan Pelayanan Dasar/Publik;
 - d. Kebijakan Pemda DIY dalam penanganan wabah pandemi Covid-19 adalah melakukan upayaupaya penanganan melalui Belanja Tidak Terduga yang diprioritaskan pada :
 - e. Penanganan Kesehatan, yang meliputi:
 - 1) Penyediaan sarana prasarana kesehatan;
 - 2) Penyediaan sarana fasilitas kesehatan;
 - 3) Penyediaan tenaga kesehatan/medis yang potensial;



การและ การเกาะ การเกาะ

- 4) Penyemprotan disinfektan;
- 5) Penyediaan ruang isolasi bagi pasien;
- 6) Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-19;
- 7) Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban;
- 8) Penanganan jenazah;
- 9) Penanganan kesehatan lainnya.
- 3. Penanganan Dampak Ekonomi, antara lain:
 - a. Pengadaan bahan pangan dan bahan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying;
 - b. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19;
 - c. Penanganan dampak ekonomi lainnya.
- 4. Penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial antara lain: pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai.

Berdasarkan dinamika tersebut maka dalam APBD Perubahan TA 2020 dilakukan perubahan kebijakan pendapatan yaitu:

- a. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Dana Insentif Daerah sebagai akibat adanya perubahan-perubahan asumsi ekonomi makro;
- b. Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kedua sejak Bulan April hingga Bulan Desember 2020;
- c. Menambah titik layanan Pembayaran PKB agar tidak terjadi penumpukkan massa di salah satu titik pembayaran;
- d. Penambahan fasilitas layanan publik, khususnya yang terkait dengan PAD diprioritaskan untuk operasional, pemeliharaan dan penataan baru untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Tindak lanjut dari perubahan kebijakan pendapatan tersebut dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dalam APBD Perubahan ditetapkan sebesar Rp5.558.125.044.792,93 turun sebesar Rp155.799.220.709,78 dibandingkan dalam APBD TA 2019 sebesar Rp5.713.924.265.502,71, dengan rincian anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.799.932.971.064,54, Dana Perimbangan sebesar Rp2.395.248.332.317,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1.362.943.741.411,39.

Untuk perubahan kebijakan belanja dalam APBD Perubahan 2020 adalah sebagai berikut:

- 1. Memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan Pandemi Covid-19 antara lain bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan prioritas untuk:
 - a. Penanganan kesehatan
 - b. Penanganan dampak ekonomi
 - c. Optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial
- 2. Melaksanakan penyesuaian APBD antara lain dengan melakukan realokasi anggaran belanja tidak terduga untuk menambah belanja barang/jasa dan belanja modal dengan tetap memperhatikan kebutuhan penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan status kategori zona wilayah terkait Covid-19 yang dikeluarkan oleh satgas penanganan Covid-19 setempat dan ketentuan perundangan dan/atau untuk mendanai keperluan mendesak;



กกา พยากหูงพลางพลางตุมีๆผบางพาฦหาเก

- 3. Menghitung kembali belanja gaji pegawai dengan dasar realisasi gaji Bulan Juni dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang tidak dijadikan penghitung besaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya;
- 4. Penyesuaian Belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota dengan memperhitungkan kekurangan pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota atas kelebihan target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2019;

Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp5.865.604.964.088,35, naik sebesar Rp915.954.579.764,90 dibandingkan Anggaran Belanja TA 2019 sebesar Rp4.949.650.384.323,45.

Perubahan kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah melakukan penyesuaian anggaran penyertaan modal yang semula ditetapkan sebesar Rp 178.630.000.000,00 menjadi sebesar Rp117.590.000.000,00. Penyesuaian tersebut digunakan untuk menambah alokasi Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD Perubahan APBD TA 2020 dianggarkan Penyertaan Modal untuk Perusda Tirta Tama sebesar Rp12.500.000.000,00.

Kinerja keuangan TA 2020 dari sisi Pendapatan dianggarkan sebesar Rp5.558.125.044.792,93, dapat direalisasikan sebesar Rp5.611.510.924.299,71 atau 100,96% dibandingkan dengan target pendapatan dalam APBD Perubahan TA 2020 dengan rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.876.706.829.354,71 atau 104,27% dari target setelah perubahan, realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp2.371.44.354.021,00 atau 98,99% dari target setelah perubahan, dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1.363.759.740.924,00 atau 100,06% dari target setelah perubahan.

Kinerja keuangan TA 2020 dari sisi belanja dianggarkan sebesar Rp5.865.604.964.088,35 dapat direalisasikan sebesar Rp5.433.180.699.355,67 atau 92,63% dibandingkan dengan target belanja setelah APBD Perubahan TA 2020 dengan rincian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3.626.221.964.680,02 atau 93,36% dibandingkan dengan target belanja setelah perubahan, dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp1.806.958.734.675,65 atau 91,19% dari target belanja setelah perubahan.

Kinerja keuangan penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp425.069.919.295,42 dan realisasi sebesar Rp423.712.988.195,42 atau 99,68% dengan rincian realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp420.567.958.995,42 atau 100% dari target setelah perubahan dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar Rp3.145.029.200,00 atau 69,86%. Untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp117.590.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% dengan rincian Penyertaan Modal Ke BPD sebesar Rp101.000.000,000,00, Penyertaan Modal Ke ASKRIDA sebesar Rp90.000.000,00, Penyertaan Modal ke PD Air Bersih sebesar Rp12.500.000.000,00 dan Fasilitasi Dana Bergulir sebesar Rp4.000.000.000,00 melalui BUKP.

Berdasarkan kinerja keuangan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas, maka pada TA 2020 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp484.453.213.139,46 dan secara rinci realisasi APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang		
PEMERINTAHAN DAERAH	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PENDIDIKAN					
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN (DLAHRAGA				
PENDAPATAN DISDIKPORA	2.179.535.102,00	2.526.873.617,00	347.338.515,00	115,93	%
Pendapatan Asli Daerah	2.179.535.102,00	2.526.873.617,00	347.338.515,00	115,93	%
Hasil Retribusi Daerah	924.243.500,00	1.064.513.500,00	140.270.000,00	115,17	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.255.291.602,00	1.462.360.117,00	207.068.515,00	116,49	%
BELANJA DISDIKPORA	1.227.433.266.212,00	1.177.846.859.137,00	(49.586.407.075,00)	95,96	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	801.201.779.651,00	775.003.930.455,00	(26.197.849.196,00)	96,73	%
Belanja Pegawai	801.201.779.651,00	775.003.930.455,00	(26.197.849.196,00)	96,73	%
BELANJA LANGSUNG	426.231.486.561,00	402.842.928.682,00	(23.388.557.879,00)	94,51	%
Program Administrasi Perkantoran	12.976.946.840,00	11.779.692.741,00	(1.197.254.099,00)	90,77	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.316.410.344,00	5.467.153.924,00	(849.256.420,00)	86,55	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	890.203.000,00	838.124.550,00	(52.078.450,00)	94,14	%
Program Pendidikan Menengah	363.820.627.321,00	348.069.609.789,00	(15.751.017.532,00)	95,67	%
Program Layanan Pendidikan Khusus	13.544.213.861,00	12.257.993.364,00	(1.286.220.497,00)	90,50	%
Program Peningkatan Mutu Pendidikan	2.533.765.100,00	2.240.114.490,00	(293.650.610,00)	88,41	%
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.542.215.400,00	10.222.060.050,00	(320.155.350,00)	96,96	%
Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1.203.677.000,00	1.168.611.800,00	(35.065.200,00)	97,08	%
Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	7.191.664.145,00	4.608.054.880,00	(2.583.609.265,00)	64,07	%
Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	336.947.000,00	334.211.250,00	(2.735.750,00)	99,18	%
Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	277.016.000,00	223.751.000,00	(53.265.000,00)	80,77	%
Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	947.955.500,00	871.419.182,00	(76.536.318,00)	91,92	%
Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunung Kidul	310.297.850,00	282.467.350,00	(27.830.500,00)	91,03	%
Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	519.474.900,00	484.579.100,00	(34.895.800,00)	93,28	%
Program Pembinaan Kepemudaan	507.557.600,00	487.082.884,00	(20.474.716,00)	95,96	%
Program Pembinaan Olahraga	1.491.226.200,00	1.343.939.710,00	(147.286.490,00)	90,12	%
Program Pendidikan Berbasis Budaya	2.821.288.500,00	2.164.062.618,00	(657.225.882,00)	76,70	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
KESEHATAN					
DINAS KESEHATAN					
PENDAPATAN DINAS KESEHATAN	34.487.714.477,00	37.482.745.598,00	2.995.031.121,00	108,68	%



กลายเกาะสารเกาะสารแก้มๆเกาะสารเ

Pendapatan Asli Daerah	34.487.714.477,00	37.482.745.598,00	2.995.031.121,00	108,68	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	34.487.714.477,00	37.482.745.598,00	2.995.031.121,00	108,68	%
BELANJA DINAS KESEHATAN	175.707.757.161,29	129.617.621.649,00	(46.090.135.512,29)	73,76	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	46.370.672.286,00	44.575.407.650,00	(1.795.264.636,00)	96,12	%
Belanja Pegawai	46.370.672.286,00	44.575.407.650,00	(1.795.264.636,00)	96,12	%
BELANJA LANGSUNG	129.337.084.875,29	85.042.213.999,00	(44.294.870.876,29)	65,75	%
Program Administrasi Perkantoran	2.070.226.700,00	1.859.576.597,00	(210.650.103,00)	89,82	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	441.375.533,00	399.399.590,00	(41.975.943,00)	90,48	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.515.500,00	31.336.800,00	(14.178.700,00)	68,84	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	77.615.280,23	76.536.450,00	(1.078.830,23)	98,61	%
Program Kesehatan Masyarakat	9.591.229.440,00	7.773.502.378,00	(1.817.727.062,00)	81,04	%
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.674.609.700,00	3.343.421.963,00	(331.187.737,00)	90,98	%
Program Pelayanan Kesehatan	143.615.900,00	142.465.100,00	(1.150.800,00)	99,19	%
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	377.886.000,00	366.275.657,00	(11.610.343,00)	96,92	%
Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD BALABKES	19.657.514.281,62	13.832.490.045,00	(5.825.024.236,62)	70,36	%
Program Pelayanan Pelatihan Kesehatan Pada BLUD BAPELKES	6.510.349.078,00	2.755.095.778,00	(3.755.253.300,00)	42,31	9
Program Pelayanan Pada BLUD BAPELJAMKESSOS	32.033.924.065,29	18.821.347.512,00	(13.212.576.553,29)	58,75	%
Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ GRHASIA	28.266.091.329,15	19.107.901.787,00	(9.158.189.542,15)	67,60	%
Program Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS PARU RESPIRA	26.447.132.068,00	16.532.864.342,00	(9.914.267.726,00)	62,51	%
URUSAN KONKUREN WAJIB PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUM	1				
PENDAPATAN DINAS PUP-ESDM	6.262.617.000,00	8.135.160.962,00	1.872.543.962,00	29,90	%
Pendapatan Asli Daerah	6.262.617.000,00	8.135.160.962,00	1.872.543.962,00	129,90	%
Hasil Retribusi Daerah	6.257.013.000,00	8.129.568.962,00	1.872.555.962,00	129,92	9
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.604.000,00	5.592.000,00	(12.000,00)	99,78	9
BELANJA DINAS PUP-ESDM	573.146.992.580,00	544.625.128.917,01	(28.521.863.662,99)	95,02	9
BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.192.681.810,00	22.636.678.327,00	(2.556.003.483,00)	89,85	9
Belanja Pegawai	25.192.681.810,00	22.636.678.327,00	(2.556.003.483,00)	89,85	9
BELANJA LANGSUNG	547.954.310.770,00	521.988.450.590,01	(25.965.860.179,99)	95,26	9
Program Administrasi Perkantoran	12.954.793.856,00	11.618.073.481,00	(1.336.720.375,00)	89,68	9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.635.283.100,00	3.365.102.086,01	(270.181.013,99)	92,56	9
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	809.742.000,00	798.234.750,00	(11.507.250,00)	98,57	9
Program Penyelenggaraan Jalan	33.459.590.000,00	27.287.682.040,00	(6.171.907.960,00)	81,55	9



กลานางพะกางเกมีนคอกแพนาใน

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	21.929.530.536,00	19.035.548.415,00	(2.893.982.121,00)	87,80	%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.777.383.000,00	8.197.444.088,00	(2.579.938.912,00)	76,06	%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku	2.878.572.400,00	2.806.772.678,00	(71.799.722,00)	97,50	%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	14.646.124.100,00 0	11.013.827.944,00	(3.632.296.156,00)	75,19	%
Program Pelayanan Jasa Pengujian dan Pembinaan Jasa Konstruksi	953.210.400,00	918.304.380,00	(34.906.020,00)	96,33	%
Program Penyelenggaraan Perumahan	8.559.229.380,00	8.206.345.723,00	(352.883.657,00)	95,87	%
Program Penyelenggaraan Prasana Sarana Utilitas Kawasan	1.440.701.520,00	1.184.519.250,00	(256.182.270,00)	82,21	%
Program Penyelenggaraan Energi dan Ketenagalistrikkan	3.937.255.000,00	2.756.363.350,00 0	(1.180.891.650,00)	70,00	%
Program Pengelolaan Air Tanah	12.994.160.500,00	11.237.138.850,00	(1.757.021.650,00)	86,47	%
Program Pengelolaan Pertambangan	900.015.000,00	823.306.100,00	(76.708.900,00)	91,47	%
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	183.994.000,00	183.994.000,00	0,00	100,00	%
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	417.529.745.428,00	412.190.812.905,00	(5.338.932.523,00)	98,72	%
Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	364.980.550,00	364.980.550,00	0,00	100,00	%
DINAS PERTANAHAN DAN TATA R	UANG				
BELANJA DINAS PERTARU	47.515.576.065,0	41.518.983.074,00	(5.996.592.991,00)	87,37	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.807.743.425,00	3.459.150.222,00	(348.593.203,00)	90,84	%
Belanja Pegawai	3.807.743.425,00	3.459.150.222,00	(348.593.203,00)	90,84	%
BELANJA LANGSUNG	43.707.832.640,00	38.059.832.852,00	(5.647.999.788,00)	87,07	%
Program Administrasi Perkantoran	1.015.610.600,00	764.394.767,00	(251.215.833,00)	75,26	%
i logialii Adillillistiasi i Cikalitolali			(=0=.0.000,00)	,	70
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	520.939.200,00	420.912.379,00	(100.026.821,00)	80,79	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	-	420.912.379,00 76.061.750,00			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan	520.939.200,00		(100.026.821,00)	80,79	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Program Pengaturan dan	520.939.200,00 93.475.500,00	76.061.750,00	(100.026.821,00)	80,79 81,37	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang Program Tertib Administrasi Pertanahan	520.939.200,00 93.475.500,00 283.045.000,00	76.061.750,00 282.100.500,00	(100.026.821,00) (17.413.750,00) (944.500,00)	80,79 81,37 99,66	% %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang Program Tertib Administrasi	520.939.200,00 93.475.500,00 283.045.000,00 261.382.000,00	76.061.750,00 282.100.500,00 242.564.376,00	(100.026.821,00) (17.413.750,00) (944.500,00)	80,79 81,37 99,66 92,80	% % %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang Program Tertib Administrasi Pertanahan Program Pelestarian Cagar Budaya	520.939.200,00 93.475.500,00 283.045.000,00 261.382.000,00 28.766.000,00	76.061.750,00 282.100.500,00 242.564.376,00 28.766.000,00	(100.026.821,00) (17.413.750,00) (944.500,00) (18.817.624,00)	80,79 81,37 99,66 92,80 00,00	% % % %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang Program Tertib Administrasi Pertanahan Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Program Pengelolaan Tanah	520.939.200,00 93.475.500,00 283.045.000,00 261.382.000,00 28.766.000,00 36.286.983.752,00	76.061.750,00 282.100.500,00 242.564.376,00 28.766.000,00 32.426.991.803,00	(100.026.821,00) (17.413.750,00) (944.500,00) (18.817.624,00)	80,79 81,37 99,66 92,80 00,00 89,36	% % % % %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang Program Tertib Administrasi Pertanahan Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	520.939.200,00 93.475.500,00 283.045.000,00 261.382.000,00 28.766.000,00 36.286.983.752,00 2.302.063.000,00	76.061.750,00 282.100.500,00 242.564.376,00 28.766.000,00 32.426.991.803,00 1.967.437.637,00	(100.026.821,00) (17.413.750,00) (944.500,00) (18.817.624,00) - (3.859.991.949,00) (334.625.363,00)	80,79 81,37 99,66 92,80 00,00 89,36 85,46	% % % % % % %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang Program Tertib Administrasi Pertanahan Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan	520.939.200,00 93.475.500,00 283.045.000,00 261.382.000,00 28.766.000,00 36.286.983.752,00 2.302.063.000,00 860.827.800,00	76.061.750,00 282.100.500,00 242.564.376,00 28.766.000,00 32.426.991.803,00 1.967.437.637,00 477.436.000,00	(100.026.821,00) (17.413.750,00) (944.500,00) (18.817.624,00) - (3.859.991.949,00) (334.625.363,00) (383.391.800,00)	80,79 81,37 99,66 92,80 00,00 89,36 85,46 55,46	% % % % % % % %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Program Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang Program Tertib Administrasi Pertanahan Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Program Pengendalian Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang	520.939.200,00 93.475.500,00 283.045.000,00 261.382.000,00 28.766.000,00 36.286.983.752,00 2.302.063.000,00 860.827.800,00 1.090.543.000,00	76.061.750,00 282.100.500,00 242.564.376,00 28.766.000,00 32.426.991.803,00 1.967.437.637,00 477.436.000,00 960.633.280,00	(100.026.821,00) (17.413.750,00) (944.500,00) (18.817.624,00) - (3.859.991.949,00) (334.625.363,00) (383.391.800,00) (129.909.720,00)	80,79 81,37 99,66 92,80 00,00 89,36 85,46 55,46	% % % % % % % % %



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POBELANJA BAKESBANGPOL BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan	8.665.849.353,00 3.255.106.853,00 3.255.106.853,00 5.410.742.500,00 1.015.246.000,00 842.657.000,00	7.718.268.374,00 3.025.119.183,00 3.025.119.183,00 4.693.149.191,00 913.773.562,00 758.175.929,00	(947.580.979,00)) (229.987.670,00) (229.987.670,00) (717.593.309,00)	89,06 92,93 92,93	
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan	3.255.106.853,00 3.255.106.853,00 5.410.742.500,00 1.015.246.000,00	3.025.119.183,00 3.025.119.183,00 4.693.149.191,00 913.773.562,00	(229.987.670,00) (229.987.670,00) (717.593.309,00)	92,93 92,93	
Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan	3.255.106.853,00 5.410.742.500,00 1.015.246.000,00	3.025.119.183,00 4.693.149.191,00 913.773.562,00	(229.987.670,00) (717.593.309,00)	92,93	
Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan	5.410.742.500,00 1.015.246.000,00	4.693.149.191,00 913.773.562,00	(717.593.309,00)		
Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan	1.015.246.000,00	913.773.562,00		00.70	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan			(404 470 400 00)	86,73	
Prasarana Aparatur Program Peningkatan	842.657.000,00	758 175 929 00	(101.472.438,00)	90,00	Ī
		100.110.828,00	(84.481.071,00)	89,97	
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	174.468.000,00	142.990.000,00	(31.478.000,00)	81,95	
Program Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	2.006.779.500,00	1.774.193.000,00	(232.586.500,00)	88,40	
Program Pendidikan Politik Masyarakat	391.593.000,00	364.810.200,00	(26.782.800,00)	93,16	+
Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi	115.122.500,00	112.722.500,00	(2.400.000,00)	97,91	
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	864.876.500,00	626.484.000,00	(238.392.500,00)	72,43	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
PENDAPATAN SATPOL PP	10.008.000,00	15.317.000,00	5.309.000,00	153,04	Ī
Pendapatan Asli Daerah	10.008.000,00	15.317.000,00	5.309.000,00	153,04	
_ain-Lain Pendapatan Asli Daerah ∕ang Sah	10.008.000,00	15.317.000,00	5.309.000,00	153,04	1
BELANJA SATPOL PP	14.263.558.338,00	13.650.721.472,00	(612.836.866,00)	95,70	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.318.261.238,00	6.877.592.093,00	(440.669.145,00)	93,97	
Belanja Pegawai	7.318.261.238,00	6.877.592.093,00	(440.669.145,00)	93,97	
BELANJA LANGSUNG	6.945.297.100,00	6.773.129.379,00	(172.167.721,00)	97,52	
Program Administrasi Perkantoran	692.288.850,00	647.054.070,00	(45.234.780,00)	93,46	I
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	484.379.000,00	481.677.699,00	(2.701.301,00)	99,44	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	74.433.000,00	74.356.050,00	(76.950,00)	99,89	
Program Pemeliharaan Ketertiban Jmum dan Ketentraman Masyarakat	1.394.700.000,00	1.317.639.627,00	(77.060.373,00)	94,47	
Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	240.912.750,00	236.192.750,00	(4.720.000,00)	98,04	
Program Pembinaan dan Pelaksanaan Penegakkan Perda dan Perkada	292.873.500,00	284.980.500,00	(7.893.000,00)	97,30	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	3.765.710.000,00	3.731.228.683,00	(34.481.317,00)	99,08	
I BADAN PENANGGULANGAN BENCA	NA DAERAH				
PENDAPATAN BPBD	0,00	1.390.856.513,00	1.390.856.513,00	-	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	1.390.856.513,00	1.390.856.513,00	-	+
Pendapatan Hibah	0,00	1.390.856.513,00	1.390.856.513,00	-	



กลายเกาะสารเกาะสารแก้มๆเกาะสารเ

BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.064.867.707,00	4.757.227.101,00	(307.640.606,00)	93,92	%
Belanja Pegawai	5.064.867.707,00	4.757.227.101,00	(307.640.606,00)	93,92	%
BELANJA LANGSUNG	19.511.752.000,00	17.867.147.533,64	(1.644.604.466,36)	91,57	%
Program Administrasi Perkantoran	1.937.493.000,00	1.692.183.820,00	(245.309.180,00)	87,33	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	770.429.000,00	691.725.675,00	(78.703.325,00)	89,78	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Program Pencegahan dan	89.802.000,00	87.436.000,00	(2.366.000,00)	97,36	%
Kesiapsiagaan Bencana	1.544.905.000,00	1.522.344.001,00	(22.560.999,00)	98,53	%
Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana	4.282.062.000,00	5.263.425.363,00	981.363.363,00	122,92	%
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	10.883.086.000,00	8.606.057.674,64	(2.277.028.325,36)	79,18	%
Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	100,00	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
SOSIAL					
DINAS SOSIAL					
PENDAPATAN DINAS SOSIAL	532.200.000,00	532.200.000,00	0,00	100,00	%
Pendapatan Asli Daerah	532.200.000,00	532.200.000,00	0,00	100,00	%
Hasil Retribusi Daerah	532.200.000,00	532.200.000,00	0,00	100,00	%
BELANJA DINAS SOSIAL	68.446.611.129,11	62.312.687.145,00	(6.133.923.984,11)	91,03	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.988.955.422,00	20.792.506.269,00	(2.196.449.153,00)	90,44	%
Belanja Pegawai	22.988.955.422,00	20.792.506.269,00	(2.196.449.153,00)	90,44	%
BELANJA LANGSUNG	45.457.655.707,11	41.520.180.876,00	(3.937.474.831,11)	91,33	%
Program Administrasi Perkantoran	17.140.435.573,11	15.706.390.712,00	(1.434.044.861,11)	91,63	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.240.555.859,00	4.983.825.471,00	(256.730.388,00)	95,10	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	26.112.000,00	26.112.000,00	0,00	100,00	%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan	82.160.000,00	63.480.000,00	(18.680.000,00)	77,26	%
Program Rehabilitasi Sosial	4.610.432.995,00	4.323.336.716,00	(287.096.279,00)	93,77	%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.038.962.600,00	2.868.120.370,00	(170.842.230,00)	94,37	%
Program Penanganan Fakir Miskin	2.071.606.500,00	1.610.950.200,00	(460.656.300,00)	77,76	%
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	1.904.038.925,00	1.849.478.045,00	(54.560.880,00)	97,13	%
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial	1.054.814.000,00	1.034.313.325,00	(20.500.675,00)	98,05	%
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan Eks Psikotik	2.059.705.745,00	2.014.615.953,00	(45.089.792,00)	97,81	%
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial	1.258.850.000,00	1.138.201.550,00	(120.648.450,00)	90,41	%
Program Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	1.295.803.500,00	1.159.612.764,00	(136.190.736,00)	89,48	%



กลา พยาหญานะ การเขาผู้ๆ ยายาๆเพาะ การเกาะ

Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	991.233.650,00	975.752.000,00	(15.481.650,00)	98,43	%
Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan	2.258.844.360,00	1.683.146.500,00	(575.697.860,00)	74,51	%
Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	2.424.100.000,00	2.082.845.270,00	(341.254.730,00)	85,92	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
TENAGA KERJA					
DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN	SMIGRASI				
PENDAPATAN DISNAKERTRANS	1.284.756.000,00	1.793.755.000,00	508.999.000,00	139,61	%
Pendapatan Asli Daerah	1.284.756.000,00	1.793.755.000,00	508.999.000,00	139,61	%
Hasil Retribusi Daerah	1.284.756.000,00	1.778.155.000,00	493.399.000,00	138,40	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	-	%
BELANJA DISNAKERTRANS	23.835.181.547,00	22.120.340.823,00	(1.714.840.724,00)	92,80	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.213.409.577,00	12.621.851.123,00	(591.558.454,00)	95,52	%
Belanja Pegawai	13.213.409.577,00	12.621.851.123,00	(591.558.454,00)	95,52	%
BELANJA LANGSUNG	10.621.771.970,00	9.498.489.700,00	(1.123.282.270,00)	89,42	%
Program Administrasi Perkantoran	3.847.805.620,00	3.313.058.657,00	(534.746.963,00)	86,10	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.819.517.350,00	2.524.334.676,00	(295.182.674,00)	89,53	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	282.185.000,00	279.715.000,00	(2.470.000,00)	99,12	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	284.085.000,00	256.017.500,00	(28.067.500,00)	90,12	%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	114.268.000,00	93.821.200,00	(20.446.800,00)	82,10	%
Program Pembinaan Pelatihan Stadarisasi dan Pemagangan	208.880.500,00	208.426.500,00	(454.000,00)	99,78	%
Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	321.611.000,00	320.834.630,00	(776.370,00)	99,75	%
Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	335.833.000,00	317.017.000,00	(18.816.000,00)	94,39	%
Program Pengujian Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja	656.778.500,00	575.845.537,00	(80.932.963,00)	87,67	%
Program Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigrasi	1.750.808.000,0	1.609.419.000,00	(141.389.000,00)	91,92	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DA	N PERLINDUNGAN ANAK				
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPU PENDUDUK	JAN, PERLINDUNGAN ANAK	DAN PENGENDALIAN			
BELANJA DINAS P3AP2	7.717.460.323,00	7.199.857.614,00	(517.602.709,00)	93,29	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.862.851.683,00	2.712.519.691,00	(150.331.992,00)	94,74	%
Belanja Pegawai	2.862.851.683,00	2.712.519.691,00	(150.331.992,00)	94,74	%
BELANJA LANGSUNG	4.854.608.640,00	4.487.337.923,00	(367.270.717,00)	92,43	%
Program Administrasi Perkantoran	1.454.479.420,00	1.314.135.585,00	(140.343.835,00)	90,35	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	722.077.720,00	712.783.939,00	(9.293.781,00)	98,71	%
Frasarana Aparatur					



กลา ผลาหูเพลาเพลาเพ่นๆผพาดพากหาเก

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	123.414.000,00	114.889.000,00	(8.525.000,00)	93,09	%
Program Perlindungan Perempuan dan Anak	640.821.000,00	628.684.000,00	(12.137.000,00)	98,10	%
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	513.882.000,00	488.692.125,00	(25.189.875,00)	95,09	%
Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	230.538.500,00	221.895.274,00	(8.643.226,00)	96,25	%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	371.520.500,00	291.560.500,00	(79.960.000,00)	78,47	%
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	797.875.500,00	714.697.500,00	(83.178.000,00)	89,57	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
LINGKUNGAN HIDUP					
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN K	(EHUTANAN				
PENDAPATAN DLHK	16.733.114.125,00	16.617.768.388,71	(115.345.736,29)	99,31	%
Pendapatan Asli Daerah	16.733.114.125,00	16.617.768.388,71	(115.345.736,29)	99,31	%
Hasil Retribusi Daerah	16.323.353.000,00	16.208.007.263,71	(115.345.736,29)	99,29	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	409.761.125,00	409.761.125,00	0,00	-	%
BELANJA DLHK	48.030.733.178,00	44.389.681.878,00	(3.641.051.300,00)	92,41	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	23.261.645.769,00	21.962.577.363,00	(1.299.068.406,00)	94,41	%
Belanja Pegawai	23.261.645.769,00	21.962.577.363,00	(1.299.068.406,00)	94,41	%
BELANJA LANGSUNG	24.769.087.409,00	22.427.104.515,00	(2.341.982.894,00)	90,54	%
Program Administrasi Perkantoran	2.848.775.250,00	2.502.797.803,00	(345.977.447,00)	87,85	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.964.425.242,00	1.775.591.083,00	(188.834.159,00)	90,38	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	192.907.000,00	187.425.200,00	(5.481.800,00)	97,15	%
Program Pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup	322.201.500,00	307.816.500,00	(14.385.000,00)	95,53	%
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	288.536.900,00	235.841.900,00	(52.695.000,00)	81,73	%
Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	1.219.946.520,00	1.132.912.100,00	(87.034.420,00)	92,86	%
Program Pegelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	973.039.900,00	816.515.800,00	(156.524.100,00)	83,91	%
Program Pengelolaan Persampahan Regional	8.824.492.517,00	8.171.625.905,00	(652.866.612,00)	92,60	%
Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	279.156.000,00	273.779.200,00	(5.376.800,00)	98,07	%
Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	6.973.650.580,00	6.159.702.574,00	(813.948.006,00)	88,32	%
Program Pengelolaan Hutan Konservasi	263.364.500,00	260.546.500,00	(2.818.000,00)	98,93	%
Program Pengembangan Pembibitan Kehutanan	401.931.500,00	393.089.550,00	(8.841.950,00)	97,80	%
Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	182.000.000,00	175.140.400,00	(6.859.600,00)	96,23	%
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	34.660.000,00	34.320.000,00	(340.000,00)	99,01	%



กกา พยาหูรุเพลารุเพลาระทุนูฦยเบฤพนาฦหาเก

PERHUBUNGAN					
DINAS PERHUBUNGAN					
PENDAPATAN DINAS					c
PERHUBUNGAN	815.293.200,00	971.895.200,00	156.602.000,00	119,20	
Pendapatan Asli Daerah	815.293.200,00	971.895.200,00	156.602.000,00	119,20	
Hasil Retribusi Daerah	815.293.200,00	971.895.200,00	156.602.000,00	119,20	ļ.,
BELANJA DINAS PERHUBUNGAN	26.967.535.763,00	24.304.688.951,00	(2.662.846.812,00)	90,12	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.802.701.149,00	7.215.352.196,00	(587.348.953,00)	92,47	Ī
Belanja Pegawai	7.802.701.149,00	7.215.352.196,00	(587.348.953,00)	92,47	Ī
BELANJA LANGSUNG	19.164.834.614,00	17.089.336.755,00	(2.075.497.859,00)	89,17	ľ
Program Admnistrasi Perkantoran	4.751.376.000,00	4.185.885.129,00	(565.490.871,00)	88,09	Ī
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.414.931.916,00	1.370.469.416,00	(44.462.500,00)	96,85	Ť
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	460.401.000,00	443.867.500,00	(16.533.500,00)	96,40	
Program Pengembangan Keselamatan Transportasi	5.735.572.000,00	4.666.141.909,00	(1.069.430.091,00)	81,35	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.292.134.600,00	1.252.387.560,00	(39.747.040,00)	96,92	+
Program Pengembangan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.089.511.888,00	1.022.777.450,00	(66.734.438,00)	93,87	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran	1.099.548.000,00	902.529.189,00	(197.018.811,00)	82,08	-
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	3.321.359.210,00	3.245.278.602,00	(76.080.608,00)	97,70	
URUSAN KONKUREN WAJIB					<u> </u>
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATI	KA				1
PENDAPATAN DINAS KOMINFO	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	150,00	+
Pendapatan Asli Daerah	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	150,00	+
Hasil Retribusi Daerah	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	150,00	Ť
BELANJA DINAS KOMINFO	48.050.515.863,00	46.230.575.777,00	(1.819.940.086,00)	96,21	+
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.479.035.913,00	4.020.811.086,00	(458.224.827,00)	89,76	+
Belanja Pegawai	4.479.035.913,00	4.020.811.086,00	(458.224.827,00)	89,76	+
BELANJA LANGSUNG	43.571.479.950,00	42.209.764.691,00	(1.361.715.259,00)	96,87	+
Program Administrasi Perkantoran	1.158.919.000,00	996.291.108,00	(162.627.892,00)	85,96	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	358.677.000,00	303.982.693,00	(54.694.307,00)	84,75	+
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	73.211.000,00	66.797.000,00	(6.414.000,00)	91,23	-
Program Informasi dan Komunikasi Publik	810.756.000,00	783.926.000,00	(26.830.000,00)	96,69	1
Program Pengembangan Aplikasi Informatika dan Persandian Program Layanan Teknologi	1.345.205.000,00	1.162.776.467,00	(182.428.533,00)	86,43	
Informasi	917.997.000,00	895.180.300,00	(22.816.700,00)	97,51	



กลา พยาหญาพ๛ทางพลางเกมูกของกุพทางกา

Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	38.906.714.950,00	38.000.811.123,00	(905.903.827,00)	97,67	9,
URUSAN KONKUREN WAJIB					
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	. MENENGAH				
PENDAPATAN DINAS KOPERASI DAN UKM	4.500.000,00	598.049.473,00	593.549.473,00	13.289,98	9
Pendapatan Asli Daerah	4.500.000,00	598.049.473,00	593.549.473,00	13.289,98	9
Hasil Retribusi Daerah	4.500.000,00	4.700.000,00	200.000,00	104,44	(
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	593.349.473,00	593.349.473,00	-	(
BELANJA DINAS KOPERASI DAN UKM	23.212.159.028,00	21.036.500.408,00	(2.175.658.620,00)	90,63	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.415.093.450,00	3.280.481.297,00	(134.612.153,00)	96,05	İ
Belanja Pegawai	3.415.093.450,00	3.280.481.297,00	(134.612.153,00)	96,05	-
BELANJA LANGSUNG	19.797.065.578,00	17.756.019.111,00	(2.041.046.467,00)	89,69	-
Program Administrasi Perkantoran	1.031.519.500,00	838.315.099,00	(193.204.401,00)	81,26	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.207.482.800,00	668.401.550,00	(539.081.250,00)	55,35	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	87.036.500,00	78.036.500,00	(9.000.000,00)	89,65	-
Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru	1.212.823.500,00	1.175.907.500,00	(36.916.000,00)	96,95	
Program Pengembangan Perkoperasian	1.752.761.000,00	1.693.913.059,00	(58.847.941,00)	96,64	
Program Pengembangan UKM	10.372.657.028,00	9.410.739.403,00	(961.917.625,00)	90,73	
Program Peningkatan Akses Pembiayaan	50.820.000,00	48.480.000,00	(2.340.000,00)	95,39	
Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	275.000.000,00	272.120.000,00	(2.880.000,00)	98,95	
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	3.806.965.250,00	3.570.106.000,00	(236.859.250,00)	93,77	ļ
JRUSAN KONKUREN WAJIB					+
PENANAMAN MODAL					
DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN	MODAL				
PENDAPATAN DPPM	394.720.000,00	512.415.000,00	117.695.000,00	129,81	
Pendapatan Asli Daerah	394.720.000,00	512.415.000,00	117.695.000,00	129,81	Ť
Hasil Retribusi Daerah	392.320.000,00	510.015.000,00	117.695.000,00	129,99	Ť
ain-lain Pendapatan Asli Daerah ⁄ang Sah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	-
BELANJA DPPM	5.992.188.224,00	5.601.799.349,00	(390.388.875,00)	93,48	Ī
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.579.953.675,00	3.467.661.348,00	(112.292.327,00)	96,86	T
Belanja Pegawai	3.579.953.675,00	3.467.661.348,00	(112.292.327,00)	96,86	Ť
BELANJA LANGSUNG	2.412.234.549,00	2.134.138.001,00	(278.096.548,00)	88,47	Ī
Program Administrasi Perkantoran	1.395.053.880,00	1.051.492.719,00	(266.841.780,00)	79,75	+
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	480.283.300,00	473.013.532,00	(7.269.768,00)	98,48	†···
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	68.951.500,00	68.951.500,00	0,00	100,00	
Program Promosi Investasi	112.114.750,00	110.799.750,00	(1.315.000,00)	98,82	T



กลายเลารณะกรณ์ที่ผู้ปลากปการแก้ง

Program Peningkatan Iklim Investasi	22.520.000,00	22.520.000,00	0,00	100,00	%
Program Pelayanan Perijinan	279.878.000,00	279.068.000,00	(810.000,00)	99,71	%
Program Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Pengaduan	130.152.500,00	128.292.500,00	(1.860.000,00)	98,57	%
URUSAN KONKUREN WAJIB					
KEBUDAYAAN					
DINAS KEBUDAYAAN					
PENDAPATAN DINAS KEBUDAYAAN	366.410.000,00	413.104.500,00	46.694.500,00	112,74	%
Pendapatan Asli Daerah	366.410.000,00	413.104.500,00	46.694.500,00	112,74	9
Hasil Retribusi Daerah	366.410.000,00	413.104.500,00	46.694.500,00	112,74	
BELANJA DINAS KEBUDAYAAN	314.966.111.077,00	296.976.785.408,00	(17.989.325.669,00)	94,28	ç
BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.281.763.769,00	11.905.878.556,00	(375.885.213,00)	96,93	9
Belanja Pegawai	12.281.763.769,00	11.905.878.556,00	(375.885.213,00)	96,93	9
BELANJA LANGSUNG	302.684.347.308,00	285.070.906.852,00	(17.613.440.456,00)	94,18	9
Program Administrasi Perkantoran	6.695.551.100,00	5.445.628.648,00	(1.249.922.452,00)	81,33	9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	599.733.100,00	520.510.096,00	(79.223.004,00)	88,08	9
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	52.795.500,00	48.430.000,00	(4.365.500,00)	91,73	9
Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	41.087.112.920,00	36.193.421.112,00	(4.893.691.808,00)	90,66	q
Program Penguatan Museum Sonobudoyo	12.468.457.066,00	11.568.102.454,00	(900.354.612,00)	92,77	Ç
Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	184.024.201.850,00	183.161.315.760,00	(862.886.090,00)	99,53	(
Program Pengelolaan Taman Budaya	6.053.305.600,00	5.821.612.940,00	(231.692.660,00)	96,17	(
Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	5.653.688.000,00	5.047.919.345,00	(605.768.655,00)	89,28	
Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	2.772.669.522,00	1.992.745.467,00	(779.924.055,00)	71,87	
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	43.276.832.650,00	35.271.221.030,00	(8.005.611.620,00)	81,50	(
URUSAN KONKUREN WAJIB					
PERPUSTAKAAN					
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP					
PENDAPATAN DPAD	123.000.000,00	152.914.300,00	29.914.300,00	124,32	ļ
Pendapatan Asli Daerah	123.000.000,00	152.914.300,00	29.914.300,00	124,32	-
Hasil Retribusi Daerah	123.000.000,00	152.794.300,00	29.794.300,00	124,22	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	120.000,00	120.000,00	-	
BELANJA DPAD	22.202.840.172,00	21.156.889.048,00	(1.045.951.124,00)	95,29	ļ
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.656.323.083,00	7.205.540.961,00	(450.782.122,00)	94,11	
Belanja pegawai	7.656.323.083,00	7.205.540.961,00	(450.782.122,00)	94,11	
BELANJA LANGSUNG	14.546.517.089,00	13.951.348.087,00	(595.169.002,00)	95,91	
Program Administrasi Perkantoran	5.419.484.103,00	5.117.796.641,00	(301.687.462,00)	94,43	



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.241.106.600,00	1.237.516.600,00	(3.590.000,00)	99,71	%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.452.000,00	4.452.000,00	0,00	100,00	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	123.383.000,00	119.840.500,00	(3.542.500,00)	97,12	%
Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	1.254.728.000,00	1.197.050.400,00	(57.677.600,00)	95,40	%
Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi	602.919.722,00	565.094.700,00	(37.825.022,00)	93,72	%
Program Layanan Perpustakaan	2.070.795.764,00	2.029.817.226,00	(40.978.538,00)	98,02	%
Program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan	205.538.000,00	198.575.500,00	(6.962.500,00)	96,61	%
Program Pelestarian dan Layanan Arsip	362.291.900,00	357.326.600,00	(4.965.300,00)	98,63	%
Program Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	3.261.818.000,00	3.123.877.920,00	(137.940.080,00)	95,77	%
URUSAN KONKUREN PILIHAN					
KELAUTAN DAN PERIKANAN					
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	l .				
PENDAPATAN DISKANLA	822.700.000,00	836.388.400,00	13.688.400,00	101,66	%
Pendapatan Asli Daerah	822.700.000,00	836.388.400,00	13.688.400,00	101,66	%
Hasil Retrebusi Daerah	820.200.000,00	826.343.400,00	6.143.400,00	100,74	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.500.000,00	10.045.000,00	7.545.000,00	401,80	%
BELANJA DISKANLA	22.002.627.957,00	20.908.475.789,00	(1.094.152.168,00)	95,02	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.473.091.847,00	8.105.814.539,00	(367.277.308,00)	95,66	%
Belanja Pegawai	8.473.091.847,00	8.105.814.539,00	(367.277.308,00)	95,66	%
BELANJA LANGSUNG	13.529.536.110,00	12.802.661.250,00	(726.874.860,00)	94,62	%
Program Administrasi Perkantoran	3.714.919.060,00	3.447.989.280,00	(266.929.780,00)	92,81	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.249.005.000,00	1.247.080.300,00	(1.924.700,00)	99,84	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	97.737.000,00	97.722.000,00	(15.000,00)	99,39	%
Program Pengelolaan Pelabuhan	91.118.750,00	91.118.750,00	0,00	100,00	%
Program Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	421.563.350,00	402.854.850,00	(18.708.500,00)	95,56	%
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	407.147.520,00	255.245.000,00	(151.902.520,00)	62,69	%
Program Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1.799.393.800,00	1.608.590.300,00	(190.803.500,00)	89,39	%
Program Peningkatan Produksi			(42.177.500,00)	97,86	%
Perikanan Budidaya	1.973.043.120,00	1.930.865.620,00	(42.177.300,00)		
Perikanan Budidaya Program Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya	1.973.043.120,00	1.930.865.620,00	(608.660,00)	99,96	%
Program Pengembangan				99,96 96,98	
Program Pengembangan Perbenihan Perikanan Budidaya Program Pengembangan Kearifan	1.992.061.510,00	1.991.452.850,00	(608.660,00)		%



PENDAPATAN DINAS	04 050 000 00	F7 700 004 00	(0.500.000.00)	04.00	
PARIWISATA	61.250.000,00	57.720.994,00	(3.529.006,00)	94,23	9
Pendapatan Asli Daerah	61.250.000,00	57.720.994,00	(3.529.006,00)	94,23	9
Hasil Retribusi Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	9
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	35.250.000,00	31.720.994,00	(3.529.006,00)	89,98	9
BELANJA DINAS PARIWISATA	22.270.777.488,00	16.562.042.923,00	(5.708.734.565,00)	74,36	(
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.549.509.238,00	4.319.794.093,00	(229.715.145,00)	94,95	(
Belanja Pegawai	4.549.509.238,00	4.319.794.093,00	(229.715.145,00)	94,95	
BELANJA LANGSUNG	17.721.268.250,00	12.242.248.830,00	(5.479.019.420,00)	69,08	ļ
Program Administrasi Perkantoran	1.312.379.000,00	819.507.170,00	(492.871.830,00)	62,44	ļ
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	507.714.000,00	462.190.420,00	(45.523.580,00)	91,03	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	278.905.500,00	258.715.000,00	(20.190.500,00)	92,76	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.989.000.000,00	1.008.594.500,00	(980.405.500,00)	50,70	
Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata	362.387.250,00	212.562.000,00	(149.825.250,00)	58,65	
Program Pengembangan Industri Pariwisata	281.545.000,00	240.463.000,00	(41.082.000,00)	85,40	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	6.061.512.000,00	4.199.137.550,00	(1.862.374.450,00)	69,27	-
Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	5.146.873.000,00	3.398.551.690,00	(1.748.321.310,00)	66,03	Ļ
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	1.780.952.500,00	1.642.527.500,00	(138.425.000,00)	92,22	<u></u>
URUSAN KONKUREN PILIHAN					ļ
PERTANIAN					L
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN	I PANGAN				ļ
PENDAPATAN DPKP	1.588.214.180,00	2.218.645.420,00	630.431.240,00	139,69	L
Pendapatan Asli Daerah	1.588.214.180,00	2.218.645.420,00	630.431.240,00	139,69	
Hasil Retribusi Daerah	1.483.463.180,00	2.093.646.820,00	610.183.640,00	141,13	· · · ·
_ain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	104.751.000,00	124.998.600,00	20.247.600,00	119,32	
BELANJA	44.304.152.668,23	42.084.829.468,00	(2.219.323.200,23)	94,99	T
BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.221.749.995,00	24.219.196.338,00	(1.002.553.657,00)	96,02	t
Belanja Pegawai	25.221.749.995,00	24.219.196.338,00	(1.002.553.657,00)	96,02	T
BELANJA LANGSUNG	19.082.402.673,23	17.865.633.130,00	(1.216.769.543,23)	93,62	İ
Program Administrasi Perkantoran	4.202.082.803,22	3.413.910.209,00	(788.172.594,22)	81,24	T
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.863.727.259,77	2.779.836.200,00	(83.891.059,77)	97,07	†
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	15.200.000,00	15.133.000,00	(67.000,00)	99,55	+
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	64.704.000,00	64.570.250,00	(133.750,00)	99,79	
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan	129.266.480,00	125.996.480,00	(3.270.000,00)	97,47	
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3.052.579.775,24	2.859.627.293,00	(192.952.482,24)	93,67	



กก พยาหูขนะทางพะทางตุมูกุยเบกุพทาฦหาเต

				T
182.234.580,00	182.054.450,00	(180.130,00)	99,90	%
582.397.000,00	575.723.500,00	(6.673.500,00)	98,85	%
3.418.724.000,00	3.406.512.000,00	(12.212.000,00)	99,64	%
244.731.000,00	244.353.500,00	(377.500,00)	99,84	%
256.210.250,00	249.938.750,00	(6.271.500,00)	97,55	
1.532.137.925,00	1.475.547.148,00	(56.590.777,00)	96,30	%
19.858.800,00	18.955.250,00	(903.550,00)	95,45	%
1.057.962.500,00	1.016.403.750,00	(41.558.750,00)	96,07	%
101.693.500,00	91.966.000,00	(9.727.500,00)	90,43	%
1.358.892.800,00	1.345.105.350,00	(13.787.450,00)	98,98	%
DAGANGAN				
182.200.000,00	219.787.165,00	37.587.165,00	120,62	%
182.200.000,00	219.787.165,00	37.587.165,00	120,62	%
182.200.000,00	219.787.165,00	37.587.165,00	120,62	%
18.297.649.150,00	16.787.984.617,00	(1.509.664.533,00)	91,74	%
				}
8.390.580.120,00	7.815.281.669,00	(575.298.451,00)	93,14	%
8.390.580.120,00 8.390.580.120,00	7.815.281.669,00 7.815.281.669,00	(575.298.451,00) (575.298.451,00)	93,14 93,14	% %
,	,			
8.390.580.120,00	7.815.281.669,00	(575.298.451,00)	93,14	%
8.390.580.120,00 9.907.069.030,00	7.815.281.669,00 8.972.702.948,00	(575.298.451,00) (934.366.082,00)	93,14 90,56	% %
8.390.580.120,00 9.907.069.030,00 1.883.027.250,00	7.815.281.669,00 8.972.702.948,00 1.677.572.513,00	(575.298.451,00) (934.366.082,00) (205.454.737,00)	93,14 90,56 89,08	% % %
8.390.580.120,00 9.907.069.030,00 1.883.027.250,00 521.504.750,00	7.815.281.669,00 8.972.702.948,00 1.677.572.513,00 515.092.450,00	(575.298.451,00) (934.366.082,00) (205.454.737,00) (6.412.300,00)	93,14 90,56 89,08 98,77	% % %
8.390.580.120,00 9.907.069.030,00 1.883.027.250,00 521.504.750,00 359.187.000,00	7.815.281.669,00 8.972.702.948,00 1.677.572.513,00 515.092.450,00 348.106.500,00	(575.298.451,00) (934.366.082,00) (205.454.737,00) (6.412.300,00) (11.080.500,00)	93,14 90,56 89,08 98,77 96,91	% % % %
8.390.580.120,00 9.907.069.030,00 1.883.027.250,00 521.504.750,00 359.187.000,00 273.151.500,00	7.815.281.669,00 8.972.702.948,00 1.677.572.513,00 515.092.450,00 348.106.500,00 271.495.500,00	(575.298.451,00) (934.366.082,00) (205.454.737,00) (6.412.300,00) (11.080.500,00) (1.656.000,00)	93,14 90,56 89,08 98,77 96,91 99,39	% % % %
8.390.580.120,00 9.907.069.030,00 1.883.027.250,00 521.504.750,00 359.187.000,00 273.151.500,00 157.893.000,00	7.815.281.669,00 8.972.702.948,00 1.677.572.513,00 515.092.450,00 348.106.500,00 271.495.500,00 157.863.000,00	(575.298.451,00) (934.366.082,00) (205.454.737,00) (6.412.300,00) (11.080.500,00) (1.656.000,00) (30.000,00)	93,14 90,56 89,08 98,77 96,91 99,39 99,98	% % % % % %
8.390.580.120,00 9.907.069.030,00 1.883.027.250,00 521.504.750,00 359.187.000,00 273.151.500,00 157.893.000,00 415.145.500,00	7.815.281.669,00 8.972.702.948,00 1.677.572.513,00 515.092.450,00 348.106.500,00 271.495.500,00 157.863.000,00 390.773.500,00	(575.298.451,00) (934.366.082,00) (205.454.737,00) (6.412.300,00) (11.080.500,00) (1.656.000,00) (30.000,00) (24.372.000,00)	93,14 90,56 89,08 98,77 96,91 99,39 99,98 94,12	% % % % % % %
8.390.580.120,00 9.907.069.030,00 1.883.027.250,00 521.504.750,00 359.187.000,00 273.151.500,00 157.893.000,00 415.145.500,00 291.601.280,00	7.815.281.669,00 8.972.702.948,00 1.677.572.513,00 515.092.450,00 348.106.500,00 271.495.500,00 157.863.000,00 390.773.500,00 281.668.381,00	(575.298.451,00) (934.366.082,00) (205.454.737,00) (6.412.300,00) (11.080.500,00) (1.656.000,00) (30.000,00) (24.372.000,00) (9.932.899,00)	93,14 90,56 89,08 98,77 96,91 99,39 99,98 94,12 96,59	% % % % % % % % %
8.390.580.120,00 9.907.069.030,00 1.883.027.250,00 521.504.750,00 359.187.000,00 273.151.500,00 157.893.000,00 415.145.500,00 291.601.280,00 1.572.463.250,00	7.815.281.669,00 8.972.702.948,00 1.677.572.513,00 515.092.450,00 348.106.500,00 271.495.500,00 157.863.000,00 390.773.500,00 281.668.381,00 1.304.731.850,00	(575.298.451,00) (934.366.082,00) (205.454.737,00) (6.412.300,00) (11.080.500,00) (1.656.000,00) (30.000,00) (24.372.000,00) (9.932.899,00) (267.731.400,00)	93,14 90,56 89,08 98,77 96,91 99,39 99,98 94,12 96,59 82,97	% % % % % % % % %
8.390.580.120,00 9.907.069.030,00 1.883.027.250,00 521.504.750,00 359.187.000,00 273.151.500,00 157.893.000,00 415.145.500,00 291.601.280,00 1.572.463.250,00 356.469.000,00 4.076.626.500,00	7.815.281.669,00 8.972.702.948,00 1.677.572.513,00 515.092.450,00 348.106.500,00 271.495.500,00 157.863.000,00 390.773.500,00 281.668.381,00 1.304.731.850,00 329.334.904,00 3.696.064.350,00	(575.298.451,00) (934.366.082,00) (205.454.737,00) (6.412.300,00) (11.080.500,00) (1.656.000,00) (30.000,00) (24.372.000,00) (9.932.899,00) (267.731.400,00) (27.134.096,00)	93,14 90,56 89,08 98,77 96,91 99,39 99,98 94,12 96,59 82,97 92,38	% % % % % % % % % % % % %
8.390.580.120,00 9.907.069.030,00 1.883.027.250,00 521.504.750,00 359.187.000,00 273.151.500,00 157.893.000,00 415.145.500,00 291.601.280,00 1.572.463.250,00 356.469.000,00 4.076.626.500,00	7.815.281.669,00 8.972.702.948,00 1.677.572.513,00 515.092.450,00 348.106.500,00 271.495.500,00 157.863.000,00 390.773.500,00 281.668.381,00 1.304.731.850,00 329.334.904,00 3.696.064.350,00	(575.298.451,00) (934.366.082,00) (205.454.737,00) (6.412.300,00) (11.080.500,00) (1.656.000,00) (30.000,00) (24.372.000,00) (9.932.899,00) (267.731.400,00) (27.134.096,00)	93,14 90,56 89,08 98,77 96,91 99,39 99,98 94,12 96,59 82,97 92,38	% % % % % % % % % % % % % % %
8.390.580.120,00 9.907.069.030,00 1.883.027.250,00 521.504.750,00 359.187.000,00 273.151.500,00 157.893.000,00 415.145.500,00 291.601.280,00 1.572.463.250,00 356.469.000,00 4.076.626.500,00	7.815.281.669,00 8.972.702.948,00 1.677.572.513,00 515.092.450,00 348.106.500,00 271.495.500,00 157.863.000,00 390.773.500,00 281.668.381,00 1.304.731.850,00 329.334.904,00 3.696.064.350,00	(575.298.451,00) (934.366.082,00) (205.454.737,00) (6.412.300,00) (11.080.500,00) (1.656.000,00) (30.000,00) (24.372.000,00) (9.932.899,00) (267.731.400,00) (27.134.096,00)	93,14 90,56 89,08 98,77 96,91 99,39 99,98 94,12 96,59 82,97 92,38	% % % % % % % % % % % % % % % %
	3.418.724.000,00 244.731.000,00 256.210.250,00 1.532.137.925,00 19.858.800,00 1.057.962.500,00 101.693.500,00 1.358.892.800,00 DAGANGAN 182.200.000,00 182.200.000,00	3.418.724.000,00 3.406.512.000,00 244.731.000,00 244.353.500,00 256.210.250,00 249.938.750,00 1.532.137.925,00 1.475.547.148,00 19.858.800,00 18.955.250,00 1.057.962.500,00 1.016.403.750,00 101.693.500,00 91.966.000,00 1.358.892.800,00 1.345.105.350,00 DAGANGAN 182.200.000,00 219.787.165,00 182.200.000,00 219.787.165,00	3.418.724.000,00 3.406.512.000,00 (12.212.000,00) 244.731.000,00 244.353.500,00 (377.500,00) 256.210.250,00 249.938.750,00 (6.271.500,00) 1.532.137.925,00 1.475.547.148,00 (56.590.777,00) 19.858.800,00 18.955.250,00 (903.550,00) 1.057.962.500,00 1.016.403.750,00 (41.558.750,00) 101.693.500,00 91.966.000,00 (9.727.500,00) 1.358.892.800,00 1.345.105.350,00 (13.787.450,00) DAGANGAN 182.200.000,00 219.787.165,00 37.587.165,00 182.200.000,00 219.787.165,00 37.587.165,00	3.418.724.000,00 3.406.512.000,00 (12.212.000,00) 99,64 244.731.000,00 244.353.500,00 (377.500,00) 99,84 256.210.250,00 249.938.750,00 (6.271.500,00) 97,55 1.532.137.925,00 1.475.547.148,00 (56.590.777,00) 96,30 19.858.800,00 18.955.250,00 (903.550,00) 95,45 1.057.962.500,00 1.016.403.750,00 (41.558.750,00) 96,07 101.693.500,00 91.966.000,00 (9.727.500,00) 90,43 1.358.892.800,00 1.345.105.350,00 (13.787.450,00) 98,98 DAGANGAN 182.200.000,00 219.787.165,00 37.587.165,00 120,62 182.200.000,00 219.787.165,00 37.587.165,00 120,62



กกา พยาหูรุเพลารุเพลาระทุนูฦยเบฤพนาฦหาเก

BELANJA GUBERNUR DAN WAGUB	2.801.609.507,00	2.783.613.656,00	(17.995.851,00)	99,35	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.801.609.507,00	2.783.613.656,00	(17.995.851,00)	99,35	%
Belanja Pegawai	2.801.609.507,00	2.783.613.656,00	(17.995.851,00)	99,35	%
SEKRETARIAT DAERAH					
PENDAPATAN	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	100,00	%
Pendapatan Asli Daerah	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	100,00	%
Hasil Retribusi Daerah	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	100,00	%
BELANJA SETDA	62.454.018.536,00	53.821.946.480,00	(8.632.072.056,00)	86,17	9
BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.541.994.643,00	25.052.853.729,00	(1.489.140.914,00)	94,38	9
Belanja Pegawai	26.541.994.643,00	25.052.853.729,00	(1.489.140.914,00)	94,38	9
BELANJA LANGSUNG	35.912.023.893,00	28.769.092.751,00	(7.142.931.142,00)	80,10	9
Program Administrasi Perkantoran	10.517.848.700,00	7.490.711.624,00	(3.027.137.076,00)	71,21	9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.776.383.500,00	7.544.653.666,00	(231.729.834,00)	97,02	9,
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	468.833.500,00	434.198.725,00	(34.634.775,00)	92,61	9
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	116.808.000,00	99.058.000,00	(17.750.000,00)	84,80	ç
Program Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	95.987.000,00	88.598.500,00	(7.388.500,00)	92,30	(
Program Dokumentasi Hukum	355.329.000,00	316.687.500,00	(38.641.500,00)	89,12	
Program Bantuan dan Layanan Hukum	2.266.893.000,00	2.187.398.178,00	(79.494.822,00)	96,49	¢
Program Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	100.448.500,00	80.503.000,00	(19.945.500,00)	80,14	(
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Standarisasi	589.241.500,00	524.524.750,00	(64.716.750,00)	89,01	
Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	451.561.000,00	373.503.950,00	(78.057.050,00)	82,71	
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	406.859.000,00	321.376.000,00	(85.483.000,00)	78,98	
Program Pembinaan Pemerintahan Jmum dan Penataan Wilayah	119.326.000,00	95.088.000,00	(24.238.000,00)	79,68	
Program Pelayanan Kerumahtanggaan	1.160.498.000,00	1.083.934.000,00	(76.564.000,00)	93,40	
Program Pelayanan Keprotokolan	1.209.984.500,00	774.219.500,00	(435.765.000,00)	63,98	ļ
Program Pengelolaan Hubungan Masyarakat	961.925.000,00	940.540.300,00	(21.384.700,00)	97,77	
Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	360.184.000,00	303.574.700,00	(56.609.300,00)	84,28	
Program Pengelolaan Kebijakan nfrastruktur Daerah	132.058.250,00	110.858.250,00	(21.200.000,00)	83,94	
Program Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Program Pengelolaan Kebijakan	49.830.000,00	48.030.000,00	(1.800.000,00)	96,38	
Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	73.164.000,00	66.814.000,00	(6.350.000,00)	91,32	
Program Pengelolaan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah	341.754.340,00	307.196.000,00	(34.558.340,00)	89,88	
Program Pengelolaan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan	90.347.000,00	67.569.000,00	(22.778.000,00)	74,78	



กลายเกาะสารเกาะสารแก้มๆเกาะสารเ

					*
Program Perumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	83.242.500,00	81.370.000,00	(1.872.500,00)	97,75	%
Program Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumberdaya Daerah Perekonomian	37.105.000,00	37.105.000,00	0,00	100,00	%
Program Perumusan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Masyarakat	70.294.000,00	69.789.000,00	(505.000,00)	99,28	%
Program Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Pembinaan Sarana Keagamaan	3.118.221.900,00	909.575.500,00	(2.208.646.400,00)	29,16	%
Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	176.716.500,00	139.619.700,00	(37.096.800,00)	79,00	%
Program Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Sumber Daya Manusia	276.081.500,00	245.075.100,00	(31.006.400,00)	88,76	%
Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	964.981.000,00	802.421.358,00	(162.559.642,00)	83,15	%
Program Pengelolaan Rekayasa Sosial Masyarakat	137.592.500,00	136.372.000,00	(1.220.500,00)	99,11	%
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.363.149.250,00	1.114.977.120,00	(248.172.130,00)	81,79	%
Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	351.457.500,00	322.653.480,00	(28.804.020,00)	91,80	%
Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	224.676.000,00	213.216.000,00	(11.460.000,00)	94,89	%
Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	264.197.500,00	243.687.000,00	(20.510.500,00)	92,23	%
Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	383.313.000,00	359.413.057,00	(23.899.943,00)	93,76	%
Program Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Kasultanan dan Kadipaten	75.942.500,00	75.942.500,00	0,00	100,00	%
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Kasultanan dan Kadipaten	441.839.953,00	440.110.793,00	(1.729.160,00)	99,60	%
BADAN PENGHUBUNG DAERAH					
PENDAPATAN BAHUBDA	156.120.000,00	187.475.000,00	31.355.000,00	120,08	%
Pendapatan Asli Daerah	156.120.000,00	187.475.000,00	31.355.000,00	120,08	%
Hasil Retribusi Daerah	156.120.000,00	187.475.000,00	31.355.000,00	120,08	%
BELANJA	4.687.741.856,00	4.484.543.051,00	(203.198.805,00)	95,66	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.615.081.856,00	2.614.320.979,00	(760.877,00)	99,97	%
Belanja Pegawai	2.615.081.856,00	2.614.320.979,00	(760.877,00)	99,97	%
BELANJA LANGSUNG	2.072.660.000,00	1.870.222.072,00	(202.437.928,00)	90,23	%
Program Administrasi Perkantoran	921.275.000,00	788.668.958,00	(132.606.042,00)	85,60	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78.677.000,00	64.652.226,00	(14.024.774,00)	82,17	%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	17.495.000,00	13.565.000,00	(3.930.000,00)	77,53	%
Program Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah	122.171.000,00	114.218.000,00	(7.953.000,00)	93,49	%
Program Peningkatan Kualitas Layanan Promosi Potensi dan Seni Budaya	75.347.000,00	56.045.000,00	(19.302.000,00)	74,38	%
	l			L	i



กลา พยาหญาพ๛ทางพลางเกมูกของกุพทางกา

Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	857.695.000,00	833.072.888,00	(24.622.112,00)	97,12	ģ
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE	RAH				
BELANJA DPRD	40.195.138.200,00	38.852.849.274,00	(1.342.288.926,00)	96,66	c
BELANJA TIDAK LANGSUNG	40.195.138.200,00	38.852.849.274,00	(1.342.288.926,00)	96,66	(
Belanja Pegawai	40.195.138.200,00	38.852.849.274,00	(1.342.288.926,00)	96,66	¢
SEKRETARIAT DPRD					
BELANJA SEKRETARIAT DPRD	73.062.817.844,00	55.650.672.651,00	(17.412.145.193,00)	76,16	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.621.721.733,00	5.221.659.813,00	(400.061.920,00)	92,88	T
Belanja Pegawai	5.621.721.733,00	5.221.659.813,00	(400.061.920,00)	92,88	
BELANJA LANGSUNG	67.441.096.111,00	50.429.012.838,00	(17.012.083.273,00)	74,77	1
Program Administrasi Perkantoran	8.213.865.000,00	5.838.128.686,00	(2.375.736.314,00)	71,07	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.796.388.000,00	3.456.270.873,00	(340.117.127,00)	91,04	Ī
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	75.770.000,00	75.377.500,00	(392.500,00)	99,48	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	157.383.000,00	156.514.000,00	(869.000,00)	99,44	
Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	30.053.668.111,00	20.661.163.726,00	(9.392.504.385,00)	68,74	
Program Pengembangan Regulasi Daerah	9.254.377.000,00	7.600.302.290,00	(1.654.074.710,00)	82,12	1
Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokolan	15.889.645.000,00	12.641.255.763,00	(3.248.389.237,00)	79,55	
INSPEKTORAT					
BELANJA INSPEKTORAT	14.522.464.795,00	13.899.300.234,00	(623.164.561,00)	95,70	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.152.304.795,00	6.033.765.426,00	(118.539.369,00)	98,07	
Belanja Pegawai	6.152.304.795,00	6.033.765.426,00	(118.539.369,00)	98,07	
BELANJA LANGSUNG	8.370.160.000,00	7.865.534.808,00	(504.625.192,00)	93,97	
Program Administrasi Perkantoran	968.962.000,00	842.753.611,00	(126.208.389,00)	86,97	Ī
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.539.594.000,00	1.448.341.822,00	(91.252.178,00)	94,07	Ī
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	140.072.000,00	42.364.000,00	(97.708.000,00)	30,24	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	85.484.000,00	83.938.000,00	(1.546.000,00)	98,19	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan	5.636.048.000,00	5.448.137.375,00	(187.910.625,00)	96,66	
PANIRADYA KAISTIMEWAN					
BELANJA PANIRADYA KAISTIMEWAN	11.301.857.737,0	10.488.626.016,00	(813.231.721,00)	92,80	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.971.033.887,00	2.932.195.691,00	(38.838.196,00)	98,69	ľ
Belanja Pegawai	2.971.033.887,00	2.932.195.691,00	(38.838.196,00)	98,69	
BELANJA LANGSUNG	8.330.823.850,00	7.556.430.325,00	(774.393.525,00)	90,70	
Program Administrasi Perkantoran	297.468.000,00	239.235.150,00	(58.232.850,00)	80,42	Ť



กกา เกตาหางแลกางเท่ามูกตเบกเพาาหาเก

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	254.584.000,00	237.328.500,00	(17.255.500,00)	93,22	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	23.540.000,00	22.231.000,00	(1.309.000,00)	94,43	
Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	2.734.486.500,00	2.330.913.675,00	(403.572.825,00)	85,24	
Program Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	920.469.000,00	903.718.200,00	(16.750.800,00)	98,18	
Program Sarana dan Prasarana Keistimewaan	1.336.649.200,00	1.208.757.000,00	(127.892.200,00)	90,43	
Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	157.223.000,00	139.202.300,00	(18.020.700,00)	88,53	
Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	251.732.000,00	223.805.900,00	(27.926.100,00)	88,90	
Program Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	335.751.250,00	297.280.600,00	(38.470.650,00)	88,54	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	2.018.920.900,00	1.953.958.000,00	(64.962.900,00)	96,78	1
PERENCANAAN PEMBANGUNAN					-
BADAN PERENCANAAN PEMBANG	UNAN DAERAH				
BELANJA	15.865.276.197,00	14.217.000.389,00	(1.648.275.808,00)	89,61	ľ
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.620.778.027,00	7.378.586.333,00	(242.191.694,00)	96,82	Ť
Belanja Pegawai	7.620.778.027,00	7.378.586.333,00	(242.191.694,00)	96,82	Ť
BELANJA LANGSUNG	8.244.498.170,00	6.838.414.056,00	(1.406.084.114,00)	82,94	
Program Administrasi Perkantoran	1.859.778.370,00	1.020.992.067,00	(838.786.303,00)	54,89	T
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	904.752.000,00	811.702.139,00	(93.049.861,00)	89,71	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	285.361.000,00	265.178.000,00	(20.183.000,00)	92,92	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.778.058.000,00	1.578.759.750,00	(199.298.250,00)	88,79	
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	151.087.000,00	144.957.000,00	(6.130.000,00)	95,94	+
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	452.003.000,00	416.873.000,00	(35.130.000,00)	92,22	-
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	78.133.000,00	77.995.950,00	(137.050,00)	99,82	+
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	207.458.000,00	202.961.500,00	(4.496.500,00)	97,83	Ī
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	1.539.534.500,00	1.355.435.500,00	(184.099.000,00)	88,04	
Program Pengembangan Statistik Daerah	881.292.500,00	872.497.800,00	(8.794.700,00)	99,00	1
Program Penelitian dan Pengembangan	107.040.800,00	91.061.350,00	(15.979.450,00)	85,07	1
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERA	.H				
BADAN PENGELOLA KEUANGAN D	OAN ASET				
PENDAPATAN BPKA	1.731.318.063.980,54	1.800.739.024.337,00	69.420.960.356,46	104,00	
Pendapatan Asli Daerah	1.731.318.063.980,54	1.800.739.024.337,00	69.420.960.356,46	104,00	



กลา พยาหญาพ๛ทางพลางเกมูกของกุพทางกา

Hasil Retribusi Daerah	698.044.875,00	736.782.032,00	38.737.157,00	105,54	Ç
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	101.460.382.142,49	101.460.382.151,46	8,97	100,00	ç
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	32.279.769.970,05	51.982.661.290,54	19.702.891.320,49	161,03	(
BELANJA BPKA	221.476.886.478,00	210.870.555.950,39	(10.606.330.527,61)	95,21	,
BELANJA TIDAK LANGSUNG	114.693.234.328,00	106.436.629.629,39	(8.256.604.698,61)	92,80	
Belanja Pegawai	114.693.234.328,00	106.436.629.629,39	(8.256.604.698,61)	92,80	
BELANJA LANGSUNG	106.783.652.150,00	104.433.926.321,00	(2.349.725.829,00)	97,79	
Pogram Administrasi Perkantoran	10.321.487.840,00	9.578.649.105,00	(742.838.735,00)	92,80	ľ
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11.224.268.100,00	10.768.874.565,00	(455.393.535,00)	95,94	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	85.187.400,00	84.767.400,00	(420.000,00)	99,50	
Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	910.057.500,00	793.908.500,00	(116.149.000,00)	87,23	
Program Penatausahaan Keuangan Daerah	449.997.500,00	364.268.500,00	(85.729.000,00)	80,94	Ĩ
Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	798.106.000,00	764.844.000,00	(33.262.000,00)	95,83	
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	2.160.523.000,00	2.040.040.900,00	(120.482.100,00)	94,42	
Program Peningkatan Pendapatan KPPD	6.938.366.310,00	6.582.854.659,00	(355.511.651,00)	94,87	
Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	3.459.527.000,00	3.215.718.000,00	(243.809.000,00)	92,95	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.734.387.500,00	2.541.673.892,00	(192.713.608,00)	92,95	
Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah	122.944.000,00	122.944.000,00	0,00	100,00	
Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	67.578.800.000,00	67.575.382.800,00	(3.417.200,00)	99,99	Ţ
PPKD/BUD					
PENDAPATAN	3.758.192.073.728,39	3.733.661.811.232,00	(24.530.262.496,39)	99,34	1
Dana Perimbangan	2.395.248.332.317,00	2.371.292.926.821,00	(23.955.405.496,00)	98,99	1
_ain-Lain Pendapatan yang Sah	1.362.943.741.411,39	1.362.368.884.411,00	(574.857.000,39)	99,95	•
BELANJA	2.352.490.432.180,72	2.147.734.033.083,63	(204.756.399.097,09)	91,29	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.352.490.432.180,72	2.147.734.033.083,63	(204.756.399.097,09)	91,29	+
Belanja Subsidi	78.044.866.828,00	78.044.846.317,00	(20.511,00)	99,99	+
Belanja Hibah	751.144.104.600,00	676.721.135.000,00	(74.422.969.600,00)	90,09	+
Belanja Bantuan Sosial	2.492.000.000,00	1.492.000.000,00	(1.000.000.000,00)	59,87	+
Belanja Bagi Hasil kpd Prov /kab/kota/ dan Pemdes	693.891.920.604,00	693.891.920.604,00	0,00	100,00	***************************************
Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/kab/kota dan Pemdes	404.430.889.886,00	391.944.778.392,63	(12.486.111.493,37)	96,91	
	422.486.650.262,72	305.639.352.770,00	(116.847.297.492,72)	72,34	ĺ
	.==:::00::000:=0=;:=				ſ
Belanja Tak Terduga Pembiayaan Netto	307.479.919.295,42	0,00	307.479.919.295,42	-	ļ
Belanja Tak Terduga		0,00 0,00	307.479.919.295,42 425.069.919.295,42	-	



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					
PENDAPATAN	582.675.000,00	661.280.000,00	78.605.000,00	113,49	C
Pendapatan Asli Daerah	582.675.000,00	661.280.000,00	78.605.000,00	113,49	
Hasil Retribusi Daerah	582.675.000,00	661.280.000,00	78.605.000,00	113,49	
BELANJA	287.791.363.357,00	285.883.725.042,00	(1.907.638.315,00)	99,34	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	277.081.466.891,00	276.855.308.108,00	(226.158.783,00)	99,91	
Belanja Pegawai	277.081.466.891,00	276.855.308.108,00	(226.158.783,00)	99,91	
BELANJA LANGSUNG	10.709.896.466,00	9.028.416.934,00	(1.681.479.532,00)	84,30	
Program Administrasi Perkantoran	2.198.899.966,00	1.662.370.108,00	(536.529.858,00)	75,60	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.168.834.000,00	1.166.516.200,00	(2.317.800,00)	99,80	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Keuangan	56.750.000,00	56.693.000,00	(57.000,00)	99,89	
Program Perencanaan, Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data Kepegawaian	1.411.584.500,00	841.733.700,00	(569.850.800,00)	59,63	
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pengembangan Karir Pegawai	4.242.222.000,00	3.863.605.486,00	(378.616.514,00)	91,08	
Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai	143.433.000,00	119.260.100,00	(24.172.900,00)	83,14	
Program Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian Daerah	419.336.000,00	388.970.000,00	(30.366.000,00)	92,75	
Program Pengelolaan Pengukuran Kompetensi Pegawai	873.289.000,00	735.582.840,00	(137.706.160,00)	84,23	
Program Peningkatan Budaya Pemerintahan	195.548.000,00	193.685.500,00	(1.862.500,00)	99,04	
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHA					
PENDAPATAN BANDIKLAT	1.985.280.000,00	1.991.259.000,00	5.979.000,00	100,30	-
Pendapatan Asli Daerah	1.985.280.000,00	1.991.259.000,00	5.979.000,00	100,30	
Hasil Retribusi Daerah	1.985.280.000,00	1.986.759.000,00	1.479.000,00	100,07	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
BELANJA	11.349.194.417,00	9.467.309.873,00	(1.881.884.544,00)	83,41	Ī
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.844.987.063,00	4.594.350.198,00	(250.636.865,00)	94,82	Ī
Belanja Pegawai	4.844.987.063,00	4.594.350.198,00	(250.636.865,00)	94,82	
BELANJA LANGSUNG	6.504.207.354,00	4.872.959.675,00	(1.631.247.679,00)	74,92	ľ
Program Administrasi Perkantoran	2.237.582.654,00	1.668.959.250,00	(568.623.404,00)	74,58	1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.517.592.000,00	1.376.813.625,00	(140.778.375,00)	90,72	+
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	98.014.000,00	96.614.000,00	(1.400.000,00)	98,57	-
Program Pendidikan Penjenjangan	1.699.759.300,00	1.022.133.500,00	(677.625.800,00)	60,13	-
Program Pendidikan Teknis Fungsional	474.663.900,00	247.083.100,00	(227.580.800,00)	52,05	Т
Program Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Kediklatan	48.521.500,00	44.184.500,00	(4.337.000,00)	91,06	+
Program Peningkatan Standarisasi dan Penjaminan Mutu Program Peningkatan Budaya	228.074.000,00	222.591.700,00	(5.482.300,00)	97,59	-
	200.000.000,00	194.580.000,00	(5.420.000,00)	97,29	



การ พยาหางพลางเมาผู้ๆผบางพาฦหางท

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pelaporan Keuangan Tahun 2020 mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemda DIY yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat perubahan kebijakan akuntansi sebagai dampak diterbitkannya peraturan baru oleh Pemerintah maka dalam pelaksanaannya mengikuti aturan yang lebih tinggi sepanjang perubahan tersebut belum diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2015. Perubahan tersebut antara lain penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 serta penatausahaan dan pelaporan Pendapatan dan Belanja BOS yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020.

Terjadinya pandemi Covid-19 di Tahun 2020 merupakan kejadian luar biasa yang mempengaruhi secara signifikan terhadap penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemda DIY menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 427/KEP/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tak Terduga dan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dalam Rangka Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan. Adapun secara rinci kebijakan akuntansi Pemda DIY dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah DIY atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
- b. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.
- c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Daerah DIY terdapat 30 SKPD yang merupakan entitas akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
- Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan pada basis kas yaitu Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau entitas pemerintah daerah sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.



4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan diakui pada saat:
 - a) Diterima oleh BUD di rekening Kas Daerah
 - b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD
 - c) Diterima oleh entitas lain di luar Pemda DIY atas nama BUD.
 - d) Pengakuan Pendapatan Pengelolaan BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran mendasarkan pada SP2D Nihil yang telah disahkan oleh BUD atas realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD pada periode berjalan.
 - e) Pengakuan Pendapatan Transfer BOS dilakukan saat pengesahan SP2T (Surat Pengesahan Pendapatan Transfer) oleh BUD yang berasal dari Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - f) Pengakuan Pendapatan Hibah yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam penanganan pandemi Covid-19 dilakukan saat Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja disahkan oleh BUD.
 - 3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 4) Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Belania

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah atau Rekening BLUD atau Rekening BOS atau Rekening Sumbangan Masyarakat Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diakui pada saat:
 - a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk seluruh transaksi baik di SKPD maupun PPKD setelah dilakukan pengesahan secara definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi.
 - b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.
 - c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - d) Untuk pengeluaran belanja yang sumber dananya dari BOS maka pengakuan belanja dilakukan saat Surat Pengesahan Belanja BOS dan Surat Pengesahan Belanja Hibah disahkan oleh BUD.



^^^ พยาหูเพลาเพลาเพ่นๆผพากพทากเก

- e) Untuk pengeluaran belanja yang sumber dananya dari Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis, maka pengakuan belanja dilakukan saat Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja disahkan oleh BUD.
- 3) Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
- 4) Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

c. Transfer

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Transfer masuk diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- 3) Transfer Masuk diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan penerimaan kas di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah.
- 4) Transfer disajikan berdasarkan jenis Transfer masuk dan jenis Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Pembiayaan

- Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran
- 2) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak Ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 3) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain untuk pemberian pinjaman kepada Pihak Ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- 4) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah danPengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- 5) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
- 6) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



e. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 3) Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis Pendapatan-LO dalam Laporan Opersional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Beban

 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2) Beban diakui pada saat:

- a) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
- b) Terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- 3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
- 4) Beban disajikan berdasarkan jenis Beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas.

h. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan Laporan Arus Kas. Kas tersebut meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS.
- 2) Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah



menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

- 3) Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara /Rekening KasDaerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Daerah.
- 4) Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

i. Piutang

- 1) Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan olehpemerintah daerah.
- 2) Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang sah.
 - b) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas.
 - c) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- 3) Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang Pendapatan Daerah, Piutang Lainnya dan Biaya Dibayar Dimuka.
- 4) Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah dan Piutang Pendapatan Lainnya.
- 5) Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.
- 6) Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
- Pengukuran piutang sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggalpelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dengan SKPD/SKRD/SK Pembebanan/SKTJM/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersamakan atau disajikan sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan (Biaya Dibayar Dimuka).
- 8) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizablevalue).Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.



กกการและการเกล้าตอบปกกระบาย เกล้าหรือและการเกล้าตอบปกกระบาย

- Penyisihan piutangadalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilaipenyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapiditerapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangankualitas piutang.
- 10) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Pajak:

Lancar	a. Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau					
	b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau					
	c. Wajib pajak kooperatif, dan/atau					
	d. Wajib pajak likuid, dan/atau					
	e. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.					
Kurang Lancar	a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/atau					
	b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau					
	c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau					
	d. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.					
Diragukan	a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau					
	b. Wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau					
	c. Wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau					
	d. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.					
Macet	a. Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/atau					
	 b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau 					
	c. Wajib pajak diketahui keberadaannya, dan/atau					
	d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau					
	e. Wajib pajak mengalami musibah (force majeur).					

b) Kualitas Piutang Retribusi:

Lancar	a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, dan/atau					
	b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.					
Kurang Lancar	a. Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan atau					
	b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.					
Diragukan	a. Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan, dan atau					
	b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.					
Macet	a. Umur piutang lebih 12 bulan, dan atau					
	b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan					



กลานางพะกางเมื่อแลกแบบแบบแบบ

pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

c) Kualitas Piutang Lainnya:

Lancar	Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.			
Kurang Lancar	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.			
Diragukan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.			
Macet	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.			

d) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang			
1.	1. Lancar 0,5% (nol koma lima persen)				
2.	Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)			
3.	Diragukan	50% (lima puluh persen)			
4.	Macet	100% (seratus persen)			

e) Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

j. Persediaan

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan dicatat pada saat direalisasikan obyek belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Bahan Pakai Habis
 - b) Belanja Bahan/Material
 - c) Belanja Cetak dan Penggandaan
 - d) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
 - e) Belanja Pakaian Kerja
 - f) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
 - g) Belanja Barang Dana BOS
 - h) Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
 - i) Belanja Barang Dan Jasa BLUD
 - j) Belanja Hibah Barang/Jasa
 - k) Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa



^^ พยาหญาพ๛กางพลกางเพญายเบาเพาะการเก

Dalam Penyajian Persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, sehingga terdapat penyesuaian klasifikasi atas saldo awal persediaan.

- 1. Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dan dibuat Berita Acara Opname Persediaan. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan. Selisih persediaan yang disebabkan karena persediaan usang, daluwarsa atau rusak diperlakukan sebagai beban, sedangkan selisih persediaan yang disebabkan hilang dan kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang maka diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan yang sudah rusak dan daluwarsa dapat dimusnahkan dan selanjutnya dihapuskan dengan persetujuan Pengelola Barang.
- 2. Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset yaitu beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.
- 3. Persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode FIFO (*First In First Out*).
- 4. Persediaan diukur sebagai berikut:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - d) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara dikembangbiakkan
 - e) Harga Jual yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tentang penetapan Tarif Harga Jual untuk produk/ hewan/ tanaman yang dijual kepada masyarakat.
- 5. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.
- 6. Persediaan yang dititipkan pada pihak ketiga seperti Persediaan Untuk Tujuan Strategis yang meliputi Persediaan Cadangan Energi, Cadangan Pangan dan Cadangan Lainnya dinilai berdasarkan Berita Acara Penitipan Persediaan dan didukung dengan Berita Acara Opname Persediaan akhir periode pelaporan. perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terdapat selisih kurang antara Berita Acara Penitipan Persediaan dengan Berita Acara Opname Persediaan maka dicatat sebagai Piutang Lain-lain.

k. Investasi

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi diklasifikasikan menjadi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.
- 3) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memilikikarakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanyadigunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintahdaerah dapat



^^ พยาหญาพ๛กางพลกางเพญายเบาเพาะการเก

menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhanakan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

- 4) Investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannyamemiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan meliputi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.
- 5) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali antara lain meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan investasi non permanen lainnya.
- 6) Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangkapanjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutanatau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali antara lain Penyertaan Modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
- 8) Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan.
- 9) Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan Pihak BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal terkait. Tata cara dan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 10) Pengukuran Investasi untuk beberapa jenis investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- 11) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metoda yaitu Metoda Biaya, Metoda Ekuitas dan Metoda nilai bersih yang direalisasikan.
 - a. Penilaian Investasi menggunakan metode biaya apabila kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20% dan investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
 - Denilaian investasi menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metoda ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah



^^ พยาหญาพ๛กางพลกางเพญายเบาเพาะการเก

dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c. Penilaian investasi dengan metode nilai bersih yang direalisasikan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat nonpermanen. Metoda nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 12) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu harga perolehan dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
- 13) Mekanisme Pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dikelola sendiri/langsung, *executing agency* dan *chanelling agency* dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Dana bergulir dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui SKPD Teknis yang ditunjuk mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir.
 - b. Dana bergulir dengan executing agency adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.
 - c. Dana bergulir dengan chanelling agency adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.
- 14) Kualitas dana bergulir adalah perkiraan atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.
- 15) Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Keterangan			
Lancar	a. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, dan/atau			
	b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau			
	c. Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau			
	d. Penerima dana bergulir kooperatif.			
Kurang Lancar	a. Umur dana bergulir 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan/atau			
	b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat			
	Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau			
	c. Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau			
	d. Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.			



การและ การเกาะ การและ การแ

Kualitas Piutang	Keterangan					
Diragukan	a. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau					
	b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat					
	Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau					
	c. Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau					
	d. Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.					
Macet	a. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun, dan/atau					
	b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat					
	Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau					
	c. Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya, dan/atau					
	d. Penerima dana bergulir mengalami kesulitan, bangkrut dan/atau meninggal dunia,					
	dan/atau					
	e. Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeur).					

16) Dana Bergulir Diragukan Tertagih ditetapkan sesuai dengan kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:

Kualitas Dana Bergulir	Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih		
Lancar	0,5% (nol koma lima persen)		
Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)		
Diragukan	50% (lima puluh persen)		
Macet	100% (seratus persen)		

- 17) Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan.
- 18) Penilaian investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode pelaporan.
- 19) Pengakuan hasil investasi ditentukan sebagai berikut:
 - a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
 - b) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metoda biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh rekening Kas Daerah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam Laporan Operasional.
 - c) Untuk investasi yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas maka pengakuan Pendapatan/Rugi Investasi dicatat sebagai berikut:
 - Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian laba/rugi pemerintah daerah sesuai dengan prosentase kepemilikan (berdasarkan Laporan



Keuangan BUMD Tahun Berjalan) yang menambah/mengurangi nilai Investasi di sisi debit dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di sisi kredit.

- Pada saat bagian laba dibayarkan kepada Pemerintah Daerah tahun berikutnya maka dicatat sebesar kas yang diterima di sisi debit dan mengurangi investasi di sisi kredit.
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dicatat sebesar realisasi kas yang diterima oleh rekening kas daerah.
- 20) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
- 21) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar,sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

l. Aset Tetap

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/ nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.
- 3) Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 5) Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:
 - a) Berwujud.
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPD.
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh SKPD.
 - f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
 - g) Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasiaset tetap yang telah ditetapkan yaitu:

Jenis Aset Tetap	Batas Minimal Kapitalisasi
Tanah	Tidak ada
Peralatan dan Mesin	Rp500.000,00 / unit
Gedung dan Bangunan	Rp10.000.000,00 / unit
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tidak ada
Aset Tetap Lainnya	Tidak ada



การและ การเกาะ
- 6) Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomtabel.
- 7) Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tersebut, maka tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - a) Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukkannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat maka aset tetap tersebut dicatat sebagai persediaan sampai dengan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.
 - b) Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan (DED) dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila Belanja Modal tersebut telah dianggarkan keseluruhan aktivitas yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, konstruksi dan penunjang namun sampai dengan akhir tahun anggaran baru terealisasi dokumen perencanaannya saja.
- 8) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 9) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 10) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 11) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a) Biaya persiapan tempat.
- b) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.
- c) Biaya pemasangan.
- d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
- e) Biaya konstruksi.
- 12) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- 13) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 14) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah
- 15) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.



^^ พยาหญาพ๛กางพลกางเพญายเบาเพาะการเก

- 16) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method).
- 17) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 18) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri.
- 19) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 20) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- 21) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.
- 22) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeologicalsites) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
 - a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

m. Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
- 2) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika memenuhi kriteria:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.



การ การการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและกา

- 3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 5) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - c) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah namunBerita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset, dalam hal ini Pengguna Anggaran membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f) Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, maka diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - g) Apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan seperti biaya perencanaan maka biaya tersebut harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan aset yang bersangkutan.
 - h) Apabila dalam konstruksi aset tetap, biaya penunjang untuk kegiatan pengadaan (lelang) sudah dilaksanakan, namun proses pengadaan (lelang) gagal maka biaya penunjang tersebut diakui sebagai beban tahun anggaran berjalan dan disajikan dalam Laporan Operasional.
 - i) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
 - j) Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi



การและ การเกาะ การและ การแ

Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dihapuskan dari neraca sesuai ketentuan yang berlaku dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

n. Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d) Sumber dana cadangan; dan
 - e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
- 4) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 5) Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal Dana Cadangan ditambah dengan pendapatan jasa giro rekening Dana Cadangan.

o. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai asset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- 3) Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara pemerintah daerah dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui saat pemerintah daerah menerima angsuran dari pegawai.
 - b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/dokumen yang dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar pengadilan). Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilakukan melalui jalur



- pengadilan, pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
- d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai diakui saat disetujuinya permohonan pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai dan diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan aset tetap menjadi Aset Lainnya-Pinjam Pakai.
- e) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
- f) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- h) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali.
- i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang setelah pengajuan Surat Permohonan Penghapusan Barang Daerah kepada Pembantu Pengelola Barang Daerah.
- 4) Pengukuran Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal darikontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).



- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Sewa diukur sebesar nilai perolehan dari aset yang disewakan.
- d) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan diukur sebesar nilai perolehan aset yang dikerjasamakan.
- e) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Pinjam Pakai diukur sebesar nilai perolehan aset yang dipinjampakaikan.
- f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
- g) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

p. Aset Tak Berwujud

- Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
- 2) Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaituATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).
- 3) ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life) adalah umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Umur manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB. ATB dengan umur manfaat terbatas tesebut meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten.
- 4) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) yaituATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. ATB yang dikategorikan memiliki umur manfaat tak terbatas meliputi software dan kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang.
- 5) Aset Tak Berwujud diklasifikasikan menjadi Goodwill, Lisensi dan frenchise, Hak Cipta, Paten, Aset Tidak Berwujud Lainnya antara lain meliputi sotware, DED dan lain-lain serta Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan.
- 6) Pengakuan ATB ditetapkan sebagai berikut:
 - a) ATB yang diperoleh secara internal yang tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.



การ พยาทินารพรารพรารตุนิทยเทศพารทุกาเก

- b) ATB yang diperoleh secara internal yang dapat dibedakan menjadi tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka:
 - Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
 - Pengeluaran-pengeluaran dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB diakui apabila memenuhi kriteria:
 - ➤ Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - > Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 - Manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang;
 - ➤ Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB tersebut;
 - ➤ Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
 - Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
 - Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
 - > Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
 - Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
 - > Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
- c) ATB yang dibiayai oleh instansi lain di luar pemerintah daerah maka ATB diakui sebagai aset pihak yang memberikan dana penelitian dan pengembangan.
- d) Software diakui sebagai ATB adalah software yang dibangun sendiri dengan cara dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- e) Software program yang dibeli tersendiri dan penggunaannya tidak terkait dengan hardw*are* tertentu harus dikapitalisasi sebagai ATB, namun apabila *software* yang dibeli tersebut merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
- f) Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya dan ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- g) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan diakui apabila sampai dengan tanggal pelaporan ATB belum selesai sebesar pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan



tersebut dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

7) Pengukuran Aset Tak Berwujud

- a) ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, maka harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitudengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajarmasing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- b) ATB yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
- c) ATB yang diperoleh dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.
- d) ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian hibah.
- e) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.
- f) ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
- 8) Secara umum sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilaiATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Sebagian besar pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensialyang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadapsuatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapatdiatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapatdikapitalisasi ke dalam nilai ATB



การ การการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและกา

dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* computerharus memenuhi salah satu kriteria yaitu meningkatkan fungsi *software* dan meningkatkan efisiensi *software*.

9) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasionalselama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dalam hal ini meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten) selama masa manfaat. Umur masa manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB yang bersangkutan. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas bernilai nihil.

b) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dalam hal ini goodwill, software dan hasil kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- 10) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus,Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.
- 11) ATB dapat mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



กกา พยากหูรุพ๛ารุพ๛ารุตุญทุพทฤพาฦหาเก

12) Penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saatdilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yangdiharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

g. Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yangpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan ketentuan:
 - A) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya.
- 3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus dipungut



การและ การเกาะ
potongan Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan pajak.

- b) Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
- c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yangakan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neracapada setiap akhir periode akuntansi.
- d) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
- e) Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- f) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.
- g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
- h) Utang Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
- i) Utang Dalam Negeri Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- j) Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman
- k) Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
- I) Utang Dalam Negeri Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
- m) Utang Jangka Panjang Lainnya seperti Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- 4) Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:
 - a) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.
 - b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
 - e) Utang Belanja diukur sebesar sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.



กา

- f) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD.
- g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- h) Utang Dalam Negeri Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- i) Utang Dalam Negeri Obligasi Daerah diukur sebesar nilai nominal/pari, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai pari (dengan diskon), maupun di atas nilai pari (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi.
- j) Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- k) Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- Utang Dalam Negeri Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- m) Utang Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk Utang Kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- 5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang pemerintah daerah. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus.
- 6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada



กกา พยาหญาพ๛กางพลางเพญกุษเบทพาพาทุนาเก

Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaiakan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
- b) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai buku maka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

r. Koreksi Kesalahan

- 1) Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Koreksi kesalahan meliputi koreksi atas kesalahan yang sifatnya tidak berulang dan koreksi kesalahan berulang.
- 2) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 3) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban
- 4) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya maka perlakuan akuntansi ditetapkan sebagai berikut:

a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

- Koreksi kesalahan yang menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain Lain-LRA dalam hal mengurangi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun asset yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan adanya pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.



^^ พยาหญาพ๛กางพลกางเพญายเบาเพาะการเก

- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah mauun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- 5) Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenisjenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya antara lain
 penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan
 restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak dan Piutang Pelayanan Kesehatan
 yang dijamin oleh program jaminan kesehatan seringkali penerimaan klaim berbeda dengan
 nilai piutang yang dicatat. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat
 pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan
 mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

s. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yan berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.



กลา พยาหญาพ๛ทางพลางเกมูกของกุพทางกา

t. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,atau perkembangan lain.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

u. Operasi Tidak Dilanjutkan

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

v. Laporan Keuangan Konsolidasian

- 1) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan Arus Kas disajikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 3) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 4) Konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas pelaporan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik (reciprocal accounts) antara lain akun Piutang dan Hutang antar entitas akuntansi serta RK PPKD dan RK SKPD. Namun



การ การเกาะ

- demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5) Konsolidasi di tingkat SKPD bagi SKPD yang mempunyai beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dilaksanakan oleh Unit Kerja (Induk) dengan cara cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi (KPA/KPB).
- 6) Konsolidasi untuk SKPD atau Unit Kerja yang ditetapkan sebagai BLUD dilakukan dengan cara mencara menggabungkan semua realisasi pendapatan dan belanja BLUD dengan belanja yang dibiayai dari rekening Kas Daerah (APBD). Konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja BLUD dilakukan berdasarkan SP2D Pengesahan/Nihil yang ditetapkan secara periodik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah

a. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

- 1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Pengeluaran Belanja Modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, harus dikapitalisasi.
- 3) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah harus dilakukan kapitalisasi.
- 4) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:
 - a) Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual yang meliputi:
 - Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan.
 - Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
 - b) Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki.
 - Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c) Pengeluaran yang digunakan untuk:
 - Pengadaan tanah
 - Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
 - Pembelian/pembuatan Aset Tetap Lainnya
- 5) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:
 - a) Pembelian peralatan dan mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.



- b) Pembuatan peralatan, mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- d) Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
- e) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- f) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama serta biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
- g) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- h) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- i) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan dan biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
- j) Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- k) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
- l) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah



การและ การเกาะ การและ
tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.

- m) Pembelian Aset Tetap lainnya meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- n) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- o) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan belanja yang terkait dengan pembuatan/pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- 6) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:
 - a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
 - b) Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- 7) Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan.
- 8) Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
 - a) Pengadaan/pembelian tanah
 - b) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
 - c) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.

b. Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah

- 1) Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.
- 2) Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
- 3) Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).



การและ การเกาะ การและ การแ

- 5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- 6) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

c. Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap

- 1) Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola dan Pengguna. Penyusutan ditetapkan atas ase tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olah raga, alat musik/band dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikans sebagai Aset Lainnya Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
- 2) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
 - b) Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap triwulan selama masa manfaat.
- 3) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai sisa.
- 4) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- 5) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
- 6) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- 7) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 8) Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 9) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.



กกา พยาหญาพ๛กางพลกางเท่นกายเกาแก่งกายการเกา

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tak Terduga dan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tidak Terduga

- 1) Belanja Tidak Terduga diakui pada saat SP2D LS dicairkan oleh PPKD atau saat pengesahan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk pencairan SP2D TU.
- 2) Belanja Tidak Terduga diukur sebesar nilai SP2D LS atau sebesar nilai SP2D TU dikurangi dengan nilai setoran pengembalian yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.
- 3) Pengungangkapan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan pandemi Covid-19 mengungkapkan informasi-informasi berkaitan dengan penetapan status tanggap darurat
- 4) Bencana Covid-19, mekanisme kerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19, penganggaran,penggunaan dan pelaporan Belanja Tidak Terduga.

b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran, Output Belanja Tidak Terduga dan Beban Luar Biasa atas Realisasi Belanja Tidak Terduga

- Pengakuan Beban Luar Biasa diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode pelaporan yang di dalamnya terdapat kejadian luar biasa.
- 2) Pengukuran Beban Luar biasa sebesar realisasi Belanja Tidak Terduga dikurangi dengan saldo akhir out put Belanja Tidak Terduga berupa persediaan dan asset tetap/asset lainnya.
- 3) Persediaan dan asset tetap/lainnya disajikan dalam Neraca BPBD yang merupakan kompilasi dari output Belanja Tidak Terduga yang dilaksananakan oleh Sekretariat Pelaksana dan Bidang-Bidang dalam Gugus Tugas COVID-19

c. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Bentuk Uang untuk Penanganan Pandemi Covid-19

- 1) Pendapatan dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang dicatat sebagai Pendapatan Hibah-LRA dan Pendapatan Luar Biasa-LO
- 2) Pendapatan dan belanja daerah dari sumbangan masyarakat atau pihak/sejenis dalam bentuk uang diakui pada saat diterbitkan SP2B oleh BUD.
- 3) Pendapatan Hibah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran BPBD
- 4) Pendapatan dan Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional BPBD
- 5) Persediaan dan Aset Tetap/Aset Lainnya yang berasal dari Belanja yang bersumber dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis disajikan dalam Neraca BPBD.

d. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga/Sejenis Dalam Bentuk Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19

- 1) Pendapatan dan Beban Luar Biasa yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang diakui setelah SPSB disahkan oleh BUD.
- Pengukuran sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang diukur sebesar nilai perolehan yang dimuat dalam BAST atau dokumen lain yang dipersamakan atau jika nilai perolehan tidak dapat diperoleh maka persediaan dan asset tetap dicatat berdasarkan estimasi nilai wajar saat diperoleh.
- 3) Pendapatan dan Beban Luar Biasa yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang disajikan dalam Laporan Operasional BPBD.
- 4) Saldo Persediaan dan Aset Tetap pada akhir periode pelaporan yang berasal dari penerimaan sumbangan masyakarat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang untuk penanganan pandemi Covid-19 disajikan dalam Neraca BPBD.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2020

2019

5.1.1 Pendapatan-LRA

Rp5.611.510.924.299,71

Rp5.699.357.232.440,50

Pendapatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp5.558.125.044.792,93 realisasi sebesar Rp5.611.510.924.299,71 atau 100,96%. Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp87.846.308.140,79 atau 1,54% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp5.699.357.232.440,50. Penurunan tersebut merupakan dampak terjadinya Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kemampuan fiskal pemerintah dan berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Rp1.876.706.829.354,71

Rp2.082.795.334.434,50

Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebesar Rp1.799.932.971.064,54 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diakui secara kas sebesar Rp1.876.706.829.354,71 atau 104,27% Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp206.088.505.079,79 atau 9,89% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.082.795.334.434,50 dengan rincian sebagai berikut:

A. Pajak Daerah

Rp1.646.559.198.863,00

Rp1.773.940.604.572,00

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.596.879.866.993,00 dan realisasi sebesar Rp1.646.559.198.863,00 atau 103,11%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp127.381.405.709,00 atau 7,18% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.773.940.604.572,00.

Rincian anggaran dan realisasi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Oi didii	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah				
а	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	796.300.000.000,00	846.892.566.900,00	106,35	814.539.876.400,00
b	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	317.500.000.000,00	333.512.489.000,00	105,04	491.573.238.800,00
С	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	222.968.971.700,00	225.462.302.459,00	101,12	276.358.776.194,00
d	Pajak Air Permukaan	1.166.079.000,00	1.328.837.075,00	113,96	1.212.766.300,00
е	Pajak Rokok	258.944.816.293,00	239.363.003.429,00	92,44	190.255.946.878,00
Jumlah		1.596.879.866.993,00	1.646.559.198.863,00	103,11	1.773.940.604.572,00

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dari total realisasi Pendapatan Pajak Daerah telah mencapai target yaitu 103,11%, namun Pendapatan Pajak Rokok hanya terealisasi sebesar Rp239.363.003.429,00 atau 92,44%. Target Pendapatan Pajak Rokok tidak tercapai karena adanya pemotongan dari Pemerintah Pusat sebesar 37,5% dari penerimaan yang seharusnya diterima oleh Pemda DIY terkait peran Pemda DIY dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional.



กลา พยาหางพลางพนางพามีปลอกปลางหา

B. Retribusi Daerah

Rp36.546.077.142,71

Rp42.420.048.683,08

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp32.999.671.755,00 dan realisasi sebesar Rp36.546.077.142,71 atau 110,75%. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.873.971.540,37 atau 13,85% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp42.420.048.683,08. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Daerah

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
	Oi dian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
2	Retribusi Daerah				
а	Retribusi Jasa Umum	7.963.681.000,00	8.664.796.884,71	108,80	11.378.624.745,08
b	Retribusi Jasa Usaha	24.643.670.755,00	27.371.265.258,00	111,07	30.816.533.938,00
С	Retribusi Perijinan Tertentu	392.320.000,00	510.015.000,00	130,00	224.890.000,00
	Jumlah	32.999.671.755,00	36.546.077.142,71	110,75	42.420.048.683,08

Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum dianggarkan sebesar Rp7.963.681.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.664.796.884,71 atau 108,80% terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
NO.	Ui aiaii	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
а	Retribusi Jasa Umum				
1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan	64.766.000,00	72.875.000,00	112,52	-
2)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.388.940.000,00	4.997.280.884,71	113,86	4.726.190.745,08
3)	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	835.200.000,00	839.782.000,00	100,55	-
4)	Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.674.775.000,00	2.754.859.000,00	102,99	6.652.434.000,00
	Jumlah	7.963.681.000,00	8.664.796.884,71	108,80	11.378.624.745,08

Penjelasan:

Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp64.766.000,00 dan realisasi sebesar Rp72.875.000,00 atau 112,52% merupakan pendapatan dari pelayanan cek laboratorium untuk tenaga kerja perusahaan yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja (Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggarkan sebesar Rp4.388.940.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.997.280.884,71 atau 113,86% merupakan pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp271.090.139,63 atau 5,42% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.726.190.745,08.

Retribusi Pelayanan Pendidikan dianggarkan sebesar Rp2.674.775.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.754.859.000,00 atau 102,99%. Retribusi Pelayanan Pendidikan mencapai target, namun realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.897.575.000,00 atau 58,59% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp6.652.434.000,00 yang disebabkan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Diklat mengalami penurunan sebesar Rp1.776.305.000,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019. Retribusi Pelayanan Pendidikan direalisasikan pada:

1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Balai Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sebesar Rp120.700.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp120.700.000,00;



- 2) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp657.680.000,00 atau 113,57% dari anggaran sebesar Rp579.075.000,00;
- 3) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp1.976.479.000,00 atau 110,07% dari anggaran sebesar Rp1.975.000.000,00.

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp24.643.670.755,00 dan realisasi sebesar Rp27.371.265.258,00 atau 111,07% terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Terminal, Tempat Khusus Parkir, Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Pelayanan Kepelabuhan, Tempat Rekreasi dan Olah Raga, serta Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4

Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
b	Retribusi Jasa Usaha				
1)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.574.964.755,00	5.447.360.848,00	119,07	15.418.152.858,00
2)	Retribusi Terminal	375.827.000,00	445.917.000,00	118,65	-
3)	Retribusi Tempat Khusus Parkir	285.615.000,00	372.127.000,00	130,29	238.167.000,00
4)	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	194.165.000,00	191.675.000,00	98,72	739.835.000,00
5)	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	79.355.000,00	81.191.500,00	102,31	47.652.500,00
6)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	75.517.000,00	100.645.500,00	133,28	320.135.500,00
7)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	19.058.227.000,00	20.732.348.410,00	108,78	14.052.591.080,00
	Jumlah	24.643.670.755,00	27.371.265.258,00	111,07	30.816.533.938,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp4.574.964.755,00 dan realisasi sebesar Rp5.447.360.848,00 atau 119,07%. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp9.970.792.010,00 atau 64,67% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp15.418.152.858,00. Rincian realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp5.447.360.848,00 berada pada beberapa OPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.033.823.500,00 atau 119,94% dari anggaran sebesar Rp861.983.500,00;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp309.105.000,00 atau 135,09% dari anggaran sebesar Rp228.813.000,00;
- 3) Dinas Sosial sebesar Rp532.200.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp532.200.000,00;
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp1.580.040.000,00 atau 144,62% dari anggaran sebesar Rp1.092.525.000,00;
- 5) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp118.748.500,00 atau 96,87% dari anggaran sebesar Rp122.591.000,00;
- 6) Dinas Perhubungan sebesar Rp153.851.200,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp153.851.200,00;
- 7) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.350.000,00 atau 150% dari anggaran sebesar Rp900.000,00;
- 8) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp4.700.000,00 atau 104,44% dari anggaran sebesar Rp4.500.000,00;
- 9) Dinas Kebudayaan sebesar Rp326.000.000,00 atau 106,54% dari anggaran sebesar Rp306.000.000,00;
- 10) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp152.794.300,00 atau 124,22% dari anggaran sebesar Rp123.000.000,00;
- 11) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp18.690.000,00 atau 71,73% dari anggaran sebesar Rp26.055.000,00;
- 12) Dinas Pariwisata sebesar Rp26.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp26.000.000,00;



- 13) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp175.254.820,00 atau 122,28% dari anggaran sebesar Rp143.321.180,00;
- 14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp168.441.496,00 atau 118,45% dari anggaran sebesar Rp142.200.000,00;
- 15) Sekretariat Daerah sebesar Rp41.700.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp41.700.000,00;
- 16) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp54.000.000,00 atau 94,08% dari anggaran sebesar Rp57.400.000,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Penghubung Daerah tidak mencapai target karena penggunaan pendopo sebagian besar merupakan kegiatan internal Pemda DIY sehingga tidak dipungut retribusi;
- 17) Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp736.782.032,00 atau 105,55% dari anggaran sebesar Rp698.044.875,00;
- 18) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp3.600.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp3.600.000,00;
- 19) Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp10.280.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp10.280.000,00.

Retribusi Terminal dianggarkan sebesar Rp375.827.000,00 dan realisasi sebesar Rp445.917.000,00 atau 118,65% merupakan penerimaan dari pengelolaan terminal pada Dinas Perhubungan (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran).

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas setiap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggarkan sebesar Rp285.615.000,00 dan realisasi sebesar Rp372.127.000,00 atau 130,29%. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp133.960.000,00 atau 56,25% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp238.167.000,00. Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan (Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran).

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dianggarkan sebesar Rp194.165.00,00 dan realisasi sebesar Rp191.675.000,00 atau 98,72%. Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp548.160.000,00 atau 74,09% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp739.835.000,00. Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa sebesar Rp191.675.000,00 dilaksanakan oleh beberapa OPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp30.690.000,00 atau 49,29% dari anggaran sebesar Rp62.260.000,00;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp16.350.000,00 atau 90,83% dari anggaran sebesar Rp18.000.000,00;
- 3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp4.540.000,00 atau 67,11% dari anggaran sebesar Rp6.765.000,00;
- 4) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp4.200.000,00 atau 70,00% dari anggaran sebesar Rp6.000.000,00;
- 5) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.420.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.420.000,00;
- 6) Badan Penghubung Daerah sebesar Rp133.475.000,00 atau 135,21% dari anggaran sebesar Rp98.720.000,00.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dianggarkan sebesar Rp79.355.000,00 dan realisasi sebesar Rp81.191.500,00 atau 102,31% merupakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Pelabuhan Perikanan Pantai). Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun



กกา พยาทหูรพลารพลารพุฒิทุยพฤพภาษาการ

2020 mengalami kenaikan sebesar Rp33.539.000,00 atau 70,38% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp47.652.500,00.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp75.517.000,00 dan realisasi sebesar Rp100.645.500,00 atau 133,28%. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp219.490.000,00 atau 68,35% dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp320.135.500,00. Rincian realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dilakukan oleh:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp13.541.000,00 atau 89,63% dari anggaran sebesar Rp15.107.000,00;
- 2) Dinas Kebudayaan (Museum Negeri Sonobudoyo) sebesar Rp87.104.500,00 atau 144,19% dari anggaran sebesar Rp60.410.000,00.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dianggarkan sebesar Rp19.058.227.000,00 dan realisasi sebesar Rp20.732.348.410,00 atau 108,78% terdiri dari:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp6.964.331.962,00 atau 134,58% dari anggaran sebesar Rp5.175.000.000,00;
- 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp11.074.236.879,00 atau 93,92% dari anggaran sebesar Rp11.790.715.000,00;
- 3) Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp724.041.900,00 atau 101,64% dari anggaran sebesar Rp712.370.000,00;
- 4) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.918.392.000,00 atau 143,15% dari anggaran sebesar Rp1.340.142.000,00;
- 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp51.345.669,00 atau 128,36% dari anggaran sebesar Rp40.000.000,00.

Retribusi Perijinan Tertentu

Retribusi Perijinan Tertentu dianggarkan sebesar Rp392.320.000,00 dan realisasi sebesar Rp510.015.000,00 atau 130,00% terdiri dari Retribusi Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan dan Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
С	Retribusi Perijinan Tertentu				
1)	Retribusi Izin Trayek	72.220.000,00	77.580.000,00	107,42	55.530.000,00
2)	Retribusi Izin Usaha Perikanan	900.000,00	825.000,00	91,67	1.250.000,00
3)	Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	319.200.000,00	431.610.000,00	135,22	168.110.000,00
	Jumlah	392.320.000,00	510.015.000,00	130,00	224.890.000,00

Rincian penerimaan Retribusi Perijinan Tertentu lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp72.220.000,00 dan realisasi sebesar Rp77.580.000,00 atau 107,42%. Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp22.050.000,00 atau sebesar 39,71% dibanding tahun 2019 sebesar Rp55.530.000,00.
- 2) Retribusi Izin Usaha Perikanan dianggarkan sebesar Rp900.000,00 dan realisasi sebesar Rp825.000,00 atau sebesar 91,67%. Realisasi penerimaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Tahun 2020 sebesar Rp825.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp425.000,00 atau 34% dibandingan dengan realisasi penerimaan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.250.000,00. Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak mencapai target karena Sesuai dengan Peraturan Daerah DIY nomor 13 tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 untuk Kapal dengan berat 11 30 GT untuk SIUP, SIPI, SIKPI berlaku 1 Tahun dan



การ พยาทหูงพ๛ทงพ๛ทงเพามูกตพากพาการ

karena Izin Usaha Budidaya ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi adalah yang Lintas Kabupaten Kota sedangkan pada Tahun 2020 tidak ada yang mengajukan Izin.

3) Retribusi Perpanjangan IMTA dianggarkan sebesar Rp319.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp431.610.000,00 atau 135,22%. Realisasi penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA Tahun 2020 sebesar Rp431.610.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp263.500.000,00 atau 156,74% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp168.110.000,00. Kenaikan signifikan tersebut disebabkan karena adanya pandemic Covid-19 yang mengakibatkan Tenaga Kerja Asing tidak bisa keluar dari Indonesia.

C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Rp101.460.382.151,46

Rp85.960.824.196,14

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp101.460.382.142,49 dan realisasi sebesar Rp101.460.382.151,46 atau 100,00% meliputi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta. Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp15.499.557.955,32 atau 18,03% dari realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp85.097.737.606,37. Adapun rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6

Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
а	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	101.361.064.131,49	101.361.064.140,46	100,00	85.712.083.865,14
-	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah	95.336.062.563,26	95.336.062.572,26	100,00	80.408.690.416,59
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuangan Non Bank Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)	6.025.001.568,23	6.025.001.568,20	100,00	5.303.393.448,55
b	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Sw asta	99.318.011,00	99.318.011,00	100,00	248.740.331,00
	Jumlah	101.460.382.142,49	101.460.382.151,46	100,00	85.960.824.196,14

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp101.361.064.131,49 dan realisasi sebesar Rp101.361.064.131,49 atau 100,00%. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah dianggarkan sebesar Rp95.336.062.563,26 dan terealisasi sebesar Rp95.336.062.572,26 atau 100,00% meliputi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Tarumartani, PT. Bank BPD DIY dan PT. Anindya Mitra Internasional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7

Rincian Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
а	Perusahaan Daerah Taru Martani (PD Taru Martani)	148.697.623,00	148.697.632,00	100,00	925.083.150,00
b	Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah (PD BPD)	94.001.713.614,26	94.001.713.614,26	100,00	78.265.128.516,59
С	Perusahaan Daerah Anindya Mitra Internasional (PT AMI)	1.185.651.326,00	1.185.651.326,00	100,00	1.218.478.750,00
	Jumlah	95.336.062.563,26	95.336.062.572,26	100,00	80.408.690.416,59



การ การเกาะ

Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp14.927.372.155,67 atau 18,56% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp80.408.690.416,59.

- 2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non Bank Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dianggarkan sebesar Rp6.025.001.568,23 dan terealisasi sebesar Rp6.025.001.568,23 atau 100,00% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 75 BUKP yang ada di setiap kecamatan. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Non Bank Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) sebesar Rp6.025.001.568,23 mengalami kenaikan sebesar Rp721.608.119,65 atau 13,61% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp5.303.393.448,55.
- 3) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp99.318.011,00 dan realisasi sebesar 100% merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA).

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Rp92.141.171.197,54

Rp180.473.856.983,28

Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp68.593.050.174,05 dan realisasi sebesar Rp92.141.171.197,54 atau 134,33%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp88.332.685.785,74 atau 48,94% dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2019 sebesar Rp180.473.856.983,28. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8

Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No.	Uraian		Tahun 2020		Tahun 2019
NO.	Ur alan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
а	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	429.751.000,00	1.007.048.156,00	234,33	3.174.920.651,00
b	Hasil Penjualan Aset Lainnya	8.953.000,00	8.941.000,00	99,87	178.100.000,00
С	Penerimaan Jasa Giro	7.378.215.717,50	21.541.249.683,40	291,96	9.006.551.720,00
d	Pendapatan Bunga	2.893.678.761,62	4.401.193.283,62	152,10	39.722.801.016,36
е	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	9.475.000,00	10.475.000,00	110,55	16.000.000,00
f	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	243.262.260,00	452.947.912,00	186,20	642.117.279,00
g	Pendapatan Denda Pajak	15.922.682.700,00	15.922.682.700,00	100,00	65.004.005.050,00
h	Pendapatan Denda Retribusi	1.638.230,00	5.355.130,00	326,89	4.781.310,00
i	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	13.508.000,00	34.978.000,00	258,94	7.396.500,00
j	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	68.000.000,00	-	-
k	Pendapatan dari Pengembalian	340.173.744,00	552.597.840,00	162,45	405.626.222,00
- 1	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.682.691.125,00	3.145.862.119,00	117,27	3.007.830.893,00
m	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	35.743.006.079,00	38.945.105.715,00	108,96	42.977.401.298,22
n	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.926.014.556,93	6.044.734.658,52	206,59	16.326.325.043,70
	Jumlah	68.593.050.174,05	92.141.171.197,54	134,33	180.473.856.983,28

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp429.751.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.007.048.156,00 atau 234,33% dengan rincian sebagai berikut:



00 การและ การเกาะ การแก้ง ปลาย การเกาะ การเกาะ การเกาะ การเกาะ การเกาะ การเกาะ การเกาะ การเกาะ การเกาะ การเกาะ

Tabel 5.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

No.	Uraian -	Tahun 2020				
NO.		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
а	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	525.929.467,00	350,62		
b	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	61.302.989,00	35,03		
С	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	104.751.000,00	419.815.700,00	400,77		
	Jumlah	429.751.000,00	1.007.048.156,00	234,33		

Penjelasan:

- a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp525.929.467,00 atau 350,62% dari target, merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat atau usang. Lelang tersebut dilakukan oleh BPKA.
- b. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp61.302.989,00 atau 35,03% merupakan hasil lelang bekas bongkaran bangunan semua SKPD yang tidak terpakai lagi karena dalam kondisi rusak berat. Lelang tersebut dilakukan oleh BPKA.
- c. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp104.751.000,00 dan terealisasi sebesar Rp419.815.700,00 atau 400,77% merupakan hasil lelang penjualan hasil pertanian dan hasil kehutanan.

Hasil Penjualan Aset Lainnya

Hasil Penjualan Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp8.953.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.941.000,00 atau 99,87% merupakan hasil penjualan drum bekas sebesar Rp5.592.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan penjualan penebangan pohon sebesar Rp3.349.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan dari Jasa Giro dianggarkan sebesar Rp7.378.215.717,50 dan realisasinya sebesar Rp21.541.249.683,40 atau 291,96% meliputi penerimaan jasa giro Rekening Kas Daerah pada Bank BPD DIY sebesar Rp6.827.680.736,50 dan jasa giro Rekening Bendahara Pengeluaran OPD yang sudah dilimpahkan ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp550.534.981,00.

Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga Deposito dianggarkan sebesar Rp2.893.678.761,62 realisasi sebesar Rp4.401.193.283,62 atau 152,10% meliputi Pendapatan bunga deposito sebesar Rp4.301.268.283,62 dan Pendapatan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp99.925.000,00. Rincian Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp4.401.193.283,62 adalah sebagai berikut:

- 1) Bank BPD sebesar Rp1.925.000.000,00
- 2) Bank BNI sebesar Rp438.684.931,00
- 3) Bank Mandiri sebesar Rp307.397.260,28
- 4) Bank BTN sebesar Rp850.684.931,50
- 5) Bank BRI sebesar Rp718.082.140,00
- 6) Bank Mandiri Syariah sebesar Rp61.419.020,84
- 7) Dana Bergulir sebesar Rp99.925.000,00



การและ การเกาะ การและ
Tuntutan Ganti Rugi Daerah

Tuntutan Ganti Rugi Daerah Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp9.475.000,00 dan terdapat realisasi sebesar Rp10.475.000,00 atau 110,55% merupakan penerimaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Pembebanan kepada Pengawai Negeri Sipil atas kelalaian yang dilakukan.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggarkan sebesar Rp243.262.260,00 dan direalisasikan sebesar Rp452.947.912,00 atau 186,20%. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direalisasikan pada BPKA dan merupakan penerimaan dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada semua OPD baik berupa pekerjaan fisik maupun non fisik.

Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp15.922.682.700,00 dan realisasi sebesar Rp15.922.682.700,00 atau 100,00%. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp15.053.479.700,00 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp869.203.000,00. Pendapatan Denda Pajak Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp49.081.322.350,00 atau 75,51% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp65.004.005.050,00 karena adanya kebijakan Pemda DIY untuk membebaskan denda pajak sebagai dampak terjadinya Pandemi Covid-19.

Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.638.230,00 dan realisasi sebesar Rp5.355.130,0 atau 326,89%. Pendapatan Denda Retribusi direalisasikan pada BPKA. Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp573.820,00 atau 12,00% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.781.310,00.

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda

Pendapatan Denda atas pelanggaran Perda Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp13.508.000,00 dan realisasi sebesar realisasi sebesar Rp34.978.000,00 terdiri dari Denda atas Pelanggaran Perda sebesar Rp15.317.000,00, Denda Dana Bergulir sebesar Rp5.500.000,00 dan Denda Pembayaran Kontribusi Tetap dari PT. YIS sebesar Rp14.161.000,00.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tidak dianggarkan, namun terdapat realisasi sebesar Rp68.000.000,00 berupa setoran jaminan pelaksanaan dari CV. Wahana karena tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian merupakan penerimaan pengembalian belanja periode tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan pendapatan.

Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan sebesar Rp340.173.744,00 dan direalisasikan sebesar Rp552.597.840,00 atau 162,45%. Pendapatan dari Pengembalian meliputi:

- 1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan sebesar Rp295.877.638,00;
- 2) Pengembalian Dana Penyesuaian sebesar Rp19.294.718,00;
- 3) Pengembalian dari Pengembalian Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp56.598.100,00;



การ เกาะ การ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกา

4) Pengembalian Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp180.827.384,00.

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp2.682.691.125,00 dan realisasi sebesar Rp3.145.862.119,00 atau 117,27%. Pemanfaatan kekayaan daerah tersebut dalam bentuk sewa dengan rincian:

Tabel 5.10

Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

No.	Uraian	Tahun 2020			
NO.	Ui didii	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Sew a Tanah dan Bangunan	649.430.000,00	841.680.000,00	129,60	
2	Sew a Lahan	788.100.000,00	1.031.584.630,00	130,90	
3	Sew a Tempat/Ruangan	-	136.364,00	-	
4	Pengelolaan Hutan Lindung Mangunan	403.917.625,00	403.917.625,00	100,00	
5	Sew a Bangunan untuk Kantin	-	7.450.000,00	-	
6	Sew a Bangunan untuk Foto Copy	2.400.000,00	2.600.000,00	108,33	
7	Jasa pemeriksaan dan pengujian peralatan keselamatan dan kesehatan kerja	-	15.150.000,00	-	
8	Pengelolaan Hutan Produksi Klayar Kenet	1.580.750,00	1.580.750,00	100,00	
9	Pengelolaan Hutan Produksi Ngingrong Mulo	4.262.750,00	4.262.750,00	100,00	
10	Pengelolaan PT. YIS	833.000.000,00	833.000.000,00	100,00	
11	Sew a komputer	-	4.500.000,00	-	
	Jumlah	2.682.691.125,00	3.145.862.119,00	117,27	

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD dianggarkan sebesar Rp35.743.006.079,00 dan realisasi sebesar Rp38.945.105.715,00 atau 108,96%. Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.032.295.583,22 atau 9,38% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD Tahun 2019 yaitu sebesar 42.977.401.298,22. Adapun penerimaan Pendapatan dari Pengelolaan BLUD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BLUD

No.	Uraian	Tahun 2020				
NO.		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
1	RS Jiw a Grhasia	17.846.160.000,00	18.656.156.571,00	104,54		
2	RS Paru Respira	10.400.000.000,00	11.755.363.058,00	113,03		
3	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	4.258.398.892,00	5.499.852.228,00	129,15		
4	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial	37.800.000,00	48.217.638,00	127,56		
5	Balai Pelatihan Kesehatan	1.945.355.585,00	1.523.156.103,00	78,30		
6	Balai Latihan Pendidikan Teknik	1.255.291.602,00	1.462.360.117,00	116,50		
	Jumlah	35.743.006.079,00	38.945.105.715,00	108,96		

Pendapatan dari Pengelolaan BLUD pada Balai Pelatihan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp1.945.355.585,00 dan realisasi sebesar Rp1.523.156.103,00 atau sebesar 78,30% dari anggaran, tidak mencapai target karena penurunan jumlah pelatihan yang diselenggarakan sebagai dampak terjadinya Pandemi Covid-19.

Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.926.014.556,93 dan direalisasikan sebesar Rp6.001.203.367,52 atau 205,10% dengan rincian sebagai berikut:



การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ

Tabel 5.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

No.	Uraian	Tahun 2020				
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
1	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	2.926.014.556,93	5.451.385.185,52	186,31		
2	Sew a Ruang di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA)	-	549.818.182,00	-		
3	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Galeri Pasar Kota Gede YIA	-	43.531.291,00	-		
	Jumlah	2.926.014.556,93	6.044.734.658,52	206,59		

Penjelasan:

1) Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.926.014.556,93 dan direalisasikan sebesar Rp5.451.385.185,52 atau 186,31% merupakan penerimaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

No.	Uraian -	Tahun 2020				
NO.		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
1	Pendapatan dari Pengelolaan BUKP	552.551.676,93	552.551.676,86	100,00		
2	Tindak Lanjut Hasil Temuan	2.335.962.880,00	4.201.795.416,66	179,87		
3	Surat Keterangan Asal Ikan	2.500.000,00	2.845.000,00	113,80		
4	Pembuatan STNK Baru	35.000.000,00	32.459.000,00	92,74		
5	Lain-Lain	-	661.734.185,52	-		
	Jumlah	2.926.014.556,93	5.451.385.279,04	186,31		

Realisasi penerimaan "Lain-lain" pada Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya sebesar Rp661.734.092,00 berasal dari penerimaan yang tidak bisa masuk ke dalam salah satu kategori rekening pendapatan yang ada.

- 2) Sewa Ruang di Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) sebesar Rp549.818.182,00 merupakan penerimaan pemanfaatan Galeri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Pasar Kotagede Yogyakarta Internasional Airport (YIA) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 119/03010 dan 0195/8811/2020. Pengelolaan Galeri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Pasar Kotagede Yogyakarta Internasional Airport (YIA) dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.
- 3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Galeri Pasar Kota Gede YIA sebesar Rp43.531.291,00 merupakan setoran sisa omset di Galeri Pasar Kota Gede YIA.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Rp3.726.454.595.432,00

Rp3.608.013.435.006,00

Anggaran Pendapatan Transfer Tahun 2020 sebesar Rp3.750.658.573.728,39,00 dan realisasi yang diterima secara kas sebesar Rp3.726.454.595.432,00 atau 99,35%. Meskipun tidak mencapai target tetapi realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 sebesar Rp3.726.703.168.232,00 mengalami kenaikan sebesar Rp118.441.160.426,00 atau sebesar 3,28% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019 sebesar Rp3.608.013.435.006,00. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:



การ เกาะ การ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกา

Tabel 5.14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

NI-	Tahun 2020				Tahun 2019
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
а	Bagi Hasil Pajak	119.819.807.501,00	114.252.471.928,00	95,35	56.035.674.200,00
b	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	31.627.168,00	24.870.747,00	78,64	24.907.600,00
С	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.234.516.326.000,00	1.227.647.676.000,00	99,44	1.351.102.020.000,00
d	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.040.880.571.648,00	1.029.119.335.346,00	98,87	978.540.310.453,00
	Jumlah	2.395.248.332.317,00	2.371.044.354.021,00	98,99	2.385.702.912.253,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
а	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
b	Dana Keistimew aan	1.286.576.228.221,39	1.286.576.228.221,00	100,00	1.162.772.688.443,00
С	Dana Penyesuaian	68.053.994.000,00	68.053.994.000,00	100,00	58.831.799.000,00
	Jumlah	1.354.630.222.221,39	1.354.630.222.221,00	100,00	1.221.604.487.443,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Atau Daerah - Lainnya				
а	Bantuan Keuangan	780.019.190,00	780.019.190,00	100,00	706.035.310,00
	Jumlah	780.019.190,00	780.019.190,00	100,00	706.035.310,00
	Jumlah	3.750.658.573.728,39	3.726.454.595.432,00	99,35	3.608.013.435.006,00

Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp119.819.807.501,00 dan realisasi sebesar Rp114.252.471.928,00 atau 95,35%. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp58.216.797.728,00 atau 103,89% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 yaitu sebesar Rp56.035.674.200,00. Rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
NO.		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	113.213.216.271,00	108.979.914.503,00	96,26	49.099.528.200,00
b	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.895.404.028,00	3.591.562.731,00	92,20	5.210.616.000,00
С	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	2.711.187.202,00	1.680.994.694,00	62,00	1.725.530.000,00
	Jumlah	119.819.807.501,00	114.252.471.928,00	95,35	56.035.674.200,00

Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target anggaran dan telah dicatat sesuai dengan transfer dari pusat.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp31.627.168,00 dan realisasi sebesar Rp24.870.747,00 atau 78,64% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

No.	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
NO.		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
а	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	28.446.925,00	14.301.407,00	50,27	3.564.600,00
b	Bagi Hasil dari luran Tetap (Lant Rent)	3.180.243,00	8.991.100,00	282,72	21.343.000,00
С	Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti)	-	1.576.150,00	-	-
d	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	2.090,00	-	-
	Jumlah	31.627.168,00	24.870.747,00	78,64	24.907.600,00

Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan dianggarkan sebesar Rp28.446.925,00 dan realisasi sebesar Rp14.301.407,00,00 atau 50,27%. Realisasi penerimaan tersebut sesuai dengan transfer dari pusat.



กกการและการเกล้าและการเกล้า

Pendapatan dari Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land Rent*) dianggarkan sebesar Rp3.180.243,00 dan realisasi sebesar Rp21.343.000,00 atau sebesar 70,00% dari anggaran, realisasi telah sesuai transfer dari pusat.

Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.234.516.326.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.227.647.676.000,00 atau 99,44%. Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp123.454.344.000,00 atau 9,14% dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.351.102.020.000,00.

Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp1.040.880.571.648,00 dan realisasi Rp1.029.119.335.346,00 atau 98,87%. Penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp50.579.024.893,00 atau 5,17% dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 yaitu sebesar Rp978.540.310.453,00. Dana Alokasi Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Nonfisik. Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan alokasi sebesar Rp129.630.558.000,00 dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah dengan alokasi sebesar Rp911.250.013.648,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp121.052.748.710,00 atau 90,94%. Realisasi penyaluran adalah sebesar nilai kontrak yang dilakukan oleh satuan kerja teknis terkait. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus

No.	Urajan		Tahun 2020		Tahun 2019
NO.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	DAK Fisik				
а	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	-	-	-	32.602.401.800,00
b	DAK Bidang Insfrastruktur Irigasi	5.764.880.000,00	2.652.397.000,00	46,01	3.191.700.000,00
С	DAK Bidang Kehutanan	-	-	-	1.839.973.253,00
d	DAK Bidang Kesehatan	7.527.698.000,00	5.860.796.287,00	77,86	13.851.677.824,00
е	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	627.342.000,00	547.052.500,00	87,20	1.862.375.634,00
f	DAK Bidang Pertanian	1.887.696.000,00	1.887.696.000,00	100,00	6.816.793.248,00
g	DAK Bidang Pendidikan	108.592.110.000,00	106.068.897.873,00	97,68	43.877.738.533,00
h	DAK Bidang Pariw isata	5.230.832.000,00	4.035.909.050,00	77,16	5.088.876.000,00
	Jumlah	129.630.558.000,00	121.052.748.710,00	93,38	109.131.536.292,00
2	DAK Non Fisik				
а	Bantuan Operasional Sekolah	658.475.159.396,00	651.878.420.000,00	99,00	613.489.389.988,00
b	Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM	-	-	-	3.499.929.176,00
С	Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan	-	-	-	1.187.151.950,00
d	Dana Tunjangan Profesi Guru	242.470.349.000,00	242.470.349.000,00	100,00	249.106.974.852,00
е	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	6.697.170.290,00	10.031.153.339,00	149,78	2.125.328.195,00
f	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	3.570.646.297,00	3.570.646.297,00	100,00	-
g	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	36.688.665,00	116.018.000,00	316,22	
	Jumlah	911.250.013.648,00	908.066.586.636,00	99,65	869.408.774.161,00
	Jumlah	1.040.880.571.648,00	1.029.119.335.346,00	98,87	978.540.310.453,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik dianggarkan sebesar Rp911.250.013.648,00 dan realisasi sebesar Rp908.315.159.436,00 atau 99,68% antara lain Bantuan Operasional dengan anggaran sebesar Rp652.126.992.800,00 dan realisasi sebesar Rp651.878.420.000,00 atau 99%. Realisasi Dana BOS disalurkan langsung ke sekolah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah. Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik BOS sebesar Rp651.878.420.000,00 diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer BOS yang disampaikan oleh sekolah melalui Dinas Pendidikan,



กกกลุ่งพลางพลางตุญี่ ๆ ยอกพาการตา

Pemuda dan Olahraga DIY dan Dinas Pendidikan Pemda Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi BOS (Rp)
1	PROVINSI DIY	
	SMA Negeri	60.550.800.000,00
	SMK Negeri	75.337.920.000,00
	SLB Negeri	2.747.800.000,00
	Jumlah Negeri	138.636.520.000,00
	SMA Swasta	25.553.400.000,00
	SMK Swasta	66.475.200.000,00
	SLB Swasta	9.575.200.000,00
	Jumlah Swasta	101.603.800.000,00
	Jumlah	240.240.320.000,00
2	KOTA YOGYAKARTA	
	SD Negeri	17.973.360.000,00
	SMP Negeri	11.257.180.000,00
	SD Swasta	18.607.050.000,00
	SMP Swasta	11.078.370.000,00
	Jumlah	58.915.960.000,00
3	KABUPATEN BANTUL	
	SD Negeri	49.297.020.000,00
	SMP Negeri	27.114.340.000,00
	SD Swasta	17.425.080.000,00
	SMP Swasta	8.142.320.000,00
	Jumlah	101.978.760.000,00
4	KABUPATEN KULON PROGO	
	SD Negeri	26.989.410.000,00
	SMP Negeri	14.450.940.000,00
	SD Swasta	6.404.280.000,00
	SMP Swasta	3.294.110.000,00
	Jumlah	51.138.740.000,00
5	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
	SD Negeri	42.257.760.000,00
	SMP Negeri	21.946.640.000,00
	SD Swasta	5.915.130.000,00
	SMP Swasta	6.075.470.000,00
	Jumlah	76.195.000.000,00
6	KABUPATEN SLEMAN	
	SD Negeri	53.891.100.000,00
	SMP Negeri	26.443.550.000,00
	SD Swasta	26.758.050.000,00
	SMP Swasta	16.316.940.000,00
	Jumlah	123.409.640.000,00
	Jumlah Total	651.878.420.000,00



^^ พยาหญาพ๛กางพลกางเพญายเบาเพาะการเก

Dana Keistimewaan Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.320.000.000,000 berasal dari alokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 (Lampiran V) sebesar Rp1.320.000.000.000,000 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2019 sebesar Rp33.423.771.778,61 sehingga menjadi sebesar Rp1.286.576.228.221,39. Adapun realisasi penerimaan Dana Keistimewaan Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.286.576.228.221,00 atau sebesar 100% dari anggaran.

Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp68.053.994.000,00 dan realisasi sebesar Rp68.053.994.000,00 atau 100% merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID). Penerimaan Dana Penyesuaian Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp9.222.195.000,00 atau 15,68% dibandingkan dengan realisasi Dana Penyesuaian Tahun 2019 yaitu sebesar Rp58.831.799.000,00.

Bantuan Keuangan tersebut berasal dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta dengan peruntukkan sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan Nomor 12/PK/Bt/2020 dan Nomor 30/PK.KDH/a/2020 dan Nomor 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat. Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan sebesar Rp780.019.190,00 terdiri dari Bantuan Keuangan dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp91.448.260,00 (100%), Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp105.140.870,00 (100%), dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp583.430.060,00 (100%).

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rp8.349.499.513,00

Rp8.548.463.000,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri serta Hibah dari Kelompok. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditetapkan sebesar Rp7.533.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.349.499.513,00 atau 110,83%. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp198.963.487,00 atau 2,33% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 yaitu sebesar Rp8.548.463.000,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Na	Uraian		Tahun 2020		Tahun 2019
No.		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
	Pendapatan Hibah				
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah				
а	Rupiah Murni	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam	n Negeri			
а	Dealer Otomotif	3.584.000.000,00	3.006.443.000,00	83,89	4.667.663.000,00
b	Main Dealer	25.500.000,00	28.200.000,00	110,59	28.800.000,00
С	PT Jasa Raharja	3.924.000.000,00	3.924.000.000,00	100,00	3.852.000.000,00
	Jumlah	7.533.500.000,00	6.958.643.000,00	92,37	8.548.463.000,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan				
а	Kelompok Masyarakat/Perorangan	-	1.390.856.513,00	-	-
	Jumlah	-	1.390.856.513,00	-	-
	Jumlah	7.533.500.000,00	8.349.499.513,00	110,83	8.548.463.000,00



Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp8.349.499.513,00 merupakan penerimaan hibah dari Dealer Otomotif sebesar Rp3.006.443.000,00, Main Dealer sebesar Rp28.200.000,00, PT. Jasa Raharja sebesar Rp3.924.000.000,00 dan Sumbangan Kelompok Masyarakat/Perorangan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp1.390.856.513,00. Rincian Sumbangan Kelompok Masyarakat/Perorangan untuk Penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penyumbang	Jumlah (Rp)
1	PT Bank Negara Indonesia	500.000.000,00
2	PT bank Rakyat Indonesia	350.000.000,00
3	PT Sari Husada	300.000.000,00
4	BUMD & BUKP DIY	200.000.000,00
5	Barahmus DIY	10.000.000,00
6	PT Bank Pembangunan Derah	7.500.000,00
7	PT Bank Mandiri	3.096.000,00
8	PT Bank Syariah Mandiri	4.000.000,00
9	Pendaki	1.410.000,00
10	Perorangan	14.850.513,00
	Jumlah	1.390.856.513,00

5.1.2 Belanja

Rp4.347.344.000.359,04

Rp4.523.871.348.582,31

APBD DIY Tahun Anggaran 2020 mengalami beberapa kali refocusing dan realokasi anggaran sesuai dengan arahan Pemerintah untuk percepatan penanganan dampak Pandemi Covid-19 yang selanjutnya ditetapkan dalam APBD Perubahan 2020.

Anggaran Belanja Perubahan Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp4.767.282.153.598,35. Sampai dengan akhir Tahun 2020, anggaran belanja tersebut telah terserap sebesar Rp4.347.344.000.359,04_atau 91,19%. Realisasi Belanja Tahun 2020 sebesar Rp4.347.344.000.359,04 mengalami penurunan sebesar Rp176.527.348.223,27 atau 3,90% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.347.344.000.359,04. Penurunan realisasi belanja disebabkan adanya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya program dan kegiatan yang dilaksanakan diprioritaskan untuk urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, bidang kesehatan dalam penangangan Covid-19, penyediaan jaring pengaman sosial dan pemulihan dampak ekonomi. Adapun rincian anggaran dan belanja adalah sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Rp3.101.070.722.657,40

Rp3.488.668.163.097,46

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp3.366.747.181.795,86 dan realisasi sebesar Rp3.101.070.722.657,40 atau 92,11%. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 sebesar Rp3.101.070.722.657,40 mengalami penurunan sebesar Rp387.597.440.440,06 atau 11,11% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.488.668.163.097,46. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. Belanja Pegawai

Rp1.562.236.884.707,39

Rp1.553.763.754.881,00

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.630.034.458.720,15 terdiri dari Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.531.527.128.590,00 dan Belanja Pegawai Langsung sebesar Rp98.507.330.130,15. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp1.562.236.884.707,39



กกา พยาหญาพ๛ทางพลกางเพลา

terdiri dari realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.478.736.504.396,39 dan Belanja Pegawai Langsung sebesar Rp83.500.380.311,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp8.473.129.826,39 atau 0,55% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.553.763.754.881,00.

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp1.478.736.504.396,39 atau 96,55% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:



การและ การเกาะ
Tabel 5.19

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Sesuai Dengan Rincian Obyek Belanja

		Tahun 2020			
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
I	Gaji dan Tunjangan				
а	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	727.915.094.758,00	694.268.754.825,00	33.646.339.933,00	95,38
b	Tunjangan Keluarga	56.891.691.953,00	52.885.141.977,00	4.006.549.976,00	92,96
С	Tunjangan Jabatan	12.730.808.404,00	12.008.289.000,00	722.519.404,00	94,32
d	Tunjangan Fungsional	35.974.646.250,00	34.630.413.000,00	1.344.233.250,00	96,26
e	Tunjangan Fungsional Umum	10.714.948.072,00	9.655.165.000,00	1.059.783.072,00	90,11
f	Tunjangan Beras	27.730.971.102,00	25.576.426.500,00	2.154.544.602,00	92,23
g	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.262.192.924,00	2.225.192.733,00	1.037.000.191,00	68,21
h	Pembulatan Gaji	18.769.966,00	7.484.577,00	11.285.389,00	39,88
i	Uang Paket	149.940.000,00	148.815.000,00	1.125.000,00	99,25
j	Tunjangan Badan Musyawarah	47.763.000,00	45.805.500,00	1.957.500,00	95,90
k	Tunjangan Komisi	95.526.000,00	94.873.500,00	652.500,00	99,32
1	Tunjangan Badan Anggaran	51.417.000,00	51.156.000,00	261.000,00	99,49
m	Tunjangan Badan Kehormatan	11.223.000,00	9.722.250,00	1.500.750,00	86,63
n	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	94.090.500,00	47.654.250,00	46.436.250,00	50,65
0	Tunjangan Perumahan	13.761.600.000,00	13.658.600.000,00	103.000.000,00	99,25
р	Uang Jasa Pengabdian	33.300.000,00	2.250.000,00	31.050.000,00	6,76
q	Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	360.000.000,00	-	100,00 100,00
r	Tunjangan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais	28.449.000,00	28.449.000,00	4 246 544 650 64	
S	luran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	6.430.563.632,00	5.114.048.973,39	1.316.514.658,61	79,53
t	Iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	48.583.966.441,00 138.000.000,00	42.402.641.465,00 124.200.000,00	6.181.324.976,00 13.800.000,00	87,28 90,00
u v	Tunjangan Bahaya Radiasi Tunjangan Reses	2.475.000.000,00	2.445.000.000,00	30.000.000,00	98,79
w	Tunjangan Transportasi	8.586.360.000,00	8.516.210.000,00	70.150.000,00	99,18
vv	Jumlah	956.086.322.002,00	904.306.293.550,39	51.780.028.451,61	94,58
II II	Tambahan Penghasilan PNS	930.080.322.002,00	304.300.233.330,33	31.760.028.431,01	34,36
a	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1.504.677.000,00	949.000.000,00	555.677.000,00	63,07
b	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi	248.546.028.175,00	248.520.088.325,00	25.939.850,00	99,99
С	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	271.081.859.740,00	271.081.859.740,00	23.333.830,00	100,00
d	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Biaya Hidup	691.200.000,00	627.120.000,00	64.080.000,00	90,73
u	Jumlah	521.823.764.915,00	521.178.068.065,00	645.696.850,00	99,88
Ш	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	321.025.701.313,00	322.270.000.003,00	0 13.030.030,00	33,00
a	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	9.900.000.000,00	9.825.000.000,00	75.000.000,00	99,24
b	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	2.589.000.000,00	2.589.000.000,00	-	100,00
_ ~	Jumlah	12.489.000.000,00	12.414.000.000,00	75.000.000,00	99,40
IV	Insentif Pemungutan Pajak Daerah				,.0
a	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	40.138.051.521,00	40.103.069.151,00	34.982.370,00	99,91
	Jumlah	40.138.051.521,00	40.103.069.151,00	34.982.370,00	99,91
V	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,00			,,-
а	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	254.731.196,00	233.283.854,00	21.447.342,00	91,58
b	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	723.489.356,00	490.020.776,00	233.468.580,00	67,73
С	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Perijinan Tertentu	11.769.600,00	11.769.000,00	600,00	99,99
	Jumlah	989.990.152,00	735.073.630,00	254.916.522,00	74,25
	Jumlah	1.531.527.128.590,00	1.478.736.504.396,39	52.790.624.193,61	96,55

Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.531.527.128.590,00 dan realisasi sebesar Rp1.478.739.504.396,39 atau 96,55%. Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2020 sebesar Rp1.478.739.504.396,39,00 mengalami kenaikan sebesar Rp183.034.574.104,39 atau 14,13% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.295.701.930.292,00.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2020 per OPD adalah sebagai berikut:



การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Per OPD

		Tahun 2020			
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	801.201.779.651,00	775.003.930.455,00	26.197.849.196,00	96,73
2	Dinas Kesehatan	46.370.672.286,00	44.575.407.650,00	1.795.264.636,00	96,13
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	25.192.681.810,00	22.636.678.327,00	2.556.003.483,00	89,85
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.807.743.425,00	3.459.150.222,00	348.593.203,00	90,85
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.255.106.853,00	3.025.119.183,00	229.987.670,00	92,93
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.318.261.238,00	6.877.592.093,00	440.669.145,00	93,98
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.064.867.707,00	4.757.227.101,00	307.640.606,00	93,93
8	Dinas Sosial	22.988.955.422,00	20.792.506.269,00	2.196.449.153,00	90,45
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.213.409.577,00	12.621.851.123,00	591.558.454,00	95,52
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.862.851.683,00	2.712.519.691,00	150.331.992,00	94,75
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23.261.645.769,00	21.962.577.363,00	1.299.068.406,00	94,42
12	Dinas Perhubungan	7.802.701.149,00	7.215.352.196,00	587.348.953,00	92,47
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.479.035.913,00	4.020.811.086,00	458.224.827,00	89,77
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.415.093.450,00	3.280.481.297,00	134.612.153,00	96,06
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	3.579.953.675,00	3.467.661.348,00	112.292.327,00	96,86
16	Dinas Kebudayaan	12.281.763.769,00	11.905.878.556,00	375.885.213,00	96,94
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.656.323.083,00	7.205.540.961,00	450.782.122,00	94,11
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.473.091.847,00	8.105.814.539,00	367.277.308,00	95,67
19	Dinas Pariwisata	4.549.509.238,00	4.319.794.093,00	229.715.145,00	94,95
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.221.749.995,00	24.219.196.338,00	1.002.553.657,00	96,03
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.390.580.120,00	7.815.281.669,00	575.298.451,00	93,14
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	2.801.609.507,00	2.783.613.656,00	17.995.851,00	99,36
23	Sekretariat Daerah	26.541.994.643,00	25.052.853.729,00	1.489.140.914,00	94,39
24	Badan Penghubung Daerah	2.615.081.856,00	2.614.320.979,00	760.877,00	99,97
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40.195.138.200,00	38.852.849.274,00	1.342.288.926,00	96,66
26	Sekretariat DPRD	5.621.721.733,00	5.221.659.813,00	400.061.920,00	92,88
27	Inspektorat	6.152.304.795,00	6.033.765.426,00	118.539.369,00	98,07
28	Paniradya Kaistimewan	2.971.033.887,00	2.932.195.691,00	38.838.196,00	98,69
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.620.778.027,00	7.378.586.333,00	242.191.694,00	96,82
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	114.693.234.328,00	106.436.629.629,39	8.256.604.698,61	92,80
31	PPKD/BUD	-	-	-	-
32	Badan Kepegawaian Daerah	277.081.466.891,00	276.855.308.108,00	226.158.783,00	99,92
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.844.987.063,00	4.594.350.198,00	250.636.865,00	94,83
	Jumlah	1.531.527.128.590,00	1.478.736.504.396,39	52.790.624.193,61	96,55

Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2020 sebesar Rp83.500.380.311,00 mengalami penurunan sebesar Rp174.561.444.278,00 atau 67,64% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2019 yaitu sebesar Rp258.061.824.589,00.

Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp83.500.380.311,00 atau 84,77% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Sesuai Obyek Belanja

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
а	Uang Lembur	-		•	-
b	Honorarium PNS	20.329.227.000,00	19.596.115.725,00	733.111.275,00	96,39
С	Honorarium Non PNS	56.612.132.140,00	53.211.130.868,00	3.401.001.272,00	93,99
d	Belanja Pegawai BLUD	20.441.866.990,15	9.678.748.718,00	10.763.118.272,15	47,35
е	Belanja Pegawai BOS	1.124.104.000,00	1.014.385.000,00	109.719.000,00	90,24
	Jumlah	98.507.330.130,15	83.500.380.311,00	15.006.949.819,15	84,77

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2020 per OPD adalah sebagai berikut:



การ พยาหญาพ๛ การเมาผู้ ๆ ยาเขา ๆ เพาะ การเมาผู้

Tabel 5.22
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung Per OPD

			Tahun 2020		
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	14.091.488.880,00	13.635.073.140,00	456.415.740,00	96,76
2	Dinas Kesehatan	19.749.821.110,15	9.105.268.578,00	10.644.552.532,15	46,10
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	15.458.220.000,00	15.359.850.750,00	98.369.250,00	99,36
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	400.420.000,00	250.823.250,00	149.596.750,00	62,64
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.565.860.000,00	1.503.590.000,00	62.270.000,00	96,02
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.452.855.000,00	3.426.040.152,00	26.814.848,00	99,22
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	256.950.000,00	254.510.000,00	2.440.000,00	99,05
8	Dinas Sosial	4.578.090.000,00	4.298.050.000,00	280.040.000,00	93,88
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	578.930.000,00	493.870.000,00	85.060.000,00	85,31
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	120.010.000,00	113.195.000,00	6.815.000,00	94,32
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.517.546.700,00	4.369.265.546,00	148.281.154,00	96,72
12	Dinas Perhubungan	355.550.000,00	348.555.000,00	6.995.000,00	98,03
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	486.080.000,00	476.235.000,00	9.845.000,00	97,97
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	536.960.000,00	515.670.000,00	21.290.000,00	96,04
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	50.280.000,00	46.030.000,00	4.250.000,00	91,55
16	Dinas Kebudayaan	8.812.810.440,00	6.788.377.500,00	2.024.432.940,00	77,03
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	118.800.000,00	96.489.000,00	22.311.000,00	81,22
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	522.940.000,00	512.105.000,00	10.835.000,00	97,93
19	Dinas Pariwisata	153.420.000,00	134.394.400,00	19.025.600,00	87,60
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.721.025.000,00	3.583.428.750,00	137.596.250,00	96,30
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	463.580.000,00	458.475.000,00	5.105.000,00	98,90
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	-	-
23	Sekretariat Daerah	3.117.930.000,00	2.895.035.000,00	222.895.000,00	92,85
24	Badan Penghubung Daerah	57.560.000,00	49.115.000,00	8.445.000,00	85,33
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-
26	Sekretariat DPRD	75.210.000,00	70.360.000,00	4.850.000,00	93,55
27	Inspektorat	5.192.948.000,00	5.089.459.475,00	103.488.525,00	98,01
28	Paniradya Kaistimewan	2.561.130.000,00	2.381.155.000,00	179.975.000,00	92,97
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.416.100.000,00	1.351.256.000,00	64.844.000,00	95,42
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.253.320.000,00	5.085.708.020,00	167.611.980,00	96,81
31	PPKD/BUD	-	-	-	-
32	Badan Kepegawaian Daerah	780.315.000,00	751.065.000,00	29.250.000,00	96,25
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	61.180.000,00	57.930.750,00	3.249.250,00	94,69
	Jumlah	98.507.330.130,15	83.500.380.311,00	15.006.949.819,15	84,77

B. Belanja Barang dan Jasa

Rp707.629.279.470,01

Rp1.072.294.764.575,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp707.629.279.470,01 merupakan konversi dari realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp782.824..429.433,01 dikurangi dengan realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp67.677.202.052,00 dan Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp7.517.947.911,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.23 Konversi Belanja Hibah Barang Ke Belanja Hibah

NI-	Urajan		Tahun 2019		
No.	Oraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa	905.031.751.647,71	782.824.429.433,01	86,50	1.219.154.114.509,46
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Masyarakat/Pihak Ketiga	(79.588.886.880,00)	(75.195.149.963,00)	94,48	(146.859.349.934,46)
а	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan kepada	(70.689.402.000,00)	(67.677.202.052,00)	95,74	(96.417.920.031,46)
b	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan kepada	(8.899.484.880,00)	(7.517.947.911,00)	84,48	(50.441.429.903,00)
	Jumlah	825.442.864.767,71	707.629.279.470,01	85,73	1.072.294.764.575,00

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.



Selanjutnya penyajian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar anggaran dan Belanja Barang dan Jasa sebelum konversi dikurangi dengan anggaran dan realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat dan anggaran serta realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2020 sebelum dikonversi dianggarkan sebesar Rp905.031.751.647,71 dan realisasi sebesar Rp782.830.947.893,01 atau 86,50%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp436.323.166.616,45 atau 35,79% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.219.154.114.509,46. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sesuai Dengan Obyek Belanja

		Tahun 2020			
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Belanja Bahan Pakai Habis	20.624.677.843,00	19.488.864.840,00	1.135.813.003,00	94,49
2	Belanja Bahan/Material	72.181.497.829,18	63.498.920.943,00	8.682.576.886,18	87,97
3	Belanja Jasa Kantor	235.752.941.524,39	211.118.527.592,00	24.634.413.932,39	89,55
4	Belanja Premi Asuransi	1.303.627.200,00	1.232.049.442,00	71.577.758,00	94,51
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.638.956.415,00	15.641.565.381,00	1.997.391.034,00	88,68
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.955.961.330,23	20.294.260.476,00	1.661.700.854,23	92,43
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.668.683.887,00	5.218.149.047,00	1.450.534.840,00	78,25
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.541.710.500,00	2.625.071.300,00	1.916.639.200,00	57,80
9	Belanja Sewa Alat Berat	815.970.000,00	686.500.800,00	129.469.200,00	84,13
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.791.152.000,00	7.971.790.911,00	2.819.361.089,00	73,87
11	Belanja Makanan dan Minuman	37.767.103.700,00	32.863.848.500,00	4.903.255.200,00	87,02
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	719.305.000,00	689.710.000,00	29.595.000,00	95,89
13	Belanja Pakaian Kerja	2.811.342.000,00	2.596.892.750,00	214.449.250,00	92,37
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.217.612.250,00	3.059.712.850,00	157.899.400,00	95,09
15	Belanja Perjalanan Dinas	52.307.382.734,00	31.013.363.323,00	21.294.019.411,00	59,29
16	Belanja Pemeliharaan	47.069.947.711,00	44.570.085.445,01	2.499.862.265,99	94,69
17	Belanja Jasa Konsultansi	35.665.630.551,00	33.655.752.775,00	2.009.877.776,00	94,36
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.066.580.000,00	1.984.630.000,00	81.950.000,00	96,03
19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	1.205.052.000,00	1.014.977.352,00	190.074.648,00	84,23
20	Honorarium PNS (Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber)	26.070.264.500,00	21.570.564.500,00	4.499.700.000,00	82,74
21	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.040.084.160,00	4.266.200.000,00	773.884.160,00	84,65
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	87.799.307.573,91	59.250.219.679,00	28.549.087.894,91	67,48
23	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.689.402.000,00	67.677.202.052,00	3.012.199.948,00	95,74
24	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.899.484.880,00	7.517.947.911,00	1.381.536.969,00	84,48
25	Belanja Barang dan Jasa BOS	107.433.024.059,00	99.582.403.024,00	7.850.621.035,00	92,69
26	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	1.650.000.000,00	1.536.600.000,00	113.400.000,00	93,13
27	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	22.224.700.000,00	22.092.740.000,00	131.960.000,00	99,41
28	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	120.350.000,00	112.397.000,00	7.953.000,00	93,39
	Jumlah	905.031.751.647,71	782.830.947.893,01	122.200.803.754,70	86,50

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 per OPD adalah sebagai berikut:



การและ การเกาะ
Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per OPD

			Tahun 2020		
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	290.117.633.766,00	272.592.462.076,00	17.525.171.690,00	93,96
2	Dinas Kesehatan	100.075.138.465,14	69.368.057.160,00	30.707.081.305,14	69,32
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	80.088.758.444,00	68.781.562.892,01	11.307.195.551,99	85,88
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	6.484.708.888,00	5.318.058.638,00	1.166.650.250,00	82,01
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.550.320.500,00	2.917.434.105,00	632.886.395,00	82,17
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.334.352.100,00	3.190.101.227,00	144.250.873,00	95,67
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.444.206.387,00	9.078.990.859,00	(634.784.472,00)	107,52
8	Dinas Sosial	38.099.473.181,11	34.553.596.455,00	3.545.876.726,11	90,69
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.339.242.970,00	8.357.634.018,00	981.608.952,00	89,49
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	4.382.922.940,00	4.027.191.903,00	355.731.037,00	91,88
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.455.633.217,00	17.303.537.869,00	2.152.095.348,00	88,94
12	Dinas Perhubungan	14.870.529.614,00	13.442.927.470,00	1.427.602.144,00	90,40
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.941.536.500,00	14.989.858.968,00	951.677.532,00	94,03
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	13.355.670.778,00	12.134.854.261,00	1.220.816.517,00	90,86
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	2.049.245.249,00	1.779.067.001,00	270.178.248,00	86,82
16	Dinas Kebudayaan	86.165.755.182,00	74.513.722.438,00	11.652.032.744,00	86,48
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	13.919.556.819,00	13.357.879.087,00	561.677.732,00	95,96
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.450.520.110,00	11.735.919.250,00	714.600.860,00	94,26
19	Dinas Pariwisata	12.114.016.250,00	7.849.267.490,00	4.264.748.760,00	64,79
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.237.800.413,46	12.188.514.615,00	1.049.285.798,46	92,07
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.338.654.280,00	8.411.818.198,00	926.836.082,00	90,08
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	-	-	-	-
23	Sekretariat Daerah	27.631.443.893,00	20.799.895.806,00	6.831.548.087,00	75,28
24	Badan Penghubung Daerah	1.936.149.000,00	1.750.551.072,00	185.597.928,00	90,41
25	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-
26	Sekretariat DPRD	65.359.551.111,00	48.374.713.497,00	16.984.837.614,00	74,01
27	Inspektorat	1.980.028.000,00	1.669.950.981,00	310.077.019,00	84,34
28	Paniradya Kaistimewan	4.349.329.650,00	3.884.458.825,00	464.870.825,00	89,31
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.469.396.170,00	5.136.855.056,00	1.332.541.114,00	79,40
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	25.283.830.950,00	23.352.493.357,00	1.931.337.593,00	92,36
31	PPKD/BUD	-	-	-	-
32	Badan Kepegawaian Daerah	9.417.601.466,00	7.766.095.934,00	1.651.505.532,00	82,46
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	5.788.745.354,00	4.196.958.925,00	1.591.786.429,00	72,50
	Jumlah	905.031.751.647,71	782.824.429.433,01	122.207.322.214,70	86,50

C. Belanja Bunga Rp0,00 Rp0,00

Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00.

D. Belanja Subsidi

Rp78.044.846.317,00

Rp76.067.609.352,00

Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp78.044.866.828,00 dan realisasi sebesar Rp78.044.846.317,00 atau sebesar 100%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 41 ayat (1) Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tersebut merupakan perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk/jasa pelayanan umum masyarakat. Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi. Belanja Subsidi pada Pemda DIY merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy The Service kepada PT. Anindya Mitra Internasional. Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI berhak atas subsidi, pendapatan dari tiket dan pendapatan lain-lain, dan mengusulkan tarif layanan



angkutan. Secara rinci ketentuan tentang Subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2019 tentang Subsidi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Servise*.

E. Belanja Hibah

Rp744.149.764.252,00

Rp735.398.604.386,46

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 sebesar Rp744.398.337.052,00 terdiri dari Belanja Hibah dalam bentuk uang sebesar Rp676.472.562.200,00 dan Belanja Hibah dalam bentuk barang/jasa sebesar Rp67.677.202.052,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp8.751.159.865,54 atau 1,19% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 yaitu sebesar Rp735.398.604.386,46.

Belanja Hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD dan Belanja Hibah dalam bentuk barang direalisasikan melalui Belanja Hibah Barang/Jasa obyek Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD.

Belanja Hibah dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung PPKD sebesar Rp751.144.104.600,00 dan realisasi sebesar Rp676.472.562.200,00 atau 90,06% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang

			Tahun 2020			
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian	
1	Hibah Urusan Pendidikan	619.021.710.000,00	559.513.725.000,00	59.507.985.000,00	90,39	
2	Hibah Urusan Kesehatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00	
3	Hibah Urusan Sosial	417.500.000,00	417.500.000,00	-	100,00	
4	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	968.800.000,00	968.800.000,00	-	100,00	
5	Hibah Urusan Pangan	230.000.000,00	230.000.000,00	-	100,00	
6	Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.185.000.000,00	2.185.000.000,00	-	100,00	
7	Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika	805.866.000,00	557.508.600,00	248.357.400,00	69,18	
8	Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	259.000.000,00	259.000.000,00	-	100,00	
9	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	1.000.000.000,00	400.000.000,00	600.000.000,00	40,00	
10	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	15.000.000.000,00	6.000.000.000,00	9.000.000.000,00	40,00	
11	Hibah Untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	5.315.200.000,00	-	5.315.200.000,00	-	
12	Hibah Urusan Keistimewaan	102.460.490.600,00	102.460.490.600,00	-	100,00	
13	Hibah kepada Partai Politik	2.480.538.000,00	2.480.538.000,00	-	100,00	
	Jumlah	751.144.104.600,00	676.472.562.200,00	74.671.542.400,00	90,06	

Penjelasan Belanja Hibah (Uang) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Hibah Urusan Pendidikan

Hibah Urusan Pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp619.021.710.000,00 dan realisasi sebesar Rp559.762.297.800,00 atau 90,43% dengan rincian sebagai berikut:



การ พยาหางพลางเมาผู้ๆผบางพาฦหางท

Tabel 5.27 Rincian Hibah Urusan Pendidikan

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	BOSNAS DIKDAS/SM	527.270.960.000,00	513.241.900.000,00	14.029.060.000,00	97,34
2	BOSDA SM SWASTA (Sekolah)	43.325.590.000,00	27.666.825.000,00	15.658.765.000,00	63,86
3	BOSDA SLB (Sekolah)	5.760.160.000,00	5.143.000.000,00	617.160.000,00	89,29
	Kelembagaan:			-	
4	Lembaga Orang Tua Asuh	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
5	Kwarda DIY	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00
6	KONI DIY	29.000.000.000,00	8.997.000.000,00	20.003.000.000,00	31,02
7	NPC DIY	12.500.000.000,00	3.400.000.000,00	9.100.000.000,00	27,20
8	Dewan Pendidikan DIY	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00
9	PGRI DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
10	KNPI DIY	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	618.921.710.000,00	559.513.725.000,00	59.407.985.000,00	90,40

Penjelasan:

Hibah Urusan Pendidikan BOSNAS DIKDAS/SM merupakan hibah BOSNAS dari Pemerintah yang disalurkan langsung kepada Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus Swasta serta Satuan Pendidikan Dasar baik negeri maupun swasta. Mekanisme penyaluran BOSNAS Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah disalurkan langsung dari rekening Kas Negara ke Rekening BOS di sekolah. Realisasi Belanja Hibah BOSNAS dilakukan berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah oleh PPKD Provinsi berdasarkan Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Hibah dari sekolah. BOSNAS DIKDAS/SM dianggarkan sebesar Rp527.270.960.000,00 dan realisasi sebesar Rp513.241.900.000,00 atau 97,34% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Urajan	Realisasi BOS
	Oraian	(Rp)
1	PROVINSI DIY	
	SMA Swasta	25.553.400.000,00
	SMK Swasta	66.475.200.000,00
	SLB Swasta	9.575.200.000,00
	Jumlah	101.603.800.000,00
2	KOTA YOGYAKARTA	
	SD Negeri	17.973.360.000,00
	SMP Negeri	11.257.180.000,00
	SD Swasta	18.607.050.000,00
	SMP Swasta	11.078.370.000,00
	Jumlah	58.915.960.000,00
3	KABUPATEN BANTUL	
	SD Negeri	49.297.020.000,00
	SMP Negeri	27.114.340.000,00
	SD Swasta	17.425.080.000,00
	SMP Swasta	8.142.320.000,00
	Jumlah	101.978.760.000,00
4	KABUPATEN KULON PROGO	
	SD Negeri	26.989.410.000,00
	SMP Negeri	14.450.940.000,00
	SD Swasta	6.404.280.000,00
	SMP Swasta	3.294.110.000,00
	Jumlah	51.138.740.000,00
5	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
	SD Negeri	42.257.760.000,00
	SMP Negeri	21.946.640.000,00
	SD Swasta	5.915.130.000,00
	SMP Swasta	6.075.470.000,00
	Jumlah	76.195.000.000,00
6	KABUPATEN SLEMAN	
	SD Negeri	53.891.100.000,00
	SMP Negeri	26.443.550.000,00
	SD Swasta	26.758.050.000,00
	SMP Swasta	16.316.940.000,00
	Jumlah	123.409.640.000,00
	Jumlah Total	513.241.900.000,00



การและ การเกาะ
Hibah Urusan Pendidikan berupa BOSDA SM Swasta merupakan hibah BOSDA yang bersumber dari APBD DIY yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Menengah Swasta dengan anggaran sebesar Rp43.325.590.000,00 dan realisasi sebesar Rp27.666.825.000,00 atau 63,86% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29 Rincian Hibah BOSDA

No.	Uraian	Gelombang 1 (Rp)	Gelombang 2 (Rp)	Gelombang 3 (Rp)
1	Kota Yogyakarta	2.723.000.000,00	1.231.475.000,00	3.954.475.000,00
2	Kabupaten Bantul	3.661.500.000,00	2.166.050.000,00	5.827.550.000,00
3	Kabupaten Kulon Progo	3.133.300.000,00	349.000.000,00	3.482.300.000,00
4	Kabupaten Gunungkidul	5.510.475.000,00	1.813.750.000,00	7.324.225.000,00
5	Kabupaten Sleman	4.397.550.000,00	2.680.725.000,00	7.078.275.000,00
	Jumlah	19.425.825.000,00	8.241.000.000,00	27.666.825.000,00

Hibah BOS SLB dianggarkan sebesar Rp5.760.160.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.143.000.000,00 atau 89,29% diberikan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh swasta. Sisa anggaran disebabkan karena data siswa yang digunakan pada saat perencanaan dan pencairan berbeda. Perbedaan data siswa disebabkan adanya perbedaan tahun ajaran sekolah dan tahun anggaran.

Hibah untuk Pembinaan Kelembagaan Bidang Pendidikan, Pembinaan Kepemudaan dan Pembinaan Olahraga dianggarkan direalisasikan untuk Lembaga Orang Tua Asuh, Kwarda DIY, KONI DIY, NPC DIY, Dewan Pendidikan DIY, PGRI DIY dan KNPI DIY. Hibah untuk KONI dan NPC DIY terdapat sisa hibah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dikarenakan kegiatan tidak jadi dilaksanakan pada Tahun 2020 sehubungan dengan terjadinya Pandemi Covid-19.

2) Hibah Urusan Kesehatan

Hibah Urusan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis. Dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30
Rincian Penerima Hibah Urusan Kesehatan

		Tahun 2020					
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp) Selisih Lebih (Kurang) (Rp)		% Capaian		
1	Palang Merah Indonesia (PMI) DIY	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00		
2	Komisi Penanggulangan AIDS DIY	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00		
	Jumlah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	•	100,00		

3) Hibah Urusan Sosial

Hibah Urusan Sosial dikelola oleh Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp417.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp417.500.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.31
Rincian Penerima Hibah Urusan Sosial

		Tahun 2020					
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian		
ı	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasa	lah Sosial					
а	Rumah Singgah Ahmad Dahlan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00		
b	Rumah Singgah HAFARA	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00		
С	Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00		
d	Yayasan Anak Mandiri	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00		
е	Yayasan Rumah Impian Indonesia	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00		
f	PA Rumah Anak Indonesia	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00		
g	LKS Indria-Nati	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00		
h	Yayasan Sayap Ibu Cabang DIY	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
i	Yayasan Lembaga Perlindungan Anak	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
	Jumlah	92.500.000,00	92.500.000,00	-	100,00		
ıı.	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga	Rentan dan Miskin					
а	KOMDA LU DIY	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00		
	Jumlah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00		
III	Pembinaan dan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PS	SKS)					
а	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial "BK3S" DIY	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00		
b	Karang Taruna DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
С	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat DIY	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
	Jumlah	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00		
	Jumlah	417.500.000,00	417.500.000,00	-	100,00		

4) Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hibah Urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagai OPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp968.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp968.800.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32

Rincian Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		Tahun 2020					
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian		
I	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						
а	Sejahtera Jaya, Kricak Tegalrejo Yogyakarta	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
b	Prima jati, Jatimulyo Dlingo Bantul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
С	Wilis Makmur, Hargowilis Kokap Kulon Progo	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
d	Gading Mas, Srigading Sanden Bantul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
е	Srikandi Mataram, Margodadi Seyegan Sleman	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
f	Putri Mandiri, Terbah Patuk Gunungkidul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
g	Lancar Berkah, Srikayangan Sentolo Kulon Progo	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
h	Perjius, Planjan Saptosari Gunungkidul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
i	Panggung Makmur, Panggungharjo Sewon Bantul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
j	Gilang Lestari, Gilangharjo Pandak Bantul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
k	Dullor Subur, Sabdodadi Bantul Bantul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
- 1	Ngudi Mukti, Karangtengah Imogiri Bantul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
m	Berkah Indah, Glagah Temon Kulon Progo	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
n	Wanita Tama, Getas Playen Gunungkidul	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
0	Berkah Jaya,	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00		
	Jumlah	375.000.000,00	375.000.000,00	-	100,00		
II	Perlindungan Perempuan dan Anak						
а	Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban	593.800.000,00	593.800.000,00	-	100,00		
	Kekerasan dan Integrasi P2TPAKK "RUD"DIY						
	Jumlah	593.800.000,00	593.800.000,00	-	100,00		
	Jumlah Total	968.800.000,00	968.800.000,00		100,00		



กลา พยาหญาพ๛ทางพาผูกของทุพทางทางพา

5) Hibah Urusan Pangan

Hibah Urusan Pangan dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp230.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp230.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Rincian Hibah Urusan Pangan

		Tahun 2020					
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian		
1	KWT Anugrah Guwosari, Guwosari Pajangan Bantu	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00		
2	KWT Sarwodadi, Hargotirto Kokap Kulon Progo	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00		
3	KT. Margo Dadi, Girikerto Panggang Gunungkidul	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
4	KWT. Srikandi, Trimurti Srandakan Bantul	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
5	KT. Berkah Rejeki, Kalirejo Kokap Kulon Progo	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00		
6	Gapoktan Makmur Sejahtera, Tuksono Sentotlo Kulon Progo	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
7	Gapoktan Wono Makmur, Wonokerto Turi Sleman	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00		
	Jumlah Total	230.000.000,00	230.000.000,00	-	100,00		

6) Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikelola oleh Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan. Hibah dianggarkan sebesar Rp2.185.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.185.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34

Rincian Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	Uraian	Tahun 2020					
No.		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian		
1	LPMK Bumijo	75.000.000,00	75.000.000,00	=	100,00		
2	LPMD Kemiri	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00		
3	LPMD Kemiri	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00		
4	LPMD Argomulyo	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00		
5	LPMK Ngampilan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00		
6	LPMD Tamanmartani	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00		
7	LPMD Mulo	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00		
8	LPMD Hargorejo	75.000.000,00	75.000.000,00	-	100,00		
9	LPMD Purwosari	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00		
10	LPMD Sumberagung	125.000.000,00	125.000.000,00	-	100,00		
11	TP PKK DIY	960.000.000,00	960.000.000,00	-	100,00		
	Jumlah Total	1.810.000.000,00	1.810.000.000,00	-	100,00		

7) Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika

Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika dikelola oleh OPD Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika. Hibah dianggarkan sebesar Rp805.866.000,00 dan realisasi sebesar Rp557.508.600,00 atau 69,18% diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY.

8) Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dikelola oleh OPD Teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hibah dianggarkan sebesar Rp259.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp259.000.000,00 atau 100% diberikan kepada Koperasi PPDI DIY.



การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ

9) Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dikelola oleh OPD Biro Bina Mental dan Spiritual dan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol. Hibah dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp400.000.000,00 atau 40%. Realisasi Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum sebesar Rp400.000.000,00 diberikan kepada MUI DIY sebesar Rp200.000.000,00 dan BAZNAS DIY sebesar Rp200.000.000,00.

10) Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur

Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,000 dan realisasi sebesar Rp6.000.000.000,000 atau 40%. Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur direalisasikan sesuai dengan permohonan yang ada dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35 Rincian Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur

No.	Penerima	Kabupaten/Kota	Peruntukan	Jumlah (Rp)		
1	Kalurahan Ponjong	Gunungkidul	Pengembangan Sustainable Farming	1.000.000.000,00		
2	Kalurahan Bleberan	Gunungkidul	Pengembangan Usaha Jamur Tiram, Green House dan Program Air Bersih	750.000.000,00		
3	Pemdes Purwobinangun	Sleman	Pembangunan Akses Wisata di Destinasi Wisata Turgo	1.000.000.000,00		
4	Kalurahan Pagerharjo	Kulon Progo	Penyempurnaan Camp, Rest Area Segitik, dan Pembangunan Toilet Wisata	750.000.000,00		
5	Kalurahan Hargotirto	Kulon Progo	Pemb. Akses jalan Desa Wisata Segajih Hargotirto	250.000.000,00		
6	Kalurahan Kenteng	Gunungkidul	Pemb. Jalan trap, hand railing, talud, dan gazebo di kawasan Goa Gilap	250.000.000,00		
7	Kalurahan Pacarejo	Gunungkidul	Pemb. Gazebo dan Jogging Track	500.000.000,00		
8	Kalurahan Katongan	Gunungkidul	Pembangunan Toilet dan Penataan Landscape	250.000.000,00		
9	Kalurahan Umbulrejo	Gunungkidul	Aspal jalan dan rabat beton obyek wisata Goa Cokro	250.000.000,00		
10	Kalurahan Purwosari	Kulon Progo	Pemb toilet 10 homestay, Akse wisata di Ayunan Langit Watu Jaran, Tempat ibadah, Gazebo	500.000.000,00		
11	Kalurahan Sumbergiri	Gunungkidul	Pengembangan UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik)	250.000.000,00		
12	Kalurahan Karangasem	Gunungkidul	Pengembangan UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik)	250.000.000,00		
	Jumlah					

11) Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi

Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi dianggarkan sebesar Rp5.315.200.000,00 dan tidak direalisasikan karena tidak terjadi erupsi merapi yang butuh penanganan pasca erupsi. Alokasi anggaran hibah untuk penanganan pasca erupsi Merapi berasal dari sisa sumbangan masyarakat ketika terjadi erupsi merapi.

12) Hibah Urusan Keistimewaan

Hibah Urusan Keistimewaan dikelola oleh Dinas Kebudayaan sebagai OPD Teknis dengan anggaran sebesar Rp102.460.490.600,00 dan realisasi Rp102.460.490.600,00 atau 100% diberikan kepada:



การ เกาะ การ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกา

Tabel 5.36
Rincian Hibah Urusan Keistimewaan

No.	Penerima	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kraton Yogyakarta	Urusan Kebudayaan	76.817.250.000,00
		Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	120.000.000,00
2	Puro Pakualaman	Urusan Kebudayaan	24.000.000.000,00
		Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	120.000.000,00
3	Kwarda DIY	Urusan Kebudayaan	1.403.240.600,00
		102.460.490.600,00	

13) Belanja Hibah Kepada Partai Politik

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan sebagai Belanja Hibah. Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp2.480.538.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.480.538.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37
Rincian Hibah Kepada Partai Politik

	Uraian	Tahun 2020				
No.		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
1	Partai Kebangkitan Bangsa	253.759.200,00	253.759.200,00	100,00		
2	Partai Nasional Demokrat	161.514.000,00	161.514.000,00	100,00		
3	Partai Keadilan Sejahtera	283.305.600,00	283.305.600,00	100,00		
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	785.576.400,00	785.576.400,00	100,00		
5	Partai Golongan Karya	227.136.000,00	227.136.000,00	100,00		
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	269.019.600,00	269.019.600,00	100,00		
7	Partai Demokrat	94.432.800,00	94.432.800,00	100,00		
8	Partai Amanat Nasional	279.979.200,00	279.979.200,00	100,00		
9	Partai Persatuan Pembangunan	74.612.400,00	74.612.400,00	100,00		
10	Partai Solidaritas Indonesia	51.202.800,00	51.202.800,00	100,00		
	Jumlah Total	2.480.538.000,00	2.480.538.000,00	100,00		

Realisasi Belanja Hibah dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pada OPD sebesar Rp70.689.402.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp67.677.202.052,00 atau 95,74% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.38
Rincian Belanja Hibah Barang

			Tahun 2020			
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	47.055.520.000,00	45.593.029.252,00	1.462.490.748,00	96,89	
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral	7.363.503.000,00	6.299.362.850,00	1.064.140.150,00	85,55	
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	740.550.000,00	655.900.000,00	84.650.000,00	88,57	
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	185.000.000,00	182.655.000,00	2.345.000,00	98,73	
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	185.000.000,00	183.225.000,00	1.775.000,00	99,04	
6	Dinas Kebudayaan	11.112.027.400,00	10.944.683.700,00	167.343.700,00	98,49	
7	Dinas Perikanan dan Kelautan	2.244.112.000,00	2.163.136.500,00	80.975.500,00	96,39	
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.278.309.600,00	1.251.531.750,00	26.777.850,00	97,91	
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	525.380.000,00	403.678.000,00	121.702.000,00	76,84	
	Jumlah Total	70.689.402.000,00	67.677.202.052,00	3.012.199.948,00	95,74	



กลา พยาหญาพ๛ทางพาผูกของทุพทางทางพา

Rincian Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Tabel 5.39

Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA)	2.843.418.000,00		Hibah barang berupa Rehab Ruang Kelas, Laboratorium, Toilet, Peralatan Pendidikan TIK, Media Pendidikan dan Sarana Olahraga pada SMA Swasta
2	DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)	43.990.000.000,00		Hibah barang berupa Ruang Praktek Siswa beserta perabotnya, Alat Praktek Utama/Praktek Produksi, Alat Praktek Otomotif Ringan, Alat Praktek Tata Boga, Alat Multi Media, Alat Praktek Tata Busana, Alat Praktek Perhotelan dan Alat Praktek Permesinan pada SMK Swasta
3	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SLB)	222.102.000,00	,	Pembangunan Ruang Kelas Baru SLB Tunas Bhakti Pleret dan SLB Marsudi Putra III Bantul
Jumlah Total 4		47.055.520.000,00	45.593.029.252,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral

Tabel 5.40

Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Pendayagunaan Air Tanah	7.363.503.000,00	·	Belanja pembuatan sumur bor air tanah dalam dan sumur resapan di Kabupaten Sleman (6 unit sumur bor dan 120 unit sumur resapan), pembuatan sumur or air tanah dalam dan sumur resapan di Kabupaten Bantul (4 unit sumur bor dan 80 sumur resapan), dan pembuatan sumur bor air tanah dalam dan sumur resapan di Kabupaten Gunungkidul (4 unit sumur bor dan 80 sumur resapan)
	Jumlah Total	7.363.503.000,00	6.299.362.850,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 5.41

Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Pembentukan Kesempatan Kerja	740.550.000,00	·	Bantuan Peralatan Usaha TKM berupa Kolam Terpal Bulat Ukuran 1,5 m x 1 m dengan rangka dan Instalasi Aquaponik Ukuran 2m x 1 m (pipa pralon 2,5 inc tanpa atap) untuk 16 Kelompok
Jumlah Total		740.550.000,00	655.900.000,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp182.655.000,00 merupakan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Perempuan dengan hibah barang berupa Peralatan Sarana Usaha kepada 5 kelompok pada Desa Mandiri Budaya yaitu:

- 1. Kelompok Sejahtera, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul.
- 2. Kelompok Lestari, Sendangmulyo, Minggir, Sleman.
- 3. Kelompok Dullor Subur, Sabdodadi, Bantul.
- 4. Kelompok Sejahtera Abadi, Pagerharjo,, Samigaluh, Kulon Progo.
- 5. Kelompok Gumregah, Putat, Pathuk, Gunungkidul.

Rincian Hibah Barang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.



การ เกาะ การ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกา

Tabel 5.42 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Pengembangan Kewirausahaan Desa	185.000.000,00		Pengembangan kewirausahaan desa tahap 2 (pengembangan) berupa pemberian bantuan alat pada 5 Kelompok Olahan: 1. Kelompok Olahan Okra Desa Sabdodadi, Bantul, Bantul 2. Kelompok Olahan Daging Sapi Desa Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul 3. Kelompok Olahan Coklat Desa Putat, Patuk, Gunungkidul 4. Kelompok Olahan Mpon-mpon Desa Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo 5. Kelompok Olahan Salak Desa Bangunkerto, Turi, Sleman)
	Jumlah Total	185.000.000,00	183.225.000,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Perikanan dan Kelautan

Tabel 5.43

Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Perikanan dan Kelautan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (DAK)	627.342.000,00		Belanja rahabilitasi UPI untuk 5 kelompok dan Belanja pembuatan Desain Gambar UPI untuk 5 kelompok
2	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya	505.152.000,00		Belanja bahan percontohan Ikan Lele untuk 24 Kelompok, Belanja bahan percontohan Ikan Hias untuk 2 Kelompok, Belanja bahan percontohan benih Ikan Lele 1 Kelompok, Belanja bahan percontohan benih Ikan Nila untuk 5 Kelompok
3	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Budidaya	1.077.618.000,00		Belanja sarana dan prasarana untuk sektor budidaya Ikan Lele untuk 24 Kelompok, Belanja sarana dan prasarana untuk sektor budidaya Ikan Nila untuk 10 Kelompok, dan Belanja sarana dan prasarana untuk sektor budidaya Ikan Gurami untuk 9 Kelompok
4	Pengembangan Budaya Bahari	34.000.000,00	·	Belanja dalam rangka Pelatihan SIBUDIDIKUCIR (Kincir Air) untuk 3 KPI
	Jumlah Total	2.244.112.000,00	2.163.136.500,00	

Rincian Hibah Barang pada Dinas Perindstrian dan Perdagangan

Tabel 5.44

Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Pengembangan Industri Kreatif	525.380.000,00	·	Belanja Pengadaan Bantuan Peralatan sebanyak 9 Paket untuk 9 Kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM)
	Jumlah Total	525.380.000,00	403.678.000,00	



Rincian Hibah Barang pada Dinas Kebudayaan

Tabel 5.45

Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Kebudayaan

Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	198.000.000,00	196.020.000,00	Belanja alat perlengkapan protokol kesehatan untuk 36 Museum
2 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Buday			
	a 3.025.627.400,00	2.948.000.000,00	Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta-nDalem Notoprajan (Kraton Yogyakarta, Kelurahan Penambahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, DIY), Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta-Bangunan Pekapalan (Kraton Yogyakarta, Kelurahan Penambahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, DIY), Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta-Masjid Wijirejo (Kraton Yogyakarta, Kelurahan Penambahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, DIY), Rehabilitasi WBCB Aset Kraton Yogyakarta-Kawasan Masjid Giriloyo (Kraton Yogyakarta, Kelurahan Penambahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, DIY), Rehabilitasi WBCB Aset Pura Pakualaman-Penataan Interior Bisokop Permata, Rehabilitasi WBCB Aset Masyarakat-Gereja Santo Antonius Kotabaru (Jalan Abu Bakar Ali, Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY)
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	2.194.960.000,00	2.121.763.700,00	
4 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	5.693.440.000,00	5.678.900.000,00	Pengadaan Gamelan Perunggu Laras Pelog Slendro 13 Penerima (1. Desa Budaya Glagah, Temon, Kulon Progo 2. Desa Budaya Tuksono, Sentolo, Kulon Progo 3. Desa Budaya Kalirejo, Kokap, Kulon Progo, 4. Desa Budaya Bugel, Panjatan, Kulon Progo 5. Desa Budaya Jeruk Wudel, Girisubo, Gunungkidul 6. Desa Budaya Katongan, Nglipar, Gunungkidul 7. Desa Budaya Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul 8. Desa Budaya Semin, Semin, Gunungkidul 9. Kalurahan Budaya Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta 10. Desa Budaya Pandowoharjo, Sleman, Sleman 11. Desa Budaya Margoadai, Seyegan, Sleman 12. Desa Budaya Sendangagung, Minggir, Sleman 13. Desa Budaya Margoagung, Seyegan, Sleman 11. Desa Budaya Gl. Kalurahan Budaya Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta 2. Kalurahan Budaya Terban, Gondokusuman, Yogyakarta 3. Desa Budaya Panggungharjo, Sewon, Bantul 4. Desa Budaya Selopamioro, Imogiri, Bantul 5. Desa Budaya Srigading, Sanden, Bantul 6. Desa Budaya Sabdodai, Bantul, Bantul 7. Desa Budaya Sitimulyo, Piyungan, Bantul 8. Desa Budaya Dingo, Dlingo, Bantul 9. Desa Budaya Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul 10. Desa Budaya Seloharjo,
			Pundong, Bantul 11. Desa Budaya Gilangharjo, Pandak, Bantul 12. Desa Budaya Trimurti, Srandakan, Bantul 13. Desa Budaya Triwidadi,



การ เกาะ การ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกา

Rincian Hibah Barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tabel 5.46 Rincian Belanja Hibah Barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Budidaya Tanaman Pangan	716.201.000,00	689.476.000,00	Belanja Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (untuk 1 P3A, 4 Kelompok Tani, dan 3 Gapoktan), Belanja Jalan Usaha Tani (untuk 5 Kelompok Tani), Belanja Pupuk NPK untuk pendampingan ubi kayu (untuk 4 Kelompok Tani), Belanja Power Threser Multiguna (untuk 2 Kelompok Tani), Belanja Hand Sprayer (untuk 8 Kelompok Tani), Belanja Hand Traktor (untuk 7 Kelompok Tani), Belanja Pompa Air (untuk 101 Kelompok Tani dan P3A)
2	Budidaya Tanaman Hortikultura	81.124.300,00	81.071.450,00	Belanja sarana dan prasarana budidaya hortikultura di lahan pekarangan untuk 5 KWT, belanja sarana dan prasarana budidaya tanaman biofarmaka untuk 2 Kelompok Tani, belanja Sarana Irigasi untuk Mendukung Pertanaman Hortikultura untuk 3 Kelompok Tani, dan belanja sarana dan prasarana tanaman stroberi untuk 2 Kelompok Tani
3	Pengembangan Lumbung Mataraman	480.984.300,00	480.984.300,00	Belanja demplot Lumbung Mataraman Tahap Penumbuhan (8) untuk 11 KWT, belanja sarana prasarana alat Kelompok Limbung Mataram Paska Tahap untuk 11 KWT, belanja sarana dan prasarana produksi budidaya di lahan surjan 11 Kelompok Tani, dan belanja sarana dan prasarana produksi budidaya sistem sabuk gunung untuk 3 Kelompok Tani dan 3 Gapoktan
	Jumlah Total	1.278.309.600,00	1.251.531.750,00	

Sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Hibah dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Hibah.

Selanjutnya Realisasi Belanja Hibah Uang dan Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2020 digabung menjadi:

Tabel 5.47 Konversi Belanja Hibah

No.	Uraian		Tahun 2019		
NO.	Of didff	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Belanja hibah Uang	751.144.104.600,00	676.472.562.200,00	90,06	638.980.684.355,00
	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.689.402.000,00	67.677.202.052,00	95,74	96.417.920.031,46
	Jumlah	821.833.506.600,00	744.149.764.252,00	90,55	735.398.604.386,46

F. Belanja Bantuan Sosial

Rp9.009.947.911,00

Rp51.143.429.903,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp11.391.484.880,00 dengan rincian anggaran Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebesar Rp2.492.000.000,00 dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang sebesar Rp8.899.484.880,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.009.947.911,00 terdiri dari realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebesar Rp1.492.000.000,00 dan realisasi Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang sebesar Rp7.517.947.911,00.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan di PPKD sebesar Rp2.492.000.000,00 terdiri dari Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan sebesar Rp1.492.000.000,00 dan Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan sebesar Rp1.492.000.000,00 telah direalisasikan 100% untuk program Rehabilitasi bagi Penyandang



การและ การเกาะ การและ การแ

Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial sebesar Rp292.000.000,00 dengan penerima sebanyak 32 penerima dan untuk program pelayanan dan perlindungan lanjut usia terlantar serta keluarga rentan dan miskin sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan penerima sebanyak 15 penerima.

Untuk Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 namun tidak direalisasikan.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pada OPD sebesar Rp8.899.484.880,00 dan direalisasikan sebesar Rp7.517.947.911,00 atau 84,48% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48
Rincian Belanja Bantuan Sosial Barang

	Uraian	Tahun 2020				
No.		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian	
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Sumber Daya Mineral	8.729.484.880,00	7.347.982.023,00	1.381.502.857,00	84,17	
2	Badan Penghubung Daerah	170.000.000,00	169.965.888,00	34.112,00	99,98	
	Jumlah	8.899.484.880,00	7.517.947.911,00	1.381.536.969,00	84,48	

Penjelasan:

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dianggarkan sebesar Rp8.729.484.880,00 dan realisasi sebesar Rp7.347.982.023,00 atau 84,17% merupakan Bantuan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan bantuan pengadaan instalasi dan sambungan listrik untuk rumah tangga miskin.

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang pada Badan Penghubung Daerah dianggarkan sebesar Rp170.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp169.965.888,00 atau 99,98% merupakan bantuan untuk pemberdayaan UMKM Yogyakarta di Jakarta berkarakter Yogyakarta.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD maka Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang dikonversi menambah Belanja Bantuan Sosial. Selanjutnya Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2020 digabung menjadi:

Tabel 5.49 Konversi Belanja Bantuan Sosial Uang

No.	Uraian		Tahun 2019		
NO.	Of didff	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang	2.492.000.000,00	1.492.000.000,00	59,87	638.980.684.355,00
	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.899.484.880,00	7.517.947.911,00	84,48	50.441.429.903,00
Jumlah		11.391.484.880,00	9.009.947.911,00	79,09	689.422.114.258,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Rp940.633.924.931,64

Rp1.035.203.185.484,85

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp940.633.924.931,64 atau 96,17% dari anggaran sebesar Rp978.048.321.539,77. Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp94.569.260.553,21 atau 9,14% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.035.203.185.484,85.



การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. Belanja Modal Tanah

Rp696.800.024.901.00

Rp469.142.424.222,00

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp705.576.303.389,00 dan realisasi sebesar Rp696.800.024.901,00 atau 98,76% dengan rincian SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.50
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

		Tahun 2020				
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.692.100.000,00	1.246.621.500,00	445.478.500,00	73,67	
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	402.759.645.637,00	400.312.938.560,00	2.446.707.077,00	99,39	
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	32.972.983.752,00	30.317.701.921,00	2.655.281.831,00	91,95	
4	Dinas Kebudayaan	195.423.874.000,00	192.407.321.080,00	3.016.552.920,00	98,46	
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	72.727.700.000,00	72.515.441.840,00	212.258.160,00	99,71	
	Jumlah	705.576.303.389,00	696.800.024.901,00	8.776.278.488,00	98,76	

Penjelasan:

Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp705.576.303.389,00 dan realisasi sebesar Rp696.800.024.901,00 atau 98,76%. Belanja Modal Tanah direalisasikan pada beberapa OPD berikut:

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp1.692.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.246.621.500,00 atau sebesar 73,67% merupakan Pengadaan Tanah SMK Negeri 1 Samigaluh Kulonprogo.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp402.759.645.637,00 dan realisasi sebesar Rp400.312.938.560,00 atau sebesar 99,39% terdiri dari Pembebasan Tanah JJLS untuk Segmen Ngremang Congot (Garongan) sebesar Rp285.802.677.000,00 dan Pembebasan Tanah JJLS untuk Segmen Tepus Jerukwudel sebesar Rp114.510.261.560,00.
- 3) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp32.972.983.752,00 dan realisasi sebesar Rp30.317.701.921,00 atau sebesar 91,95% merupakan Pengadaan Tanah di Pojok Beteng Lor Wetan.
- 4) Belanja Modal Tanah pada Dinas Kebudayaan dianggarkan sebesar Rp195.423.874.000,00 dan realisasi sebesar Rp192.407.321.080,00 atau 98,46% terdiri dari pengadaan tanah untuk lahan pengembangan Museum Sejarah Purbakala Pleret dan Batikan sebesar Rp22.193.379.720,00, pengadaan tanah dan bangunan Mutiara I dan II sebesar Rp170.211.464.000,00 dan sertifikasi Lahan Situs Kalasan dan Situs Pleret sebesar Rp2.477.360,00.
- 5) Badan Pengelola Keuangan dan Aset menganggarkan Rp72.727.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp72.515.441.840,00 merupakan pembelian tanah dan bangunan HOS Cokroaminoto sebesar Rp67.575.382.800,00 dan Pengadaan Tanah di Baleharjo dan karangrejek 5.036 m2 Gunungkidul sebesar Rp4.940.059.040,00.

B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp137.484.204.942,00 Rp159.857.330.876,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp148.322.892.546,00 dan realisasi sebesar Rp137.484.204.942,00 atau 92,69%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp22.373.125.934,00 atau 14,00% dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 yaitu sebesar Rp159.857.330.876,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



บอทิหูรูเพลทรเพลทรเตมีกูตอเทพเพาห์เพา

Tabel 5.51

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

			Tahun 2020					
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian			
1	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00			
2	Pengadaan Alat-alat Bantu	3.011.232.000,00	2.817.757.910,00	193.474.090,00	93,57			
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.731.904.140,00	6.144.704.140,00	587.200.000,00	91,28			
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	276.223.600,00	246.095.150,00	30.128.450,00	89,09			
5	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	2.321.521.700,00	1.796.768.500,00	524.753.200,00	77,40			
6	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	36.444.000,00	33.439.000,00	3.005.000,00	91,75			
7	Pengadaan Alat Ukur	1.314.495.550,00	1.144.606.750,00	169.888.800,00	87,08			
8	Pengadaan Alat Pengolahan	594.116.500,00	578.210.000,00	15.906.500,00	97,32			
9	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	25.870.000,00	25.445.000,00	425.000,00	98,36			
10	Pengadaan Alat Kantor	15.844.280.120,00	10.253.912.632,00	5.590.367.488,00	64,72			
11	Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.331.346.440,00	13.317.988.416,00	1.013.358.024,00	92,93			
12	Pengadaan Komputer	41.220.689.422,00	40.478.070.069,00	742.619.353,00	98,20			
13	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	59.532.000,00	56.951.000,00	2.581.000,00	95,66			
14	Pengadaan Alat Studio	3.839.251.200,00	3.625.963.278,00	213.287.922,00	94,44			
15	Pengadaan Alat Komunikasi	357.030.500,00	354.722.000,00	2.308.500,00	99,35			
16	Pengadaan Peralatan Pemancar	186.511.000,00	174.151.000,00	12.360.000,00	93,37			
17	Pengadaan Alat Kedokteran	273.926.950,00	264.677.450,00	9.249.500,00	96,62			
18	Pengadaan Alat Kesehatan	170.840.000,00	150.465.000,00	20.375.000,00	88,07			
19	Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.399.301.684,00	2.354.555.554,00	44.746.130,00	98,14			
20	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	32.249.280.200,00	31.189.767.948,00	1.059.512.252,00	96,71			
21	Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	90.550.000,00	87.202.000,00	3.348.000,00	96,30			
22	Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	1.370.588.000,00	1.035.459.432,00	335.128.568,00	75,55			
23	Peralatan dan Mesin BOS	21.592.957.540,00	21.328.292.713,00	264.664.827,00	98,77			
	Jumlah	148.322.892.546,00	137.484.204.942,00	10.838.687.604,00	92,69			

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.52

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per OPD

			Tahun 2020		
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	75.270.327.375,00	70.776.144.829,00	4.494.182.546,00	94,03
2	Dinas Kesehatan	9.512.125.300,00	6.568.888.261,00	2.943.237.039,00	69,06
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	5.652.968.750,00	5.180.890.338,00	472.078.412,00	91,65
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	535.720.000,00	63.959.161,00	471.760.839,00	11,94
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	294.562.000,00	272.125.086,00	22.436.914,00	92,38
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	405.384.200,00	403.280.000,00	2.104.200,00	99,48
8	Dinas Sosial	2.269.684.500,00	2.181.335.841,00	88.348.659,00	96,11
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	702.699.000,00	646.096.346,00	56.602.654,00	91,94
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	351.675.700,00	346.951.020,00	4.724.680,00	98,66
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	693.221.017,00	653.061.000,00	40.160.017,00	94,21
12	Dinas Perhubungan	958.222.000,00	773.623.189,00	184.598.811,00	80,74
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	26.053.863.450,00	25.865.757.286,00	188.106.164,00	99,28
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.899.078.800,00	1.261.157.500,00	637.921.300,00	66,41
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	75.298.000,00	73.598.000,00	1.700.000,00	97,74
16	Dinas Kebudayaan	7.476.370.684,00	6.680.624.813,00	795.745.871,00	89,36
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	325.635.270,00	316.057.000,00	9.578.270,00	97,06
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	447.196.000,00	446.306.000,00	890.000,00	99,80
19	Dinas Pariwisata	223.000.000,00	222.947.890,00	52.110,00	99,98
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.997.413.800,00	1.986.575.140,00	10.838.660,00	99,46
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	101.900.000,00	99.500.000,00	2.400.000,00	97,64
22	Sekretariat Daerah	5.021.514.000,00	4.934.406.945,00	87.107.055,00	98,27
23	Badan Penghubung Daerah	21.296.000,00	14.096.000,00	7.200.000,00	66,19
24	Sekretariat DPRD	1.931.630.000,00	1.911.752.041,00	19.877.959,00	98,97
25	Inspektorat	1.192.485.000,00	1.101.430.852,00	91.054.148,00	92,36
26	Paniradya Kaistimewan	1.418.364.200,00	1.288.914.500,00	129.449.700,00	90,87
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	323.827.000,00	316.152.000,00	7.675.000,00	97,63
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	2.615.043.500,00	2.579.495.904,00	35.547.596,00	98,64
29	Badan Kepegawaian Daerah	146.292.000,00	145.568.000,00	724.000,00	99,51
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	406.095.000,00	373.510.000,00	32.585.000,00	91,98
	Jumlah	148.322.892.546,00	137.484.204.942,00	10.838.687.604,00	92,69



กลา พยาหางและกางเกมีของกางเกมา

C. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp52.613.388.365,00

Rp138.986.381.949,17

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp56.794.002.047,77 dan realisasi sebesar Rp52.613.388.365,00 atau 92,64%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp86.372.993.584,17 atau 62,14% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp138.986.381.949,17. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.53
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Tahun 2020				
NO.		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.456.322.000,00	1.439.452.028,00	98,84		
2	Pengadaan Bangunan Bersejarah	3.314.000.000,00	2.109.289.882,00	63,65		
3	Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	87.500.000,00	87.062.000,00	99,50		
4	Pengadaan Rambu-Rambu	183.257.000,00	169.119.051,00	92,29		
5	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	52.705.000,00	50.200.000,00	95,25		
6	Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.860.276.000,00	2.418.110.045,00	84,54		
7	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	48.839.942.047,77	46.357.964.359,00	94,92		
	Jumlah	56.794.002.047,77	52.631.197.365,00	92,67		

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.54

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD

		Tahun 2020					
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian		
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	30.450.054.995,00	30.262.063.179,00	187.991.816,00	99,38		
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	6.276.590.000,00	5.244.260.940,00	1.032.329.060,00	83,55		
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.314.000.000,00	2.109.289.882,00	1.204.710.118,00	63,65		
4	Satuan Polisi Pamong Praja	158.090.000,00	156.988.000,00	1.102.000,00	99,30		
5	Dinas Sosial	473.508.026,00	450.367.580,00	23.140.446,00	95,11		
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	102.686.475,00	101.240.100,00	1.446.375,00	98,59		
7	Dinas Perhubungan	2.980.533.000,00	2.524.231.096,00	456.301.904,00	84,69		
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.000.000.000,00	787.943.437,00	212.056.563,00	78,79		
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.755.356.000,00	3.727.957.950,00	27.398.050,00	99,27		
10	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	237.411.300,00	235.443.000,00	1.968.300,00	99,17		
11	Dinas Kebudayaan	3.186.646.342,00	3.107.728.626,00	78.917.716,00	97,52		
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	60.000.000,00	59.125.000,00	875.000,00	98,54		
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	108.880.000,00	108.331.000,00	549.000,00	99,50		
14	Dinas Pariwisata	3.903.032.000,00	2.977.677.000,00	925.355.000,00	76,29		
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	125.855.459,77	107.114.625,00	18.740.834,77	85,11		
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.934.750,00	2.909.750,00	25.000,00	99,15		
17	Sekretariat Daerah	132.500.000,00	131.155.000,00	1.345.000,00	98,98		
18	Sekretariat DPRD	52.705.000,00	50.200.000,00	2.505.000,00	95,25		
19	Inspektorat	4.699.000,00	4.693.500,00	5.500,00	99,88		
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	33.250.000,00	33.026.000,00	224.000,00	99,33		
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	187.082.700,00	187.082.700,00	-	100,00		
22	Badan Pendidikan dan Pelatihan	248.187.000,00	244.560.000,00	3.627.000,00	98,54		
	Jumlah	56.794.002.047,77	52.613.388.365,00	4.180.613.682,77	92,64		

D. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp38.021.109.346,64 Rp242.118.840.886,68

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp51.326.954.352,00 dan realisasi sebesar Rp38.021.109.346,64 atau 74,08%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp204.097.731.540,04 atau 84,30% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019



การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ

yaitu sebesar Rp242.118.840.886,68. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.55
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

	Hardan	Tahun 2020			
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Pengadaan Jalan	35.326.911.352,00	26.489.134.280,00	74,98	
2	Pengadaan Jembatan	17.181.000,00	-	-	
3	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	228.720.000,00	215.506.700,00	94,22	
4	Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	
5	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	
6	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	988.980.000,00	820.683.450,00	82,98	
7	Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	197.159.000,00	194.915.000,00	98,86	
8	Pengadaan Instalasi Pengaman	459.000.000,00	457.693.500,00	99,72	
9	Pengadaan Jaringan Listrik	90.868.000,00	88.714.000,00	97,63	
10	Pengadaan Jaringan Telepon	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
11	Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	13.987.335.000,00	9.834.112.592,00	70,31	
	Jumlah	51.326.954.352,00	38.131.559.522,00	74,29	

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.56

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

		Tahun 2020					
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian		
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	88.550.000,00	81.014.862,00	7.535.138,00	91,49		
2	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	37.718.127.939,00	27.209.575.560,00	10.508.552.379,00	72,14		
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.405.211.413,00	8.140.188.400,00	2.265.023.013,00	78,23		
4	Dinas Sosial	31.000.000,00	30.931.000,00	69.000,00	99,78		
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	90.000.000,00	89.970.000,00	30.000,00	99,97		
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	250.000.000,00	116.379.400,00	133.620.600,00	46,55		
7	Dinas Kebudayaan	581.569.000,00	572.595.250,00	8.973.750,00	98,46		
8	Dinas Pariwisata	1.327.800.000,00	1.057.962.050,00	269.837.950,00	79,68		
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	308.000,00	-	308.000,00	-		
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	468.700.000,00	467.255.000,00	1.445.000,00	99,69		
11	Badan Kepegawaian Daerah	365.688.000,00	365.688.000,00	-	100,00		
	Jumlah	51.326.954.352,00	38.131.559.522,00	13.195.394.830,00	74,29		

E. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rp15.382.208.041,00

Rp23.907.706.051,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp15.693.894.205,00 dan realisasi sebesar Rp15.382.208.041,00 atau 98,01%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.525.498.010,00 atau 35,66% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 yaitu sebesar Rp23.907.706.051,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ

Tabel 5.57
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian –	Tahun 2020			
NO.		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Pengadaan Buku	119.842.460,00	118.894.300,00	99,21	
2	Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	301.770.000,00	294.298.000,00	97,52	
3	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.566.298.000,00	1.517.238.945,00	96,87	
4	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	6.480.000,00	6.480.000,00	100,00	
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	13.699.503.745,00	13.445.296.796,00	98,14	
	Jumlah	15.693.894.205,00	15.382.208.041,00	98,01	

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.58

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD

		Tahun 2020					
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian		
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	14.431.081.545,00	14.159.449.096,00	271.632.449,00	98,12		
2	Dinas Sosial	5.900.000,00	5.900.000,00	-	100,00		
3	Dinas Kebudayaan	1.037.321.660,00	1.000.537.145,00	36.784.515,00	96,45		
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	122.525.000,00	121.798.000,00	727.000,00	99,41		
5	Sekretariat Daerah	8.636.000,00	8.600.000,00	36.000,00	99,58		
6	Badan Penghubung Daerah	57.655.000,00	56.460.000,00	1.195.000,00	97,93		
7	Sekretariat DPRD	22.000.000,00	21.987.300,00	12.700,00	99,94		
8	Paniradya Kaistimewan	2.000.000,00	1.902.000,00	98.000,00	95,10		
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.925.000,00	1.125.000,00	800.000,00	58,44		
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	4.850.000,00	4.449.500,00	400.500,00	91,74		
	Jumlah	15.693.894.205,00	15.382.208.041,00	311.686.164,00	98,01		

a. Belanja Modal Aset Lainnya

Rp332.989.336,00

Rp1.190.501.500,00

Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp334.275.000,00 dan realisasi sebesar Rp332.989.336,00 atau 99,62%. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp857.512.164,00 atau 72,03% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.190.501.500,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2020 per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.59

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

	Uraian	Tahun 2020					
No.		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian		
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	90.250.000,00	90.100.000,00	150.000,00	99,83		
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	900.000,00	889.336,00	10.664,00	98,82		
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	243.125.000,00	242.000.000,00	1.125.000,00	99,54		
Jumlah		334.275.000,00	332.989.336,00	1.285.664,00	99,62		

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Rp305.639.352.770,00

Rp0,00

Anggaran Belanja Tak Terduga sebelum ada kebijakan untuk melakukan refocusing dan realokasi adalah sebesar Rp14.849.303.517,40. Selanjutnya dalam APBD Perubahan 2020 Belanja Tak Terduga ditetapkan sebesar Rp422.486.650.262,72 dengan realisasi sebesar Rp305.639.352.770,00 atau 72,34%. Realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 digunakan untuk penanganan pandemic Covid-



19 melalui Gugus Tugas Penanganan Corona Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur DIY dengan Keputusan Gubernur Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta dan terakhir dirubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 78/KEP/2020. Selanjutnya mekanisme kerja Gugus Tugas mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Mekanisme Kerja Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dasar pengeluaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur DIY berikut:

- Keputusan Gubernur Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 20 Maret - 29 Mei 2020.
- 2) Keputusan Gubernur Nomor 121/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 30 Mei 30 Juni 2020.
- 3) Keputusan Gubernur Nomor 197/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 30 Juli 2020.
- 4) Keputusan Gubernur Nomor 227/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 31 Agustus 2020.
- 5) Keputusan Gubernur Nomor 254/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 30 September 2020.
- 6) Keputusan Gubernur Nomor 286/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 31 Oktober 2020.
- 7) Keputusan Gubernur Nomor 318/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keenam Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 30 November 2020.
- 8) Keputusan Gubernur Nomor 358/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Ketujuh Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai 1 31 Desember 2020.

Pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Ketua Gugus Tugas *COVID-19* membuat Rencana Operasi merupakan pedoman dalam melaksanakan penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) yang memuat jangka waktu operasi, tujuan operasi, gambaran situasi, pelaku yang terlibat dalam operasi dan aktifitas utama yang akan dilaksanakan, serta kebutuhan pendanaannya selama periode waktu operasi.
- 2) Rencana Aksi disusun berdasarkan Rencana Operasi, yang berisi rencana aktivitas/kegiatan harian Sekretariat dan Bidang Gugus Tugas *COVID-19* yang memuat sekurang-kurangnya nama aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi, waktu, dan yang terlibat dalam aktivitas/kegiatan penanganan COVID-19 oleh masing-masing bidang dalam Gugus Tugas *COVID-19*.



การและ การเกาะ
- 3) Kepala Pelaksana BPBD DIY melakukan verifikasi usulan anggaran sesuai dengan Rencana Operasi dan Rencana Aksi.
- 4) Kepala Pelaksana BPBD DIY mengajukan pencairan anggaran kepada PPKD setelah dilakukan verifikasi.
- 5) Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP TU/LS untuk pencairan SP2D TU/LS Belanja Tidak Terduga.
- 6) BUD menerbitkan SP2D TU/LS dan memindahbukukan dana ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD memindahbukukan ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- 7) Bendahara Pengeluaran BPBD melakukan penatausahaan secara terpisah atas semua pengeluaran Belanja Tidak Terduga.
- 8) Bendahara Pengeluaran BPBD DIY melakukan distribusi anggaran ke Sekretariat dan Bidang Gugus Tugas *COVID-19* sesuai yang diajukan.
- 9) Tugas *COVID-19* menjadi tanggung jawab masing-masing Pelaksana Bidang Gugus Tugas dan disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD DIY.
- 10) Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran diketahui oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY.

Realisasi SP2D dan realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.60
Rincian SP2D Belanja Tidak Terduga

Fase	No./Tanggal	SP2D	SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
Tahap 1	00904/LS/4.05.02.	27-Mar-20	9.295.231.300,00	9.165.945.500,00	129.285.800,00	98,61
	01143/TU/4.05.02	14-Apr-20	458.979.592,00	448.139.590,00	10.840.002,00	97,64
Tahap 2 Phase 1	01548/TU/4.05.02	30-Apr-20	51.641.912.300,00	41.775.598.987,00	9.866.313.313,00	80,89
Tahap 2 Phase 2	01718/TU/4.05.02	14-May-20	67.792.910.000,00	67.783.970.000,00	8.940.000,00	99,99
Tahap 2 Phase 3	02012/TU/4.05.02	20-May-20	726.000.000,00	726.000.000,00	0,00	100,00
Tahap 2 Phase 4	02072/TU/4.05.02	27-May-20	202.776.800,00	190.049.530,00	12.727.270,00	93,72
	02525/TU/4.05.02	22-Jun-20	42.705.170.125,00	37.484.325.946,00	5.220.844.179,00	87,77
Tahap 2 Phase 5	02524/TU/4.05.02	22-Jun-20	101.114.400.000,00	87.184.400.000,00	13.930.000.000,00	86,22
	02604/TU/4.05.02	26-Jun-20	10.800.000,00	8.890.200,00	1.909.800,00	82,32
Tahap 2 Phase 6	03092/TU/4.05.02	05-Jul-20	4.877.400.000,00	4.086.979.800,00	790.420.200,00	83,79
Tahap 2 Phase 7	03309/TU/4.05.02	24-Jul-20	6.820.102.711,00	6.164.363.712,00	655.738.999,00	90,39
Tahap 2 Phase 8	03926/TU/4.05.02	27-Aug-20	8.719.276.569,00	7.883.062.614,00	836.213.955,00	90,41
Tahap 2 Phase 9	04501/TU/4.05.02	25-Sep-20	7.440.534.800,00	5.989.794.379,00	1.450.740.421,00	80,50
Tahap 2 Phase 10	04867/TU/4.05.02	16-Oct-20	9.809.972.800,00	8.804.874.374,00	1.005.098.426,00	89,75
Tahap 2 Phase 11	05981/TU/4.05.02	01-Dec-20	29.473.297.645,00	26.507.181.284,00	2.966.116.361,00	89,94
Tahap 2 Phase 12	06329/TU/4.05.02	10-Dec-20	1.424.113.800,00	1.390.949.354,00	33.164.446,00	97,67
Tahap 2 Phase 13	06622/TU/4.05.02	17-Dec-20	112.305.000,00	44.827.500,00	67.477.500,00	39,92
	Jumlah		342.625.183.442,00	305.639.352.770,00	36.985.830.672,00	89,21



^^^^ ^^^ พยาหูเพลาเพลาเพ่นูๆผพฤพเพา

Adapun rincian SP2D dan realisasi Belanja Tak Terduga per kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.61

Rincian Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Per Kegiatan

NO.	URAIAN		SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5	6 = (4 - 5)	7 = (5/4)*100
A.	PEN	IANGANAN KESEHATAN				
	1	Penyediaan APD untuk Petugas Pengubur Jenazah (6 petugas/kabupaten-kota dengan estimasi 10 kejadian)	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00
	2	Penyediaan Virkon (Bahan Desinfektan) untuk 438 Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00
	3	Penyediaan Kantong Jenazah (Estimasi 10 Kejadian)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
	4	Desinfektisasi sekolah untuk SMA (Negeri/Swasta)	399.740.000,00	393.606.000,00	6.134.000,00	98,47
	5	Penyediaan APD dan sarana Kebersihan Sekretariat Posko Terpadu	2.650.235.500,00	2.627.467.454,00	22.768.046,00	99,14
	6	Penyemprotan/Sterilisasi sekolah	799.480.000,00	705.525.000,00	93.955.000,00	88,25
	7	Fasilitasi Peginapan bagi tenaga medis yang menangani Covid 19 di PPSDM Kemendagri Regional Yogya	1.103.400.800,00	164.890.990,00	938.509.810,00	14,94
	8	Penanganan Pasien di RS Rujukan	5.642.915.800,00	5.640.802.500,00	2.113.300,00	99,96
	9	Komunikasi dan Informasi	733.760.000,00	720.615.000,00	13.145.000,00	98,21
	10	Penyediaan BMHP dan Peralatan / Perlengkapan untuk ODP di seluruh Kab/ Kota	870.167.992,00	781.041.217,00	89.126.775,00	89,76
	11	Pemenuhan APD untuk RS Rujukan	21.519.375.000,00	19.655.518.818,00	1.863.856.182,00	91,34
	12	Penyediaan Alat Kesehatan	2.990.524.025,00	2.669.645.092,00	320.878.933,00	89,27
	13	Penyediaan BMHP dan Peralatan / Perlengkapan	35.234.006.545,00	30.989.754.636,00	4.244.251.909,00	87,95
	14	Penyediaan Dukungan Manajemen Posko Terpadu	3.474.452.562,00	3.317.057.037,00	157.395.525,00	95,47
	15	Dekontaminasi dan Karantina Petugas	529.216.800,00	525.322.000,00	3.894.800,00	99,26
	16	Penyediaan Peralatan Kerja Petugas dan Relawan	337.483.500,00	334.016.000,00	3.467.500,00	98,97
	17	Pengadaan Alat Perlengkapan Diri Penanganan Covid-19	1.060.380.000,00	1.016.021.000,00	44.359.000,00	95,82
	18	Penyediaan dukungan Pos Kesehatan	128.933.000,00	120.559.364,00	8.373.636,00	93,51
	19	Pengadaan Peralatan Perlengkapan Pengamanan Personil dan Kesekretariatan	67.600.000,00	67.093.000,00	507.000,00	99,25
	20	Cadangan Tempat Pemakaman Jenazah COVID-19	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	-
	21	Penggandaan Panduan DeskataVID (Desa/Kampung Tangguh COVID-19)	271.000.000,00	125.000.000,00	146.000.000,00	46,13
	22	Shelter/Naungan Sementara Bagi WNA di Wisma Bandiklat DIY	60.398.000,00	60.398.000,00	0,00	100,00
	23	Operasional Media Center - Press Conference	18.662.000,00	18.662.000,00	0,00	100,00
	24	Langganan Peta untuk Dashboard	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
	25	Aplikasi Pengumpulan Data Terintegrasi untuk mendukung Gugus Tugas Covid-19	242.600.000,00	240.200.000,00	2.400.000,00	99,01
	26	Aplikasi untuk mendukung DSS Internal Pemda DIY	207.400.000,00	199.800.000,00	7.600.000,00	96,34
	27	Publikasi media luar ruang berupa billboard di 50 titik termasuk desain dan pemasangan	130.000.000,00	128.000.000,00	2.000.000,00	98,46
	28	Tenaga Ahli Content Creator Media Sosial sebanyak 2 Orang selama 2 Bulan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
	29	Publikasi melalui dialog interaktif televisi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
	30	Pengelola Data CMS (Corona Monitoring System)	983.460.000,00	589.842.500,00	393.617.500,00	59,98



กลา พยาหญาพ๛ทางพลางเกมูกของกุพทางกา

NO.		URAIAN	SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Prosentase (%)
	31	Publikasi Kegiatan Gugus Tugas Penanganan Covid19	741.749.000,00	680.226.273,00	61.522.727,00	91,71
	32	Penyediaan Sistem Verifikasi berkas PPDB secara daring/online	125.180.000,00	68.343.000,00	56.837.000,00	54,60
	33	Operasi Pengawasan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka Pencegahan Covid 19	6.420.109.800,00	6.352.947.995,00	67.161.805,00	98,95
	34	Pengumpulan Data dan Informasi/Intelijen	389.508.400,00	388.053.100,00	1.455.300,00	99,63
	35	Posko Induk Dishub DIY	99.123.000,00	61.863.800,00	37.259.200,00	62,41
	36	Pemeriksaan Pemudik di 3 wilayah perbatasan DIY - Jateng	1.687.232.000,00	1.447.170.200,00	240.061.800,00	85,77
	37	Tim Terpadu Penanganan Covid-19 di Terminal	923.516.000,00	736.968.000,00	186.548.000,00	79,80
	38	Pengumpulan Data Informasi Keberadaan Orang Asing	9.290.000,00	9.290.000,00	0,00	100,00
	39	Pengumpulan Data Mahasiswa Luar Daerah	38.624.500,00	38.471.500,00	153.000,00	99,60
	40	Fasilitasi pengambilan logistik bantuan Pusat	145.880.000,00	32.328.383,00	113.551.617,00	22,16
	41	APD untuk petugas di level desa	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00
	42	Penyediaan dukungan Rapid test Lapangan	140.000.000,00	127.272.730,00	12.727.270,00	90,91
	43	Fasilitasi Narasumber The New Normal	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00
	44	Fasilitasi Pemulangan WNA	16.726.800,00	14.817.000,00	1.909.800,00	88,58
	45	Penyediaan Kebutuhan Sarana Kebersihan di TPI	7.252.000,00	7.252.000,00	0,00	100,00
	46	Penguatan Kapasitas Komunikasi dan Koordinasi Satgas Deskatavid menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19	77.830.000,00	72.250.000,00	5.580.000,00	92,83
	47	Koordinasi Penanganan Covid-19 di Kab/Kota dengan Pusdalops se-DIY	2.240.000,00	2.100.000,00	140.000,00	93,75
	48	Narasumber pada video dokumentasi tentang Covid-19 di DIY	27.000.000,00	25.200.000,00	1.800.000,00	93,33
	49	Penambahan kapasitas komunikasi Respon Darurat Covid-19	15.000.000,00	12.907.000,00	2.093.000,00	86,05
	50	Dekontaminasi, Desinfektanisasi dan Ruang Karantina	1.406.817.200,00	1.229.229.091,00	177.588.109,00	87,38
	51	Pengelolaan Limbah B3 Infeksius	21.120.000,00	0,00	21.120.000,00	-
	52	Penyusunan JITUPASNA Covid-19	98.000.000,00	97.240.000,00	760.000,00	99,22
	53	Dukungan Sekretariat Gugus Tugas Covid-19 - KOMINFO	58.770.000,00	53.030.000,00	5.740.000,00	90,23
	54	Publikasi dan Diseminasi Informasi Publik Kegiatan Gugus Tugas Penanganan Covid19	2.364.022.000,00	2.268.751.490,82	95.270.509,18	95,97
	55	Pengawasan dan Pengendalian Penerapan Protokol Kesehatan di Stasiun Tugu dan Bandara YIA	290.404.000,00	271.489.000,00	18.915.000,00	93,49
	56	Pelatihan Swab untuk ATLM, Tenaga Puskesmas dan Labkesda	27.478.000,00	26.878.000,00	600.000,00	97,82
	57	Pengelolaan Limbah Medis PSC 119 DIY	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-
	58	Penyediaan BMHP dan Peralatan/ Perlengkapan Skrining	37.805.186.769,00	33.824.235.364,00	3.980.951.405,00	89,47
	59	Tim Verifikator Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 <i>(COVID-</i> 19)	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	100,00
	60	Pengadaan APD untuk Sekolah dalam rangka Pelaksanaan di Era Pendidikan New Normal	826.200.000,00	615.271.140,00	210.928.860,00	74,47
	61	Pendampingan Tim Pengawas dan Pengendalian Operasi	58.520.000,00	56.070.000,00	2.450.000,00	95,81
	62	Pemeriksaan Kendaraan di Perbatasan DIY- Jawa Tengah	821.007.000,00	783.079.000,00	37.928.000,00	95,38
	63	Koordinasi Penanganan Karantina dan Isolasi dengan satgas penanganan Covid-19 di kab/kota dan Desa/Kelurahan	270.580.000,00	238.733.000,00	31.847.000,00	88,23



กลา ผลาหูเพลาเพลาเพ่นๆผพาดพากหาเก

NO.		URAIAN	SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Prosentase (%)
	64	Penambahan Fitur Penanganan Covid-19 pada Aplikasi Disaster Management Information System (DMIS) di PUSDALOPS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00
	65	Penambahan Fasilitas Ambulance bantuan PT Angkasa Pura I	297.866.020,00	269.609.091,91	28.256.928,09	90,51
	66	Dukungan Data untuk Pemetaan Pergerakan Orang	137.500.000,00	136.455.000,00	1.045.000,00	99,24
	67	Relawan Survailance Data	574.620.000,00	451.888.500,00	122.731.500,00	78,64
	68	Dukungan Ke-humas-an	29.000.000,00	28.772.000,00	228.000,00	99,21
	69	Pengadaan Alat Kesehatan Ambulans Gawat Darurat PSC 119 DIY	257.102.000,00	224.545.455,00	32.556.545,00	87,34
	70	Peningkatan Kapasitas dalam Disinfeksi Lingkungan dan Ambulans Transport Covid 19 pada Rumah Sakit di DIY	38.951.000,00	35.779.000,00	3.172.000,00	91,86
	71	Tim Pengawas dan Pemeriksa Penerapan Protokol Kesehatan Kendaraan Umum/Pariwisata di Kawasan Obyek Wisata	183.970.000,00	182.914.000,00	1.056.000,00	99,43
	72	Logistik untuk PEMDA DIY beserta unit layanan	1.512.150.000,00	1.358.772.727,27	153.377.272,73	89,86
	73	Monitoring Evaluasi peningkatan kapasitas dalam desinfeksi lingkungan dan ambulans transport Covid-19 pada Rumah Sakit	20.800.000,00	20.722.400,00	77.600,00	99,63
	74	Bahan Desinfektan & Pembersih	6.355.000,00	0,00	6.355.000,00	-
	75	Dukungan Petugas Dekontaminasi/ Pengantaran Jenazah	6.735.652.500,00	6.075.791.910,00	659.860.590,00	90,20
	76	Relawan Survailance Data untuk 6 Dinas Kesehatan, 1 Diskominfo DIY	275.900.000,00	251.080.000,00	24.820.000,00	91,00
	77	Penyemprotan desinfektan	43.200.000,00	34.200.000,00	9.000.000,00	79,17
	78	Pembelian Multivitamin	776.210.000,00	700.736.365,00	75.473.635,00	90,28
	79	Dukungan Logistik Protokol Kesehatan Pemda	304.500.000,00	277.509.091,00	26.990.909,00	91,14
	80	Extra Fooding	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
	81	Kelengkapan BSL 2 BALAI LABKES dan KALIBRASI	238.399.600,00	216.725.000,00	21.674.600,00	90,91
	82	Pekerjaan Sekat BSL 2 BALAI LABKES dan KALIBRASI	40.420.000,00	36.420.000,00	4.000.000,00	90,10
	83	Monitoring Evaluasi Penanganan Darurat Covid- 19	146.525.000,00	129.125.000,00	17.400.000,00	88,12
	84	Pengadaan Virus Transport Media (VTM)	874.500.000,00	794.200.000,00	80.300.000,00	90,82
	85	Pengadaan Reagen Ekstaksi	703.915.000,00	398.800.000,00	305.115.000,00	56,65
	86	Fasilitasi untuk mendukung Protokol Kesehatan pada Sarana Olah Raga dan kegiatan Kepemudaan	231.995.000,00	188.148.751,00	43.846.249,00	81,10
	87	Perlengkapan shelter Isolasi ASN Pemda DIY	139.529.000,00	0,00	139.529.000,00	-
	88	Logistik untuk dukungan Operasional Lapangan oleh TRC BPBD DIY	96.420.000,00	96.420.000,00	0,00	100,00
	89	Logistik untuk dukungan Operasional Gugus Tugas Kabupaten/Kota dan satgas desa	1.311.500.000,00	1.181.706.182,00	129.793.818,00	90,10
	90	Dukungan Penerapan Protokol Kesehatan di lingkungan Kantor Gubernur	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00
	91	Pemenuhan Kebutuhan Lab BSL2 (Tambah Daya Listrik)	77.000.000,00	70.000.000,00	7.000.000,00	90,91
	92	Dukungan Protokol Kesehatan Bagi Sekolah	1.203.800.000,00	871.134.500,00	332.665.500,00	72,37
	93	Penyusunan Pedoman Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan Covid 19	64.350.000,00	59.554.546,00	4.795.454,00	92,55
	94	Perlengkapan Shelter Isolasi	4.083.000,00	0,00	4.083.000,00	-
	95	Sosialisasi Shelter	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	-
	96	Dukungan Logistik PB DIY	557.305.000,00	417.327.501,00	139.977.499,00	74,88
		Sub Total	151.750.776.113,00	135.384.191.695,00	16.366.584.418,00	89,21



กลา พยาหญาพ๛ทางพลางเกมูกของกุพทางกา

NO.		URAIAN	SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Prosentase (%)
B.	PEN	IANGANAN DAMPAK EKONOMI				
	1	Pemberian kerja darurat istimewa (PKDI)	1.022.400.000,00	1.020.258.000,00	2.142.000,00	99,79
	2	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	106.000.000,00	45.985.000,00	60.015.000,00	43,38
	3	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Baju APD sebanyak 6.000 buah	520.200.000,00	515.345.300,00	4.854.700,00	99,07
	4	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Sepatu APD sebanyak 6.000 buah	298.200.000,00	189.237.000,00	108.963.000,00	63,46
	5	Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Debarkasi ke DIY	69.000.000,00	7.298.000,00	61.702.000,00	10,58
	6	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Faceshield APD sebanyak 5.000 buah	375.000.000,00	245.653.000,00	129.347.000,00	65,51
	7	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan masker kain 2 lapis sebanyak 10.200 buah	106.500.000,00	96.336.100,00	10.163.900,00	90,46
	8	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Kantong Mayat sebanyak 100 buah	35.500.000,00	34.995.400,00	504.600,00	98,58
	9	Pemberdayaan peternak sapi perah.	310.090.600,00	288.698.600,00	21.392.000,00	93,10
	10	Pendistribusian bahan makanan	6.400.000,00	6.208.000,00	192.000,00	97,00
	11	Pengadaan Sarana Prasana untuk Penyimpanan Produk Pertanian	7.191.000,00	4.900.000,00	2.291.000,00	68,14
	12	Pemberdayaan UMKM untuk pembuatan masker	316.368.000,00	197.448.000,00	118.920.000,00	62,41
	13	Pemberdayaan UMKM untuk pembuatan wastafel gerabah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
	14	Identifikasi dan invetariisasi kredit macet dan pembiayaan UMKM	76.325.000,00	24.078.000,00	52.247.000,00	31,55
	15	Kemitraan UKM, Marketplace dan Jasa Pengiriman dalam distribusi produk KUMKM	750.928.000,00	460.283.225,00	290.644.775,00	61,30
	16	Pemberdayaan Pelaku wisata di Destinasi Wisata dan Desa/Kampung Wisata	637.902.000,00	628.126.027,00	9.775.973,00	98,47
	17	Penyediaan Dukungan Manajemen Logistik	185.198.000,00	171.987.900,00	13.210.100,00	92,87
	18	Media Campaign promosi digital	215.320.000,00	215.320.000,00	0,00	100,00
	19	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Hygienitas Destinasi Wisata	240.600.000,00	234.600.000,00	6.000.000,00	97,51
	20	Kampanye Penguatan Citra Destinasi Pariwisata DIY (Brand Awarness) Masa Pemulihan	339.215.000,00	194.985.000,00	144.230.000,00	57,48
	21	Pendampingan Simulasi dan Evaluasi SOP Hotel dan Restoran/Rumah Makan "New Normal" Di DIY	83.450.000,00	78.050.000,00	5.400.000,00	93,53
	22	Koordinasi penyusunan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19	34.750.000,00	25.000.000,00	9.750.000,00	71,94
	23	Pemeliharaan Aset Daerah Terdampak	265.414.219,00	130.266.910,00	135.147.309,00	49,08
	24	Pendampingan SOP New Normal Destinasi	83.650.000,00	83.650.000,00	0,00	100,00
	25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Cuci Tangan (wastafel) di Destinasi Wisata Strategis	30.897.510,00	22.594.000,00	8.303.510,00	73,13
	26	Padat Karya Mandiri Destinasi Wisata	74.365.000,00	74.365.000,00	0,00	100,00
	27	Pengadaan Sarana Kebersihan Desa Wisata	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00
	28	Persiapan Pembukaan TKM	58.708.500,00	42.328.500,00	16.380.000,00	72,10
	29	Padat Karya Mandiri Desa/ Kampung Wisata	117.820.000,00	117.820.000,00	0,00	100,00
	30	Pendampingan Pelaksanaan SOP New Normal bagi Perusahaan	45.066.000,00	36.716.000,00	8.350.000,00	81,47
	31	Pembinaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Tenaga Kerja Dampak Covid 19	63.332.000,00	63.332.000,00	0,00	100,00
	32	Sarana Prasarana Pelayanan Terpadu Ketenagakerjaan	141.781.000,00	132.005.864,00	9.775.136,00	93,11



กลา พยาหญาพ๛ทางพลางเกมูกของกุพทางกา

NO.		URAIAN	SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Prosentase (%)
	33	Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	188.062.000,00	175.562.000,00	12.500.000,00	93,35
	34	Peningkatan Kapasitas bagi UMKM	21.845.500,00	21.109.000,00	736.500,00	96,63
	35	Media Campaign Pemulihan Ekonomi KUKM	185.925.000,00	185.565.000,00	360.000,00	99,81
	36	Pendampingan Sertifikasi IUMK	148.552.000,00	145.880.000,00	2.672.000,00	98,20
	37	Pendampingan Sertifikasi PIRT	148.573.000,00	145.907.000,00	2.666.000,00	98,21
	38	Sosialisasi dan Pendampingan SOP di Desa/Kampung Wisata	131.514.000,00	130.954.000,00	560.000,00	99,57
	39	Sosialisasi Pranatan Anyar di Sektor Perdagangan	93.701.000,00	93.601.000,00	100.000,00	99,89
	40	Pelatihan Alih Teknologi Informasi (ATI)	155.195.000,00	154.295.000,00	900.000,00	99,42
	41	Sosialisasi Gemar Makan Ikan (Gemarikan)	131.102.000,00	130.802.000,00	300.000,00	99,77
	42	Kampanye Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal	135.438.000,00	135.398.000,00	40.000,00	99,97
	43	Bimtek Pemanfaatan Pekarangan untuk Budidaya Hortikultura	235.022.000,00	199.284.364,00	35.737.636,00	84,79
	44	Penumbuhan Wira Usaha Baru	172.530.000,00	171.366.000,00	1.164.000,00	99,33
	45	Fasilitasi menuju Izin Edar Produk UMKM	68.920.000,00	67.240.500,00	1.679.500,00	97,56
	46	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pranatan Anyar Plesiran Jogja pada Usaha Jasa Pariwisata	11.110.000,00	11.110.000,00	0,00	100,00
	47	Budi daya ilan di lahan sempeti (BUDILAMPIT)	225.575.000,00	210.005.908,00	15.569.092,00	93,10
	48	Registrasi Kebun	38.475.000,00	38.445.000,00	30.000,00	99,92
	49	Pemberdayaan Peternak Kambing Perah	94.150.000,00	92.850.000,00	1.300.000,00	98,62
	50	Pemberian Bantuan Peralatan Usaha kepada Tenaga Kerja Dampak Covid-19	80.360.000,00	65.637.000,00	14.723.000,00	81,68
	51	Promosi Pranatan Anyar Potensi Daerah untuk Pemulihan Ekonomi	189.700.000,00	172.322.727,00	17.377.273,00	90,84
		Sub Total	9.203.321.329,00	7.865.205.325,00	1.338.116.004,00	85,46
C.		NYEDIAAN SOCIAL SAFETY NET/ JARING NGAMAN SOSIAL				
	1	Pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dalam rangka Perlindungan dan Jaminan Sosial terdampak Covid 19	174.378.000.000,00	159.658.400.000,00	14.719.600.000,00	91,56
	2	Penyelenggaraan Dapur Umum	3.292.002.000,00	327.474.000,00	2.964.528.000,00	9,95
	3	Pemberian bantuan sosial untuk penyandang disabilitas terdampak Covid 19	112.500.000,00	0,00	112.500.000,00	-
	4	Pemberian bantuan sosial bagi Lanjut Usia Terlantar berupa sembako,tambahan gizi dalam rangka percepatan penanganan dampak covid 19	450.000.000,00	444.675.000,00	5.325.000,00	98,82
	5	Jaminan Hidup ODP	107.530.000,00	0,00	107.530.000,00	-
	6	Pengerahan anggota Tagana	1.849.820.000,00	838.670.000,00	1.011.150.000,00	45,34
	7	Bantuan Sosial Tunai untuk Lansia terlantar tinggal sendiri	225.000.000,00	110.617.700,00	114.382.300,00	49,16
	8	Bantuan Sosial Tunai untuk Lansia terlantar tinggal sendiri dan Penyandang disabilitas	230.700.000,00	227.887.500,00	2.812.500,00	98,78
	9	Pendampingan Penyaluran Bantuan	26.460.000,00	2.797.500,00	23.662.500,00	10,57
	10	Money Tim	53.000.000,00	10.800.000,00	42.200.000,00	20,38
	11	Biaya Pengiriman Bantuan	24.509.800,00	4.036.500,00	20.473.300,00	16,47
	12	Operasional kesekretariatan	54.493.700,00	47.569.550,00	6.924.150,00	87,29
	13	Bantuan Sosial untuk mahasiswa	280.556.500,00	263.083.200,00	17.473.300,00	93,77
	14	Layanan Dukungan Psikososial	466.910.000,00	385.255.000,00	81.655.000,00	82,51
	15	Fasilitasi Distribusi dan Bongkar Muat Logistik	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
	16	Bantuan Sosial untuk bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan terdampak Covid-19	67.800.000,00	67.189.800,00	610.200,00	99,10



การ พยาหญาพ๛ การเมาผู้ ๆ ยาเขา ๆ เพาะ การเมาผู้

NO.		URAIAN	SP2D (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Prosentase (%)
	17	Penyelenggaraan Dapur Umum untuk Isolasi ASN Pemda DIY	48.804.000,00	0,00	48.804.000,00	-
		Sub Total	181.671.086.000,00	162.389.955.750,00	19.281.130.250,00	89,39
		Jumlah	342.625.183.442,00	305.639.352.770,00	36.985.830.672,00	89,21

Belanja Tak Terduga dilaksanakan oleh Gugus Tugas yang terdiri dari Sekretariat dan Bidang-bidang untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62
Rincian Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Per Satuan Gugus Tugas

No.	Uraian	SP2D	Realisasi	Sisa	%
1	Sekretariat	16.691.216.601,00	14.942.235.794,45	1.748.980.806,55	89,52
2	Bidang Kesehatan	108.133.907.531,00	96.115.149.484,00	12.018.758.047,00	88,89
3	Bidang Sosial Kemasyarakatan	183.270.928.000,00	163.754.494.933,00	19.516.433.067,00	89,35
4	Bidang Ekonomi	8.725.211.110,00	7.545.202.515,27	1.180.008.594,73	86,48
5	Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum	10.862.784.700,00	10.276.901.595,00	585.883.105,00	94,61
6	Bidang Pendidikan	3.586.395.000,00	2.842.028.391,00	744.366.609,00	79,24
7	Bidang Logistik	10.620.980.500,00	9.442.725.056,73	1.178.255.443,27	88,91
8	Bidang Komunikasi dan Informasi	733.760.000,00	720.615.000,00	13.145.000,00	98,21
	Jumlah	342.625.183.442,00	305.639.352.769,46	36.985.830.672,55	89,21

5.1.2.4 Belanja Dana Keistimewaan

Rp1.279.572.655.079,63

Rp1.166.576.228.221,39

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 sebesar Rp5.865.604.964.088,35 dan realisasi sebesar Rp5.433.564.049.791,03, di dalamnya termasuk anggaran dan realisasi belanja yang sumber dananya dari Dana Keistimewaan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Alokasi Dana Keistimewaan Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 (Lampiran V) ditetapkan sebesar Rp1.320.000.000.000,00. Penyaluran Dana Keistimewaan Tahun 2020 sebesar Rp1.286.576.228.221,00 berasal dari nilai alokasi sebesar Rp1.320.000.000,00 dikurangi dengan sisa Dana Keistimewaan Tahun 2019 sebesar Rp33.423.771.778,61.

Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2020 dilaksanakan oleh OPD dilingkungan Pemda DIY dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan. Dana Keistimewaan ditransfer dari rekening Kas Daerah Pemda DIY ke rekening Kas Daerah Pemda Kabupaten/Kota untuk pembiayaan Program dan Kegiatan sesuai dengan Urusan Keistimewaan. Sisa Dana Keistimewaan pada Pemda Kabupaten/Kota pada akhir tahun anggaran disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah Pemda DIY.

Anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp1.320.000.000.000,00 sampai dengan akhir tahun anggaran telah terserap sebesar Rp1.279.572.655.079,63 atau 96,94% sesuai dengan Berita Acara



^^^ ๎๎๎ พยาหูเพลางพลางตุนูๆผพาๆพาฦหาเก

yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Adapun rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.63
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Capaian
ı	KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	14.554.390.500,00	13.266.845.421,00	1.287.545.079,00	91,15
1	Kota Yogyakarta	174.296.500,00	157.614.750,00	16.681.750,00	90,43
2	Kabupaten Bantul	1.270.319.000,00	1.185.032.400,00	85.286.600,00	93,29
3	Kabupaten Kulon Progo	1.289.277.500,00	1.247.489.300,00	41.788.200,00	96,76
4	Kabupaten Gunungkidul	1.213.190.900,00	1.065.057.521,00	148.133.379,00	87,79
5	Kabupaten Sleman	741.920.000,00	728.119.675,00	13.800.325,00	98,14
6	Biro Tata Pemerintahan	238.854.000,00	212.495.000,00	26.359.000,00	88,96
7	Biro Hukum Setda	325.000.000,00	302.111.200,00	22.888.800,00	92,96
8	Biro Organisasi	1.150.752.750,00	923.024.400,00	227.728.350,00	80,21
9	Paniradya Kaistimewan	7.755.231.850,00	7.057.635.675,00	697.596.175,00	91,00
10	Badan Kepegawaian Daerah	195.548.000,00	193.685.500,00	1.862.500,00	99,05
11	Badan Pendidikan dan Pelatihan	200.000.000,00	194.580.000,00	5.420.000,00	97,29
п	KEBUDAYAAN	744.003.521.915,00	714.035.144.010,84	29.968.377.904,16	95,97
1	Kota Yogyakarta	11.986.349.265,00	11.627.809.886,84	358.539.378,16	97,01
2	Kabupaten Bantul	13.747.762.590,00	12.839.672.482,00	908.090.108,00	93,39
3	Kabupaten Kulon Progo	93.604.771.950,00	91.586.440.552,00	2.018.331.398,00	97,84
4	Kabupaten Gunungkidul	81.273.171.500,00	80.080.153.950,00	1.193.017.550,00	98,53
5	Kabupaten Sleman	40.789.854.150,00	40.420.852.720,00	369.001.430,00	99,10
6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	2.821.288.500,00	2.164.062.618,00	657.225.882,00	76,70
7	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	183.994.000,00	183.994.000,00	-	100,00
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	36.286.983.752,00	32.426.991.803,00	3.859.991.949,00	89,36
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	864.876.500,00	626.484.000,00	238.392.500,00	72,44
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.975.000,00	3.975.000,00	-	100,00
11	Dinas Sosial	2.424.100.000,00	2.082.845.270,00	341.254.730,00	85,92
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	797.875.500,00	714.697.500,00	83.178.000,00	89,58
13	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta	182.000.000,00	175.140.400,00	6.859.600,00	96,23
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	38.906.714.950,00	38.000.811.123,00	905.903.827,00	97,67
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.081.965.250,00	3.842.226.000,00	239.739.250,00	94,13
16	Dinas Kebudayaan	276.814.504.942,00	261.666.622.714,00	15.147.882.228,00	94,53
17	Museum Negeri Sonobudoyo	12.468.457.066,00	11.568.102.454,00	900.354.612,00	92,78
18	Taman Budaya Yogyakarta	6.053.305.600,00	5.821.612.940,00	231.692.660,00	96,17
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.261.818.000,00	3.123.877.920,00	137.940.080,00	95,77
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.783.547.000,00	1.729.742.300,00	53.804.700,00	96,98
21	Dinas Pariwisata	6.927.825.500,00	5.041.079.190,00	1.886.746.310,00	72,77
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.358.892.800,00	1.345.105.350,00	13.787.450,00	98,99
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.076.626.500,00	3.696.064.350,00	380.562.150,00	90,66
	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	224.676.000,00	213.216.000,00	11.460.000,00	94,90
	Badan Penghubung Daerah	857.695.000,00	833.072.888,00	24.622.112,00	97,13
	PPKD/ BUD	102.220.490.600,00	102.220.490.600,00	-	100,00



การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Capaian
III	PERTANAHAN	19.469.545.187,00	16.644.881.594,21	2.824.663.592,79	85,49
1	Kota Yogyakarta	1.239.550.000,00	1.194.422.250,00	45.127.750,00	96,36
2	Kabupaten Bantul	3.857.701.400,00	3.409.016.075,00	448.685.325,00	88,37
3	Kabupaten Kulon Progo	3.170.804.000,00	2.813.892.448,00	356.911.552,00	88,74
4	Kabupaten Gunungkidul	4.789.091.637,00	3.812.290.277,21	976.801.359,79	79,60
5	Kabupaten Sleman	2.361.996.850,00	2.127.286.850,00	234.710.000,00	90,06
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.162.890.800,00	2.444.873.637,00	718.017.163,00	77,30
7	Biro Tata Pemerintahan	264.197.500,00	243.687.000,00	20.510.500,00	92,24
8	Biro Hukum	383.313.000,00	359.413.057,00	23.899.943,00	93,76
9	PPKD/ BUD	240.000.000,00	240.000.000,00	-	100,00
IV	TATA RUANG	541.972.542.398,00	535.625.784.053,58	6.346.758.344,42	98,83
1	Kota Yogyakarta	40.312.165.019,00	40.133.491.630,58	178.673.388,42	99,56
2	Kabupaten Bantul	832.710.500,00	826.980.600,00	5.729.900,00	99,31
3	Kabupaten Kulon Progo	4.387.908.950,00	4.384.205.250,00	3.703.700,00	99,92
4	Kabupaten Gunungkidul	634.322.500,00	621.524.100,00	12.798.400,00	97,98
5	Kabupaten Sleman	637.658.000,00	628.358.000,00	9.300.000,00	98,54
6	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	417.894.725.978,00	412.555.793.455,00	5.338.932.523,00	98,72
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2.054.739.788,00	1.373.167.640,00	681.572.148,00	66,83
8	Satuan Polisi Pamong Praja	3.765.710.000,00	3.731.228.683,00	34.481.317,00	99,08
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	34.660.000,00	34.320.000,00	340.000,00	99,02
10	Dinas Perhubungan	3.321.359.210,00	3.245.278.602,00	76.080.608,00	97,71
11	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	114.942.500,00	114.742.500,00	200.000,00	99,83
12	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	402.839.953,00	401.310.793,00	1.529.160,00	99,62
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	67.578.800.000,00	67.575.382.800,00	3.417.200,00	99,99
	Jumlah	1.320.000.000.000,00	1.279.572.655.079,63	40.427.344.920,37	96,94

5.1.3 Transfer

Rp1.085.836.698.996,63

Rp1.020.779.081.747,71

Transfer Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.098.322.810.490,00 dan realisasi sebesar Rp1.085.836.698.996,63 atau 98,86%, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Rp693.891.920.604,00

Rp735.341.757.826,71

Transfer Bagi Hasil Pendapatan dianggarkan sebesar Rp693.891.920.604,00 dan realisasi sebesar Rp693.891.920.604,00 atau 100%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp41.449.837.222,71 atau 5,64% dibandingkan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp735.341.757.826,71. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2020 merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64
Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

	Under-		Tahun 2020			
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)	
1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta	120.965.338.876,00	120.965.338.876,00	100,00	133.393.876.281,00	
2	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul	159.398.655.115,00	159.398.655.115,00	100,00	164.965.839.463,00	
3	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	88.092.018.037,00	88.092.018.037,00	100,00	91.295.702.627,99	
4	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	102.149.130.231,00	102.149.130.231,00	100,00	102.025.720.182,72	
5	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Sleman	223.286.778.345,00	223.286.778.345,00	100,00	243.660.619.272,00	
	Jumlah	693.891.920.604,00	693.891.920.604,00	100,00	735.341.757.826,71	

Untuk Bagi Hasil Pajak atas kelebihan target penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020, Kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak tersebut akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Adapun kekurangan pembayaran Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebesar Rp21.721.050.942,00 dengan rincian sebagai berikut:



กลา พยาหญาพ๛ทางพาผูกของทุพทางทางพา

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kota Yogyakarta	1.602.395.078,00
2	Kabupaten Bantul	5.230.278.485,00
3	Kabupaten Kulon Progo	2.693.378.622,00
4	Kabupaten Gunungkidul	3.783.042.594,00
5	Kabupaten Sleman	8.411.956.163,00
	Jumlah	21.721.050.942,00

Kekurangan bayar Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 telah dicatat sebagai Utang Belanja Bagi Hasil pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.721.050.942,00.

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Rp391.944.778.392,63

Rp285.437.323.921,00

Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp404.430.889.886,00 dan realisasi sebesar Rp391.944.778.392,63 atau 96,91%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp106.507.454.471,63 atau 37,31% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp285.437.323.921,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan meliputi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp390.599.778.392,63 dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp1.345.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Rp390.599.778.392,63

Rp281.452.614.421,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp403.085.889.886,00 dan realisasi sebesar Rp390.599.778.392,63 atau 96,90%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp109.147.163.971,63 atau 38,78% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp281.452.614.421,00 hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2020 ini untuk Pemerintah Kabupaten/Kota telah menggunakan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus untuk Dana Keistimewaan. Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.65
Rincian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

No.	Uraian		Tahun 2020			
NO.	Oralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)	
1	Bantuan Keuangan Ke Kota Yogyakarta	54.376.360.784,00	53.579.338.517,42	98,53	1.236.000.000,00	
2	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Bantul	30.057.493.490,00	27.049.701.557,00	89,99	4.356.000.000,00	
3	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Kulon Progo	174.812.830.075,00	170.547.095.225,00	97,56	100.162.270.517,00	
4	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Gunungkidul	94.793.776.537,00	91.005.025.848,21	96,00	173.379.343.904,00	
5	Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Sleman	49.045.429.000,00	48.418.617.245,00	98,72	2.319.000.000,00	
Jumlah		403.085.889.886,00	390.599.778.392,63	96,90	281.452.614.421,00	

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya tersebut merupakan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat khusus dengan peruntukkan masing-masing adalah sebagai berikut:



บอทิหูรูเพลทรเพลทรเตมีกูตอเทพเพาห์เพา

Tabel 5.66 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta

		Tahun 2020					
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian		
1	Jambanisasi (20 penerima)	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100,00		
1	Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (16 KPM)	48.000.000,00	-	48.000.000,00	-		
3	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (50 orang)	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-		
4	Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur	286.000.000,00	286.000.000,00	-	100,00		
5	Urusan Keistimewaan	53.712.360.784,00	53.113.338.517,42	599.022.266,58	98,88		
	Jumlah	54.376.360.784,00	53.579.338.517,42	797.022.266,58	98,53		

Tabel 5.67 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul

		Tahun 2020				
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian	
1	Jambanisasi (350 penerima)	1.050.000.000,00	642.000.000,00	408.000.000,00	61,14	
2	Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (19 KPM)	57.000.000,00	-	57.000.000,00	-	
3	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (215 orang)	645.000.000,00	-	645.000.000,00	-	
4	Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan Tahun 2020 (20 KUBE)	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-	
5	Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (29 penerima)	4.147.000.000,00	4.147.000.000,00	-	100,00	
6	Bantuan Keuangan Pemilukada 2020	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	100,00	
7	Urusan Keistimewaan	19.708.493.490,00	18.260.701.557,00	1.447.791.933,00	92,65	
	Jumlah	30.057.493.490,00	27.049.701.557,00	3.007.791.933,00	89,99	

Tabel 5.68 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo

		Tahun 2020				
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian	
1	Jambanisasi (374 penerima)	748.000.000,00	748.000.000,00	-	100,00	
2	BKK RSUD Wates	63.688.067.675,00	63.688.067.675,00	-	100,00	
3	Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan Jangkaran - Pantai Congot	780.000.000,00	-	780.000.000,00	-	
4	Pembangunan Embung Dlingseng Desa Banjaroyo, Kec, Kalibawang, Kab. Kulon Progo	5.650.000.000,00	5.650.000.000,00	-	100,00	
5	Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (25 KPM)	75.000.000,00	-	75.000.000,00	-	
6	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (180 orang)	540.000.000,00	-	540.000.000,00	-	
7	Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan Tahun 2020 (20 KUBE)	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-	
8	Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (3 penerima)	429.000.000,00	429.000.000,00	-	100,00	
9	Urusan Keistimewaan	102.452.762.400,00	100.032.027.550,00	2.420.734.850,00	97,64	
	Jumlah	174.812.830.075,00	170.547.095.225,00	4.265.734.850,00	97,56	



การ เกาะ การ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกา

Tabel 5.69
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul

			Tahun 2020		
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian
1	Jambanisasi (200 penerima)	600.000.000,00	354.000.000,00	246.000.000,00	59,00
	Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (24 KPM)	72.000.000,00	-	72.000.000,00	-
3	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (230 orang)	690.000.000,00	-	690.000.000,00	-
4	Bantuan Kelompok Usaha Bersama Pengembangan Tahun 2020 (20 KUBE)	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-
	Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (4 penerima)	572.000.000,00	572.000.000,00	-	100,00
6	Bantuan Keuangan Pemilukada 2020	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-	100,00
7	Urusan Keistimewaan	87.909.776.537,00	85.579.025.848,21	2.330.750.688,79	97,35
	Jumlah	94.793.776.537,00	91.005.025.848,21	3.788.750.688,79	96,00

Tabel 5.70
Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman

		Tahun 2020				
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian	
1	Jambanisasi (200 penerima)	800.000.000,00	800.000.000,00	-	100,00	
	Bantuan Penguatan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2018 (16 KPM)	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
3	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (150 orang)	450.000.000,00	450.000.000,00	-	100,00	
	Bantuan Keuangan Khusus Padat Karya Infrastruktur (12 penerima)	1.716.000.000,00	1.716.000.000,00	-	100,00	
5	Bantuan Keuangan Pemilukada 2020	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100,00	
6	Urusan Keistimewaan	44.531.429.000,00	43.904.617.245,00	626.811.755,00	98,59	
	Jumlah	49.045.429.000,00	48.418.617.245,00	626.811.755,00	98,72	

5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Rp1.345.000.000,00

Rp1.560.062.700,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp1.345.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.345.000.000,00 atau 100%. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp215.062.700,00 atau sebesar 13,79% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.560.062.700,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.71
Rincian Bantuan Keuangan ke Desa

		Tahun 2020				
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian	
1	Penguatan tebing pemukiman huntap Plosokerep	995.000.000,00	995.000.000,00	-	100,00	
2	Pemerintah Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
3	Pemerintah Desa Bawuran, Pleret, Bantul	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
Jumlah		1.345.000.000,00	1.345.000.000,00	-	100,00	



5.1.3.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Rp0,00

Rp2.424.646.800,00

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya pada Tahun 2019 merupakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Sesuai dengan perubahan regulasi terkait dengan Bantuan Partai Politik, Bantuan kepada Partai Politik dianggarkan dan direalisasikan pada Belanja Hibah kepada Partai Politik, sehingga realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5.1.4 Surplus (Defisit)

Rp178.330.224.944,04

Rp154.706.802.110,48

Surplus sebesar Rp178.330.224.944,04 merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2020. Surplus Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp23.623.422.833,56 atau 15,27% dibandingkan dengan Surplus Tahun 2019 yaitu sebesar Rp154.706.802.110,48. Surplus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.72 Surplus/Defisit

No	Unaian	Tahun 2020			Tahun 2019
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	5.558.125.044.792,93	5.611.510.924.299,71	100,96	5.699.357.232.440,50
2	Belanja dan Transfer	5.865.604.964.088,35	5.433.180.699.355,67	92,63	5.544.650.430.330,02
3	Surplus/Defisit	(307.479.919.295,42)	178.330.224.944,04	(58,00)	154.706.802.110,48

5.1.5 Pembiayaan Netto

Rp306.122.988.195,42

Rp265.861.156.884,94

Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp306.122.988.195,42, yang terdiri atas:

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Rp423.712.988.195,42

Rp474.458.156.884,94

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp423.712.988.195,42. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp50.745.168.689,52 atau 10,70% dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp474.458.156.884,94. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp423.712.988.195,42 berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya (Penarikan Dana Bergulir) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
No.	Or alam	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	420.567.958.995,42	420.567.958.995,42	100,00	471.794.246.868,94
2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Non Permanen Lainnya	4.501.960.300,00	3.145.029.200,00	69,86	2.663.910.016,00
	Jumlah	425.069.919.295,42	423.712.988.195,42	99,68	474.458.156.884,94

a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp420.567.958.995,42 merupakan SiLPA Tahun 2019 yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penerimaan Tahun Anggaran 2020.



^^^ พยาหญาพ๛กางพระกางผู้พุทยเบทเพาะการกางกา

b. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dianggarkan sebesar Rp4.501.960.300,00 dan realisasi sebesar Rp3.145.029.200,00 terdiri dari penerimaan pembayaran dana bergulir pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp55.000.000,00 dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp3.090.029.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74

Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kembali Investasi Daerah

		Tahun 2020				
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	% Capaian	
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	55.000.000,00	(55.000.000,00)	-	
	Program DPM LDPM	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	-	
	Program DPM LUEP	-	52.000.000,00	(52.000.000,00)	-	
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.501.960.300,00	3.090.029.200,00	1.411.931.100,00	44,43	
	Program Ketahanan Pangan 14 Kecamatan (Koperasi)	-	600.000,00	(600.000,00)	-	
	Program Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	-	1.088.429.200,00	(1.088.429.200,00)	-	
	Dana Bergulir dari Dana BUKP	4.501.960.300,00	2.000.000.000,00	2.501.960.300,00	44,43	
	Program Fasilitas Pemberdayaan Koperasi (Erupsi)	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	1	
	Jumlah	4.501.960.300,00	3.145.029.200,00	1.356.931.100,00	44,43	

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Rp117.590.000.000,00

Rp208.597.000.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp117.590.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp91.007.000.000,00 atau 43,63% dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp208.597.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp117.590.000.000,00 terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda DIY dianggarkan sebesar Rp117.590.000.000,00 dan realisasi 100% diberikan kepada:
 - 1) PT. Bank BPD DIY dianggarkan sebesar Rp101.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp101.000.000.000,000 atau 100%;
 - 2) PT. ASKRIDA dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp90.000.000,00 atau 100%; dan
 - 3) Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Air Bersih Tirtatama dianggarkan sebesar Rp12.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp12.500.000.000,00 atau 100%.

Pada Tahun 2020 terdapat penambahan penyertaan modal pada Perusda Air Bersih Tirtatama yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2020. Penyertaan Modal Pemda DIY pada Perusda Air Bersih Tirtatama dilakukan mendasarkan pada Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta berupa uang tunai sebesar Rp12.500.000.000,00 dan barang senilai Rp179.222.362.679,00.

4) Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan realisasi sebesar 100% melalui BUKP.

5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Rp484.453.213.139,46 Rp420.567.958.995,42

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp484.453.213.139,46, mengalami kenaikan sebesar Rp63.885.254.144,04 atau 15,19% dibandingkan dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 yaitu sebesar Rp420.567.958.995,42.



Jumlah tersebut merupakan selisih antara total realisasi pendapatan dan total realisasi belanja dan transfer ditambah dengan pembiayaan netto Tahun Anggaran 2020, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.75
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

No.	Uraian		Tahun 2020		
NO.	Oralan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	5.558.125.044.792,93	5.611.510.924.299,71	100,96	-
2	Belanja dan Transfer	5.865.604.964.088,35	5.433.180.699.355,67	92,63	-
3	Surplus/Defisit	(307.479.919.295,42)	178.330.224.944,04	(58,00)	-
4	Pembiayaan Netto	307.479.919.295,42	306.122.988.195,42	99,56	265.861.156.884,94
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	484.453.213.139,46	-	265.861.156.884,94

SILPA sebesar Rp484.453.213.139,46 tersebut terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah
NO.	Oralan	(Rp)
1	Kas di Kas Daerah	441.671.236.637,40
	Giro BPD	441.542.977.462,04
	Setoran Pengembalian dari Pihak Ketiga	128.259.175,36
2	Kas di Bendahara Penerimaan	52.675.210,00
	Bendahara Penerima DPUPESDM	1.334.000,00
	Bendahara Penerima Dinas Perhubungan	4.127.000,00
	Bendahara Penerima DLHK	3.682.919,00
	Bendaharan Penerima Dinas Koperasi dan UKM	43.531.291,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.518.460,00
	Bendahara Pengeluaran BKD	4.405.460,00
	Bendahara Pengeluaran di DPAD	2.113.000,00
4	Kas di Bendahara BOS	10.044.731.811,00
5	Kas di BLUD	32.677.963.006,06
	SILPA di BLUD RS Jiwa Ghrasia	9.362.753.244,15
	SILPA di BLUD BLPT	2.657.212.910,00
	SILPA di BLUD BAPELIAMKESOS	2.108.285.943,29
	SILPA di BLUD Balai Latihan Kesehatan	3.246.671.492,00
	SILPA di BLUD RS Paru Respira	10.677.399.119,00
	SILPA di Balai Laboratorium Kesehatan	4.625.640.297,62
6	Kas Lainnya	88.015,00
	Kas di Bendahara Sumbangan Penanganan Covid-19	88.015,00
	Jumlah	484.453.213.139,46

Penjelasan:

- 1. SILPA di BUD sebesar Rp441.671.236.637,40 terdiri dari Saldo Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY Nomor 001.111.000059 sebesar Rp441.542.977.462,04 dan Setoran Pengembalian atas kelebihan pembayaran pada Pihak Ketiga sebesar Rp128.259.175,36.
- 2. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan belum disetor oleh Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp9.143.919,00 meliputi Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.334.000,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp4.127.000,00, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp3.682.919,00, dan Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp43.531.291,00.
- 3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.518.460,00 merupakan setoran pengembalian belanja yang sumber dananya dari SP2D UP/GU pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp4.405.460,00 dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp2.113.000,00.



การ พยาทินารพรารพรารตุนิทยเทศพารทุกาเก

- 4. Kas di Bendahara BOS sebesar Rp10.044.731.811,00 merupakan sisa penyaluran BOS yang diterima langsung oleh Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri.
- 5. Kas di BLUD sebesar Rp32.677.963.006,06 merupakan kas yang ada di rekening BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76
Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	RS Jiwa Ghrasia	(
	SILPA 31 Desember 2019	8.052.144.460,15
	Pendapatan BLUD Tahun 2020	18.656.156.571,00
	Belanja BLUD Tahun 2020	17.345.547.787,00
	SILPA 31 Desember 2020	9.362.753.244,15
2	Balai Latihan Pendidikan Teknik	
	SILPA 31 Desember 2019	2.653.578.243,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2020	1.462.360.117,00
	Belanja BLUD Tahun 2020	1.458.725.450,00
	SILPA 31 Desember 2020	2.657.212.910,00
3	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial	
	SILPA 31 Desember 2019	2.060.068.305,29
	Pendapatan BLUD Tahun 2020	48.217.638,00
	Belanja BLUD Tahun 2020	-
	SILPA 31 Desember 2020	2.108.285.943,29
4	Balai Pelatihan Kesehatan	
	SILPA 31 Desember 2019	3.066.421.643,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2020	1.523.156.103,00
	Belanja BLUD Tahun 2020	1.342.906.254,00
	SILPA 31 Desember 2020	3.246.671.492,00
5	RS Paru Respira	
	SILPA 31 Desember 2019	8.512.709.497,00
	Pendapatan BLUD Tahun 2020	11.755.363.058,00
	Belanja BLUD Tahun 2020	9.590.673.436,00
	SILPA 31 Desember 2019	10.677.399.119,00
6	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi	
	SILPA 31 Desember 2019	3.369.247.849,62
	Pendapatan BLUD Tahun 2020	5.499.852.228,00
	Belanja BLUD Tahun 2020	4.243.459.780,00
	SILPA 31 Desember 2020	4.625.640.297,62
	Jumlah SILPA BLUD	32.677.963.006,06

6. Kas Lainnya sebesar Rp88.015,00 merupakan penerimaan bunga rekening Sumbangan Masyarakat untuk Penanganan Covid-19 pada BPBD yang belum disetorkan ke rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.



การ พยาหญาพ๛ การเมาผู้ ๆ ยาเขา ๆ เพาะ การเมาะการท

5.2. RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Penjelasan rincian Laporan Perubahan SAL adalah sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Rp420.567.958.995,42

Rp471.794.246.868,94

Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2020 sebesar Rp420.567.958.995,42 mengalami penurunan sebesar Rp51.226.287.873,52 atau 10,86% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2019 yaitu sebesar Rp471.794.246.868,94. Saldo Anggaran Lebih awal merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan APBD Tahun 2020.

5.2.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Rp484.453.213.139,46 Rp420.567.958.995,42

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp484.453.213.139,46 berasal dari:

Tabel 5.77 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah
		(Rp)
1	Pendapatan	5.611.510.924.299,71
2	Belanja dan Transfer	5.433.180.699.355,67
	Surplus (Defisit)	178.330.224.944,04
3	Penerimaan Pembiayaan	423.712.988.195,42
4	Pengeluaran Pembiayaan	(117.590.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	306.122.988.195,42
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	484.453.213.139,46

5.2.3. Sisa Anggaran Lebih Akhir

Rp484.453.213.139,46

Rp420.567.958.995,42

Sisa Anggaran Lebih akhir Tahun 2020 sebesar Rp484.453.213.139,46 mengalami kenaikan sebesar Rp63.885.254.144,04 atau 15,19% dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2019 yaitu sebesar Rp420.567.958.995,42. Kenaikan Sisa Anggaran Lebih Akhir disebabkan realisasi penerimaan pendapatan Tahun 2020 melebihi dari target yang ditetapkan.



การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ

5.3 RINCIAN DAN PENJELASAN NERACA

5.3.1 Aset Rp11.335.536.076.401,00 Rp10.384.581.587.538,70

5.3.1.1 Aset Lancar Rp672.000.559.071,08 Rp565.036.388.454,07

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas Rp 484.453.213.139,46 Rp433.555.460.454,42

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 484.453.213.139,46 merupakan Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS, dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Rp441.671.236.637,40

Rp385.653.593.288,36

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp441.671.236.637,40 merupakan kas dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059 dengan rincian saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp439.850.345.019,04, Jasa Giro bulan Desember sebesar Rp1.692.632,.443,00 dan Pengembalian Belanja SP2D LS masih di Pihak Ketiga sebesar Rp128.259.175,36.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp441.671.236.637,40 mengalami kenaikan sebesar Rp 56.017.643.349,04 atau 14,53% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp385.653.593.288,36.

Rincian Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.78
Rincian Rekening Giro

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Rekening Giro BPD DIY	441.542.977.462,04	385.582.061.588,36
2.	Pengembalian Belanja SP2D LS masih di Pihak Ketiga	128.259.175,36	71.531.700,00
	Jumlah	441.671.236.637,40	385.653.593.288,36

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Rp52.675.210,00

Rp54.694.388,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp52.675.210,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp52.675.210,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.019.178,00 atau 3,69% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp54.694.388,00

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan berikut nomor STS dan tanggal penyetoran ke Kasda adalah sebagai berikut:

OPD	No. STS	Tanggal	Jumlah
	33037/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	230.000,00
	33038/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	712.000,00
Dinas Perhubungan	33039/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	564.000,00
	33040/STS/1.15.01.01/A01/01/2021		216.000,00
	33041/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	246.000,00



กลา พยาหญาพ๛ทางพาผูกของทุพทางทางพา

	52.675.210,00		
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	00004/STS/2.17.01/A01/04/2020	1 April 2021	43.531.291,00
& Kehutanan	390/STS/1.11.01.00/A01/12/2020	4 Januari 2021	48.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	391/STS/1.11.01.00/A01/12/2020	4 Januari 2021	3.634.919,00
Dinas PUPESDM	00001/STS/BALAIPIALAM/01/2021	4 Januari 2021	1.334.000,00
	33044/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	410.000,00
-	33043/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	703.000,00
	33042/STS/1.15.01.01/A01/01/2021	4 Januari 2021	1.046.000,00

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp6.518.460,00

Rp7.145.501.321,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.518.460,00 merupakan kelebihan belanja barang jasa yang disetor ke Rekening Kas Daerah setelah tanggal 31 Desember 2010. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.518.460,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.138.982.861,00 atau 99,91% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp7.145.501.321,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.79
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Nama OPD	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	6.921.089.344,00
	a. Setor Kas Daerah	0,00	142.500.000,00
	b. Rekening SMA/SMK/SLB Negeri (Sisa BOS 2019)	0,00	474.194.489,00
	c. Rekening SMA/SMK/SLB Negeri (Sisa BOS 2020)	0,00	6.304.394.855,00
2.	Dinas Kebudayaan (Taman Budaya)	0,00	12.000.000,00
3.	PPKD	0,00	212.411.977,00
4.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.113.000,00	0,00
5.	Badan Kepegawaian Daerah	4.405.460,00	0,00
	Jumlah	6.518.460,00	7.145.501.321,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.921.089.344,00 di dalamnya termasuk Saldo Kas BOS di sekolah sebesar Rp6.778.589.344,00. Dalam Neraca per 31 Desember 2020, sisa Kas BOS disajikan dalam akun Kas di Bendahara BOS. Penyajian didasarkan pada Permendagri 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dimana salah satunya mengatur bahwa untuk pengelolaan Dana BOS, Kepala Daerah menetapkan Bendahara BOS. Untuk Tahun 2020 Bendahara BOS telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 198/KEP/2020 tentang Penunjukkan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Rp32.677.963.006,06

Rp27.714.169.998,06

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.677.963.006,06 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Bapel



การ พยาทินารพรารพรารตุนิทยเทศพารทุกาเก

Jamkessos, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Latihan Pendidikan dan Teknik. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.677.963.006,06 mengalami peningkatan sebesar Rp4.963.793.008,00 atau 17,91% dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp27.714.169.998,06. Rincian Kas di BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.80 Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	RS Grhasia	9.362.753.244,15	8.052.144.460,15
2	RS Paru Respira	10.677.399.119,00	8.512.709.497,00
3	Balai Pelayanan Jamkesos	2.108.285.943,29	2.060.068.305,29
4.	Balai Pelatihan Kesehatan	3.246.671.492,00	3.066.421.643,00
5.	Balai Laboratorium Kesehatan	4.625.640.297,62	3.369.247.849,62
6.	BLPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.657.212.910,00	2.653.578.243,00
	Jumlah	32.677.963.006,06	27.714.169.998,06

Penjelasan:

- a. Kas BLUD pada RS Grhasia sebesar Rp9.362.753.244,15 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY No. 041.111.000043 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2020 Rp9.360.340.315,15 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp2.412.929,00.
- b. Kas di BLUD pada RS Paru Respira sebesar Rp 10.677.399.119,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001427 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2020 Rp10.661.454.406,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp15.944.713,00.
- c. Kas di BLUD pada Balai Pelayanan Jamkesos sebesar Rp2.108.285.943,29 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.000055 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2020 Rp2.104.778.230,29 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp3.507.713,00.
- d. Kas di BLUD pada Balai Pelatihan Kesehatan sebesar Rp3.246.671.492,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 040.111.00005 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2020 Rp3.239.035.266,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp7.636.226,00.
- e. Kas di BLUD pada Balai Laboratorium Kesehatan sebesar Rp4.625.640.297,62 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 060.111.000004 yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2020 Rp4.619.400.751,62 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp6.239.546,00.
- f. Kas di BLUD pada BLPT sebesar Rp2.657.212.910,00 ditempatkan pada rekening giro BPD DIY Nomor 001.111.001065yang terdiri dari saldo giro per 31 Desember 2020 Rp2.653.005.348,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2020 sebesar Rp4.207.562,00 .

5.3.1.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Rp10.044.731.811,00

Rp0,00

Kas di Bendahara BOS merupakan Sisa Dana BOS yang berada di rekening SMA/SMK/SLB Negeri sebesar Rp10.044.731.811,00 terdiri dari Sisa Dana BOS Tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp614.183.396,00 dengan rincian sesuai dengan Tabel 5.81 dan Sisa Dana BOS Tahun 2020 sebesar Rp9.430.548.415,00 sesuai dengan rincian Tabel 5.82.

Saldo Kas di BOS per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Hal tersebut disebabkan karena pada Neraca per 31 Desember 2019, sisa Kas BOS disajikan menjadi satu dalam Akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Hal tersebut disebabkan belum ada penunjukkan Bendahara BOS secara formal. Penyajian sisa Kas BOS per 31 Desember 2020 pada Akun Kas di Bendahara BOS mendasarkan pada Permendagri 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dimana



^^^ ๛๛๎กษูรุฒ๛ทรฺฒ๛ทรฺ๛ฺมูฦ๛๗ฦพฺ๛ฦ๛๎๛

salah satunya mengatur bahwa untuk pengelolaan Dana BOS, Kepala Daerah menetapkan Bendahara BOS. Untuk Tahun 2020 Bendahara BOS telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 198/KEP/2020 tentang Penunjukkan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

Tabel 5.81

Rincian Sisa Dana BOS Tahun 2018 dan 2019 di SMA/SMK/SLB Negeri

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 2018	SALDO 2019	JUMLAH	REALISASI	SISA KAS BOS
1	SMA Negeri 1 Yogyakarta	-	10.050.575,00	10.050.575,00	10.050.575,00	-
2	SMA Negeri 2 Yogyakarta	-	62.952.701,00	62.952.701,00	62.952.701,00	-
3	SMA Negeri 3 Yogyakarta	-	3.471.978,00	3.471.978,00	3.471.978,00	-
4	SMA Negeri 4 Yogyakarta	-	20.961.535,00	20.961.535,00	20.961.535,00	-
5	SMA Negeri 5 Yogyakarta	-	7.548.001,00	7.548.001,00	-	7.548.001,00
6	SMA Negeri 6 Yogyakarta	-	2.763.063,00	2.763.063,00	2.760.800,00	2.263,00
7	SMA Negeri 7 Yogyakarta	-	74.856.991,00	74.856.991,00	74.856.991,00	-
8	SMA Negeri 8 Yogyakarta	-	11.084.320,00	11.084.320,00	11.084.320,00	-
9	SMA Negeri 9 Yogyakarta	-	40.793.094,00	40.793.094,00	40.793.094,00	-
10	SMA Negeri 10 Yogyakarta	-	924.000,00	924.000,00	924.000,00	-
11	SMA Negeri 11 Yogyakarta	-	95.821.000,00	95.821.000,00	95.821.000,00	_
12	SMA Negeri 1 Bambanglipuro	-	356.000,00	356.000,00	356.000,00	-
13	SMA Negeri 1 Banguntapan	91,00	5.847.492,00	5.847.583,00	5.847.583,00	-
14	SMA Negeri 2 Banguntapan		1.100.144,00	1.100.144,00	1.100.144,00	-
15	SMA Negeri 1 Bantul	-	1.636.080,00	1.636.080,00	1.636.080,00	-
16	SMA Negeri 2 Bantul	80,00	-	80,00	-	80,00
17	SMA Negeri 3 Bantul	-	2.163.400,00	2.163.400,00	63.400,00	2.100.000,00
18	SMA Negeri 1 Dlingo	-	-	-	-	-
19	SMA Negeri 1 Imogiri	-	930.300,00	930.300,00	930.300,00	-
20	SMA Negeri 1 Jetis	-	348.706,00	348.706,00	348.706,00	-
21	SMA Negeri 1 Kasihan	-	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-
22	SMA Negeri 1 Kretek	-	425.000,00	425.000,00	-	425.000,00
23	SMA Negeri 1 Pajangan	-	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	-
24	SMA Negeri 1 Piyungan	-	37.181.320,00	37.181.320,00	37.181.320,00	-
25	SMA Negeri 1 Pleret	-	5.975.400,00	5.975.400,00	5.975.400,00	-
26	SMA Negeri 1 Pundong	-	-	-	-	-
27	SMA Negeri 1 Sanden	-	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-
28	SMA Negeri 1 Sedayu	-	-	-	-	-
29	SMA Negeri 1 Sewon	100.000,00	3.574.625,00	3.674.625,00	3.674.625,00	-



กกล พยาหูเพลาเพลาเพ่นๆผพาพพาหาเก

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 2018	SALDO 2019	JUMLAH	REALISASI	SISA KAS BOS
30	SMA Negeri 1 Srandakan	-	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-
31	SMA Negeri 1 Galur	-	467.300,00	467.300,00	467.300,00	-
32	SMA Negeri 1 Girimulyo	-	4.666.997,00	4.666.997,00	4.666.997,00	-
33	SMA Negeri 1 Kalibawang	-	6.128.446,00	6.128.446,00	6.128.446,00	-
34	SMA Negeri 1 Kokap	-	2.264.175,00	2.264.175,00	2.264.175,00	-
35	SMA Negeri 1 Lendah	-	2.204.173,00	-	-	-
36	SMA Negeri 1 Pengasih	-	1.540.550	1.540.550,00	1.540.550	_
37	SMA Negeri 1 Samigaluh	-	1.040.000	_	-	-
38	SMA Negeri 1 Sentolo	-	24 567 700	34.567.700,00	34.365.860	201.840,00
39	SMA Negeri 1 Temon	_	34.567.700	23.086.600,00	23.086.600	-
40	SMA Negeri 1 Wates	_	23.086.600	51.066.273,00	51.066.273	_
41	SMA Negeri 2 Wates		51.066.273	-		_
42	SMA Negeri 1 Karangmojo		24.852.211,00	24.852.211,00	24 852 200 00	
		-	·		24.852.200,00	11,00
43	SMA Negeri 1 Panggang	-	21.739.125,00	21.739.125,00	21.739.125,00	-
44	SMA Negeri 1 Patuk	-	-	-	-	-
45	SMA Negeri 1 Playen	-	45.900.700,00	45.900.700,00	44.700.700,00	1.200.000,00
46	SMA Negeri 2 Playen	-	47.008.040,00	47.008.040,00	47.008.040,00	-
47	SMA Negeri 1 Rongkop	-	3.200.000,00	3.200.000,00	2.160.000,00	1.040.000,00
48	SMA Negeri 1 Semanu	-	3.209.080,00	3.209.080,00	-	3.209.080,00
49	SMA Negeri 1 Semin	-	7.772.000,00	7.772.000,00	7.772.000,00	-
50	SMA Negeri 1 Tanjungsari	-	-	-	-	-
51	SMA Negeri 1 Wonosari	-	40.394.802,00	40.394.802,00	40.394.802,00	-
52	SMA Negeri 2 Wonosari	-	2.334.500,00	2.334.500,00	2.334.500,00	-
53	SMA Negeri 1 Cangkringan	-	-	-	-	-
54	SMA Negeri 1 Depok	-	1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	-
55	SMA Negeri 1 Gamping	-	-	-	-	-
56	SMA Negeri 1 Godean	-	-	-	-	-
57	SMA Negeri 1 Kalasan	-	162.400,00	162.400,00	162.400,00	-
58	SMA Negeri 1 Minggir	-	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	-
59	SMA Negeri 1 Mlati	-	-	-	-	-
60	SMA Negeri 1 Ngaglik	-	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	-
61	SMA Negeri 2 Ngaglik	-	4.968.869,00	4.968.869,00	4.968.869,00	-
62	SMA Negeri 1 Ngemplak	-	64.995.600,00	64.995.600,00	64.995.600,00	-
63	SMA Negeri 1 Pakem	42,00	4.788.950,00	4.788.992,00	4.788.600,00	392,00
64	SMA Negeri 1 Prambanan	-	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-
65	SMA Negeri 1 Seyegan	-	-	-	-	-
66	SMA Negeri 1 Sleman	-			-	-
67	SMA Negeri 2 Sleman	-	-	-	-	-
68	SMA Negeri 1 Tempel	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-



กลายเกาะสารเกาะสารแก้มๆเกาะสารเ

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 2018	SALDO 2019	JUMLAH	REALISASI	SISA KAS BOS
69	SMA Negeri 1 Turi	-	132.696.800,00	132.696.800,00	132.696.800,00	-
70	SMK Negeri 1 Yogyakarta	-	-	-	-	-
71	SMK Negeri 2 Yogyakarta	1.275.850,00	530.456.796,00	711.732.646,00	707.756.485,00	3.976.161,00
72	SMK Negeri 3 Yogyakarta	-	1.338.387.182,00	1.338.387.182,00	860.856.000,00	477.531.182,00
73	SMK Negeri 4 Yogyakarta	-	6.087.758,00	6.087.758,00	6.087.758,00	-
74	SMK Negeri 5 Yogyakarta	-	244.028.500,00	244.028.500,00	244.028.500,00	-
75	SMK Negeri 6 Yogyakarta	-	122.159.350,00	122.159.350,00	122.159.350,00	-
76	SMK Negeri 7 Yogyakarta	-	-	-	-	-
77	SMK Negeri 1 Bantul	-	383.798.271,00	383.798.271,00	383.798.271,00	-
78	SMK Negeri 1 Dlingo	-	210.000,00	210.000,00	-	210.000,00
79	SMK Negeri 1 Kasihan	-	158.471.350,00	158.471.350,00	158.403.300,00	68.050,00
80	SMK Negeri 2 Kasihan	.044.135,00	44.347.570,00	96.391.705,00	96.391.705,00	-
81	SMK Negeri 3 Kasihan	-	57.347.806,00	57.347.806,00	57.347.806,00	-
82	SMK Negeri 1 Pajangan	-	7.733.370,00	7.733.370,00	7.733.370,00	-
83	SMK Negeri 1 Pandak	-	94.599.100,00	94.599.100,00	94.599.100,00	-
84	SMK Negeri 1 Pleret	-	78.050.554,00	78.050.554,00	78.050.554,00	-
85	SMK Negeri 1 Pundong	-	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	-
86	SMK Negeri 1 Sanden	4.059.938,00	70.404.938,00	284.464.876,00	237.220.886,00	47.243.990,00
87	SMK Negeri 1 Sedayu	-	106.782.950,00	106.782.950,00	106.782.950,00	-
88	SMK Negeri 1 Sewon	-	381.678.000,00	381.678.000,00	366.578.000,00	15.100.000,00
89	SMK Negeri 2 Sewon	-	76.467.500,00	76.467.500,00	76.467.500,00	-
90	SMK Negeri 1 Girimulyo	-	-	-	-	-
91	SMK Negeri 1 Kokap	-	-	-	-	-
92	SMK Negeri 1 Nanggulan	6.557.643,00	199.828.170,00	226.385.813,00	224.948.506,00	1.437.307,00
93	SMK Negeri 1 Panjatan	-	1.965.826,00	1.965.826,00	1.965.826,00	-
94	SMK Negeri 1 Pengasih	-	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-
95	SMK Negeri 2 Pengasih	-	27.412.441,00	27.412.441,00	27.412.441,00	-
96	SMK Negeri 1 Samigaluh	-	43.993.250,00	43.993.250,00	43.993.250,00	-
97	SMK Negeri 1 Temon	50,00	430.812.825,00	430.812.875,00	430.812.875,00	-
98	SMK Negeri 1 Gedangsari	-	27.835.550,00	27.835.550,00	26.950.000,00	885.550,00
99	SMK Negeri 2 Gedangsari	-	12.504.400,00	12.504.400,00	12.503.755,00	645,00
100	SMK Negeri 1 Girisubo	-	132.064.820,00	132.064.820,00	82.064.820,00	50.000.000,00
101	SMK Negeri 1 Ngawen	-	67.651.414,00	67.651.414,00	67.651.414,00	_
102	SMK Negeri 1 Nglipar	-	28.139.539,00	28.139.539,00	28.139.530,00	9,00
103	SMK Negeri 1 Ponjong	-	49.851.425,00	49.851.425,00	48.861.000,00	990.425,00
104	SMK Negeri 1 Purwosari	-	39.231.325,00	39.231.325,00	39.061.000,00	170.325,00
105	SMK Negeri 1 Saptosari	-	-	-	-	-
106	SMK Negeri 1 Tanjungsari	-	4.137.215,00	4.137.215,00	4.137.215,00	-
107	SMK Negeri 1 Tepus	-	85.016.500,00	85.016.500,00	85.016.500,00	-
108	SMK Negeri 1 Wonosari	-	80.200,00	80.200,00	80.200,00	-
109	SMK Negeri 2 Wonosari	-	67.409.821,00	67.409.821,00	67.409.821,00	-



NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 2018	SALDO 2019	JUMLAH	REALISASI	SISA KAS BOS
110	SMK Negeri 3 Wonosari	-	-	-	-	-
111	SMK Negeri 1 Cangkringan	-	43.298.109,00	43.298.109,00	43.298.109,00	-
112	SMK Negeri 1 Depok	-	33.018.800,00	33.018.800,00	33.018.800,00	-
113	SMK Negeri 2 Depok	-	36.466.864,00	36.466.864,00	36.466.000,00	864,00
114	SMK Negeri 1 Godean	-	43.641.612,00	43.641.612,00	43.641.612,00	-
115	SMK Negeri 2 Godean	-	40.913.860,00	40.913.860,00	40.913.860,00	-
116	SMK Negeri 1 Kalasan	-	19.421.920,00	19.421.920,00	19.421.920,00	-
117	SMK Negeri 1 Seyegan	156.660,00	34.299.540,00	34.456.200,00	34.456.180,00	20,00
118	SMK Negeri 1 Tempel	-	70.442.900,00	70.442.900,00	70.442.900,00	-
119	SLB/C N 1 Yogyakarta	-	-	-	-	-
120	SLB/C N 2 Yogyakarta	-	912.500,00	912.500,00	912.500,00	-
121	SLB/C N Pembina	-	12.685.240,00	12.685.240,00	12.685.240,00	-
122	SLB N 1 Bantul	-	60.070.201,00	60.070.201,00	59.570.000,00	500.201,00
123	SLB N 2 Bantul	-	342.000,00	342.000,00	-	342.000,00
124	SLB N 1 Sleman	-	-	-	-	-
125	SLB N 1 Gunungkidul	-	29.605.350,00	29.605.350,00	29.605.350,00	-
126	SLB N 2 Gunungkidul	-	-	-	-	-
127	SLB N 1 Kulon Progo	-	1.629.400,00	1.629.400,00	1.629.400,00	-
	Jumlah	74.194.489,00	6.304.394.855,00	6.778.589.344,00	6.164.405.948,00	614.183.396,00

Tabel 5.82
Rincian Sisa Dana BOS Tahun 2020 di SMA/SMK/SLB Negeri

NO	NAMA SEKOLAH	PENCAIRAN	REALISASI	SISA KAS BOS
1	SMA Negeri 1 Yogyakarta	1.360.350.000,00	1.151.600.395,00	208.749.605,00
2	SMA Negeri 2 Yogyakarta	1.351.350.000,00	1.256.560.643,00	94.789.357,00
3	SMA Negeri 3 Yogyakarta	1.055.550.000,00	1.026.968.341,00	28.581.659,00
4	SMA Negeri 4 Yogyakarta	1.190.250.000,00	894.902.211,00	295.347.789,00
5	SMA Negeri 5 Yogyakarta	1.220.550.000,00	1.193.446.447,00	27.103.553,00
6	SMA Negeri 6 Yogyakarta	1.209.300.000,00	1.180.577.019,00	28.722.981,00
7	SMA Negeri 7 Yogyakarta	1.191.300.000,00	1.115.755.254,00	75.544.746,00
8	SMA Negeri 8 Yogyakarta	1.221.000.000,00	1.185.700.940,00	35.299.060,00
9	SMA Negeri 9 Yogyakarta	979.050.000,00	801.828.699,00	177.221.301,00
10	SMA Negeri 10 Yogyakarta	850.950.000,00	837.000.000,00	13.950.000,00
11	SMA Negeri 11 Yogyakarta	1.336.650.000,00	1.315.500.000,00	21.150.000,00
12	SMA Negeri 1 Bambanglipuro	896.700.000,00	869.516.734,00	27.183.266,00
13	SMA Negeri 1 Banguntapan	1.034.400.000,00	1.024.500.000,00	9.900.000,00
14	SMA Negeri 2 Banguntapan	1.047.900.000,00	1.042.418.616,00	5.481.384,00
15	SMA Negeri 1 Bantul	1.332.000.000,00	1.313.994.841,00	18.005.159,00
16	SMA Negeri 2 Bantul	1.225.350.000,00	1.200.250.040,00	25.099.960,00
17	SMA Negeri 3 Bantul	935.250.000,00	927.562.400,00	7.687.600,00
18	SMA Negeri 1 Dlingo	632.550.000,00	632.548.800,00	1.200,00
19	SMA Negeri 1 Imogiri	892.650.000,00	877.622.950,00	15.027.050,00



กลา ผลาหูเพลาเพลาเพนีย์ กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม

NO	NAMA SEKOLAH	PENCAIRAN	REALISASI	SISA KAS BOS
20	SMA Negeri 1 Jetis	1.213.650.000,00	1.191.553.967,00	22.096.033,00
21	SMA Negeri 1 Kasihan	1.208.400.000,00	1.142.623.956,00	65.776.044,00
22	SMA Negeri 1 Kretek	628.050.000,00	606.000.000,00	22.050.000,00
23	SMA Negeri 1 Pajangan	775.350.000,00	760.500.000,00	14.850.000,00
24	SMA Negeri 1 Piyungan	806.850.000,00	801.000.000,00	5.850.000,00
25	SMA Negeri 1 Pleret	734.700.000,00	726.164.500,00	8.535.500,00
26	SMA Negeri 1 Pundong	884.250.000,00	881.980.000,00	2.270.000,00
27	SMA Negeri 1 Sanden	896.850.000,00	886.500.000,00	10.350.000,00
28	SMA Negeri 1 Sedayu	1.322.100.000,00	1.322.100.000,00	-
29	SMA Negeri 1 Sewon	1.575.300.000,00	1.549.846.600,00	25.453.400,00
30	SMA Negeri 1 Srandakan	548.400.000,00	529.176.413,00	19.223.587,00
31	SMA Negeri 1 Galur	487.500.000,00	476.476.798,00	11.023.202,00
32	SMA Negeri 1 Girimulyo	432.000.000,00	431.668.600,00	331.400,00
33	SMA Negeri 1 Kalibawang	567.150.000,00	533.103.423,00	34.046.577,00
34	SMA Negeri 1 Kokap	254.550.000,00	254.241.000,00	309.000,00
35	SMA Negeri 1 Lendah	866.250.000	863.239.010	3.010.990,00
36	SMA Negeri 1 Pengasih	922.050.000	912.624.290	9.425.710,00
37	SMA Negeri 1 Samigaluh	264.450.000	259.500.000	4.950.000,00
38	SMA Negeri 1 Sentolo	793.050.000	781.360.225	11.689.775,00
39	SMA Negeri 1 Temon	559.350.000	547.250.188	12.099.812,00
40	SMA Negeri 1 Wates	1.062.000.000	1.040.792.213	21.207.787,00
41	SMA Negeri 2 Wates	754.200.000	740.517.000	13.683.000,00
42	SMA Negeri 1 Karangmojo	1.019.400.000,00	953.522.101,00	65.877.899,00
43	SMA Negeri 1 Panggang	645.450.000,00	606.389.081,00	39.060.919,00
44	SMA Negeri 1 Patuk	666.900.000,00	649.210.028,00	17.689.972,00
45	SMA Negeri 1 Playen	528.750.000,00	500.153.522,00	28.596.478,00
46	SMA Negeri 2 Playen	957.300.000,00	911.814.231,00	45.485.769,00
47	SMA Negeri 1 Rongkop	514.350.000,00	481.855.029,00	32.494.971,00
48	SMA Negeri 1 Semanu	380.550.000,00	346.198.541,00	34.351.459,00
49	SMA Negeri 1 Semin	965.700.000,00	953.997.699,00	11.702.301,00
50	SMA Negeri 1 Tanjungsari	673.500.000,00	593.419.300,00	80.080.700,00
51	SMA Negeri 1 Wonosari	1.052.550.000,00	984.326.670,00	68.223.330,00
52	SMA Negeri 2 Wonosari	972.900.000,00	908.397.453,00	64.502.547,00
53	SMA Negeri 1 Cangkringan	595.500.000,00	587.295.950,00	8.204.050,00
54	SMA Negeri 1 Depok	899.550.000,00	890.899.356,00	8.650.644,00
55	SMA Negeri 1 Gamping	584.400.000,00	562.800.000,00	21.600.000,00
56	SMA Negeri 1 Godean	899.850.000,00	889.496.559,00	10.353.441,00
57	SMA Negeri 1 Kalasan	1.116.150.000,00	1.098.123.282,00	18.026.718,00
58	SMA Negeri 1 Minggir	580.050.000,00	566.459.842,00	13.590.158,00
59	SMA Negeri 1 Mlati	588.900.000,00	579.000.000,00	9.900.000,00
60	SMA Negeri 1 Ngaglik	956.850.000,00	881.348.704,00	75.501.296,00
61	SMA Negeri 2 Ngaglik	1.101.000.000,00	1.092.000.000,00	9.000.000,00



กลา ผลาหูรพะทรพะทรพุทูกผพาทุพาเก

NO	NAMA SEKOLAH	PENCAIRAN	REALISASI	SISA KAS BOS
62	SMA Negeri 1 Ngemplak	589.800.000,00	581.815.602,00	7.984.398,00
63	SMA Negeri 1 Pakem	738.450.000,00	728.882.444,00	9.567.556,00
64	SMA Negeri 1 Prambanan	1.073.700.000,00	1.048.439.970,00	25.260.030,00
65	SMA Negeri 1 Seyegan	1.200.900.000,00	1.159.500.000,00	41.400.000,00
66	SMA Negeri 1 Sleman	1.021.500.000,00	999.000.000,00	22.500.000,00
67	SMA Negeri 2 Sleman	591.600.000,00	575.865.125,00	15.734.875,00
68	SMA Negeri 1 Tempel	544.650.000,00	541.500.000,00	3.150.000,00
69	SMA Negeri 1 Turi	571.050.000,00	492.376.355,00	78.673.645,00
70	SMK Negeri 1 Yogyakarta	937.440.000,00	880.631.733,00	56.808.267,00
71	SMK Negeri 2 Yogyakarta	3.501.600.000,00	3.296.972.741,00	204.627.259,00
72	SMK Negeri 3 Yogyakarta	2.890.720.000,00	1.827.371.938,00	1.063.348.062,00
73	SMK Negeri 4 Yogyakarta	2.753.600.000,00	2.522.026.795,00	231.573.205,00
74	SMK Negeri 5 Yogyakarta	2.073.120.000,00	1.917.748.819,00	155.371.181,00
75	SMK Negeri 6 Yogyakarta	2.027.200.000,00	1.619.809.074,00	407.390.926,00
76	SMK Negeri 7 Yogyakarta	1.572.000.000,00	1.497.618.338,00	74.381.662,00
77	SMK Negeri 1 Bantul	2.554.880.000,00	2.075.275.243,00	479.604.757,00
78	SMK Negeri 1 Dlingo	661.760.000,00	658.453.000,00	3.307.000,00
79	SMK Negeri 1 Kasihan	1.189.440.000,00	1.138.963.302,00	50.476.698,00
80	SMK Negeri 2 Kasihan	755.040.000,00	618.543.220,00	136.496.780,00
81	SMK Negeri 3 Kasihan	1.648.800.000,00	1.588.185.220,00	60.614.780,00
82	SMK Negeri 1 Pajangan	703.680.000,00	679.226.018,00	24.453.982,00
83	SMK Negeri 1 Pandak	1.350.240.000,00	1.180.273.400,00	169.966.600,00
84	SMK Negeri 1 Pleret	1.180.800.000,00	1.132.029.196,00	48.770.804,00
85	SMK Negeri 1 Pundong	1.255.360.000,00	1.243.950.020,00	11.409.980,00
86	SMK Negeri 1 Sanden	705.920.000,00	660.355.969,00	45.564.031,00
87	SMK Negeri 1 Sedayu	2.003.040.000,00	1.579.871.172,00	423.168.828,00
88	SMK Negeri 1 Sewon	3.257.440.000,00	3.133.224.904,00	124.215.096,00
89	SMK Negeri 2 Sewon	1.102.080.000,00	924.768.585,00	177.311.415,00
90	SMK Negeri 1 Girimulyo	413.920.000,00	413.920.000,00	-
91	SMK Negeri 1 Kokap	615.360.000,00	599.891.500,00	15.468.500,00
92	SMK Negeri 1 Nanggulan	1.333.920.000,00	1.279.556.937,00	54.363.063,00
93	SMK Negeri 1 Panjatan	1.102.880.000,00	1.090.612.686,00	12.267.314,00
94	SMK Negeri 1 Pengasih	1.611.040.000,00	1.589.815.250,00	21.224.750,00
95	SMK Negeri 2 Pengasih	2.768.320.000,00	2.667.906.478,00	100.413.522,00
96	SMK Negeri 1 Samigaluh	687.200.000,00	643.259.450,00	43.940.550,00
97	SMK Negeri 1 Temon	654.400.000,00	532.579.267,00	121.820.733,00
98	SMK Negeri 1 Gedangsari	781.600.000,00	721.148.570,00	60.451.430,00
99	SMK Negeri 2 Gedangsari	1.100.320.000,00	1.018.502.722,00	81.817.278,00
100	SMK Negeri 1 Girisubo	800.960.000,00	752.968.421,00	47.991.579,00
101	SMK Negeri 1 Ngawen	1.773.600.000,00	1.579.842.394,00	193.757.606,00
102	SMK Negeri 1 Nglipar	1.235.520.000,00	1.232.237.545,00	3.282.455,00
103	SMK Negeri 1 Ponjong	1.059.200.000,00	1.041.114.505,00	18.085.495,00



กลา พยาหางพลางพลางพุ่มๆผบางพาฦหางท

NO	NAMA SEKOLAH	PENCAIRAN	REALISASI	SISA KAS BOS
104	SMK Negeri 1 Purwosari	813.120.000,00	773.938.073,00	39.181.927,00
105	SMK Negeri 1 Saptosari	1.795.200.000,00	1.771.200.000,00	24.000.000,00
106	SMK Negeri 1 Tanjungsari	460.800.000,00	446.285.139,00	14.514.861,00
107	SMK Negeri 1 Tepus	742.720.000,00	598.456.627,00	144.263.373,00
108	SMK Negeri 1 Wonosari	2.084.640.000,00	2.051.126.336,00	33.513.664,00
109	SMK Negeri 2 Wonosari	2.368.320.000,00	2.317.069.294,00	51.250.706,00
110	SMK Negeri 3 Wonosari	1.743.680.000,00	1.702.400.000,00	41.280.000,00
111	SMK Negeri 1 Cangkringan	1.506.720.000,00	1.328.846.419,00	177.873.581,00
112	SMK Negeri 1 Depok	1.426.560.000,00	1.352.638.750,00	73.921.250,00
113	SMK Negeri 2 Depok	3.869.280.000,00	2.991.002.447,00	878.277.553,00
114	SMK Negeri 1 Godean	1.600.320.000,00	1.413.432.043,00	186.887.957,00
115	SMK Negeri 2 Godean	1.222.400.000,00	1.119.903.727,00	102.496.273,00
116	SMK Negeri 1 Kalasan	1.853.120.000,00	1.807.373.632,00	45.746.368,00
117	SMK Negeri 1 Seyegan	2.224.000.000,00	2.118.828.806,00	105.171.194,00
118	SMK Negeri 1 Tempel	1.564.640.000,00	1.514.320.661,00	50.319.339,00
119	SLB/C N 1 Yogyakarta	185.800.000,00	177.792.115,00	8.007.885,00
120	SLB/C N 2 Yogyakarta	192.600.000,00	189.395.491,00	3.204.509,00
121	SLB/C N Pembina	474.800.000,00	438.618.940,00	36.181.060,00
122	SLB N 1 Bantul	634.000.000,00	356.668.926,00	277.331.074,00
123	SLB N 2 Bantul	193.400.000,00	176.692.925,00	16.707.075,00
124	SLB N 1 Sleman	235.400.000,00	231.512.200,00	3.887.800,00
125	SLB N 1 Gunungkidul	319.000.000,00	239.347.400,00	79.652.600,00
126	SLB N 2 Gunungkidul	135.200.000,00	134.000.000,00	1.200.000,00
127	SLB N 1 Kulon Progo	377.600.000,00	365.907.865,00	11.692.135,00
	Jumlah	138.636.520.000,00	129.205.971.585,00	9.430.548.415,00

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Rp88.015,00

Rp12.987.501.459,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp88.015,00 merupakan penerimaan bunga pada Rekening Sumbangan Masyarakat Untuk Penanganan *Covid-19* pada BPBD yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Saldo Kas Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp12.987.501.459,00 yang merupakan Kas di Rekening SMA/SMK dari serah terima P3D sebesar Rp1.967.403.459,00 telah disetor ke Kas Daerah, sedangkan Beasiswa Pendidikan Menengah pada Sekolah Negeri sebesar Rp8.399.331.000,00 dan Beasiswa Pendidikan Menengah pada Sekolah Swasta sebesar Rp2.620.767.000,00 telah disalurkan ke siswa yang berhak.

5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan

Rp5.339.277.997,85

Rp8.814.302.709,12

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.339.277.997,85 terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, dan Piutang Pendapatan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:



กลา ผลาหูเพลาเพลาเพนีย์ กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Rp171.173.000,00

Rp222.791.500,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp171.173.000,00 merupakan Piutang Pajak Daerah pada BPKA terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp122.067.000,00 dan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp49.106.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83 Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah

No	UPTD	Saldo Akhir 31/12/2019	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31/12/2020
1	Piutang PKB	31/12/2019			31/12/2020
	KPPD di Kota Yogyakarta	31.964.000,00	-	1.027.500,00	30.936.500,00
	KPPD di Kab. Bantul	33.936.200,00	-	6.720.100,00	27.216.100,00
	KPPD di Kab. Gunungkidul	8.266.800,00	123.791.900,00	113.752.200,00	18.306.500,00
	KPPD di Kab. Kulon Progo	16.629.000,00	-	11.070.000,00	5.559.000,00
	KPPD di Kab. Sleman	82.334.500,00	-	42.285.600,00	40.048.900,00
	Jumlah	173.130.500,00	123.791.900,00	174.855.400,00	122.067.000,00
2	Piutang BBNKB				
	KPPD di Kota Yogyakarta	2.055.000,00	-	-	2.055.000,00
	KPPD di Kab. Bantul	9.558.000,00	-	5.381.000,00	4.177.000,00
	KPPD di Kab. Gunungkidul	950.000,00	62.616.000,00	54.783.000,00	8.783.000,00
	KPPD di Kab. Kulon Progo	-	-	-	-
	KPPD di Kab. Sleman	37.098.000,00	-	3.007.000,00	34.091.000,00
	Jumlah	49.661.000,00	62.616.000,00	63.171.000,00	49.106.000,00
	Jumlah Total	222.791.500,00	186.407.900,00	238.026.400,00	171.173.000,00

Kualitas Piutang Pajak Daerah tersebut ditentukan sebagai berikut:

Tabel 5.84 Kelompok Umur dan Kualitas Piutang

Umur Piutang	Kualitas Piutang	PKB (Rp)	(BBNKB)	Jumlah
0 – 1 Tahun	Lancar	15.330.500,00	8.783.000,00	24.113.500,00
1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	12.898.500,00		12.898.500,00
2 – 5 Tahun	Diragukan	43.695.500,00	29.300.000,00	72.995.500,00
Lebih dari 5 Tahun	Macet	50.142.500,00	11.023.000,00	61.165.500,00
	Jumlah	122.067.000,00	49.106.000,00	171.173.000,00

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, Piutang Pajak diakui ketika wajib pajak datang untuk mendaftar ulang dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak daerah. Selain itu terdapat potensi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan daftar ulang sebesar Rp55.490.355.500,00 sesuai dengan data pada masing-masing KPPD dengan rincian sebagai berikut:



การ เกาะ การ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกา

Tabel 5.85

Data Kendaraan Yang Tidak Melakukan Daftar Ulang

No	Unit Kerja	Jumlah Kendaraan (Unit)	Nilai Tagihan (Rp)
1.	KPPD di Kota Yogyakarta	33.715	11.110.654.800,00
2.	KPPD di Kabupaten Bantul	44.225	15.129.800.500,00
3.	KPPD di Kabupaten Kulon Progo	13.692	3.518.953.600,00
4.	KPPD di Kabupaten Gunungkidul	21.907	4.986.239.300,00
5.	KPPD di Kabupaten Sleman	60.533	20.744.707.300,00
	Jumlah	174.072	55.490.355.500,00

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Rp1.847.960.188,00

Rp442.993.902,66

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.847.960.188,00 merupakan:

- a. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp489.293.338,00 dalam kondisi lancar.
- b. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pariwisata dengan kondisi macet sebesar Rp5.250.000,00.
- c. Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Balai PIALAM DPU ESDM sebesar Rp1.353.416.850,00 dalam kondisi lancar sebesar Rp944.224.875,00, kurang lancar sebesar Rp296.063.775,00 dan diragukan sebesar Rp113.128.200,00.

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Rp3.320.144.809,85 Rp8.148.517.306,46

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.320.144.809,85 meliputi Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp216.998.281,55, Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00, Piutang Denda Pajak sebesar Rp41.078.450,00, Piutang Denda Retribusi sebesar Rp82.663.399,30, dan Piutang BLUD sebesar Rp2.977.354.679,00 dan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.86
Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	OPD	Saldo Awal 31-12-2019	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31-12-2020
1.	PPKD				
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	229.568.281,55	-	12.570.000,00	216.998.281,55
	Jumlah	229.568.281,55			216.998.281,55
2.	BPKA				
	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
	Piutang Denda Pajak	73.619.050,00	15.062.500,00	47.603.100,00	41.078.450,00
	Jumlah	75.669.050,00			43.128.450,00
3.	RS Ghrasia				·
	Piutang BLUD	3.792.697.805,00	13.838.795.892,00	16.025.447.068,00	1.606.046.629,00
	Jumlah	3.792.697.805,00			1.606.046.629,00
4.	BLPT				
	Piutang BLUD	82.080.359,00	50.702.500,00	=	132.782.859,00
	Jumlah	82.080.359,00			132.782.859,00
5.	RS RESPIRA				
	Piutang BLUD	2.341.292.219,00	3.553.447.452,00	4.656.214.480,00	1.238.525.191,00



การ พยาหญาพ๛ การเมาผู้ ๆ ยาเบา พารามารถ

No	OPD	Saldo Awal 31-12-2019	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31-12-2020
	Jumlah	2.341.292.219,00			1.238.525.191,00
6.	DPUP ESDM (Balai PIALAM)				
	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	1.627.209.591,91	-	1.627.209.591,91	-
	Piutang Denda Retribusi	-	82.663.399,30	-	82.663.399,30
	Jumlah	1.627.209.591,91			82.663.399,30
	Jumlah Total	8.148.517.306,46			3.320.144.809,85

a. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp216.998.281,55

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp216.998.281,55 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada PPKD yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2020 dengan kondisi macet.

b. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00

Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp2.050.000,00 merupakan piutang pada BPKA berupa Piutang Pendapatan Sewa Tanah di Jangkang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2014 dan dalam kondisi macet.

c. Piutang Denda Pajak sebesar Rp41.078.450,00

Saldo Piutang Denda Pajak sebesar Rp41.078.450,00 merupakan Denda Pajak Daerah pada BPKA yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Wajib Pajak.

d. Piutang BLUD sebesar Rp2.977.354.679,00

Piutang BLUD sebesar Rp2.977.354.679,00 terdiri dari Piutang BLUD RS Ghrasia (Dinas Kesehatan) sebesar Rp1.606.046.629,00, Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp132.782.859,00, dan Piutang BLUD RS Respira (Dinas Kesehatan) sebesar Rp1.238.525.191,00.

Piutang BLUD RS Ghrasia sebesar Rp1.606.046.629,00 terdiri dari Piutang Pasien Umum sebesar Rp671.145.722,00, Piutang Diklat sebesar Rp16.535.000,00 dan Piutang Pasien Jamkes sebesar Rp918.365.907,00, dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.87
Rincian Mutasi Piutang RS Ghrasia

Uraian	Saldo 31-12-2019	Tambah	Kurang	Saldo 31-12-2020
Piutang Pasien Umum	656.335.376,00	14.810.346,00	-	671.145.722,00
Piutang Diklat	65.345.000,00	16.535.000,00	65.345.000,00	16.535.000,00
Piutang Jamkes	3.071.017.429,00	13.807.450.546,00	15.960.102.068,00	918.365.907,00
Jumlah	3.792.697.805,00	13.838.795.892,00	16.025.447.068,00	1.606.046.629,00



က်မ်ာက်မှုနေကဲ့ ကောင်းသည်။ ကောင်သ

Adapun rincian kualitas piutang RS Ghrasia per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Jumlah (Rp)
Lancar	106.004.959,00
Kurang Lancar	801.172.800,00
Diragukan	8.114.520,00
Macet	690.754.350,00
Jumlah	1.606.046.629,00

Piutang BLUD BLPT (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) sebesar Rp132.782.859,00 dalam kategori lancar sebesar Rp50.702.500,00 dan kategori macet sebesar Rp82.080.359,00.

Piutang Rumah Sakit Paru Respira sebesar Rp1.238.525.191,00 dalam kategori lancar.

e. Piutang Denda Retribusi sebesar Rp82.663.399,30

Piutang Denda Retribusi sebesar Rp82.663.399,30 merupakan piutang denda atas keterlambatan pembayaran retribusi penjualan air curah pada DPUP ESDM (Balai PIALAM).

5.3.1.1.3 Piutang Lainnya

Rp1.635.674.799,30

Rp1.285.830.187,20

Saldo Piutang Lain-Lain Pemda DIY per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.635.674.799,30 merupakan cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga tetapi pada tanggal 31 Desember 2020, pihak ketiga tersebut tidak dapat menyediakan persediaan beras secara fisik. Pemda DIY dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan BULOG dan TARUMARTANI dalam menyimpan cadangan beras dengan tujuan untuk tujuan strategis. Nilai beras yang dititipkan kepada BULOG dan TARUMARTANI sampai dengan 31 Desember 2020 masing-masing sebanyak 31.875,00 kg dan 243.166,70 kg. Tanggal 31 Desember 2020 dilakukan stock opname dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 5.88
Rincian Perhitungan Piutang Lainnya

No	Pihak Ketiga	Total Cadangan Beras (kg)	Total Opname Persediaan (kg)	Selisih Kurang (kg)
1	TARUMARTANI	243.166,70	61.000,00	182.166,70
2	BULOG	31.875,00	31.875,00	-
	Jumlah	275.041,70	92.875,00	182.166,70

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2020, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2020 dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain. Penilaian Piutang Lain-Lain menggunakan harga pembelian terakhir dikalikan dengan volume kekurangan persediaan, sehingga Nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.635.674.799,30 (182.166,70 kg x Rp8.979,00).



กลา พยาหางพะกางพานั้น ๆ ยากางทางทางทาง

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Rp(1.343.159.110,48)

Rp(1.378.698.788,81)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.343.159.110,48) merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp(99.073.667,50), Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp(98.588.068,57), dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp(1.145.497.374,41) dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Rp(99.073.667,50)

Rp(100.536.319,50)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada BPKA sebesar Rp(99.073.667,50) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp(73.356.752,50) dan Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp(25.716.915,00).

Tabel 5.89 Kelompok Umur dan Kualitas Piutang

Harris Birden a	Karlita - Diatana	Nilai Penyisi	T-1-1	
Umur Piutang	Kualitas Piutang	PKB (Rp)	BBNKB (Rp)	Total
0 – 1 Tahun	Lancar	76.652,50	43.915,00	120.567,50
1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	1.289.850,00	-	1.289.850,00
2 – 5 Tahun	Diragukan	21.847.750,00	14.650.000,00	36.497.750,00
Lebih dari 5 Tahun	Macet	50.142.500,00	11.023.000,00	61.165.500,00
Jumlah		73.356.752,50	25.716.915,00	99.073.667,50

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Retribusi

Rp(98.588.068,57)

Rp(7.438.719,51)

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp(98.588.068,57) terdiri dari:

Tabel 5.90 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi

No	Satuan Kerja	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
1	Dinas Pariwisata	5.250.000,00	Macet	5.250.000,00
2	DLHK	489.293.338,00	Lancar	2.446.466,69
3	DPUP ESDM (Balai PIALAM)	944.224.875,00	Lancar	4.721.124,38
		296.063.775,00	Kurang Lancar	29.606.377,50
		113.128.200,00	Diragukan	56.564.100,00
	Total	1.847.960.188,00		98.588.068,57

5.3.1.1.4.3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Rp(1.145.497.374,41)

Rp(1.270.723.749,80)

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.145.497.374,41) terdiri dari:



การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ

Tabel 5.91
Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

No	Satuan Kerja	Nilai Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
a.	PPKD	216.998.281,55	Macet	216.998.281,55
	Jumlah	216.998.281,55		216.998.281,55
b.	RS Ghrasia	106.004.959,00	Lancar	530.024,80
		801.172.800,00	Kurang Lancar	80.117.280,00
		8.114.520,00	Diragukan	4.057.260,00
		690.754.350,00	Macet	690.754.350,00
	Jumlah	1.606.046.629,00		775.458.914,80
C.	BLPT	50.702.500,00	Lancar	253.512,50
		82.080.359,00	Macet	82.080.359,00
	Jumlah	132.782.859,00		82.333.871,50
d.	RESPIRA	1.238.525.191,00	Lancar	6.192.625,96
	Jumlah	1.238.525.191,00		6.192.625,96
e.	ВРКА			
	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2.050.000,00	Macet	2.050.000,00
	Piutang Denda Pajak	1.216.600,00	Lancar	6.083,00
		4.381.900,00	Kurang Lancar	438.190,00
		11.307.700,00	Diragukan	5.653.850,00
		24.172.250,00	Macet	24.172.250,00
	Jumlah	43.128.450,00		32.320.373,00
f.	DPUP ESDM (Balai PIALAM)			
	Piutang Denda Retribusi	6.497.289,00	Lancar	32.486,45
		14.805.585,00	Kurang Lancar	1.480.558,50
		61.360.525,30	Diragukan	30.680.262,65
	Jumlah	82.663.399,30		32.193.307,60
	Total	3.320.144.809,85		1.145.497.374,41

5.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka

Rp815.983.222,54

Rp680.855.777,20

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp815.983.222,54 terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp679.839.158,65 dan Beban Sewa Dibayar Dimuka sebesar Rp136.144.063,89 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.1.5.1 Beban Jasa Dibayar Dimuka

Rp679.839.158,65

Rp598.825.183,60

Saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp679.839.158,65 merupakan pembayaran Premi Asuransi Tahun 2020 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp1.228.422.242,11 dikurangi dengan Beban Asuransi dan Jasa sebesar Rp548.583.083,46.

Premi Asuransi Tahun 2020 sebesar Rp1.228.422.242,11 merupakan:

- 1. Premi Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp584.237.923,11 dengan masa pertanggungan mulai 21 Juni 2020 sampai dengan 21 Juli 2021.
- 2. Premi Asuransi Kendaraan Dinas yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk Yogyakarta sebesar Rp644.184.319,00 dengan masa pertanggungan 21 Juni 2020 sampai dengan 21 Juli 2021.

Rincian saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp679.839.158,65 adalah sebagai berikut:



การ การการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและกา

- 1. Beban Jasa Dibayar Dimuka Asuransi Kebakaran dan Gempa Bumi kepada PT. Asuransi Sinar Mas sebesar Rp323.331.672,52 dengan masa manfaat mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 21 Juli 2021.
- 2. Beban Jasa Dibayar Dimuka Asuransi Kendaraan Dinas kepada PT. Asuransi Bintang Tbk, Yogyakarta sebesar Rp356.507.486,13 dengan masa manfaat 1 Januari 2021 sampai dengan 21 Juli 2021.

5.3.1.1.5.1 Beban Sewa Dibayar Dimuka

Rp136.144.063,89

Rp82.030.593,60

Saldo Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp112.310.730,59_merupakan Saldo Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp15.627.397,26, dan Dinas Kesehatan sebesar Rp96.683.333,33 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp15.627.397,26 merupakan pembayaran sewa ruang Pemdes untuk SAMSAT Desa pada KPPD Kulon Progo sebesar Rp986.301,37 dan KPPD Bantul sebesar Rp14.641.095,89, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92
Rincian Beban Sewa Dibayar Dimuka

Pihak Yang Disewa	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Beban Sewa Dibayar Dimuka	Nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka (Rp)	
Pemerintah Desa Palihan Kecamatan Temon Kab. Kulon Progo	01/04/2020 s.d 31/03/2021	4.000.000,00	01/01/2021 s.d. 31/03/2021	986.301,37	
Pemerintah Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kab. Bantul	01/12/2020 s.d 30/11/2021	16.000.000,00	1/1/2021 s/d 30/11/2021	14.641.095,89	
	Jumlah	20.000.000,00		15.627.397,26	

2. Dinas Kesehatan

Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Dinas Kesehatan sebesar Rp96.683.333,33 terdiri dari:

- a. Pembayaran sewa tanah untuk tower antena repiter pada Dinas Kesehatan sebesar Rp25.000.000,00, untuk jangka waktu 5 tahun mulai 1 Januari 2021 31 Desember 2025. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.000.000,00.
- b. Pembayaran sewa tanah magersari milik Sultan Ground pada RS Ghrasia sebesar Rp93.500.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 20 Agustus 2018 20 Agustus 2028. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp71,683,333,33.

3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp23.833.333,30 merupakan pembayaran sewa tanah kas desa Pemdes Kemadang Kecamatan Tanjungsari pada SMKN 1 Tanjungsari (Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunung Kidul) sebesar Rp55.000.000,00 untuk jangka waktu 10 tahun mulai 30 April 2015 – 30 April 2025. Berdasarkan pembayaran dan masa sewa maka nilai Beban Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.833.333,30.



กลา ผลาหูเพลางพลางตุญทุลเบทเพา

5.3.1.1.6 Persediaan

Rp181.099.569.022,4 1

Rp122.078.638.114,94

Saldo Persediaan sebesar Rp181.099.569.022,41 terdiri dari persediaan barang pakai habis yang berada di 30 OPD dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.93
Rincian Persediaan pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	41.416.162.167,94	32.365.101.939,14
2	Dinas Kesehatan	16.060.932.781,58	9.314.778.141,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	30.792.336.772,00	49.845.387.752,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	24.777.150,00	165.996.600,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.079.500,00	21.536.200,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	34.359.050,00	4.095.975,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.572.452.946,78	223.759.000,00
8	Dinas Sosial	590.896.470,50	324.504.439,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	552.319.111,05	298.723.250,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	36.391.450,00	19.695.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.226.294.680,32	1.674.035.300,00
12	Dinas Perhubungan	1.191.236.775,00	381.944.875,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	59.921.032,00	77.707.300,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	27.720.700,00	62.863.700,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	28.971.480,00	24.550.960,00
16	Dinas Kebudayaan	14.923.239.122,00	15.493.340.879,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	159.688.633,00	177.191.371,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.419.953.153,86	892.218.292,00
19	Dinas Pariwisata	24.851.000,00	50.654.000,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.892.692.843,11	5.671.190.146,80
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.102.513.734,00	857.207.743,00
22	Sekretariat Daerah	669.479.220,00	306.388.260,00
23	Badan Penghubung Daerah	367.298.245,00	322.541.057,00
24	Sekretariat DPRD	347.677.452,50	310.553.436,00
25	Inspektorat	87.301.335,77	27.566.953,00
26	Paniradya Kaistimewan	298.044.860,00	30.165.000,00
27	Badan Perencanaan Daerah	579.738.715,00	555.831.175,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	2.499.878.481,00	2.482.882.226,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	73.726.310,00	81.306.670,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	24.633.850,00	14.920.475,00
	Jumlah	181.099.569.022,41	122.078.638.114,94

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah, maka penyajian saldo persediaan per 31 Desember 2020 disajikan berdasarkan penggolongan dan kodefikasi dalam aturan tersebut. Untuk itu telah dilakukan mapping klasifikasi persediaan menjadi sebagai berikut:



การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ

Tabel 5.94
Rincian Obyek Persediaan

No	Uraian	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Barang Konsumsi	-	22.491.592.386,14
2	Barang Pakai Habis Sebagai Pendukung Kegiatan	-	19.809.717.917,50
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	2.863.983.770,50
4	Pita Cukai dan Leges	-	45.594.000,00
5	Bahan Baku	-	8.455.747.042,00
6	Hewan dan Tanaman Untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	4.692.076.284,00
	Barang Pakai Habis		
7	Bahan	79.114.942.271,86	-
8	Suku Cadang	416.351.282,00	288.808.101,00
9	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	49.718.056.159,10	-
10	Obat-Obatan	5.672.993.665,42	ı
11	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	43.982.435.758,43	62.084.226.289,00
12	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga	901.297.989,60	748.875.824,80
13	Natura dan Pakan	723.592.948,00	-
14	Persediaan Dalam Proses	569.898.948,00	598.016.500,00
	Jumlah	181.099.569.022,41	122.078.638.114,94

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp181.099.569.022,41 termasuk antara lain saldo Persediaan Untuk Strategis yaitu persediaan cadangan pangan berupa beras sebesar Rp833.924.625,00, saldo persediaan yang dihasilkan dari Belanja Tak Terduga dan sumbangan untuk penanggulangan *Covid* 19 pada BPBD sebesar Rp54.232.202.230,78, serta saldo persediaan Obat di RS Paru Respira yang sudah kedaluwarsa sebesar Rp215.874.037,00.

Rincian dari masing-masing persediaan tersebut sebagai berikut :

a. Saldo persediaan untuk strategis (cadangan pangan beras)

Persediaan Untuk Strategis berupa persediaan cadangan pangan berupa beras sebesar Rp833.924.625,00 merupakan persediaan yang dititipkan kepada pihak ketiga sebanyak 92.875,00 kg dengan rincian dititipkan pada Gudang Tarumartani sebanyak 61.000,00 kg dan Gudang Bulog Yogyakarta sebanyak 31.875,00 kg dengan nilai sebesar Rp833.924.625,00 .

Pada saat dilakukan opname persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 persediaan fisik yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 5.95
Rincian Persediaan Cadangan Pangan Beras

No	Pihak Ketiga	Total Cadangan Beras (kg)	Total Opname Persediaan (kg)	Selisih Kurang (kg)
1	TARUMARTANI	243.166,70	61.000,00	182.166,70
2	BULOG	31.875,00	31.875,00	-
	Jumlah	275.041,70	92.875,00	182.166,70



การ พยาทินารพรารพรารตุนิทยเทศพารทุกาเก

Sesuai dengan perjanjian antara Kepala DPKP dengan PT Taru Martani, atas penitipan cadangan beras pada Gudang PT Taru Martani, PT Taru Martani mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang minimal sebanyak 25% dari total cadangan beras yang dititipkan, sedangkan untuk BULOG mempunyai kewajiban menyediakan persediaan beras di gudang sebanyak 100%.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Persediaan Untuk Strategis berupa cadangan pangan yang dititipkan tersebut disajikan sesuai dengan volume pada Berita Acara Opname Persediaan, sedangkan selisih antara volume Berita Acara Opname persediaan dengan total volume cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga dicatat sebagai Piutang Lain-lain.

Perhitungan rincian nilai persediaan cadangan pangan beras per 31 Desember 2020 sebesar Rp833.924.625,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.96

Rincian Nilai Persediaan Cadangan Pangan Beras

No	Pihak Ketiga	Total Opname Persediaan (kg)	Harga Pembelian Terakhir (Rp)	Nilai Persediaan Beras (Rp)
1.	TARU MARTANI	61.000,00	8.979,00	547.719.000,00
2.	BULOG	31.875,00	8.979,00	286.205.625,00
	Jumlah	92.875,00		833.924.625,00

Nilai persediaan Cadangan Beras dicatat dengan menggunakan harga pembelian terakhir sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.

b. Saldo persediaan yang dihasilkan dari Belanja Tak Terduga dan sumbangan untuk penanganan *Covid* 19 pada BPBD sebesar Rp60.848.279.810,07, dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.97 Rincian Persediaan Dari Belanja Tidak Terduga dan Hibah

LIDALANI	PERSE	JUMLAH	
URAIAN	BTT	HIBAH	JUNILAH
SEKRETARIAT GUGUS TUGAS	1.425.103.710,07	7.220.422.461,00	8.645.526.171,07
BPBD	1.409.892.710,07	7.220.422.461,00	8.630.315.171,07
Dinas Komunikasi dan Informasi	15.211.000,00	-	15.211.000,00
ВРКА	-	ı	ı
DINAS KESEHATAN	47.796.513.239,00	4.014.861.750,00	51.811.374.989,00
EKONOMI	-	,	ı
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	1
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-
Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-
Dinas Koperasi dan UMKM	-	-	-
Dinas Pariwisata	-	-	-
Dinas Industri dan Perdagangan	-	-	-
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	-	-	-
DINAS PENDIDIKAN	254.144.500,00	-	254.144.500,00
PENGAMANAN DAN GAKKUM	137.234.150,00	-	137.234.150,00
Satpol PP	137.234.150,00	-	137.234.150,00



Dinas Perhubungan	-	-	-
Badan Kesbangpol	-	-	-
Sosial kemasyarakatan	-	-	-
Logistik	-	-	=
TOTAL	49.612.995.599,07	11.235.284.211,00	60.848.279.810,07

c. Saldo persediaan obat di RS Paru Respira yang sudah kedaluwarsa sebesar Rp215.874.037,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.98
Rincian Persediaan Obat Kedaluwarsa

No	Nama Obat	Jumlah Obat ED	Satuan	Harga	Total Harga
1	Acyclovir 200 mg tablet	200	tablet	237	47.400,00
2	Akarbose 50mg tablet	1.700	tab	562	955.400,00
3	Amiodaron 200 mg tablet/Kendaron	480	tab	1.200	576.000,00
4	Amiodaron injeksi 150 mg/3 ml	42	ampul	8.700	365.400,00
5	Amoksisilin 250 mg kapsul	1.500	tab	211	316.500,00
6	Amoksisilin 500 mg tablet	1.000	tab	249	249.000,00
7	Amoksisilin sirup kering 125 mg/5 ml	100	botol	2.090	209.000,00
8	Amoksisilin sirup kering 250 mg/5 ml	50	botol	3.628	181.400,00
9	Antasida DOEN tab kunyah	21.500	tab	75	1.612.500,00
10	Asam Mefenamat 500 mg tablet	3.500	tab	176	616.000,00
11	Asam Ursodeoxycholic kapsul	330	tab	2.268	748.440,00
12	Azithromicin 200mg/5ml sirup kering	135	botol	24.621	3.323.835,00
13	Azithromicin 500 mg infus	32	vial	106.562	3.409.984,00
14	B fluid infus	20	botol	291.500	5.830.000,00
15	Batugin elixir	20	botol	42.500	850.000,00
16	Bisolvon solution 2mg/1ml	66	botol	67.320	4.443.120,00
17	Bricasma 0,5mg injeksi	210	ampul	11.960	2.511.600,00
18	Bromheksin HCl 8mg tablet	9.500	tab	252	2.394.000,00
19	Calcium lactat 500 mg (kalk) tablet	1.500	tab	63	94.500,00
20	Calorex sirup	301	botol	13.640	4.105.640,00
21	Cangkang kapsul ukuran 00	85	sak	71.500	6.077.500,00
22	Captopril 12,5 mg tablet	600	tab	62	37.200,00
23	Cefotaxim 1 g injeksi	400	vial	4.840	1.936.000,00
24	Cetirizin sirup 5mg/5ml	1.020	botol	6.745	6.879.900,00
25	Ciprofloxacine 500 mg tablet	3.200	tab	260	832.000,00
26	Citicolin 125mg injeksi	45	ampul	11.550	519.750,00
27	Clarithromycin 500 mg tablet	1.860	tab	2.974	5.531.640,00
28	Clobazam 10mg tablet	4.600	tab	900	4.140.000,00
29	Codein 20 mg tablet	3.000	tab	571	1.713.000,00
30	Cotrimoxazol suspensi	20	botol	2.340	46.800,00
31	CTM 4 mg tablet	12.000	tab	55	660.000,00
32	Deksametason 0,5 mg tablet	77.100	tab	108	8.326.800,00
33	Deksametason Injeksi 5 mg/ml	240	ampul	2.010	482.400,00
34	Devosix oral drop	100	botol	21.500	2.150.000,00



กกล พยาหญาพ๛ทางพลาวเท่าผูกยเบทเพาหาเก

No	Nama Obat	Jumlah Obat ED	Satuan	Harga	Total Harga
35	Dextral tablet	4	kotak	47.960	191.840,00
36	Diasepam injeksi 5mg/ml	50	ampul	1.735	86.750,00
37	Digoxin 0,25mg tablet	30	tab	104	3.120,00
38	Digoxin injeksi 0,25 mg/ml	30	ampul	25.300	759.000,00
39	Diltiazerm 30 mg tablet	200	tablet	133	26.600,00
40	Dimenhidrinat 50mg tablet	3.700	tablet	104	384.800,00
41	Dobutamin injeksi	20	ampul	11.843	236.860,00
42	Doxycycline kapsul	700	kapsul	239	167.300,00
43	Erythromycin 500mg tablet	1.200	tab	730	876.000,00
44	Esomeprazol injeksi	328	vial	33.389	10.951.592,00
45	Eperison 50mg tab	1.300	tab	1.485	1.930.500,00
46	Flutrop tablet	5.400	tab	1.450	7.830.000,00
47	Gentamicin 40mg/ml injeksi	120	ampul	17.545	2.105.400,00
48	Glibenklamid tablet 5mg	200	tab	119	23.800,00
49	Glimepiride 2 mg tablet	5.150	tab	361	1.859.150,00
50	Gliseril Guaiakolat 100 mg tablet	8.000	tab	88	704.000,00
51	Glukosa infus 10 %	20	botol	8.003	160.060,00
52	Glukosa infus 40% steril	44	ampul	11.418	502.392,00
53	Glukosa infus 5%	140	botol	7.363	1.030.820,00
54	Hepamax kapsul	18	tab	10.296	185.328,00
55	Ibuprofen tab 400mg	600	tab	150	90.000,00
56	Intunal sirup	515	botol	11.347	5.843.705,00
57	Intunal-F tablet	2.800	tab	720	2.016.000,00
58	Isosorbid Dinitrat 5mg tablet sublingual	13.000	tab	89	1.157.000,00
59	Jurnista (hidromorfon) 8mg tablet	56	tab	39.000	2.184.000,00
60	Kalium Aspartat 300 mg tablet (Kalipar)	1.200	tab	700	840.000,00
61	KCl injeksi 25mg	38	vial	3.223	122.474,00
62	L bio kapsul	120	kaplet	9.240	1.108.800,00
63	Laktulosa 120ml sirup	24	botol	24.200	580.800,00
64	Laktulosa 60ml sirup	132	botol	22.688	2.994.816,00
65	Loperamide 2mg tablet	100	tab	85	8.500,00
66	Manitol	10	botol	28.276	282.760,00
67	Masneuro tablet	11.800	tab	550	6.490.000,00
68	Metamizole injeksi	500	amp	10.890	5.445.000,00
69	Metilprednisolon injeksi 125mg	108	vial	11.525	1.244.700,00
70	Metoclopramid Drop 2mg/ml	25	botol	3.900	97.500,00
71	Metronidazole 500 mg/100ml infus	131	botol	8.525	1.116.775,00
72	Meylon 84 injeksi	18	amp	6.448	116.064,00
73	MgSO4 40% injeksi	18	vial	3.796	68.328,00
74	Microlax	126	tube	20.900	2.633.400,00
75	Minowel	100	sachset	19.602	1.960.200,00
76	Neprolith kapsul	1.000	tab	910	910.000,00



กลายเกาะสารเกาะสา

No	Nama Obat	Jumlah Obat ED	Satuan	Harga	Total Harga
77	Nifedipin 10mg tablet	12.600	tab	100	1.260.000,00
78	OBH 100 ml sirup	900	btl	5.000	4.500.000,00
79	Ofloxacin 400mg tablet	5.650	tab	650	3.672.500,00
80	Opineuron tablet	3.600	tab	1.375	4.950.000,00
81	Piracetam 200mg injeksi	20	amp	22.000	440.000,00
82	Piracetam 400mg tablet	800	tab	2.710	2.168.000,00
83	Pravastatin 20 mg tablet	500	tab	2.090	1.045.000,00
84	Prednison 5 mg tablet	14.000	tab	94	1.316.000,00
85	Quantidex tablet / Neo protifed	9.200	tab	1.021	9.393.200,00
86	Sanmag sirup	108	botol	27.500	2.970.000,00
87	SNMC injeksi	270	amp	115.500	31.185.000,00
88	Terbutalin 2,5 mg tablet	6.000	tab	89	534.000,00
89	Triheksifenidil 2mg tablet	500	tab	40	20.000,00
90	Triofusin injeksi	30	botol	4.700	141.000,00
91	Valsartan 80mg tablet	960	tab	6.550	6.288.000,00
92	Vistrum sirup	70	botol	31.500	2.205.000,00
93	Vitamin B kompleks tablet	242	kotak	12.502	3.025.484,00
94	Wida D5 1/2 NS infus	40	botol	9.776	391.040,00
95	Wida D5 1/4 NS infus	40	botol	9.724	388.960,00
96	Zinc drop 10mg/ml	10	botol	6.281	62.810,00
97	Zink tablet 20mg	800	tab	524	419.200,00
	Total Harga				215.874.037,00

Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp43.982.435.758,43 termasuk didalamnya persediaan hewan ternak yang terdapat pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan (Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Dan Diagnostik Kehewanan). Terdapat selisih pencatatan nilai perolehan persediaan hewan ternak antara di aplikasi dengan nilai yang tertera di neraca, hal tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa pencatatan untuk persediaan yang tumbuh dan berkembang di neraca menggunakan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang Rp1.655.347.172.982,67 Rp1.353.575.720.335,44

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.655.347.172.982,67 terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Rp18.885.178.364,00 Rp18.030.207.564,00 Non Permanen – Dana Bergulir

Investasi Non Permanen sebesar Rp18.885.178.364,00 merupakan saldo dana bergulir yang disalurkan Pemerintah DIY sampai dengan 31 Desember 2020 dan berasal dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp18.030.207.564,00 ditambah Dana Bergulir Tahun 2020 sebesar Rp4.000.000.000,00, pengembalian sebesar Rp12.500.100,00 dan dikurangi pelunasan sebesar Rp3.157.529.300,00. Rincian saldo awal, mutasi dan saldo akhir Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



การ พยาทินารพลารพลารพานิกุขพากพาการ

Tabel 5.99 Mutasi Dana Bergulir

M.	SKPD Teknis/Nama	Tahun	Nilai Awal	Saldo 31/12/2019	Koreksi (Inv			Mutasi 2020 (Rp)	<u></u>	Saldo 31/12/2020	Vatarra
No	Program	Perguliran	Digulirkan (Rp)	(Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Pengembalian	(Rp)	Keterangan
1	Dinas Pertanian dan		(-	-	1 01141112411411	. ogu.ugu	. ongombanan		
	Ketahanan Pangan										
-	DPM PHP Tahun Anggaran	2010	2.630.000.000,00	-			-	-		-	Suku Bunga 3% ,
_	2010 DPM PHP Tahun Anggaran	2011	2.390.000.000,00	185.000.000,00			_			185.000.000.000	Jangka Waktu 1 Tahu Suku Bunga 3%,
	2011	2011	2.000.000.000,00	100.000.000,00			_			100.000.000,000	Jangka Waktu 1 Tahu
	Gapoktan Tahap Pra	2011	3.569.417.900,00	_						_	•
	Penumbuhan	2011	· ·	4 405 050 000 00			_	50 000 000 00		1.413.650.000.000	O.d., D., 2.0/
•	DPM LUEP (Pelimpahan dari Dinas Pertanian Serah terima	2011	3.569.417.900,00	1.465.650.000,00			•	52.000.000,00		1.413.000.000,000	Suku Bunga 3 % , Jangka Waktu 1 Tahu
	per Oktober 2011)										oungita Franta Franta
	DPM PHP Tahun Anggaran	2012	3.400.000.000,00	241.000.000,00						241.000.000,00	
	2012 DPM PHP Tahun Anggaran										
-	2013	2013	1.495.000.000,00	-			-			-	
-	LDPM	2013	10.870.000.000,00	147.500.000,00			-	3.000.000,00		144.500.000,00	Suku Bunga 3 % ,
	Jumlah			2.039.150.000,00	-	-	-	55.000.000,00		1.984.150.000,00	
2	Dinas Koperasi dan UKM										
-	Ketahanan Pangan di 14	2003	455.000.000,00	93.022.098,00			-	600.000,00		92.422.098,00	Suku Bunga 9 % ,
_	Kecamatan 2003 Fasilitasi Perkuatan Modal	2006	2.492.500.000.00	567.715.775,00						567.715.775,00	Jangka Waktu 3 Tahu Suku Bunga 6 %,
-	Usaha Koperasi (Pasca	2000	2.432.300.000,00	301.113.113,00			-			301.113.113,00	Jangka Waktu 10 Tah
-	Ketahanan Pangan 2007	2007	1.100.000.000,00	64.950.000,00			-			64.950.000,00	Suku Bunga 6 % ,
-	Prospek Mandiri 2007	2007	110.000.000,00	55.000.000,00			-			55.000.000,00	Suku Bunga 6 % ,
-	Bantuan Modal Usaha Koperasi	2007	609.600.000,00	50.800.000,00			-			50.800.000,00	Suku Bunga 6 % ,
	(Setelah Gempa) 2007										Jangka Waktu 3 Tahu
-	Prospek Mandiri 2008	2008	160.000.000,00	80.000.000,00			-			80.000.000,00	Suku Bunga 6 % ,
-	Koperasi Karyawan 2008	2008	225.000.000,00	25.000.000,00			-			25.000.000,00	Suku Bunga 6 % ,
-	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa) 2008	2008	630.000.000,00	168.734.227,00			-			168.734.227,00	Suku Bunga 6 % , Jangka Waktu 3 Tahi
-	Prospek Mandiri Campus	2009	200.000.000,00	55.615.598,00			-	-		55.615.598,00	Suku Bunga 3 % ,
	Enterpreneur 2009										Jangka Waktu 3 Tahu
-	Program Perkuatan Permodalan	2010	750.000.000,00	150.000.000,00			-			150.000.000,00	Suku Bunga 3 % ,
	bagi KJKS/UJKS Kop 2010	2010	3.000.000.000,00	168.057.582,00						168.057.582,00	Jangka Waktu 3 Tahu Suku Bunga 3 %,
-	Program Fasilitasi Pengembangan Koperasi 2010	2010	3.000.000.000,00	108.057.582,00			-			108.057.582,00	Jangka Waktu 3 Tahu
-	Fasilitasi Pemberdayaan	2011	2.500.000.000,00	239.912.400,00						239.912.400,00	Suku Bunga 3 % ,
	Koperasi 2011						•				Jangka Waktu 3 Tahu
-	Fasilitasi Pemberdayaan	2011	2.500.000.000,00	401.736.502,00			-	1.000.000,00		400.736.502,00	Suku Bunga 1 % ,
_	Koperasi (Pasca Erupsi) 2011 Fasilitasi Pemberdayaan	2012	4.600.000.000,00	184.909.300,00						184.909.300,00	Jangka Waktu 3 Tahu Suku Bunga 1 %,
	Koperasi 2012						-				Jangka Waktu 3 Tahu
-	Fasilitasi Pemberdayaan	2013	4.200.000.000,00	87.560.178,00				1.000.000,00		86.560.178,00	Suku Bunga 3 % ,
_	Koperasi 2013	2016	3.500.000.000,00	38.652.204.00						38.652.204,00	Jangka Waktu 3 Tahu
-	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2016	2010	3.300.000.000,00	30.032.204,00			•			30.002.204,00	Suku Bunga 3 % , Jangka Waktu 3 Tahu
-	Fasilitasi Pemberdayaan	2017	3.175.000.000,00	867.682.500,00				702.041.900,00	12.500.100,00	178.140.700,00	Suku Bunga 9 % ,
	Koperasi 2017									100.0	Jangka Waktu 3 Tahu
-	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi 2017 ABT	2017	1.525.000.000,00	558.209.200,00			-	397.887.400,00		160.321.800,000	Suku Bunga 9 % , Jangka Waktu 3 Tahu
	Jumlah			3.857.557.564,00	-	-		1.102.529.300,000	12.500.100,00	2.767.528.364,00	
				, , , , , , , , , , , , , , , ,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,			1
3	BUKP										
	Tahun 2018	2018	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00				2.000.000.000,00		-	
	Tahun 2019	2019	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00						10.000.000.000.00	
	Tahun 2020	2013		10.000.000.000,00			4 000 000 000 00	_			
		ZUZU	4.000.000.000,00				4.000.000.000,00		•	4.000.000.000,00	-
	Jumlah			12.000.000.000,00			4.000.000.000,00	2.000.000.000,00		14.000.000.000,00	
4	Dinas Kelautan dan										
1	Perikanan					-					
	DPM 2013	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00			-	-	-	133.500.000,00	Suku Bunga 3 %
_	Jumlah			133.500.000,00						133.500.000,00	
_	JUMLAH			18.030.207.564,00			4.000.000.000,00	3.157.529.300,00	12.500.100,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	



กกา พยากษางพรางพรางพัฒฑยพากพาการ

Mutasi tambah sebesar Rp4.000.000.000,00 merupakan penambahan Dana Bergulir melalui BUKP. Mutasi kurang sebesar Rp3.157.529.300,00 merupakan pelunasan pokok dana bergulir, terdiri dari pelunasan pokok bergulir pada Dinas Pertanian sebesar Rp55.000.000,00 , Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp1.102.529.300,00 dan BUKP sebesar Rp2.000.000.000,00.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.885.178.364,00 dikelompokkan umurnya berdasarkan jatuh temponya menjadi:

Tabel 5.100 Kelompok Umur Dana Bergulir

No	Kelompok	Nilai (Rp)
1	Umur kurang dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo	14.000.000.000,000
2	Umur 1 – 3 Tahun dari tanggal jatuh tempo	377.114.704,000
3	Umur 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	839.185.253,000
4	Lebih dari 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	3.668.878.407,000
	Jumlah	18.885.178.364,00

Sesuai perhitungan berdasarkan kelompok umur, saldo Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.196.182.503,90 sehingga saldo NRV Dana Bergulir per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp14.688.995.860,10 (Rp18.885.178.364,00– Rp4.196.182.503,90).

Pengelolaan Dana Bergulir yang disajikan pada Investasi Non Permanen Provinsi DIY mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 56.1 Tahun 2012, antara lain diatur sebagai berikut:

- a. Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan yang berada di bawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.
- b. OPD Teknis menyusun usulan anggaran dana bergulir, berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Teknis yang diajukan kepada PPKD.
- c. Dana Bergulir dialokasikan sebagai pengeluaran pembiayaan dalam APBD.
- d. Dana Bergulir yang telah diterima melalui rekening kelompok/koperasi/BUKP harus dipergunakan sesuai dengan proposal.
- e. Dana Bergulir dilaksanakan dengan perjanjian antara Kepala OPD Teknis dengan Ketua atau Kepala Kelompok/Koperasi/BUKP.
- f. Pengembalian dikenakan bunga untuk kelompok/koperasi/BUKP sebesar 3% per tahun dan disalurkan kepada anggota maksimum sebesar 6% per tahun.
- g. Kelompok/koperasi/BUKP wajib mengembalikan pokok dan bunga dana bergulir ke rekening penerimaan melalui Bank Pembangunan Daerah (rekening Kas Daerah) Provinsi DIY dan menyerahkan bukti setor ke Kelompok Kerja Teknis.
- h. Jangka waktu pengembalian dana bergulir sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dalam perjanjian.
- i. Kelompok/koperasi/BUKP yang belum dapat mengembalikan lunas dana yang diterima sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian kelompok/koperasi/BUKP yang bersangkutan, dikenakan denda 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan dari sisa tunggakan sejak tanggal jatuh tempo.



การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ

5.3.1.2.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Rp(4.196.182.503,90)

p(3.629.958.920,82)

Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2020 sebesar Rp(4.196.182.503,90) dikelompokkan berdasarkan umurnya dan ditentukan prosentasenya sebagai berikut :

Tabel 5.101 Klasifikasi Kualitas Dana Bergulir dan Diragukan Tertagih

No	Kelompok	. (Кр)			
1	Umur kurang dari 1 tahun dari tanggal jatuh tempo	14.000.000.000,000	0,5%	70.000.000,00	
2	Umur 1 – 3 Tahun dari tanggal jatuh tempo	377.114.704,000	10%	37.711.470,40	
3	Umur 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	839.185.253,000	50%	419.592.626,50	
4	Lebih dari 5 tahun dari tanggal jatuh tempo	3.668.878.407,000	100%	3.668.878.407,00	
	Jumlah	18.885.178.364,00		4.196.182.503,90	

Perhitungan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dengan mendasarkan saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.102
Rincian Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tak Tertagih

No	SKPD Teknis/Nama Program	Tahun Pengguliran	Nilai Awal	Saldo 31-12-2020	Keterangan	Jatuh Tempo	Usia Investasi	Perkiraan Dana Bergulir Diragu Tak Tertagih	
140	SKI D TEKINS/IVAINA I TOGITAIN	Tanan Tengganian	Pengguliran (Rp)	(Rp)	Keterungun	Jacan Tempo	Osia ilivestasi	%	Rp.
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan								
	DPM PHP Tahun 2010	2010	2.630.000.000,00	-	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20-Dec-10	9 tahun	100%	-
	DPM PHP Tahun 2011	2011	2.390.000.000,00	185.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20-Dec-11	7 tahun	100%	185.000.000,00
	DPM LUEP	2011	3.569.417.900,00	1.413.650.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20 Des 2008 dan 20 Des 2009	10 - 11 tahun	100%	1.413.650.000,00
	DPM PHP Tahun 2012	2012	3.400.000.000,00	241.000.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20-Dec-12	6 tahun	100%	241.000.000,00
	DPM PHP Tahun 2013	2013	1.495.000.000,00	-		20-Dec-13			-
	LDPM	2013	10.870.000.000,00	144.500.000,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 1 tahun	20-Dec-13	6 Tahun 11 Hari	100%	144.500.000,00
	Jumlah			1.984.150.000,00					1.984.150.000,00
2	Dinas Koperasi dan UKM								
	Program Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan 2003	2003	455.000.000,00	92.422.098,00	Suku bunga 9%, jangka waktu 3 tahun		> 11 Tahun	100%	92.422.098,00
	Fasilitasi Perkuatan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2006	2.492.500.000,00	567.715.775,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 10 tahun	2016	4 Tahun	50%	283.857.887,50
	Program Ketahanan Pangan	2007	1.100.000.000,00	64.950.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	10 Tahun	100%	64.950.000,00
	Program Prospek Mandiri	2007	110.000.000,00	55.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	10 Tahun	100%	55.000.000,00
	Bantuan Modal Usaha Koperasi (Pasca Gempa)	2007	609.600.000,00	50.800.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2010	10 Tahun	100%	50.800.000,00
	Program Prospek Mandiri	2008	160.000.000,00	80.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	9 Tahun	100%	80.000.000,00
	Koperasi Karyawan	2008	225.000.000,00	25.000.000,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	9 Tahun	100%	25.000.000,00
	Modal Bergulir Koperasi (Pasca Gempa)	2008	630.000.000,00	168.734.227,00	Suku bunga 6%, jangka waktu 3 tahun	2011	9 Tahun	100%	168.734.227,00
	Prospek Mandiri Campus Enterpreneur	2009	200.000.000,00	55.615.598,00	Suku bunga 3%, jangka waktu 3 tahun	2012	8 tahun	100%	55.615.598,00



การ เกาะ การ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกา

	Program Perkuatan Permodalan	2010	750.000.000,00	150.000.000,00	Suku bunga 3%,	2013	6 Tahun	100%	150.000.000,00
	bagi KJK/UJKS Koperasi				jangka waktu 3				
					tahun				
	Program Fasilitasi Pengembangan	2010	3.000.000.000,00	168.057.582,00	Suku bunga 3%,	2013	6 Tahun	100%	168.057.582,00
	Koperasi				jangka waktu 3				
	-				tahun				
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2011	2.500.000.000,00	239.912.400,00	Suku bunga 3%,	2014	6 Tahun	100%	239.912.400,00
					jangka waktu 3				
					tahun				
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2011	2.500.000.000,00	400.736.502,00	Suku bunga 1%,	2014	6 Tahun	100%	400.736.502,00
	(Pasca Erupsi)				jangka waktu 3				
					tahun				
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2012	4.600.000.000,00	184.909.300,00	Suku bunga 1%,	2015	5 Tahun	50%	92.454.650,00
					jangka waktu 3				
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2013	4.200.000.000,00	86.560.178,00	Suku bunga 3%,	2016	4 Tahun	50%	43.280.089,00
					jangka waktu 3				
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2016	3.500.000.000,00	38.652.204,00		2019	1 Tahun	10%	3.865.220,40
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2017	3.175.000.000,00	178.140.700,00		2020	1 Tahun	10%	17.814.070,00
	2017								
	Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	2017	1.525.000.000,00	160.321.800,00		2020	1 Tahun	10%	16.032.180,00
	2017 ABT								
	Jumlah			2.767.528.364,00					2.008.532.503,90
3	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	DPM 2013	2013	2.915.000.000,00	133.500.000,00	Suku bunga 3%,	Dec-13	7 Tahun	100%	133.500.000,00
					jangka waktu 1				
					tahun				
	Jumlah			133.500.000,00					133.500.000,00
_									
4	BUKP								
	BUKP	2018	2.000.000.000,00	40.000.000.00			1 Tahun	10%	50 000 000
	BUKP	2019	10.000.000.000,00				<1 Tahun	0,50%	50.000.000,00
	BUKP	2020	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00			< 1 Tahun	0,50%	20.000.000,00
_	Jumlah			14.000.000.000,00					70.000.000,00
	JUMLAH TOTAL			18.885.178.364,00					4.196.182.503,90

5.3.1.2.3 Investasi Jangka Panjang Permanen

Rp1.640.658.177.122,57

Rp1.339.175.471.692,26

Penyertaan Modal per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.640.658.177.122,57 diperoleh dari saldo awal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.339.175.471.692,26 ditambah penyesuaian perhitungan Ekuitas BUMD 2019 sebesar Rp(37.311.816.753,01) sehingga Ekuitas BUMD Tahun 2019 Bagian Pemda DIY menjadi Rp1.301.863.654.939,25, ditambah penyertaan modal Tahun 2020 sebesar Rp101.090.000.000,00 dikurangi Deviden Tahun 2019 yang disetor ke BUD Tahun 2020 sebesar Rp101.460.382.151,46 ditambah Laba/Rugi BUMD Tahun 2020 Bagian Pemda DIY sebesar Rp147.343.223.644,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.103
Perhitungan Penyertaan Modal

			Perhitungan Penyertaan Modal 2020			Mutasi Tahun Anggaran 2020						
No	Perusahaan Daerah	Penyertaan Modal per 31 Desember 2019	% Saham Pemda DIY	Ekuitas BUMD Thn 2019 (LK BUMD)	Ekuitas BUMD 2019 Bagian Pemda DIY	Penyesuaian Perhitungan Berdasarkan LK Audited TA 2019	Tambahan Modal Disetor Tahun 2020	% Saham Pemda	Deviden Tahun 2019 yang Disetor ke BUD Tahun 2020	Laba/Rugi BUMD Tahun 2020	Laba/Rugi BUMD Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	(Uauuileu)
		1	2	3	4 = 2 x 3	5 = 4 - 1	6	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 4+6-8+10
	METODE EKUITAS											
1	PT. Bank BPD DIY	1.196.262.377.102,21	51,000%	2.279.614.000.000,00	1.162.603.140.000,00	(33.659.237.102,21)	101.000.000.000,00	51,000%	94.001.713.614,26	243.980.043.013,00	124.429.821.936,63	1.294.031.248.322,37
2	PT. Anindya Mitra Internasional	42.797.239.256,02	99,951%	40.276.493.418,00	40.256.757.936,23	(2.540.481.319,80)		99,951%	1.185.651.326,00	3.555.003.551,00	3.553.261.599,26	42.624.368.209,49
3	PT. Tarumartani	52.427.479.342,79	99,996%	52.164.149.040,00	52.162.062.474,04	(265.416.868,75)	-	99,996%	148.697.632,00	9.593.905.721,00	9.593.521.964,77	61.606.886.806,81
4	BUKP	47.028.375.991,24	83,140%	55.546.902.248,00	46.181.694.528,99	(846.681.462,25)	-	83,140%	6.025.001.568,20	11.747.195.265,96	9.766.618.144,11914	49.923.311.104,91
5	Perumda Air Bersih Tirtatama DIY		100,000%	-		-	191.722.362.679,00	100,000%	-		-	191.722.362.679,00
	METODE HARGA PEROLEHAN											
5	PT. Asuransi Bangun Askrida	660.000.000,00	0,223%		660.000.000,00		90.000.000,00	0,223%	99.318.011,00			750.000.000,00
	TOTAL SELURUHNYA	1.339.175.471.692,26			1.301.863.654.939,25	(37.311.816.753,01)	101.090.000.000,00		101.460.382.151,46	268.876.147.550,96	147.343.223.644,78	1.640.658.177.122,57



Perhitungan nilai penyertaan modal pada BPD DIY, PT. Anindya Mitra Internasional, PD. Taru Martani dan BUKP menggunakan metode ekuitas sedangkan perhitungan penyertaan modal pada PT. Askrida menggunakan harga perolehan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.294.031.248.322,37. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Bank BPD DIY per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2020 Audited		Rp	1.196.262.377.102,21
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan		Rp	(33.659.237.102,21)
Keuangan BUMD 2019 Audited			
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2020		Rp	1.162.603.140.000,00
Tambahan Modal		Rp	101.000.000.000,00
Deviden Tahun 2019 yang disetor ke Pemda		Rp	(94.001.713.614,26)
DIY Tahun 2020			
Laba Tahun 2020	Rp243.980.043.013,00		
Laba Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	51,00%	Rp	124.429.821.936,63
Penyertaan Modal Pemda DIY per		Rp	1.294.031.248.322,37
31 Desember 2020			

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL Yogyakarta per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.624.368.209,49 Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. AMI per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2019 Audited		Rp	42.797.239.256,02
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan		Rp	(2.540.481.319,80)
Keuangan BUMD 2019 Audited			
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2019		Rp	40.256.757.936,23
Tambahan Modal		Rp	0,00
Deviden Tahun 2019 yang disetor ke Pemda		Rp	(1.185.651.326,00)
DIY Tahun 2020			
Laba Tahun 2020	Rp 3.555.003.551,00		
Laba Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	99,951%	Rp	3.553.261.599,26
Penyertaan Modal Pemda DIY per		Rp	42.624.368.209,49
31 Desember 2020			

c. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah TARU MARTANI Yogyakarta sebesar Rp61.606.886.806,81. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada PT. Tarumartani per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2019 Audited		Rp	52.427.479.342,79
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan		Rp	(265.416.868,75)
Keuangan BUMD 2019 Audited			
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2019		Rp	52.162.062.474,04
Tambahan Modal		Rp	0,00
Deviden Tahun 2019 yang disetor ke Pemda DIY		Rp	(148.697.632,00)
Tahun 2020			
Laba Tahun 2020	Rp 9.593.905.721,00		
Laba Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	99,996%	Rp	9.593.521.964,77
Penyertaan Modal Pemda DIY per		Rp	61.606.886.806,81
31 Desember 2020			



d. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp49.923.311.104,91. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada BUKP per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

04 B			
Penyertaan Modal Pemda DIY		Rp	49.923.311.104,91
Laba Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	83,140%	Rp	9.766.618.144,12
Laba Tahun 2020	Rp11.747.195.265,96		
DIY Tahun 2020			
Deviden Tahun 2019 yang disetor ke Pemda		Rp	(6.025.001.568,20)
Tambahan Modal		Rp	0,00
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2019		Rp	46.181.694.528,99
Keuangan BUMD 2019 Audited			
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan	1	Rp	(846.681.462,25)
Saldo Awal per 31 Desember 2019 Audited		Rp	47.028.375.991,24
-			

per 31 Desember 2020

e. Penyertaan Modal pada Perumda Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp191.722.362.679,00. Perhitungan Ekuitas Pemda DIY pada Perumda Air Bersih Tirtatama per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal per 31 Desember 2019 Audited		Rp	0,00
Penyesuaian Perhitungan berdasarkan Laporan		Rp	0,00
Keuangan BUMD 2019 Audited			
Ekuitas Bagian Pemda DIY per 31-12-2019		Rp	0,00
Tambahan Modal		Rp	191.722.362.679,00
Deviden Tahun 2019 yang disetor ke Pemda		Rp	0,00
DIY Tahun 2020			
Laba Tahun 2020	Rp00,00		
Laba Tahun 2020 Bagian Pemda DIY	100,00%	Rp	0,00
Penyertaan Modal Pemda DIY		Rp	191.722.362.679,00

per 31 Desember 2020

Pada Tahun 2020 terdapat penambahan penyertaan modal pada Perusda Air Bersih Tirtatama yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2020. Penyertaan Modal Pemda DIY pada Perusda Air Bersih Tirtatama dilakukan mendasarkan pada Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta berupa uang tunai sebesar Rp12.500.000.000,00 dan barang senilai Rp179.222.362.679,00.

f. Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2020 sebesar Rp750.000.000,00. Selama Tahun 2020 terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp90.000.000,00. Penyertaan modal tersebut merupakan 0,223% dari seluruh Modal PT Asuransi Bangun Askrida. Perhitungan nilai investasi permanen pada PT. Asuransi Bangun Askrida menggunakan metode harga perolehan (*cost method*) karena nilainya relatif kecil.

5.3.1.3 Aset Tetap

Rp8.479.112.482.546,08

Rp7.872.445.226.240,18

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.479.112.482.546,08 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp12.080.309.111.026,30 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.601.196.628.480,27, dengan rincian sebagai berikut:



การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ

5.3.1.3.1 Tanah

Rp4.238.954.451.307,00

Rp3.563.143.798.663,00

Saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp4.238.954.451.307,00 diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5.104

Rincian Obyek Tanah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah Perkampungan	102.852.250.374,00
2	Tanah Pertanian	47.637.590.000,00
3	Tanah Perkebunan	3.322.000.000,00
4	Kolam Ikan	-
5	Danau/Rawa	5.298.702.000,00
6	Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.409.336.112.217,00
7	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	2.670.507.796.716,00
	Jumlah	4.238.954.451.307,00

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.105

Rincian Tanah pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)		
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	351.397.558.020,00	350.444.085.148,00		
2	Dinas Kesehatan	9.944.264.762,00	9.948.249.262,00		
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	1.980.505.788.164,00	1.581.587.907.759,00		
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	496.906.383.455,00	413.095.765.280,00		
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.392.000.000,00	1.392.000.000,00		
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-		
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-		
8	Dinas Sosial	18.720.829.406,00	18.720.829.406,00		
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.551.800.680,00	923.281.000,00		
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	254.810.000,00	254.810.000,00		
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	38.501.670.972,00	38.501.670.972,00		
12	Dinas Perhubungan	85.346.163.771,00	52.131.377.226,00		
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.750.000.000,00	8.750.000.000,00		
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	84.735.000,00	84.735.000,00		
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	-	-		
16	Dinas Kebudayaan	378.019.463.295,00	251.680.993.815,00		
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.096.500.000,00	2.096.500.000,00		
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.892.166.000,00	13.892.166.000,00		
19	Dinas Pariwisata	3.434.065.500,00	3.434.065.500,00		
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	126.780.807.899,00	110.419.407.899,00		
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.194.362.000,00	4.939.772.000,00		



^^^ พยาหูรพะทรพะทรพุทูกุยพฤพหาหาเก

	Jumlah	4.238.954.451.307,00	3.563.143.798.663,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.669.200.000,00	4.669.200.000,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	530.676.060.793,00	519.726.285.806,00
27	Badan Perencanaan Daerah	-	-
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
25	Inspektorat	1.217.500.000,00	1.217.500.000,00
24	Sekretariat DPRD	-	-
23	Badan Penghubung Daerah	12.984.000.000,00	12.984.000.000,00
22	Sekretariat Daerah	162.234.321.590,00	161.849.196.590,00

Mutasi Tanah sebagai berikut:

Saldo awal per 31 Desember 2019	3.563.143.798.663,00		
Penambahan:			
Belanja Modal Tahun 2020	696.800.024.901,00		
Penyesuaian	2.362.400,00		
Reklas dari Aset Lainnya (Kemitraan)	46.914.710.735,00		
Reklas dari Gedung dan Bangunan	5.827.962.654,00		
Reklas dari extracom	9.000.000,00		
Reklas dari belanja barang jasa	992.142.000,00		
Hibah	17.231.785.525,00		
Mutasi dari Dikpora ke Dikmen Kota	1.647.800,00		
Mutasi masuk dari PBD ke Disbud	18.991.498.000,00		
Pelimpahan dari BPKA ke DPU Induk	16.945.081.525,00		
Mutasi dari BPKA ke BPPPMTP-DPKP	16.361.400.000,00		
Mutasi dari PBD ke Disperindag	1.254.590.000,00		
Mutasi dr Dispertaru ke BPKA	89.042.240,00		
	821.421.247.780,00		
Pengurangan:			
Reklas ke PM	5.271.378.000,00		
Reklas ke Gedung	39.339.370.000,00		
Reklas ke JIJ	248.159.000,00		
Dihapus utk dihibahkan kepada KemenPUPR	7.541.500.000,00		
Dihapus utk dihibahkan kepada Pemkab GK	13.238.093.300,00		
Dihapus utk dihibahkan kepada Pemkab KP	760.720.803,00		
Reklas ke Aset Lainnya (Kemitraan)	6.774.000.000,00		
Mutasi ke BPKA dari DPU	19.330.909.680,00		
Mutasi keluar OPD	53.027.569.525,00		
Reklas ke aset tetap lainnya	9.861.000,00		
Reklas ke Aset Lain-Lain	69.033.828,00		
	145.610.595.136,00		
Saldo akhir per 31 Desember 2020	4.238.954.451.307,00		



5.3.1.3.2 Peralatan Mesin

Rp1.512.711.423.026,27

Rp1.257.965.724.234,31

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.512.711.423.026,27 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.106
Rincian Obyek Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)			
1	Alat-alat Besar Darat	36.709.729.886,49			
2	Alat-alat Besar Apung	2.365.273,43			
3	Alat-alat Bantu	52.149.515.904,98			
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	156.418.379.077,75			
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.493.427.354,70			
6	Alat Angkut Apung Bermotor	1.050.163.500,00			
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	360.001.666,00			
8	Alat Angkut Bermotor Udara	148.400.000,00			
9	Alat Bengkel Bermesin	72.757.093.900,09			
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	10.958.074.436,04			
11	Alat Ukur	11.273.311.302,92			
12	Alat Pengolahan	11.122.843.736,21			
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.801.618.929,97			
14	Alat Kantor	84.233.778.404,15			
15	Alat Rumah Tangga	264.345.658.778,47			
16	Komputer	312.309.720.928,63			
17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	17.768.602.494,57			
18	Alat Studio	76.914.327.744,41			
19	Alat Komunikasi	37.023.275.361,53			
20	Peralatan Pemancar	5.702.159.795,00			
21	Alat Kedokteran	44.883.383.702,56			
22	Alat Kesehatan	1.621.367.292,88			
23	Unit-Unit Laboratorium	129.035.707.687,59			
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	30.070.798.846,52			
25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	9.344.537.217,78			
26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.273.972.018,29			
27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	1.677.784.492,00			
28	Radioation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	7.216.805.121,00			
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7.826.844.854,85			
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	2.156.367.909,05			
31	Senjata Api	5.344.474.000,00			
32	Persenjataan Non Senjata Api	3.999.555.404,52			
33	Senjata Sinar	12.000.000,00			
34	Alat Keamanan dan Perlindungan	13.200.000,00			



กกา พยาหูรุพ๛ทรุพ๛ทรุตุมูกุยเบฤพหาฦหาเก

No	Uraian	Nilai (Rp)
35	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	1.783.659.090,16
36	Alat Khusus Kepolisian	1.039.986.798,98
37	Alat Eksplorasi Topografi	4.925.000,00
38	Alat Eksplorasi Geofisika	69.815.000,00
39	Sumur	7.000.000,00
40	Pengolahan dan Pemurnian	25.000.000,00
41	Alat SAR	1.941.343.150,00
42	Alat Kerja Penerbangan	45.119.000,00
43	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	140.084.502,00
44	Unit Peralatan Proses/Produksi	2.067.989.820,00
45	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	95.712.203.295,04
46	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	3.196.565.200,00
47	Peralatan Olahraga	3.658.485.146,91
	Jumlah	1.512.711.423.026,27

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.107
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	508.085.882.205,63	419.108.648.161,68
2	Dinas Kesehatan	119.498.221.916,78	114.683.147.117,78
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	63.604.731.940,00	61.987.876.669,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	15.483.404.722,03	14.916.806.921,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.363.945.241,98	4.216.575.335,98
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.939.862.238,00	7.933.854.388,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.924.966.563,18	25.437.267.583,00
8	Dinas Sosial	27.472.254.938,08	25.554.632.677,23
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.603.345.887,98	32.563.868.019,99
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	6.682.149.502,00	6.481.424.034,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	52.901.527.431,98	49.180.637.081,98
12	Dinas Perhubungan	130.845.462.108,79	32.469.725.704,75
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	76.414.400.542,77	44.741.827.091,77
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.477.447.600,00	4.400.863.600,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	4.516.916.574,91	4.571.820.315
16	Dinas Kebudayaan	70.804.553.795,76	67.721.154.042,76
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	48.627.523.677,90	49.197.055.506,90
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.721.220.484,98	18.671.866.674,18
19	Dinas Pariwisata	3.540.826.192,01	3.451.656.192,01
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	39.135.526.668,83	37.273.756.821



No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.066.231.232,00	15.958.938.892,00
22	Sekretariat Daerah	49.901.122.450,78	50.652.983.334,03
23	Badan Penghubung Daerah	7.066.553.007,00	6.460.497.007,00
24	Sekretariat DPRD	24.585.196.643,59	22.572.323.352,59
25	Inspektorat	4.425.161.733,42	3.573.190.733,00
26	Paniradya Kaistimewan	4.859.658.941,96	4.469.067.275,96
27	Badan Perencanaan Daerah	11.993.454.938,00	12.128.241.458,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	88.334.009.491,93	95.576.023.468,93
29	Badan Kepegawaian Daerah	13.674.434.109,00	13.249.555.830,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	9.161.430.245,00	8.760.438.945,00
	Jumlah	1.512.711.423.026,27	1.257.965.724.234,31

Mutasi Peralatan Mesin sebagai berikut :

Saldo awal per 31 Desember 2019	1.257.965.724.234,31
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2020	137.484.204.942,00
Koreksi pencatatan Meubelair	2.811.599,75
Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	346.162.500,00
reklas dari AT lainnya	1.921.479.621,91
Reklas dari gedung dan bangunan	95.739.812.919,04
Hibah	35.881.338.473,22
Reklas dr JlJ	2.337.773.745,00
Reklas dari Persediaan	751.348.780,00
Penyesuaian Aset	2.653.045.743,64
Reklas dari KDP	1.631.133.693,75
Reklas dari Beban Jasa Konsultansi Penelitian	188.295.800,00
Reklas Extracom dari Gedung Bangunan	100.271.200,00
Reklas Pemetaan dari Gedung Bangunan	780.606.000,00
Mapping Alat Olahraga	2.339.000,00
Reklas Mutasi Kendaraan dari Banhubla	140.000.000,00
Reklas Belanja Barang Jasa ke Aset	6.350.000,00
Reklas Headset dan Mic	1.750.000,00
Peralatan mesin dari dana BTT	6.990.214.113,18
reklas dari barang dan jasa	55.594.000,00
Reklas dari Tanah	5.271.378.000,00
Kapitalisasi alat kedokteran (IR Thermometer)	3.420.000,00
Reklas antar AT	49.850.000,00
Pemetaan Aset	34.545.000,00
Reklas antar rekening AT	14.000.000,00
Koreksi dari jurnal penyesuaian	1.332.350.384,00
	293.720.075.515,49
Pengurangan:	



กลา พยาหญาพ๛ทางพาผูกของทุพทางทางพา

Penghapusan	2.483.081.445,00
Reklas ke ALL	12.751.109.959,00
Reklas ke persediaan	419.084.932,27
Reklas mini komputer	590.000,00
Ekstrakom	3.611.238.203,38
Hibah ke TNI AU	504.285.000,00
Koreksi	1.870.297.031,02
Pengembalian Belanja Modal LS temuan	16.389.890,00
Reklas Aset Tetap	123.648.094,00
Reklas ke aset tetap lainnya	224.554.000,00
Reklas ke beban	27.393.837,00
Reklas ke Gedung	2.294.166.020,00
Reklas ke JIJ	36.000.000,00
Mutasi Antar OPD	10.822.037.344,86
Koreksi dari jurnal penyesuaian	3.790.500.967,00
	38.974.376.723,53
Saldo akhir per 31 Desember 2020	1.512.711.423.026,27

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.512.711.423.026,27 termasuk di dalamnya Peralatan Mesin yang terdapat di dalam Hotel Mutiara Utara dan Selatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	HOTEL	OTEL MUTIARA UTARA HOTEL MUTIARA SELATAN		Jumlah		
140	Oralan	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	ALAT BESAR DARAT	-	-	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00
2	ALAT BANTU	6	1.422.195.000,00	8	1.399.450.000,00	14	2.821.645.000,00
3	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	3	4.011.000,00	6	5.730.000,00	9	9.741.000,00
4	ALAT BENGKEL BERMESIN	1	5.050.000,00	-	-	1	5.050.000,00
5	ALAT KANTOR	1	1.877.000,00	81	58.330.000,00	82	60.207.000,00
6	ALAT RUMAH TANGGA	522	517.593.000,00	613	1.144.858.000,00	1135	1.662.451.000,00
7	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	1	3.360.000,00	11	11.169.000,00	12	14.529.000,00
8	ALAT STUDIO	-	-	3	5.338.000,00	3	5.338.000,00
9	ALAT KOMUNIKASI	2	4.747.000,00	-	-	2	4.747.000,00
10	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	-	8	22.800.000,00	8	22.800.000,00
11	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	6.052.000,00	-	-	1	6.052.000,00
12	PERALATAN KOMPUTER	1	1.500.000,00	1	1.400.000,00	2	2.900.000,00
13	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA			2	64.815.000,00	2	64.815.000,00
	JUMLAH					1272	4.684.275.000,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Rp2.854.877.023.082,53

Rp2.853.277.179.121,12

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.854.877.023.082,53 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.108
Rincian Obyek Gedung dan Bangunan



No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.727.350.024.595,72
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	105.489.865.092,99
3	Bangunan Menara	721.228.000,00
4	Bangunan Bersejarah	12.227.556.007,98
5	Tugu Peringatan	2.290.980.501,00
6	Monumen/Bangunan Bersejarah	1.095.594.400,00
7	Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.701.774.484,84
8	Rambu-Rambu	-
9	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	-
	Jumlah	2.854.877.023.082,53

Saldo rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 untuk masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.109
Rincian Saldo Gedung dan Bangunan pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	948.846.560.411,69	894.132.203.275,15
2	Dinas Kesehatan	112.142.180.134,00	111.181.848.740,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	119.983.958.434,30	128.064.123.684,30
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	17.399.748.597,00	21.320.160.229,83
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.853.306.893,00	2.853.306.893,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.573.288.429,00	4.470.115.429,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.308.799.350,00	9.388.974.350,00
8	Dinas Sosial	93.487.735.788,65	93.135.907.225,67
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.823.742.414,00	27.508.938.468,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	20.832.031.220,00	20.769.094.720,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	38.474.866.728,94	38.392.970.728,94
12	Dinas Perhubungan	39.818.633.478,07	129.898.249.604,25
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.750.625.336,00	4.750.625.336,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	13.578.499.210,00	12.402.404.100,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	2.441.903.500,00	2.219.578.000,00
16	Dinas Kebudayaan	138.220.125.755,00	109.019.419.069,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	132.805.459.748,81	132.805.459.748,81
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	72.641.224.887,98	72.562.143.887,98
19	Dinas Pariwisata	41.712.073.651,00	38.399.222.341,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	106.985.252.441,48	103.339.786.171,48
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.241.243.075,00	20.149.036.175,00
22	Sekretariat Daerah	34.280.687.308,61	34.086.394.542,61
23	Badan Penghubung Daerah	6.370.571.262,00	6.370.571.262,00
24	Sekretariat DPRD	575.221.451.533,00	575.221.451.533,00
25	Inspektorat	929.006.440,00	929.006.440,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.989.171.200,00	4.956.145.200,00



No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019(Rp)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	219.673.484.371,00	218.810.519.082,10
29	Badan Kepegawaian Daerah	12.656.225.063,00	12.656.225.063,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	23.835.166.421,00	23.483.297.821,00
	Jumlah	2.854.877.023.082,53	2.853.277.179.121,12

Mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo awal per 31 Desember 2019	2.853.277.179.121,12
Penambahan:	
Belanja Modal Gedung Bangunan Tahun 2020	52.631.197.365,00
Reklas dari PM	2.423.462.861,00
kapitalisasi dari beban pemeliharaan	1.878.947.760,98
Reklas dari KDP	17.054.159.092,00
Penyesuaian SA	61.812.528,74
Hibah	15.158.164.888,00
Reklas dari AT Lainnya - ATR	7.394.279.000,00
Koreksi	152.165.000,00
Penyesuaian mapping	4.644.081.520,80
Kapitalisasi dari Beban Makan dan Minum	1.540.000,00
Reklas dr Aset Lainnya	54.498.548.600,00
Mutasi dari DPPM ke Biro Umum	50.970.000,00
Mutasi dari BPKA ke Dikpora Induk	31.248.922,00
Mutasi dari Dikpora ke BTKP	150.235.800,00
Reklas dari KDP yg berasal dari mutasi dikpora	12.837.463.509,27
Mutasi dari BPKA ke Disbud	1.254.888.000,00
Mutasi dari Dishub Induk ke Balai Parkir	9.974.216.515,07
Mutasi dari OPD lain ke Diskop	819.423.560,00
Mutasi dari BPTP Karangsari ke DPKP	3.601.721.270,00
Mutasi dari PBD ke Disperindag	92.206.900,00
Mutasi dari OPD lain ke BPKA	6.976.432.903,00
Reklas dari tanah	32.097.370.000,00
Reklas dari Aset Lainnya _Kemitraan dgn Pihak Ketiga	76.152.543,00
	223.860.688.538,86
Pengurangan:	
Reklas ke beban pemeliharaan gedung	5.983.002.054,00
Reklas ke PM	91.402.941.399,29
Reklas ke KDP	30.852.338.466,00
Reklas ke JIJ	7.599.831.281,00
Ekstracom	72.513.250,00
Penyesuaian	1.454.270.968,99
Reklas ke ALL	64.403.346,00
Rambu Tidak Bersuar	107.058.700,00
Reklas ke Beban Barjas	1.670.000,00



Reklas ke Persediaan	3.808.750,00
Mutasi ke OPD lain pada Distarung	3.374.711.633,00
Mutasi ke BPTPAR dari Dishub Induk	9.996.080.615,07
Mutasi keluar OPD dari BPKA	64.480.911.081,10
Reklas antar AT	14.000.000,00
Hibah ke Pemkab Bantul	3.374.711.633,00
Reklas ke ATR	3.478.591.400,00
	222.260.844.577,45
Saldo akhir per 31 Desember 2020	2.854.877.023.082,53

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp3.159.549.339.267,57 Rp3.056.004.711.149,57

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.159.549.339.267,57 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.110 Rincian Obyek Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jalan	1.943.928.622.776,59
2	Jembatan	339.871.230.667,00
3	Bangunan Air Irigasi	286.085.588.537,56
4	Bangunan Air Pasang Surut	1.894.008.246,00
5	Bangunan Air Rawa	19.583.000,00
6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	34.956.522.944,00
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	35.821.109.505,00
8	Bangunan Air Bersih/Baku	24.055.919.676,42
9	Bangunan Air Kotor	31.500.946.731,00
10	Bangunan Air	84.230.180.327,00
11	Instalasi Air Minum Bersih	7.552.746.132,54
12	Instalasi Air Kotor	61.887.225.028,68
13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	1.580.852.185,00
14	Instalasi Pembangkit Listrik	5.718.767.599,68
15	Instalasi Gardu Listrik	1.704.655.306,52
16	Instalasi Pertahanan	233.906.133,34
17	Instalasi Gas	82.236.666,67
18	Instalasi Pengaman	10.347.843.493,00
19	Jaringan Air Minum	194.797.254.966,57
20	Jaringan Listrik	73.275.439.040,44
21	Jaringan Telepon	19.937.333.604,56
22	Jaringan Gas	67.366.700,00
	Jumlah	3.159.549.339.267,57



^^^ ๛๛๎กษูรุฒ๛ทรฺฒ๛ทรฺ๛ฺมูฦ๛๗ฦพฺ๛ฦ๛ฺ๛

Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.111
Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada OPD

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 21.594.319.593.74 20.082.439.038,94 2 Dinas Kesehatan 5.174.517.755,00 5.138.517.755,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 2.637.167.328.707,02 2.597.671.103.323,02 4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 51.267.996.616,57 53.093.202.983,47 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 95.375.000,00 95.375.000,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja 218.887.000,00 218.897.000,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.218.950.800,00 6.218.950.800,00 8 Dinas Sosial 1.300.199.007,67 1.215.956.007,67 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.858.320.200,00 1.702.794.400,00 10 Anak dan Pengendalian Penduduk - - 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - - 12 Dinas Perhubungan 9.965.566.986,00 9.965.566.986,00 13 Dinas Perhubungan 9.965.566.986,00 9.965.566.986,00 14 Dinas Perjinan dan Usaha Kecil Menengah <t< th=""><th>No</th><th>Nama OPD</th><th>Nilai Per 31-12-2020 (Rp)</th><th>Nilai Per 31-12-2019 (Rp)</th></t<>	No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM 2.637.167.328.707.02 2.597.671.103.323,02	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	21.594.319.593,74	20.082.439.038,94
4 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 51.267.996.616,57 53.093.202.983,47 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 95.375.000,00 95.375.000,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja 218.887.000,00 218.887.000,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.218.950.800,00 6.218.950.800,00 8 Dinas Sosial 1.300.199.007,67 1.215.956.007,67 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.858.320.200,00 1.702.794.400,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2	Dinas Kesehatan	5.174.517.755,00	5.138.517.755,00
5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 95.375.000,00 95.375.000,00 6 Satuan Polisi Pamong Praja 218.887.000,00 218.887.000,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.218.950.800,00 6.218.950.800,00 8 Dinas Sosial 1.300.199.007,67 1.215.956.007,67 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.858.320.200,00 1.702.794.400,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - - 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 26.262.821.863,00 26.981.929.879,00 12 Dinas Perhubungan 9.965.556.986,00 9.965.556.986,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 19.198.034.932,00 19.198.034.932,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 219.614.400,00 103.235.000,00 15 Dinas Kebudayaan 4.012.838.889,00 3.283.278.139,00 16 Dinas Kebudayaan 4.012.838.889,00 3.283.278.139,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.337.566.121,00 5.337.566.121,00 18 Dinas Perlindustri	3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.637.167.328.707,02	2.597.671.103.323,02
6 Satuan Polisi Pamong Praja 218.887.000,00 218.887.000,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.218.950.800,00 6.218.950.800,00 8 Dinas Sosial 1.300.199.007,67 1.215.956.007,67 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.858.320.200,00 1.702.794.400,00 10 Dinas Permberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - - 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 26.262.821.863,00 26.981.929.879,00 12 Dinas Perhubungan 9.965.556.986,00 9.965.556.986,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 19.198.034.932,00 19.198.034.932,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 219.614.400,00 10.198.034.932,00 15 Dinas Perjiinan dan Penanaman Modal 172.868.000,00 172.868.000,00 16 Dinas Kebudayaan 4.012.838.889,00 3.283.278.139,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.337.566.121,00 5.337.566.121,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 123.581.995.978,00 115.490.671.978,00 20	4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	51.267.996.616,57	53.093.202.983,47
7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.218.950.800,00 6.218.950.800,00 8 Dinas Sosial 1.300.199.007,67 1.215.956.007,67 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.858.320.200,00 1.702.794.400,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - - 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 26.262.821.863,00 26.981.929.879,00 12 Dinas Pembubungan 9.965.556.986,00 9.965.556.986,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 19.198.034.932,00 19.198.034.932,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 219.614.400,00 103.235.000,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 172.868.000,00 172.868.000,00 16 Dinas Kebudayaan 4.012.838.889,00 3.283.278.139,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.337.566.121,00 5.337.566.121,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 123.581.995.978,00 115.490.671.978,00 19 Dinas Perimdustrian dan Ketahanan Pangan 7.476.486.520,00 7.476.486.520,00 <t< th=""><td>5</td><td>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</td><td>95.375.000,00</td><td>95.375.000,00</td></t<>	5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	95.375.000,00	95.375.000,00
8 Dinas Sosial 1.300.199.007,67 1.215.956.007,67 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.858.320.200,00 1.702.794.400,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - - 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 26.262.821.863,00 26.981.929.879,00 12 Dinas Perhubungan 9.965.556.986,00 9.965.556.986,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 19.198.034.932,00 19.198.034.932,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 219.614.400,00 103.235.000,00 15 Dinas Perljinan dan Penanaman Modal 172.868.000,00 172.868.000,00 16 Dinas Kebudayaan 4.012.838.889,00 3.283.278.139,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.337.566.121,00 5.337.566.121,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 123.581.995.978,00 115.490.671.978,00 19 Dinas Perimdustrian dan Ketahanan Pangan 7.476.486.520,00 7.476.486.520,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7.476.486.520,00 7.476.486.520,00	6	Satuan Polisi Pamong Praja	218.887.000,00	218.887.000,00
9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.858.320.200,00 1.702.794.400,00 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - - 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 26.262.821.863,00 26.981.929.879,00 12 Dinas Perhubungan 9.965.556.986,00 9.965.556.986,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 19.198.034.932,00 19.198.034.932,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 219.614.400,00 103.235.000,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 172.868.000,00 172.868.000,00 16 Dinas Kebudayaan 4.012.838.889,00 3.283.278.139,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.337.566.121,00 5.337.566.121,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 123.581.995.978,00 115.490.671.978,00 19 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7.476.486.520,00 7.476.486.520,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7.476.486.520,00 7.476.486.520,00 21 Dinas Pertanian dan Perdagangan 6.452.968.800,00 6.452.968.800,00	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.218.950.800,00	6.218.950.800,00
10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - - - 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 26.262.821.863,00 26.981.929.879,00 12 Dinas Perhubungan 9.965.556.986,00 9.965.556.986,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 19.198.034.932,00 19.198.034.932,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 219.614.400,00 103.235.000,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 172.868.000,00 172.868.000,00 16 Dinas Kebudayaan 4.012.838.889,00 3.283.278.139,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.337.566.121,00 5.337.566.121,00 18 Dinas Perjustakaan dan Perikanan 123.581.995.978,00 115.490.671.978,00 19 Dinas Pariwisata 12.358.079.400,00 11.300.117.350,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7.476.486.520,00 7.476.486.520,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.452.968.800,00 6.452.968.800,00 22 Sekretariat Daerah 80.600.000,00 80.600.000,00	8	Dinas Sosial	1.300.199.007,67	1.215.956.007,67
Anak dan Pengendalian Penduduk 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 26.262.821.863,00 26.981.929.879,00 12 Dinas Perhubungan 9.965.556.986,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 19.198.034.932,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 219.614.400,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 172.868.000,00 16 Dinas Kebudayaan 4.012.838.889,00 3.283.278.139,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.337.566.121,00 5.337.566.121,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 123.581.995.978,00 115.490.671.978,00 20 Dinas Pariwisata 12.358.079.400,00 11.300.117.350,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7.476.486.520,00 7.476.486.520,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.452.968.800,00 22 Sekretariat Daerah 23.067.915.621,47 23 Badan Penghubung Daerah 80.600.000,00 24 Sekretariat DPRD 522.131.759,00 25 Inspektorat 38.702.500,00 26 Paniradya Kaistimewan - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36.567.500,00 28 Badan Penglola Keuangan dan Aset 193.709.326.935,00 138.958.219.373,00 29 Badan Rengelola Keuangan dan Aset 1387.329.979,00 1.328.595.979,00	9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.858.320.200,00	1.702.794.400,00
12 Dinas Perhubungan 9.965.556.986,00 9.965.556.986,00 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 19.198.034.932,00 19.198.034.932,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 219.614.400,00 103.235.000,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 172.868.000,00 172.868.000,00 16 Dinas Kebudayaan 4.012.838.889,00 3.283.278.139,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.337.566.121,00 5.337.566.121,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 123.581.995.978,00 115.490.671.978,00 19 Dinas Pariwisata 12.358.079.400,00 11.300.117.350,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7.476.486.520,00 7.476.486.520,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.452.968.800,00 6.452.968.800,00 22 Sekretariat Daerah 23.067.915.621,47 23.067.915.621,47 23 Badan Penghubung Daerah 80.600.000,00 80.600.000,00 24 Sekretariat DPRD 522.131.759,00 522.131.759,00 25 Inspektorat 38.702.500,	10		-	-
13 Dinas Komunikasi dan Informatika 19.198.034.932,00 19.198.034.932,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 219.614.400,00 103.235.000,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 172.868.000,00 172.868.000,00 16 Dinas Kebudayaan 4.012.838.889,00 3.283.278.139,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.337.566.121,00 5.337.566.121,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 123.581.995.978,00 115.490.671.978,00 19 Dinas Periwisata 12.358.079.400,00 11.300.117.350,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7.476.486.520,00 7.476.486.520,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.452.968.800,00 6.452.968.800,00 22 Sekretariat Daerah 23.067.915.621,47 23.067.915.621,47 23 Badan Penghubung Daerah 80.600.000,00 80.600.000,00 24 Sekretariat DPRD 522.131.759,00 522.131.759,00 25 Inspektorat 38.702.500,00 38.702.500,00 26 Paniradya Kaistimewan -	11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.262.821.863,00	26.981.929.879,00
14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 219.614.400,00 103.235.000,00 15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 172.868.000,00 172.868.000,00 16 Dinas Kebudayaan 4.012.838.889,00 3.283.278.139,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.337.566.121,00 5.337.566.121,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 123.581.995.978,00 115.490.671.978,00 19 Dinas Pariwisata 12.358.079.400,00 11.300.117.350,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7.476.486.520,00 7.476.486.520,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.452.968.800,00 6.452.968.800,00 22 Sekretariat Daerah 23.067.915.621,47 23.067.915.621,47 23 Badan Penghubung Daerah 80.600.000,00 80.600.000,00 24 Sekretariat DPRD 522.131.759,00 522.131.759,00 25 Inspektorat 38.702.500,00 38.702.500,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 193.709.326.935,00 138.958.	12	Dinas Perhubungan	9.965.556.986,00	9.965.556.986,00
15 Dinas Perijinan dan Penanaman Modal 172.868.000,00 172.868.000,00 16 Dinas Kebudayaan 4.012.838.889,00 3.283.278.139,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.337.566.121,00 5.337.566.121,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 123.581.995.978,00 115.490.671.978,00 19 Dinas Pariwisata 12.358.079.400,00 11.300.117.350,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7.476.486.520,00 7.476.486.520,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.452.968.800,00 6.452.968.800,00 22 Sekretariat Daerah 23.067.915.621,47 23.067.915.621,47 23.067.915.621,47 23 Badan Penghubung Daerah 80.600.000,00 80.600.000,00 24 Sekretariat DPRD 522.131.759,00 522.131.759,00 25 Inspektorat 38.702.500,00 38.702.500,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Pernecanaan Pembangunan Daerah 36.567.500,00 36.567.500,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 193.709.326.93	13	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.198.034.932,00	19.198.034.932,00
16 Dinas Kebudayaan 4.012.838.889,00 3.283.278.139,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.337.566.121,00 5.337.566.121,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 123.581.995.978,00 115.490.671.978,00 19 Dinas Pariwisata 12.358.079.400,00 11.300.117.350,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7.476.486.520,00 7.476.486.520,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.452.968.800,00 6.452.968.800,00 22 Sekretariat Daerah 23.067.915.621,47 23.067.915.621,47 23 Badan Penghubung Daerah 80.600.000,00 80.600.000,00 24 Sekretariat DPRD 522.131.759,00 522.131.759,00 25 Inspektorat 38.702.500,00 38.702.500,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36.567.500,00 36.567.500,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 193.709.326.935,00 138.958.219.373,00 29 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.328.595.979,00 1.328.595.97	14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	219.614.400,00	103.235.000,00
17 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5.337.566.121,00 5.337.566.121,00 18 Dinas Kelautan dan Perikanan 123.581.995.978,00 115.490.671.978,00 19 Dinas Pariwisata 12.358.079.400,00 11.300.117.350,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7.476.486.520,00 7.476.486.520,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.452.968.800,00 6.452.968.800,00 22 Sekretariat Daerah 23.067.915.621,47 23.067.915.621,47 23 Badan Penghubung Daerah 80.600.000,00 80.600.000,00 24 Sekretariat DPRD 522.131.759,00 522.131.759,00 25 Inspektorat 38.702.500,00 38.702.500,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36.567.500,00 36.567.500,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 193.709.326.935,00 138.958.219.373,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 772.038.404,00 772.038.404,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.328.739.979,00 1.328.59	15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	172.868.000,00	172.868.000,00
18 Dinas Kelautan dan Perikanan 123.581.995.978,00 115.490.671.978,00 19 Dinas Pariwisata 12.358.079.400,00 11.300.117.350,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7.476.486.520,00 7.476.486.520,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.452.968.800,00 6.452.968.800,00 22 Sekretariat Daerah 23.067.915.621,47 23.067.915.621,47 23 Badan Penghubung Daerah 80.600.000,00 80.600.000,00 24 Sekretariat DPRD 522.131.759,00 522.131.759,00 25 Inspektorat 38.702.500,00 38.702.500,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36.567.500,00 36.567.500,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 193.709.326.935,00 138.958.219.373,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 772.038.404,00 772.038.404,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.387.329.979,00 1.328.595.979,00	16	Dinas Kebudayaan	4.012.838.889,00	3.283.278.139,00
19 Dinas Pariwisata 12.358.079.400,00 11.300.117.350,00 20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7.476.486.520,00 7.476.486.520,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.452.968.800,00 6.452.968.800,00 22 Sekretariat Daerah 23.067.915.621,47 23.067.915.621,47 23 Badan Penghubung Daerah 80.600.000,00 80.600.000,00 24 Sekretariat DPRD 522.131.759,00 522.131.759,00 25 Inspektorat 38.702.500,00 38.702.500,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36.567.500,00 36.567.500,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 193.709.326.935,00 138.958.219.373,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 772.038.404,00 772.038.404,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.387.329.979,00 1.328.595.979,00	17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.337.566.121,00	5.337.566.121,00
20 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 7.476.486.520,00 7.476.486.520,00 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.452.968.800,00 6.452.968.800,00 22 Sekretariat Daerah 23.067.915.621,47 23.067.915.621,47 23 Badan Penghubung Daerah 80.600.000,00 80.600.000,00 24 Sekretariat DPRD 522.131.759,00 522.131.759,00 25 Inspektorat 38.702.500,00 38.702.500,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36.567.500,00 36.567.500,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 193.709.326.935,00 138.958.219.373,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 772.038.404,00 772.038.404,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.387.329.979,00 1.328.595.979,00	18	Dinas Kelautan dan Perikanan	123.581.995.978,00	115.490.671.978,00
21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.452.968.800,00 6.452.968.800,00 22 Sekretariat Daerah 23.067.915.621,47 23.067.915.621,47 23 Badan Penghubung Daerah 80.600.000,00 80.600.000,00 24 Sekretariat DPRD 522.131.759,00 522.131.759,00 25 Inspektorat 38.702.500,00 38.702.500,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36.567.500,00 36.567.500,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 193.709.326.935,00 138.958.219.373,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 772.038.404,00 772.038.404,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.387.329.979,00 1.328.595.979,00	19	Dinas Pariwisata	12.358.079.400,00	11.300.117.350,00
22 Sekretariat Daerah 23.067.915.621,47 23.067.915.621,47 23 Badan Penghubung Daerah 80.600.000,00 80.600.000,00 24 Sekretariat DPRD 522.131.759,00 522.131.759,00 25 Inspektorat 38.702.500,00 38.702.500,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36.567.500,00 36.567.500,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 193.709.326.935,00 138.958.219.373,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 772.038.404,00 772.038.404,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.387.329.979,00 1.328.595.979,00	20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.476.486.520,00	7.476.486.520,00
23 Badan Penghubung Daerah 80.600.000,00 80.600.000,00 24 Sekretariat DPRD 522.131.759,00 522.131.759,00 25 Inspektorat 38.702.500,00 38.702.500,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36.567.500,00 36.567.500,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 193.709.326.935,00 138.958.219.373,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 772.038.404,00 772.038.404,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.387.329.979,00 1.328.595.979,00	21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.452.968.800,00	6.452.968.800,00
24 Sekretariat DPRD 522.131.759,00 522.131.759,00 25 Inspektorat 38.702.500,00 38.702.500,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36.567.500,00 36.567.500,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 193.709.326.935,00 138.958.219.373,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 772.038.404,00 772.038.404,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.387.329.979,00 1.328.595.979,00	22	Sekretariat Daerah	23.067.915.621,47	23.067.915.621,47
25 Inspektorat 38.702.500,00 38.702.500,00 26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36.567.500,00 36.567.500,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 193.709.326.935,00 138.958.219.373,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 772.038.404,00 772.038.404,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.387.329.979,00 1.328.595.979,00	23	Badan Penghubung Daerah	80.600.000,00	80.600.000,00
26 Paniradya Kaistimewan - - 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36.567.500,00 36.567.500,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 193.709.326.935,00 138.958.219.373,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 772.038.404,00 772.038.404,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.387.329.979,00 1.328.595.979,00	24	Sekretariat DPRD	522.131.759,00	522.131.759,00
27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36.567.500,00 36.567.500,00 28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 193.709.326.935,00 138.958.219.373,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 772.038.404,00 772.038.404,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.387.329.979,00 1.328.595.979,00	25	Inspektorat	38.702.500,00	38.702.500,00
28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 193.709.326.935,00 138.958.219.373,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 772.038.404,00 772.038.404,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.387.329.979,00 1.328.595.979,00	26	Paniradya Kaistimewan	-	-
29 Badan Kepegawaian Daerah 772.038.404,00 772.038.404,00 30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.387.329.979,00 1.328.595.979,00	27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.567.500,00	36.567.500,00
30 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.387.329.979,00 1.328.595.979,00	28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	193.709.326.935,00	138.958.219.373,00
	29	Badan Kepegawaian Daerah	772.038.404,00	772.038.404,00
Jumlah 3.159.549.339.267,57 3.056.004.711.149,57	30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.387.329.979,00	1.328.595.979,00
		Jumlah	3.159.549.339.267,57	3.056.004.711.149,57

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Saldo awal per 31 Desember 2019	3.056.004.711.149,57
Penambahan:	
Belanja Modal JIJ Tahun 2020	38.131.559.522,00



Kapitalisasi dari beban pemeliharaan JIJ	635.953.384,00
Reklas dari PM	470.495.190,00
Reklas dari KDP	163.203.403,00
Hibah	9.469.361.121,00
Reklas dari ATR	75.935.689.612,00
Reklas dari Gedung Bangunan	5.214.541.440,00
Reklas dari ATB	25.500.000,00
Mutasi dari BPKA ke Balai Pialam	117.812.761.349,00
Mutasi dari BPBD ke Dinas Kanla	436.427.000,00
Mutasi dari luar OPD ke BPKA	53.154.739.562,10
Reklas dari tanah	27.159.000,00
Penyesuaian	83.826.409,09
	301.561.216.992,19
Pengurangan:	
Reklas ke PM	604.106.500,00
Reklas ke ATR	8.140.188.400,00
Penyesuaian SA	33.826.409,19
Pelimpahan dari DPU ke PBD-BPKA	186.948.901.084,00
Reklas ke KDP	317.655.600,00
Reklas ke Beban	5.196.000,00
Reklas ke persediaan	40.880.064,00
Hibah ke Pemkab Bantul	1.825.206.367,00
Pengembalian Belanja Modal	100.628.450,00
	198.016.588.874,19
Saldo akhir per 31 Desember 2020	3.159.549.339.267,57

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Rp241.819.072.793,33

Rp296.525.642.342,22

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp241.819.072.793,33 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.112
Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Buku	119.149.729.945,70
2	Terbitan	227.433.064,94
3	Barang-Barang Perpustakaan	928.147.565,59
4	Barang Bercorak Kebudayaan	34.188.552.105,28



	Jumlah	241.819.072.793,33
8	Aset Tetap Renovasi	83.858.331.270,64
7	Tanaman	1.689.150.951,20
6	Hewan	1.777.727.889,98
5	Alat Olah Raga Lainnya	-

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.113

Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	122.973.354.208,50	110.571.238.582,01
2	Dinas Kesehatan	430.998.256,00	581.577.274,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	48.515.874.849,00	72.371.059.065,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	16.195.115.915,00	16.195.115.915,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.612.000,00	24.612.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	16.659.900,00	16.659.900,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.549.511.674,64	52.819.709.396,00
8	Dinas Sosial	559.025.787,00	592.019.287,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41.144.050,00	41.144.050,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	40.170.400,00	41.418.900,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.101.417.987,00	1.128.499.187,00
12	Dinas Perhubungan	4.260.000,00	4.260.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	864.327.389,00	85.835.001,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.765.917.400,00	5.700.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	14.407.700,00	14.407.700,00
16	Dinas Kebudayaan	5.265.213.088,00	8.102.221.943,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	10.158.606.976,00	10.128.605.776,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	392.770.500,00	392.770.500,00
19	Dinas Pariwisata	34.774.000,00	34.774.000,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.895.709.670,18	2.217.865.955,20
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.455.999.950,00	2.217.246.870,00
22	Sekretariat Daerah	11.243.067.448,00	11.247.576.448,00
23	Badan Penghubung Daerah	3.278.395.650,00	3.263.945.650,00
24	Sekretariat DPRD	828.740.552,01	844.874.502,01
25	Inspektorat	37.427.461,00	37.427.461,00



	Jumlah	241.819.072.793,33	296.525.642.342,22
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	672.628.450,00	723.309.750,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	126.786.300,00	126.786.300,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	233.903.692,00	2.599.756.390,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	83.983.840,00	82.858.840,00
26	Paniradya Kaistimewan	14.267.700,00	12.365.700,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Reklas dari KDP keATR 8.466.433.388,00 Reklas dari JIJ ke ATR 452.247.400,00 Reklas dari PM 97.658.000,00 reklas dari persediaan 420.203.800,00 Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan Gedung 6.450.000,00 Hibah 30.001.200,00 Penyesuaian 67.912.830,05 Reklas dari tanah 9.861.000,00 Mutasi ATR dari BPKA ke DPU 1.261.338.500,00 Reklas dari ATB ke ATR 47.647.000,00 Reklas dari Gedung Bangunan ke ATR 3.478.591.400,00 Pengurangan: Reklas ke PM 1.847.610.621,91 Penghapusan 1.547.260.420,00 Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya km maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Saldo awal per 31 Desember 2019	296.525.642.342,22
Reklas dari KDP keATR 8.466.433.388,00 Reklas dari JIJ ke ATR 452.247.400,00 Reklas dari PM 97.658.000,00 reklas dari persediaan 420.203.800,00 Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan Gedung 6.450.000,00 Hibah 30.001.200,00 Penyesuaian 67.912.830,05 Reklas dari tanah 9.861.000,00 Mutasi ATR dari BPKA ke DPU 1.261.338.500,00 Reklas dari ATB ke ATR 47.647.000,00 Reklas dari Gedung Bangunan ke ATR 3.478.591.400,00 Pengurangan: Reklas ke PM 1.847.610.621,91 Penghapusan 1.547.260.420,00 Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya km maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian mahir 270.600.713,06 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Penambahan:	
Reklas dari JIJ ke ATR 452.247.400,00 Reklas dari PM 97.658.000,00 reklas dari persediaan 420.203.800,00 Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan Gedung 6.450.000,00 Hibah 30.001.200,00 Penyesuaian 67.912.830,05 Reklas dari tanah 9.861.000,00 Mutasi ATR dari BPKA ke DPU 1.261.338.500,00 Reklas dari ATB ke ATR 47.647.000,00 Reklas dari Gedung Bangunan ke ATR 3.478.591.400,00 26.241.961.159,05 Pengurangan: Reklas ke PM 1.847.610.621,91 Penghapusan 1.547.260.420,00 Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya km maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian akhir 270.600.713,06 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Belanja Modal Tahun 2020	15.382.208.041,00
Reklas dari PM 97.658.000,00 reklas dari persediaan 420.203.800,00 Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan Gedung 6.450.000,00 Hibah 30.001.200,00 Penyesuaian 67.912.830,05 Reklas dari tanah 9.861.000,00 Mutasi ATR dari BPKA ke DPU 1.261.338.500,00 Reklas dari ATB ke ATR 47.647.000,00 Reklas dari Gedung Bangunan ke ATR 3.478.591.400,00 Pengurangan: Reklas ke PM 1.847.610.621,91 Penghapusan 1.547.260.420,00 Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya krn maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Reklas dari KDP keATR	8.466.433.388,00
reklas dari persediaan 420.203.800,00 Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan Gedung 6.450.000,00 Hibah 30.001.200,00 Penyesuaian 67.912.830,05 Reklas dari tanah 9.861.000,00 Mutasi ATR dari BPKA ke DPU 1.261.338.500,00 Reklas dari ATB ke ATR 47.647.000,00 Reklas dari Gedung Bangunan ke ATR 3.478.591.400,00 26.241.961.159,05 Pengurangan: Reklas ke PM 1.847.610.621,91 Penghapusan 1.547.260.420,00 Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya krn maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Reklas dari JIJ ke ATR	452.247.400,00
Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan Gedung 6.450.000,00 Hibah 30.001.200,00 Penyesuaian 67.912.830,05 Reklas dari tanah 9.861.000,00 Mutasi ATR dari BPKA ke DPU 1.261.338.500,00 Reklas dari ATB ke ATR 47.647.000,00 Reklas dari Gedung Bangunan ke ATR 3.478.591.400,00 Pengurangan: Reklas ke PM 1.847.610.621,91 Penghapusan 1.547.260.420,00 Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya krn maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Reklas dari PM	97.658.000,00
Hibah 30.001.200,00 Penyesuaian 67.912.830,05 Reklas dari tanah 9.861.000,00 Mutasi ATR dari BPKA ke DPU 1.261.338.500,00 Reklas dari ATB ke ATR 47.647.000,00 Reklas dari Gedung Bangunan ke ATR 3.478.591.400,00 Pengurangan: Reklas ke PM 1.847.610.621,91 Penghapusan 1.547.260.420,00 Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya krn maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	reklas dari persediaan	420.203.800,00
Penyesuaian 67.912.830,05 Reklas dari tanah 9.861.000,00 Mutasi ATR dari BPKA ke DPU 1.261.338.500,00 Reklas dari ATB ke ATR 47.647.000,00 Reklas dari Gedung Bangunan ke ATR 3.478.591.400,00 Pengurangan: Reklas ke PM 1.847.610.621,91 Penghapusan 1.547.260.420,00 Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya krn maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan Gedung	6.450.000,00
Reklas dari tanah 9.861.000,00 Mutasi ATR dari BPKA ke DPU 1.261.338.500,00 Reklas dari ATB ke ATR 47.647.000,00 Reklas dari Gedung Bangunan ke ATR 3.478.591.400,00 Pengurangan: Reklas ke PM 1.847.610.621,91 Penghapusan 1.547.260.420,00 Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya krn maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Hibah	30.001.200,00
Mutasi ATR dari BPKA ke DPU 1.261.338.500,00 Reklas dari ATB ke ATR 47.647.000,00 Reklas dari Gedung Bangunan ke ATR 3.478.591.400,00 26.241.961.159,05 Pengurangan: Reklas ke PM 1.847.610.621,91 Penghapusan 1.547.260.420,00 Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya krn maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Penyesuaian	67.912.830,05
Reklas dari ATB ke ATR 47.647.000,00 Reklas dari Gedung Bangunan ke ATR 3.478.591.400,00 26.241.961.159,05 Pengurangan: Reklas ke PM 1.847.610.621,91 Penghapusan 1.547.260.420,00 Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya krn maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian akhir 270.600.713,06 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Reklas dari tanah	9.861.000,00
Reklas dari Gedung Bangunan ke ATR 3.478.591.400,00 26.241.961.159,05 Pengurangan: Reklas ke PM 1.847.610.621,91 Penghapusan 1.547.260.420,00 Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya krn maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian akhir 270.600.713,06 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Mutasi ATR dari BPKA ke DPU	1.261.338.500,00
26.241.961.159,05 Pengurangan: Reklas ke PM 1.847.610.621,91 Penghapusan 1.547.260.420,00 Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya krn maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian akhir 270.600.713,06 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Reklas dari ATB ke ATR	47.647.000,00
Pengurangan: Reklas ke PM 1.847.610.621,91 Penghapusan 1.547.260.420,00 Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya krn maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian akhir 270.600.713,06 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Reklas dari Gedung Bangunan ke ATR	3.478.591.400,00
Reklas ke PM 1.847.610.621,91 Penghapusan 1.547.260.420,00 Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya krn maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian akhir 270.600.713,06 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00		26.241.961.159,05
Penghapusan 1.547.260.420,00 Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya krn maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian akhir 270.600.713,06 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Pengurangan:	
Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk 1.647.800,00 Reklas asset tetap lainnya krn maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian akhir 270.600.713,06 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Reklas ke PM	1.847.610.621,91
Reklas asset tetap lainnya krn maping kode baru 539.053.998,54 Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian akhir 270.600.713,06 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Penghapusan	1.547.260.420,00
Penyesuaian Saldo Awal Aset 831.090.266,70 penyesuaian akhir 270.600.713,06 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Mutasi ke Dikmen Kota dari Dikpora Induk	1.647.800,00
penyesuaian akhir 270.600.713,06 penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Reklas asset tetap lainnya krn maping kode baru	539.053.998,54
penyesuaian maping 304.103.165,35 Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Penyesuaian Saldo Awal Aset	831.090.266,70
Reklas ke ALL 537.126.285,00 Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	penyesuaian akhir	270.600.713,06
Reklas ke Extracom 30.850.000,00 Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	penyesuaian maping	304.103.165,35
Reklas ke KDP 121.798.000,00 Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Reklas ke ALL	537.126.285,00
Kapitalisasi ATR ke JIJ 25.011.890.716,00	Reklas ke Extracom	30.850.000,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Reklas ke KDP	121.798.000,00
Kapitalisasi ATR ke Gedung Bangunan 152.279.000,00	Kapitalisasi ATR ke JIJ	25.011.890.716,00
	Kapitalisasi ATR ke Gedung Bangunan	152.279.000,00



การ เกาะ การ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกา

Penyesuaian akumulasi penyusutan	0,02
Reklas ATR ke AT	52.858.496.396,00
Hibah ke Pemkab Gunungkidul	345.684.000,00
Pengembalian Belanja LSATR	27.630.725,36
	84.427.122.107,94
Saldo akhir per 31 Desember 2020	241.819.072.793,33

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp241.819.072.793,33 termasuk Aset Tetap Renovasi sebesar Rp83.858.331.270,64, yang terdiri dari aset tetap yang digunakan OPD tetapi milik OPD lain di lingkungan Pemda DIY sebesar Rp23.660.153.284,64 dan aset tetap yang digunakan oleh OPD tetapi milik instansi di luar Pemda DIY sebesar Rp60.198.177.986,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114
Rincian Data Aset Tetap Renovasi

No	Nama OPD	Nilai (Rp)	Keterang	an
1	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	41.925.802.424,00	Gedung Kantor di Maguwo Sleman Yogyakarta gedung milik APBN	55.754.115,00
			Ruang Rapat Balai PSDA	4.689.336,00
			Gedung Kantor di Sidomulyo, Sleman, Yogyakarta Gedung Milik Negara	7.906.995,00
			Garasi Balai PSDA	14.980.854,00
			Gedung Bina Marga DPUP- ESDM DIY	996.545.350,00
			Tembing pengaman Jembatan Denggung	89.516.800,00
			Jalan Ngalang - Nguwot - Gading	23.544.922.024,00
			Jembatan Denggung (RJ Gito Gati Sleman)	3.634.917.200,00
			Jembatan Tlacap (RJ Gito Gati Sleman)	3.642.978.300,00
			Jalan milik Kab Sleman	5.801.660.250,00
			Jembatan Tambakrejo (RJ Gito Gati SLeman)	1.531.277.600,00
			Jembatan Gondanglegi (RJ Gito Gati Sleman)	1.291.668.100,00
			Jembatan Pentung Ruas Jalan Siluk-Kretek	1.308.985.500,00
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	16.195.115.915,00	Plumbing Toilet Titik Nol milik DPU DIY	197.931.650,00
			Landscape tempat reklokasi Eks Indra milik DPU DIY	2.720.907.532,00
			Jalan Provinsi milik DPU DIY	10.594.542.500,00
			Renovasi Pagar milik Biro Umum Setda DIY	173.622.000,00
			Interior Rg Gadri milik Kraton	1.107.447.768,00
			Kawasan Wisata Kiskendo milik Kabupaten Kulon Progo TA 2016	315.683.910,00
			Ruas Jalan Bendo-Beku TA 2018 milik Kabupaten Kulon Progo	1.084.980.555,00



การ พยาทินารพลารพลารพานิกุขพากพาการ

3	Dinas Kelautan dan Perikanan	355.578.500,00	Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Kabupaten Kulon Progo	
	Dinas Roladian dan Ferikanan	000.07 0.000,00	Jaian, mgasi dan Janngan milik Kabupaten Kulon 1 1090	
4	Sekretariat Daerah (Biro Umum	10.481.187.069,00	Bangunan Gedung milik Krato	on Yogyakarta
5	Badan Penghubung Daerah	2.143.253.900,00	Bangunan Gedung milik SET	NEG
6	Dinas Komunikasi dan Informasi	826.567.388,00	Media center ruang wartawan milik Biro Umum	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.470.043.674,64	Jalan Barongan-Bibal	4.366.776.074,64
			Jalan Sedayu-Pandak	3.231.542.600,00
			Jalan Imogiri-Dodogan	532.048.000,00
			SLB BINA SIWI	339.677.000,00
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.460.782.400,00	Pasar/Pertokoan Galery di YIA	
	Jumlah	83.858.331.270,64		

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp72.397.801.549,65

Rp89.827.616.353,40

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp72.397.801.549,65 terdapat dalam beberapa OPD berikut ini:

Tabel 5.115
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.352.908.232,65	4.029.820.833,40
2	Dinas Kesehatan	198.207.250,00	77.008.900,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	27.628.877.670,00	30.456.449.748,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	20.896.037.690,00	20.985.079.930,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	153.367.000,00	153.367.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	53.815.000,00	-
7	Dinas Sosial	484.557.500,00	138.302.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	130.014.600,00	130.014.600,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.009.968.600,00	2.596.357.100,00
10	Dinas Perhubungan	513.868.450,00	513.868.450,00
11	Dinas Kebudayaan	1.495.029.592,00	2.234.597.092,00
12	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	9.700.000,00	-
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	785.658.000,00	49.560.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.433.000,00	86.433.000,00
15	Dinas Pariwisata	15.700.000,00	15.700.000,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	63.369.625,00	-
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	286.427.840,00	-
18	Sekretariat Daerah	81.912.600,00	-
19	Badan Penghubung Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00



	Jumlah	72.397.801.549,65	89.827.616.353,40
23	Badan Pendidikan dan Pelatihan	266.917.000,00	243.957.000,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	500.008.700,00	500.008.700,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	416.150.700,00	13.652.913.000,00
20	Inspektorat	13.923.872.500,00	13.919.179.000,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp72.397.801.549,65 termasuk di dalamnya berupa DED sebesar Rp58.205.991.886,66 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp14.191.809.662,99, dengan rincian pada OPD sebagai berikut :

Tabel 5.116
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD

NO	NAMA OPD	DED (Rp)	KDP (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	775.501.951,66	577.406.280,99
2	Dinas Kesehatan	198.207.250,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	27.531.332.670,00	97.545.000,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	20.896.037.690,00	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	153.367.000,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	53.815.000,00	-
7	Dinas Sosial	484.557.500,00	-
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	130.014.600,00	-
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.009.968.600,00	-
10	Dinas Perhubungan	513.868.450,00	-
11	Dinas Kebudayaan	1.455.113.710,00	39.915.882,00
12	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	9.700.000,00	-
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	785.658.000,00	-
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.433.000,00	-
15	Dinas Pariwisata	15.700.000,00	-
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	63.369.625,00	-
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	286.427.840,00	-
18	Sekretariat Daerah	81.912.600,00	-
19	Badan Penghubung Daerah	45.000.000,00	-
20	Inspektorat	446.930.000,00	13.476.942.500,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	416.150.700,00	-
22	Badan Kepegawaian Daerah	500.008.700,00	-
23	Badan Pendidikan dan Pelatihan	266.917.000,00	-
	Jumlah	58.205.991.886,66	14.191.809.662,99

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:



การ เกาะ การ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกา

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp577.406.280,99 terdiri dari Pembangunan Gedung SMKN 6 sebesar Rp528.369.900,00, dan Pembangunan Gedung SMKN 4 sebesar Rp49.036.380,99.

b. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM sebesar Rp97.545.000,00 merupakan pembangunan SPAM Regional pada Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah Dan Air Minum Perkotaan.

c. Dinas Kebudayaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp39.915.882,00 merupakan biaya appraisal tanah.

d. Inspektorat

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Inspektorat sebesar Rp13.476.942.500,00 merupakan pembangunan gedung kantor.

Mutasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut :

Saldo awal per 31 Desember 2019	89.827.616.353,40
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2020	-
Kapitalisasi dari Jasa Konsultasi	3.336.988.810,00
Reklas dari Gedung Bangunan	62.386.085.779,00
Reklas dari JIJ	69.778.000,00
Reklas dari belanja barang dan jasa	168.963.000,00
Reklas dari Beban Pemeliharan	11.791.384,00
Hibah	321.994.096,00
Reklas dari Beban Makan dan Minum	28.853.350,00
Penyesuaian saldo awal	507.134.400,00
Reklas dari PM	120.526.000,00
Reklas dari ATB	144.710.840,00
Koreksi dari jurnal penyesuaian	39.157.670,00
	67.135.983.329,00
Pengurangan:	
Reklas ke Gedung dan Bangunan	5.771.162.911,00
Mutasi ke dikmen GK	4.040.000.000,00
Mutasi ke dikmen KP	900.000.000,00
Mutasi ke dikmen	22.969.088.888,00
Reklas ke JIJ	19.652.847.434,00
Reklas PM	375.032.431,75
Penyesuaian saldo awal	5.670.637.200,00
Hibah	574.010.358,00
Reklas ke JIJ	10.985.183.170,00
Mutasi ke OPD lain dari Distarung	89.042.240,00



การ เกาะ การ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกา

Saldo akhir per 31 Desember 2020	72.397.801.549,65
	84.565.798.132,75
Penghapusan	13.354.894.500,00
Reklas ke PM dan Gedung dan Bangunan	183.899.000,00

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.479.112.482.546,08 termasuk di dalamnya saldo Aset Tetap yang berasal dari Belanja Tidak Terduga dan sumbangan/hibah untuk penanganan *Covid 19*, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.117

Rincian Aset Tetap Berasal Dari Belanja Tidak Terduga

UDAIAN	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)		KETERANGAN	
URAIAN	BTT HIBAH		JUMLAH	KETERANGAN	
SEKRETARIAT GUGUS TUGAS	2.745.937.491,91	1,00	2.745.937.492,91		
BPBD	1.723.586.091,91	1,00	1.723.586.092,91	Hibah Ambulans 1 unit	
Dinas Kominfo	1.018.391.400,00	-	1.018.391.400,00		
ВРКА	3.960.000,00	-	3.960.000,00		
DINAS KESEHATAN	3.298.619.548,00	2,00	3.298.619.550,00	Hibah Ventilator 2 unit	
EKONOMI	374.011.640,00	-	374.011.640,00		
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	125.261.640,00	-	125.261.640,00		
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	4.900.000,00	-	4.900.000,00		
Dinas Kelautan Dan Perikanan	-	-	1		
Dinas Koperasi Dan Umkm	157.500.000,00	-	157.500.000,00		
Dinas Pariwisata	-	-	-		
Dinas Industri Dan Perdagangan	-	-	ı		
Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal	86.350.000,00	-	86.350.000,00		
DINAS PENDIDIKAN	242.314.251,23	-	242.314.251,23		
PENGAMANAN DAN GAKKUM	243.100.000,00	-	243.100.000,00		
SATPOL PP	92.150.000,00	-	92.150.000,00		
Dinas Perhubungan	150.950.000,00	-	150.950.000,00		
Badan Kesbangpol	-	-	-		
SOSIAL KEMASYARAKATAN	25.500.000,00	-	25.500.000,00		
LOGISTIK	85.763.636,36	-	85.763.636,36		
JUMLAH	7.015.246.567,50	3,00	7.015.246.570,50		

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (3.244.299.445.623,34)

Rp(3.601.196.628.480,31) Rp

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp(3.601.196.628.480,31) merupakan pengakuan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118

Rincian Akumulasi Penyusutan



กลา พยาหญาพ๛ทางพาผูกของทุพทางทางพา

No	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.001.119.783.276,02)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(836.575.318.509,49)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.759.532.807.703,56)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(3.968.718.991,20)
	Jumlah	(3.601.196.628.480,27)

5.3.1.4 Dana Cadangan

Rp0,00

Rp0,00

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Rp529.075.861.801,14

Rp593.524.252.508,91

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp529.075.861.801,14 meliputi Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain dan Aset Lainnya.

Mutasi Aset Lainnya sebagai berikut:

Saldo awal per 31 Desember 2019	593.524.252.508,91
Penambahan:	
Belanja Modal Tahun 2020	332.989.336,00
Usulan penghapusan	7.314.546.503,11
Penghapusan Akm Penyusutan All	5.336.080.700,56
Penyesuaian Saldo Awal	242.321.795,00
Reklas dari PM ke ATB	39.600.000,00
Reklas hak cipta dari beban jasa sertifikasi	414.478.798,00
Reklas dari KDP dan Peralatan Jaringan ke ATB	142.395.000,00
ATB Lainnya dari BTT	989.303.000,00
Reklas dari AT Lainnya	590.936.285,00
Reklas dari PM	17.058.600,00
Mutasi dari Dikpora (software)	123.511.850,00
Hibah APBN	680.050.000,00
Reklas dari PM	234.189.882,00
Reklas dari KDP (Kajian)	5.670.637.200,00
Penyesuaian SA berkurang Akm ALL	154.383.130,00
Mutasi Akm ALL ke BPKA	575.706.000,00
Asen Non Lancar Lainnya	3.136.672.600,00
Pencatatan bunga rekening jaminan	643.466.997,00
Reklas dari Tanah ke Kemitraan -sewa	6.774.000.000,00
Pinjam pakai dr OPD luar	3.160.312.914,00
Akumulasi Penyusutan Sewa keluar OPD	21.212.233.614,00
Reklas dari Tanah ke Aset Lain-Lain	69.033.828,00



กลายเกาะสารเกาะสา

Mencatat kembali Extracom ke Aset Lain-Lain	32.668.214,00
Aset Tak Berwujud	834.407.500,00
	58.720.983.746,67
Pengurangan:	
Akumulasi penyusutan ALL	5.507.649.910,58
Penghapusan ALL	14.095.005.864,09
Reklas dari Kemitraan ke Gedung dan Bangunan	87.743.866.245,00
Penyesuaian Saldo Awal	1.337.420.162,70
Penyesuaian saldo awal Akumulasi Aset lain2	50.528.061,16
Reklas ke beban jasa	889.336,00
Akum penyusutan sewa	157.631.508,00
Mutasi ke Kominfo (Software) dari Disbud	191.210.000,00
Mutasi ke Kominfo (Kajian) dari Disbud	473.247.500,00
Mutasi ALL ke BPKA	575.706.000,00
Koreksi Aset Non Lancar Lainnya (Lebih Catat)	54.797,00
Aset Non Lancar lainnya berkurang karena jaminan dicairkan	336.430.326,00
Reklas ATB ke KDP	559.912.240,00
Reklas ke JIJ	25.500.000,00
Reklas Akm ALL ke Akm.pny Peralatan mesin	184.555.410,00
Sewa mutasi keluar OPD	10.813.404.510,00
Pembebanan Akum Penyusutan Sewa	839.044.015,87
Penghapusan Akum Penyusutan Kemitraan	110.015.701,84
Penyesuaian SA Akum Peny Sewa	2.366.400,00
Akumulasi Penyusutan Sewa	4.311.204,20
Reklas dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga ke Gedung Bangunan	76.152.543,00
Koreksi BPK	12.012.500,00
Penghapusan ALL	2.335.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.533.219,00
Reklas Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin ke Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	59.592.000,00
Pengurangan ATB	5.000.000,00
	123.169.374.454,44
Saldo akhir per 31 Desember 2020	529.075.861.801,14

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.5.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp

Rp257.752.887.426,96

Rp325.881.130.128,87

Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp257.752.887.426,96 merupakan nilai tercatat Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dengan total harga perolehan sebesar Rp270.777.930.697,93 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sampai dengan per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.025.043.270,97, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.119

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga



กลา ผลาหูเพลาเพลาเพนีย์ กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม

No	Nama OPD	Sewa	Kerjasama Pemanfaatan	BGS	Pinjam Pakai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	349.847.300,00	532.733.106,00	•	-	(355.978.331,19)	526.602.074,81
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.248.483.752,00	-	•	-	(600.769.926,24)	1.647.713.825,76
3	Dinas Perhubungan	5.823.044.000,00	-	-	-	(22.886.300,00)	5.800.157.700,00
4	Dinas Sosial	2.950.084,00	-	-	-	-	2.950.084,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.893.035.007,00	-	-	-	(2.262.018.887,76)	6.631.016.119,24
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	64.341.655.798,00	-	3.518.000.000,00	182.090.607.113,00	(8.850.724.356,81)	241.099.538.554,19
7	Badan Penghubung Daerah	2.911.574.537,93	-	-	-	(866.665.468,97)	2.044.909.068,96
8	Satpol PP	-	-	-	66.000.000,00	(66.000.000,00)	-
	Jumlah	84.570.590.478,93	532.733.106,00	3.518.000.000,00	182.156.607.113,00	(13.025.043.270,97)	257.752.887.426,96

Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut meliputi sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan pinjam pakai dengan data sebagai berikut:

a. Sewa sebesar Rp84.570.590.478,93

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk sewa per 31 Desember 2020 sebesar Rp84.570.590.478,93 merupakan aset daerah yang tidak dipisahkan yang pemanfaatannya dalam bentuk sewa pada beberapa OPD sebagai berikut :

Tabel 5.120 Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nilai Aset (Rp)	Keterangan Aset	Penyewa
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (BLPT)	349.847.300,00	Tanah	Talenta Body Repair dan PT. Naragita
2	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	2.248.483.752,00	Bangunan Mess Kaliurang	Masyarakat umum
			Gedung Wisma Kaliurang	
3	Dinas Perhubungan	5.823.044.000,00	Tanah lahan parkir Bandara Adi Sucipto	PT. Angkasa Pura
4	Dinas Sosial	2.950.084,00	Tanah dan bangunan, Eks Rumah Dinas di Jl. Munggur 32, Yogyakarta	BUKP Gondokusuman



กกา พยาหูรุเพลารุเพลาระทุนูฦยเบฤพนาฦหาเก

5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.893.035.007,00	Bangunan Rusunawa Ledok Code	Masyarakat umum
			Bangunan Pesanggrahan Balai Istirahat Karyawan (BIK) dan Balai Istirahat Pegawai (BIP) Rumah Dinas Randubelang	Pegawai dan masyarakat umum
7	Badan Penghubung Daerah	2.911.574.537,93	GriyaJogja, Jl. Diponegoro No.52 Menteng, Jakarta Wisma Jogja, Jl. Pedati No.116 Jakarta Timur	Masyarakat umum Masyarakat umum
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	64.341.655.798,00	Tanah dan Bangunan	
	Jumlah	84.570.590.478,93		

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa pada BPKA sebagai berikut:

No	Aset	Alamat	Keterangan	Nilai Aset (Rp)		
BPKA II	BPKA INDUK					
TANAH						
1	Tanah	Gadingan, Wates, Kulon Progo	Pertanian Tebu	279.542.000,00		
2	Tanah	Hargotirto Kokap Kulonprogo	Gapoktan Manunggal	2.100.000.000,00		
3	Tanah	Jl. Panjaitan 74 Suryodiningratan YK	Bang Rum Din Gol II	51.886.250,00		
4	Tanah	Jl. Panjaitan 74 Suryodiningratan YK	Tanah Kosong	51.113.750,00		
5	Tanah	Komplek Kolombo No. 59 Caturtunggal, Depok, Sleman	Rumah Dinas	36.191.000,00		
6	Tanah	Jl. janturan 29a, Warung boto, Umbulharjo, Yogyakarta	Rumah Dinas	125.500.000,00		
7	Tanah	Jl. Warung Boto UH II/ 917 Yogyakarta	Rumah Dinas	150.000.000,00		
8	Tanah	Jl. janturan 29 Warung Boto, UH, Yogyakarta	Rumah Dinas	125.500.000,00		
9	Tanah	Jl. Warung boto UH II/918 Yogyakarta	Rumah Dinas	150.000.000,00		
10	Tanah	Jl. Kusumanegara 169 E, Yogyakarta	Rumah Dinas	525.000.000,00		
11	Tanah	Komplek Kolombo No. 58, Caturtunggal, Depok, Sleman	Rumah Dinas	14.000.000,00		
12	Tanah	Jl. kolombo 60, Caturtunggal, Depok, Sleman	Rumah Dinas	192.000.000,00		
13	Tanah	Gemawang karangjati, Sinduadi, Sleman	Anik Suharmini	20.100.000,00		
14	Tanah	Gemawang karangjati, Sinduadi, Sleman	Sri Wahyu	20.100.000,00		
15	Tanah	Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Rumah Dinas	1.000.000,00		
16	Tanah	Jl. P Romo 65 Kotagede, Yogyakarta	Rumdin DPRD Golongan 1	101.700.000,00		
17	Tanah	JL. Sriti Caturtunggal Depok Sleman	Rumah Dinas	2.251.200.000,00		
18	Tanah	Jl. DI Panjaitan 66 Yogyakarta	Disewa	3.266.000,00		
19	Tanah	Jl. Kolombo 61, Caturtunggal Depok, Selman	Rumah Dinas	325.000.000,00		
20	Tanah	Glugo, panggungharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas	449.000.000,00		



กก พยาหูขนะทางพะทางตุมูกุยเบกุพทาฦหาเต

21	Tanah	Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Rumah Dinas	334.500.000,00
22	Tanah	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Rumah Dinas	9.240.000,00
23	Tanah	Permata Hijau, Juwengan, Purwomartani, Sleman	Rumah Dinas	52.020.000,00
24	Tanah	Komplek Kolombo 56, Depok, Sleman, DIY	Rumah Dinas	2.450.000,00
25	Tanah	Jalan Tunjung No. 02 Baciro Yogyakarta	Rumah Tinggal a.n Setio Agus Samapto, SH	475.378.040,00
26	Tanah	Jalan Mrican Baru XI/2 Mrican Baru Caturtunggal Depok Yogyakarta	Rumah Tinggal	1.115.200.000,00
27	Tanah	Jl. Patehan Tengah 13, Kraton Yogyakarta	-	51.500.000,00
28	Tanah	Kedunggong, Wates, Kulon Progo	RM Saiyo, SPBU, TK ABA Klayonan, RM Gudeg Kendil, Kios Assesories, Halaman PKU	4.654.320.000,00
29	Tanah	Dipan, Wates, Kulon Progo	Pertokoan, Pasar Kelapa, Gapensi	6.151.340.000,00
30	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Kios desa 9 buah	89.600.000,00
31	Tanah	Dipan, Wates, Kulon Progo	Kios 2 buah dan bangunan kios 1/2 jadi	505.827.000,00
32	Tanah	Kedunggong, Wates, Kulon Progo	Kios desa 7 buah	471.417.000,00
33	Tanah	Kedunggong, Wates, Kulon Progo	Bengkel Mobil	451.526.000,00
34	Tanah	Wonosidi Lor, Wates, Kulon Progo	Tanah Bangunan Bengkel	810.020.000,00
35	Tanah	Gadingsari, Sanden, Bantul	Swasta	1.500.000.000,00
36	Tanah	Jl.AM sangaji 45 Yogyakarta	STIKES	918.000.000,00
37	Tanah	Jl. Padang 4 Caturtunggal, depok, Sleman	-	161.600.000,00
38	Tanah	wates, wates Kulon Progo	Koperasi Sumber Rezeki	45.000.000,00
39	Tanah	Gedungkiwo, mantrijeron, Yogyakarta	KPN makaryo	81.000.000,00
40	Tanah	Dipan, Wates, Kulon Progo	Rumah Percontohan, Puskesmas, Rumdin Kodim, BKM Nugroho, Kios Desa	3.628.742.000,00
41	Tanah	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Pusat Informasi Pelayanan Anak Usia Dini	1.517.952.000,00
42	Tanah	Giwangan, Umbulharjo, Sleman	Yayasan Ambar Binangun	2.316.100.000,00
43	Tanah	Giwangan, Umbulharjo, Sleman	Yayasan Ambar binangun	619.400.000,00
44	Tanah	Caturtunggal, Depok ,Sleman	Yayasan Darmapala	2.107.500.000,00
45	Tanah	Bleberan Playen Gunung Kidul	Obyek Wisata Sri Gethuk	662.100.400,00
46	Tanah	kel. sendang sari, pengasih, kulon progo	Sarang burung walet, EKS sabut kelapa,	1.724.000.000,00
47	Tanah	Kel. Sendangsari, pengasih, kulon progo	Sarang Burung Walet, Eks sabut kelapa, Eks gudang pangan	940.000.000,00
48	Tanah	Dipan, Wates, Kulon Progo	DPD Golkar	1.941.380.000,00
49	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	234.840.000,00
50	Tanah	Beji, Wates	Pertanian	345.565.000,00
51	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	266.090.000,00
52	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	264.860.000,00
		•	•	



53	Tanah	Beji, Wates, Wates, Kulon Progo	Pertanian	258.300.000,00
54	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	342.475.000,00
55	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	1.364.800.000,00
56	Tanah	Driyan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	156.045.000,00
57	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	38.786.000,00
58	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	192.713.000,00
59	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	138.334.000,00
60	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	60.844.000,00
61	Tanah	Gadingan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	240.960.000,00
62	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	183.443.000,00
63	Tanah	Mutihan, wates, Kulon Progo	Pertanian	92.185.000,00
64	Tanah	Durungan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	123.000.000,00
65	Tanah	Mutihan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	143.170.000,00
66	Tanah	Mutihan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	21.424.000,00
67	Tanah	Gadingan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	49.131.000,00
68	Tanah	Mutihan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	82.915.000,00
69	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	101.455.000,00
70	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	243.286.000,00
71	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	311.600.000,00
72	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	164.984.000,00
73	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	48.307.000,00
74	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	94.245.000,00
75	Tanah	Bulak Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	132.355.000,00
76	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	66.744.000,00
77	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	65.817.000,00
78	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	130.707.000,00
79	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	41.200.000,00
80	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	49.955.000,00
81	Tanah	Punukan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	65.682.000,00
82	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	184.782.000,00
83	Tanah	Punukan, Wates, Kulon Progo	Pertanian	109.224.000,00
84	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	69.372.000,00
85	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	39.114.000,00
86	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	87.241.000,00
87	Tanah	Terbah, Wates, Kulon Progo	Pertanian	38.950.000,00
88	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	109.120.000,00



กลายเกาะสารเกาะสารแก้มๆเกาะสารเ

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
89	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	703.840.000,00
90	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	85.116.000,00
91	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	56.498.000,00
92	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	208.369.000,00
93	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	65.190.000,00
94	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	71.012.000,00
95	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon progo	Pertanian	15.662.000,00
96	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	31.415.000,00
97	Tanah	Beji, Wates, Kulon progo	Pertanian	111.446.000,00
98	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	15.662.000,00
99	Tanah	Sebokarang, Wates, Kulon Progo	Pertanian	9.600.000,00
100	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	15.744.000,00
101	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	58.813.000,00
102	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	31.209.000,00
103	Tanah	Beji, Wates, Kulon Progo	Pertanian	31.209.000,00
104	Tanah	Sentolo, Sentolo, Kulon Progo	Base camp	487.755.000,00
105	Tanah	Jalan Kenari 5, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta	Taman Bunga (Selatan Mandala Krida)	6.774.000.000,00
106	Tanah	Srimulyo, Piyungan, Bantul	Tempat Parkir	1.386.325.000,00
				7.222.096.440,00
BANGU	NAN			
1	Bangunan	Jl. Malioboro Kepatihan Danurejan Yogyakarta	Gedung Perkantoran disewa BPD DIY	102.535.755,00
2	Bangunan	Jl. Raya Janti KM.4, banguntapan, bantul	Bangunan gedung	1.033.385.000,00
3	Bangunan	Jl. RingRoad Selatan, giwangan Yogyakarta	Gedung Kantor	840.913.920,00
4	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Gudang, Kepsek, Belajar& Adm	56.965.800,00
5	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Ruang Perpustakaan	27.542.400,00
6	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Kamar mandi, dapur, ruangan, ruangan	33.979.600,00
7	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Ruang UKS, Bayi, Balok	18.988.600,00
8	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Kamar mandi, Office, TK Kecil	54.967.000,00
9	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	TK Kecil Ruang Kelas	63.961.600,00
10	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Kantor, Kantor Ruang Kelas Musik	85.948.400,00
11	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Kamar penjaga sekolah, KM/WC Gudang	29.982.000,00
12	Bangunan	Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta	Ruang Tunggu	35.978.400,00
13	Bangunan	JI AM Sangaji Cokrodiningratan No. 45, Jetis, Yogyakarta	Gedung sekolah AM Sangaji	175.733.000,00
14	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan	33.250.000,00
15	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Rumah Negara Gol III Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	80.822.641,00



กลา

31	Bangunan	JI Sriti No 20 G, Demangan, Yogyakarta Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	pakai BAWASLU Eks Rumah Negara Gol II Tipe C Gedung Rumah Dinas	19.500.000,00 40.932.000,00
30	Bangunan	Jl. P.Romo No.65 Kotagede, Yogyakarta Jl Sriti No 20 G. Demangan, Yogyakarta	pakai BAWASLU Eks Rumah Negara Gol II	97.375.274,00
29	Bangunan	Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas I eks Rumah Dinas dipinjam	136.400.000,00
28	+ -	Krapyak, Panggunghario, Sewon, Bantul		,
	Bangunan		Rumah Dinas II	136.400.000,00
27	Bangunan	Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas III	136.400.000,00
26	Bangunan	Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul	Rumah Dinas V	202.390.876,00
26	+ -		Rumah Dinas V	202.390.876.00
25	Bangunan	Sleman	Rumah Dinas	431.752.706,00
	1	JI Podang No 4 Caturtunggal Depok		•
24	Bangunan	Komplek Kolombo 60,CT ,Depok, Sleman	Gedung Perumahan	90.039.179,00
23	Bangunan	Komplek Kolombo 58	Gedung Perumahan	52.966.126,00
22	Bangunan	Jl. Kusumanegara168E Yogyakarta	Gedung Perumahan	597.790.000,00
21	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Rumah Negara Gol III	121.500.000,00
21	+ -		Rumah Negara Gol III Tanah dan Bangunan	·
20	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan	33.250.000,00
19	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Rumah Negara Gol III	33.250.000,00
	-		Rumah Negara Gol III Tanah dan Bangunan	·
18	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan	33.250.000,00
17	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000,00
16	Bangunan	Pelemwulung Banguntapan Bantul	Tanah dan Bangunan Rumah Negara Gol III	33.250.000,00

No	Aset	Alamat	Keterangan	Nilai Aset (Rp)
KPPD E	BANTUL			
1	Tanah	Jl. Parangtritis Km 5 Druwo Sewon Bantul	Parkir	1.472.393,00
2	Bangunan	Jl. Parangtritis Km 5 Druwo Sewon Bantul	Fotocopi	1.283.517,00
				22.755.910,00
KPPD I	KULON PROGO			
1	Tanah	Giripeni Wates Kulon Progo	Parkir	161.106.846,00
2	Bangunan	Giripeni Wates Kulon Progo	Kantin, Foto Coppy, BPD dan ATM	194.276.692,00



กลา พยาหญาพ๛ทางพาผูกของทุงพาทุนางท

				355.383.538,00
KPPD	KOTA YOGYAI	KARTA		
1	Tanah	Jl Tentara Pelajar 13 Yogyakarta Kecamatan Gedongtengen	Parkir	6.711.300,00
2	Bangunan	Jalan Tentara Pelajar No. 13 Yogyakarta	Kantin, Foto Copy	39.440.000,00
				46.151.300,00
KPPD	GUNUNGKIDU	JL		
1	Tanah	Jl. Pemuda Baleharjo Wonosari Gunung Kidul	Parkir	33.714.182,00
2	Bangunan	Jl. Pemuda, Baleharjo, Wonosari Gunung Kidul	Kantin, Foto Copy	38.356.880,00
				72.071.062,00
KPPD	SLEMAN			
1	Tanah	Jalan Magelang KM 12,5 Krapyak Triharjo Sleman	KPPD Di Kabupaten Sleman	7.943.936,00
		Jalan Laksda Adi Sucipto KM 8,5 Maguwoharjo Depok Sleman	Parkir kendaraan bermotor	1.274.000.000,00
2	Bangunan	Jalan Laksda Adi Sucipto KM 8,5 Maguwoharjo Depok Sleman	Kantin dan Fotocopy	19.145.790,00
				1.301.089.726,00
		JUMLAH		1.797.451.536,000
		TOTAL		64.341.655.798,00

b. Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp532.733.106,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp532.733.106,00 merupakan Kerjasama Pemanfaatan aset pada BLPT-Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

c. Bangun Guna Serah sebesar Rp3.518.000.000,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangunan Guna Serah sebesar Rp3.518.000.000,00 merupakan aset tanah yang dikelola secara BGS oleh PT. Yogya Indah Sejahtera dengan Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi Keuntungan antara Pemda DIY dengan PT. Yogya Indah Sejahtera dalam Pembangunan dan Pengelolaan Malioboro Hotel di Jalan Malioboro Yogyakarta Nomor 53 tanggal 12 September 1992. Masa perjanjian selama 30 tahun dan akan berakhir Tahun 2022. Setelah perjanjian berakhir maka tanah dan bangunan Malioboro Hotel beserta fasilitasnya menjadi milik Pemda DIY.

d. Pinjam Pakai sebesar Rp182.156.607.113,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Pinjam Pakai sebesar Rp182.156.607.113,00 merupakan aset milik Pemda DIY yang dipinjam oleh pihak lain terdapat pada BPKA sebesar Rp182.090.607.113,00, dan pada Satpol PP sebesar Rp66.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Luas/no. plat	Alamat / merk	Penggunaan	Nilai Aset (Rp)	
BPKA						
TANAH						



กลา ผลาหูเพลาเพลาเพนีย์ กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม

				Pemkab Kulon		_
1	Tanah	40.790	Dipan, Wates, Kulon Progo	Progo	32.713.580.000,	,00
2	Tanah	1.512	Kasongan, Bangunjiwo, Bantul	Pemkab Bantul	264.600.000,	,00
3	Tanah	10.040	Kalitirto, berbah, sleman	Pemkab Sleman	502.000.000,	,00
4	Tanah	2.510	pandowoharjo , sleman	Pemkab Sleman	125.500.000,	,00
5	Tanah	5.705	pendowoharjo, sleman	Pemkab Sleman	285.250.000,	,00
6	Tanah	9.510	sumberagung , mayudan, sleman	Pemkab Sleman	475.500.000,	,00
7	Tanah	6.770	margodadi , sayegan, sleman	Pemkab Sleman	338.500.000,	,00
8	Tanah	641	Jl Khudori 49, Dipan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	336.525.000,	,00
9	Tanah	2.885	Jl. Pakuwon beran kidul, tridadi sleman	Pemkab Sleman	288.500.000,	,00
10	Tanah	558	Jl. Veteran, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	511.178.000,	,00
11	Tanah	9.910	Bimomartani ngemplak ,sleman	Pemkab Sleman	495.500.000,	,00
12	Tanah	104	Gunungketur, Yogyakarta	Pemkot Yogyakarta	83.200.000,	,00
13	Tanah	2.250	Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta	Kanwil BPN Prov. DIY	1.800.000.000,	,00
14	Tanah	1.000	Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta	Badan Pusat Statistik Kota YK.	800.000.000,	,00
15	Tanah	1.380	Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta	BNN DIY	1.104.000.000,	,00
16	Tanah	10.001	Sumberrejo semin, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	200.020.000,	,00
17	Tanah	2.145	Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta	PMI	1.716.000.000,	,00
18	Tanah	749	Jl Kyai Mojo, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta	Pemkot Yogyakarta	1.761.698.000,	,00
19	Tanah	2.590	Karangsewu galur kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	103.600.000,	,00
20	Tanah	10.317	Semanu, semanu , Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	206.340.000,	,00
21	Tanah	1.720	Jl. Timoho, Miliran, Umbulharjo, Yogyakarta	KPU DIY	473.000.000,	,00
22	Tanah	5.520	Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	276.000.000,	,00
23	Tanah	2.755	Argorejo, Sedayu, Bantul	Pemkab Bantul	68.755.000,	,00
24	Tanah	1.425	Margosari, Pengasih, KP	Pemkab Bantul	213.750.000,	,00
25	Tanah	1.225	Margosari, Pengasih, Kulon Progo	Pemkab Bantul	1.102.500.000,	,00
26	Tanah	770	Jl. Veteran Yogyakarta	Pemkot Yogyakarta	539.000.000,	,00
27	Tanah	9.935	Kulwaru, kulwaru, Wates, kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	1.490.250.000,	,00
28	Tanah	1.555	Karangsewu Galur kulon progo Dusun XII	Pemkab Kulon Progo	62.200.000,	,00
29	Tanah	10.219	Putat, putat gunung kidul	Pemkab Gunung Kidul	204.380.000,	,00



กลา ผลาหูเพลาเพลาเพนีย์ กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม

30	Tanah	19.562	Bandung, playen gunung kidul	Pemkab Gunung Kidul	586.860.000,	,00
31	Tanah	4.824	Murtigading, Sanden, Bantul	Pemkab Bantul	964.800.000,	,00
32	Tanah	4.204	Murtigading, Sanden, Bantul	Pemkab Bantul	1.261.200.000,	,00
33	Tanah	3.837	Jalan Jenggotan No.5 Pingit Jetis Yogyakarta	Oditurat Militer	1.055.175.000,	,00
34	Tanah	4.433	Jl. Parangtritis Timbulharjo sewon bantul	Pemkab Bantul	327.738.200,	,00
35	Tanah	517	Jl. Timoho, Miliran, Umbulharjo, Yogyakarta	KPU DIY	257.675.000,	,00
36	Tanah	517	Jl. Timoho, Miliran, Umbulharjo, Yogyakarta	KPU DIY	142.175.000,	,00
37	Tanah	264	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	Detazemen Zeni Bangunan 2/IV Yk	38.188.235,	,00
38	Tanah	429	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	Pemkab Sleman	62.055.882,	,00
39	Tanah	1.298	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	Pemerintah Desa Bokoharjo	187.758.824,	,00
40	Tanah	253	Bokoharjo, Prambanan, Sleman	Pemkab Sleman	36.597.059,	,00
41	Tanah	2.142	Jl Faridan M Noto No 11 Kotabaru, Yogyakarta	BSSN	583.000.000,	,00
42	Tanah	9.685	Harjobinangun, Pakem, Sleman	Pemkab Sleman	1.239.680.000,	,00
43	Tanah	8.049	Suryodiningratan, MJ Yogyakarta	ISI	2.012.250.000,	,00
44	Tanah	278	Semin , Gunungkidul	Pemkab Gunung Kidul	69.500.000,	,00
45	Tanah	2.159	Murtigading, Sanden, bantul	Pemkab Bantul	431.000.000,	,00
46	Tanah	2.542	Wiyoro Baturetno, Batul Jl. Wonosari KM. 6	Lanal Yogyakarta	2.591.800.000,	,00
47	Tanah	1.510	Punukan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	123.820.000,	,00
48	Tanah	1.524	Punukan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	124.968.000,	,00
49	Tanah	1.352	Mutihan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	532.688.000,	,00
50	Tanah	1.550	Kedungdowo, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	1.777.850.000,	,00
51	Tanah	1.397	Durungan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	339.471.000,	,00
52	Tanah	1.178	Durungan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	286.254.000,	,00
53	Tanah	2.794	Kedunggong, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	2.240.788.000,	,00
54	Tanah	2.915	Jl. Panjaitan No.49 Suryodingratan YK	Bawaslu DIY	583.000.000,	,00
55	Tanah	1.070	Jl. Tentara Pelajar, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	94.600.000,	,00
56	Tanah	3.765	Dipan, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	3.885.480.000,	,00



กกล พยาหูเพลาเพลาเพ่นๆผพาพพาหาเก

						-
57	Tanah	1.663	Giricahyo, Panggang, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	58.205.000),0(
58	Tanah	593	Giricahyo, Panggang, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	20.755.000),0(
59	Tanah	102	Giricahyo, Panggang, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	3.570.000),0(
60	Tanah	65	Giricahyo, Panggang, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	2.275.000),0(
61	Tanah	637	Ngestiharjo, Tanjungsari, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	15.925.000),0
62	Tanah	146	Ngestiharjo, Tanjungsari, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	3.650.000),0
63	Tanah	468	Ngestiharjo, Tanjungsari, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	11.700.000),0
64	Tanah	22.502	Pantai Krakal, Sidorejo, Tepus, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	675.060.000),0
65	Tanah	21.151	Kemadang, Tanjungsari, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	1.057.550.000),0
66	Tanah	9.696	Kemadang, Tanjungsari, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	480.810.000),0
67	Tanah	46.200	Rt.06/ Rw02, Pengasih, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	1.386.000.000),(
68	Tanah	62.663	Punukan, Wates, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	5.138.366.000),(
69	Tanah	30.097	Bangun Harjo, Sewon, Bantul	Pemkab Bantul	90.182.474.400),(
					169.414.038.600),0
BANGU	NAN					
1	Bangunan	123	Jl. Malioboro, Kepatihan, Yogyakarta	Kartamantul	103.904.250),
2	Bangunan	120	jl. Retnodumilah no 23 c, Pilahan Kotagede Yogyakarta	BKSDA Yogyakarta	46.550.000),
3	Bangunan	2542	Wiyoro, Baturetno, bantul	Lanal Yogyakarta	6.083.035.300),
4	Bangunan	510	Jl. Dl Panjaitan 49 YK	Bawaslu DIY	25.000.000),
5	Bangunan	650	Jl. Tentara Pelajar, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	901.546.350),
6	Bangunan	3637	Jln. Jenggotan 5-7 Yogyakarta	Oditurat Militer	450.000.000),
7	Bangunan	58	Wijirejo, Pandak, Bantul	Pemkab Bantul	78.702.000),
8	Bangunan	58	Wijirejo, Pandak, Bantul	Pemkab Bantul	78.702.000),
9	Bangunan	132	JI DI Panjaitan 49 Yk	Bawaslu DIY	25.000.000),
10	Bangunan	200	Jl. DI Panjaitan 49 YK	Bawaslu DIY	313.405.064	
11	Bangunan	278	Semin, Semin, Gunung Kidul	Pemkab Gunung Kidul	240.303.000	
	+		Jl. Brigjen Katamso, Belakang Kanwil	Gedung Belakang		+



13	Bangunan	845	Jl M Faridan M Noto 21 Kotabaru Yogyakarta	BSSN	1.658.571.049,	,00
14	Bangunan	65	Jl. Tentara Pelajar, Wates, Kulon Progo	Pemkab Kulon Progo	109.500.000,	,00
					10.489.303.013,	00
PERAL	ATAN MESIN					
1	Kendaraan	AB 1095 UH	Nissan Terrano	TNI AU	210.000.000,	,00
2	Kendaraan	AB 82	Toyota Kijang 7K	KPU	145.000.000,	,00
3	Kendaraan	AB 1870 UA	Toyota Innova G	Lanal Yogyakata	210.250.000,	,00
4	Kendaraan	AB 1987 UA	Toyota/ Kijang Innova G DSL	KPU	233.796.550,	,00
5	Kendaraan	AB 1988 UA	Toyota/Kijang Innova G DSL	KPU	233.796.550,	,00
6	Kendaraan	AB 1255 UH	Toyota Innova 2.0 G M/T	KPU	247.139.300,	,00
7	Kendaraan	AB 1253 UH	Toyota Innova 2.0 G M/T	Korem 072 PMK	247.139.300,	,00
8	Kendaraan	AB 1363 UH	Toyota Rush 1,5 G	KPU	211.035.400,	,00
9	Kendaraan	AB 1364 UH	Toyota Avanza 1.3 E	KPU	155.035.400,	,00
10	Kendaraan	AB-1726-YX	INNOVA 2.0 GM/T LUXURY	BPN	276.073.000,	,00
11	Kendaraan	AB 2621 UA	Honda	SEKRETARIAT KPU	9.600.000,	,00
12	Kendaraan	AB 2360 UB	Honda ND125	SEKRETARIAT KPU	8.400.000,	,00
					2.187.265.500,	00
			JUMLAH		182.090.607.113,	00
SATPO	L PP			I		
PERAL	ATAN MESIN					L
1	Kendaraan	AB 1660 UA	Suzuki Station Wagon (APV)	BNNP	66.000.000,	,00
	1		JUMLAH		66.000.000,	,00

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

Rp82.178.412.601,00

Rp74.340.011.191,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tak Berwujud adalah software komputer, website, lisensi dan franchise, hak cipta, paten dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp82.178.412.601,00 merupakan Hak Cipta dan Aset Tidak Berwujud Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121
Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hak Cipta	131.849.000,00
2	Software	31.811.047.516,00
3	Kajian	43.238.888.045,00



	Jumlah	82.178.412.601,00
5	Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.726.446.200,00
4	Website	1.270.181.840,00

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 pada masing-masing OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.122 Aset Tidak Berwujud per OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	5.936.174.300,00	4.846.123.950,00
2	Dinas Kesehatan	1.576.428.255,00	1.488.267.155,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	17.448.429.735,00	11.892.485.035,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	162.090.000,00	162.090.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	149.075.000,00	149.075.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.363.803.000,00	204.550.000,00
8	Dinas Sosial	36.966.000,00	36.966.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150.230.000,00	150.230.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	662.762.750,00	662.762.750,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.996.135.250,00	4.411.336.650,00
12	Dinas Perhubungan	2.153.442.308,00	2.153.442.308,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.320.202.500,00	6.177.807.500,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	542.494.000,00	533.990.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	2.385.119.540,00	2.385.119.540,00
16	Dinas Kebudayaan	11.492.705.925,00	11.378.013.425,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.685.524.462,00	2.685.524.462,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	643.113.500,00	668.613.500,00
19	Dinas Pariwisata	2.017.301.050,00	2.017.301.050,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.206.325.780,00	1.206.325.780,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	411.793.500,00	556.504.340,00
22	Sekretariat Daerah	2.575.767.910,00	2.404.318.910,00
23	Badan Penghubung Daerah	-	-
24	Sekretariat DPRD	1.120.433.245,00	1.120.433.245,00
25	Inspektorat	460.855.200,00	411.201.200,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.339.114.325,00	9.339.114.325,00



No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.942.232.816,00	5.898.522.816,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	775.416.500,00	775.416.500,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	624.475.750,00	624.475.750,00
	Jumlah	82.178.412.601,00	74.340.011.191,00

Tabel 5.123 Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD

No	Nama OPD	Hak Cipta (Rp)	Software (Rp)	Kajian (Rp)	Website (Rp)	Aset Tak Berwujud Lainnya (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	-	5.105.194.450,00	710.818.000,00	-	120.161.850,00
2	Dinas Kesehatan	-	1.142.455.105,00	214.694.050,00	33.618.000,00	185.661.100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	-	290.837.660,00	17.157.592.075,00	-	-
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	162.090.000,00	ı	-	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	51.697.500,00	-	-	97.377.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	204.925.000,00	-	169.575.000,00	989.303.000,00
8	Dinas Sosial	-	36.966.000,00		-	-
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	150.230.000,00	-	-	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	31.850.000,00	522.412.750,00	108.500.000,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	651.208.000,00	3.259.629.250,00	36.298.000,00	49.000.000,00
12	Dinas Perhubungan	-	567.129.808,00	1.586.312.500,00	-	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	6.320.202.500,00	-	-	-
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	444.494.000,00	i	-	98.000.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	-	341.811.000,00	1.754.179.000,00	289.129.540,00	-
16	Dinas Kebudayaan	-	2.156.486.875,00	6.768.021.800,00	191.477.500,00	2.376.719.750,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	1.280.350.022,00	117.239.440,00	-	1.287.935.000,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	376.349.500,00	81.299.000,00	132.432.000,00	53.033.000,00
19	Dinas Pariwisata	-	204.605.000,00	1.812.696.050,00	-	-
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	109.537.000,00	918.788.780,00	138.900.000,00	39.100.000,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	333.893.500,00	20.000.000,00	•	57.900.000,00
22	Sekretariat Daerah	131.849.000,00	1.486.561.910,00	917.757.000,00	1	39.600.000,00
23	Badan Penghubung Daerah	-	-	1		-
24	Sekretariat DPRD	-	412.405.245,00	519.036.200,00	109.851.800,00	79.140.000,00
25	Inspektorat	-	460.855.200,00	-	-	-
26	Paniradya Kaistimewan	-	-	-	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	2.991.010.625,00	6.348.103.700,00	-	-
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	-	5.352.077.816,00	381.105.000,00	-	209.050.000,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	-	746.166.500,00	-	29.250.000,00	-
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	-	399.657.300,00	149.203.450,00	31.150.000,00	44.465.000,00
	Jumlah	131.849.000,00	31.811.047.516,00	43.238.888.045,00	1.270.181.840,00	5.726.446.200,00



5.3.1.4.4 Aset Lain-lain

Rp170.052.579.232,24

Rp177.654.783.122,10

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/yang akan dihapus dan aset tetap dalam kondisi rusak berat.

Saldo Aset Lain-lain sebesar Rp170.052.579.232,24 berasal dari nilai perolehan Aset Lain-lain sebesar Rp184.852.418.057,95 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp14.799.838.825,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.124

Rincian Nilai Buku Aset Lain-lain per OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.806.583.402,98	6.494.061.614,20
2	Dinas Kesehatan	686.097.850,00	594.188.858,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	159.003.233.249,67	158.716.242.424,27
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.902.600,00	458.446,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	72.447.758,00	150.644.077,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76.616.500,00	74.525.000,00
8	Dinas Sosial	399.072.000,00	350.477.782,34
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.786.579,17	-
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	3.220.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	613.658.647,00	623.894.491,00
12	Dinas Perhubungan	857.974.650,00	857.974.650,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	361.052.621,00	123.107.000,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	147.500,00	-
16	Dinas Kebudayaan	324.917.989,36	49.749.364,50
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.559.068.468,00	3.529.928.603,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	190.106.762,00	190.106.762,00
19	Dinas Pariwisata	-	34.761.000,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	757.008.444,65	129.431.678,65
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	6.963.450,00
22	Sekretariat Daerah	234.494.368,97	8.033.341,97
23	Badan Penghubung Daerah	-	-
24	Sekretariat DPRD	-	-
25	Inspektorat	2.536.571,44	-
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	562.500,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	84.711.670,00	5.711.552.079,17
29	Badan Kepegawaian Daerah	161.600,00	4.900.000,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	-	-
	Jumlah	170.052.579.232,24	177.654.783.122,10



การและ การเกาะ
5.3.1.4.5 Aset Non Lancar Lainnya

Rp19.091.982.540,94

Rp15.648.328.066,94

Saldo Aset Non Lancar Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.091.982.540,94 merupakan Uang Jaminan terkait dengan ijin pertambangan. Aset Non Lancar Lainnya-Uang Jaminan tersebut dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian. Uang Jaminan Kesungguhan sebesar Rp793.051.590,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp10.332.516.237,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp7.966.414.713,18. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.125
Rincian Jaminan Kesungguhan per 31 Desember 2020

BPD DIY	CABANG UTAMA				
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1	001311007454	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKAJAYA SARANA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2	001311007456	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GATOT SUBANDI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
3	001311007461	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOHAN SCORPHY ASMARA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
4	001311007463	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERFAN PRABOWO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
5	001311007475	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DESTI PUJILESTARI RR	5.000.000,00	-	5.000.000,00
6	001311007481	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARMIAT YELI FIRNADI	5.000.000,00	-	5.000.000,00
7	001311007521	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A	5.000.000,00	-	5.000.000,00
8	001311007522	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON	5.000.000,00	-	5.000.000,00
9	001311007523	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
10	001311007524	DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
11	001311007525	DINAS PUP ESDM DIY QQ DRS. H. MULYONO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
12	001311007539	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAAD SUDYARTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
13	001311007540	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
14	001311007544	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GALANG PRAYEDHA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
15	001311007553	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON	5.000.000,00	-	5.000.000,00
16	001311007581	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI MARWANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
17	001311007606	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA INDRA L	5.000.000,00	-	5.000.000,00
18	001311007609	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM	5.000.000,00	-	5.000.000,00
19	001311007613	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WISNU SUBIANTO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
20	001311007630	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ LUSIUS WIDIYANA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
21	001311007647	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	5.000.000,00	-	5.000.000,00
22	001311007661	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SETYOKO	5.000.000,00	-	5.000.000,00
23	001311007719	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA	5.000.000,00	-	5.000.000,00
24	001311007743	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG Q CV SELO MANDIRI S	5.000.000,00	-	5.000.000,00
25	001311007748	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CINTIA DEWATA M	5.000.000,00	-	5.000.000,00



บ๊ตกหูงพะทงพะทงพุ่มๆผบทพงฑุเกเต

26	001311007757	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
27	001311007772	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SARDI	5.000.000,00	- 5.000.000,00
28	001311007830	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
29	001311007833	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
30	001311007841	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BERKAH PUTRA MAJU	5.000.000,00	- 5.000.000,00
31	001311007844	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TAMBANG JAYTRASS I	5.000.000,00	- 5.000.000,00
32	001311007845	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONI BIMO SAPTOTO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
33	001311007863	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KULONPROGO BUMI S	5.000.000,00	- 5.000.000,00
34	001311007875	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	5.000.000,00	- 5.000.000,00
35	001311007952	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARI EDI PAMBUDI	5.000.000,00	- 5.000.000,00
36	001311008076	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
37	001311008077	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. WATULANWEDHI	5.000.000,00	- 5.000.000,00
38	001311008078	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TUNGGUL JAYA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
39	001311008080	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV NDEREK LANGKUNG	5.000.000,00	- 5.000.000,00
40	001311008084	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. ALAM CAHAYA K	5.000.000,00	- 5.000.000,00
41	001311008103	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANAR HARIMURTI	5.000.000,00	- 5.000.000,00
42	001311008112	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ALOYSIUS YUNIARTO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
43	001311008113	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS CANISIUS APRI	5.000.000,00	- 5.000.000,00
44	001311008114	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
45	001311008115	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
46	001311008125	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BUDI UTOMO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
47	001311008155	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ AHMAD SHOKHEH	5.000.000,00	- 5.000.000,00
48	001311008191	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARIS YULIANTO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
49	001311008199	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOYON SETIAWAN	5.000.000,00	- 5.000.000,00
50	001311008208	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKIJATMO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
51	001311008218	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
52	001311008219	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
53	001311008227	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TUGIYONO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
54	001311008228	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY DJUNARKO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
55	001311008233	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	5.000.000,00	- 5.000.000,00
56	001311008234	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HATAM	5.000.000,00	- 5.000.000,00
57	001311008246	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI	5.000.000,00	- 5.000.000,00
58	001311008247	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ FIRMAN ARDESTA P	5.000.000,00	- 5.000.000,00
59	001311008254	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PUTRA POTROGATEN	5.000.000,00	- 5.000.000,00
60	001311008312	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURYADI	5.000.000,00	- 5.000.000,00
61	001311008355	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TITIM DWI SISWANTI	5.000.000,00	- 5.000.000,00
62	001311008363	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGRAH BAGAS W	5.000.000,00	- 5.000.000,00
63	001311008380	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ IRFAN NUGROHO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
64	001311008381	DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ PT. LINTANG BUMI S	5.000.000,00	- 5.000.000,00
65	001311008392	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. REKA TATA MEDIA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
66	001311008332	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG KRISMIYANTA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
67	001311008439	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EKO SANTOSO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
68	001311008433	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT	5.000.000,00	- 5.000.000,00
69	001311008493	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT	5.000.000,00	- 5.000.000,00
70	001311008494	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAROWAN NORTHDATAT	5.000.000,00	- 5.000.000,00
71	001311008494	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEHAT SEHAT S	5.000.000,00	- 5.000.000,00
72	001311008597	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL	5.000.000,00	- 5.000.000,00
73	001311008598	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL	5.000.000,00	- 5.000.000,00
74	001311008398	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YULI RAHMAD WIDADA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
75	001311008671	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI LAKSONO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
/3	00131100071	DIVING TOF ESDIVIDITIONISDING QQ DIVITEMISDING	3.000.000,00	3.000.000,00



กลา ผลาหูเพลาเพลาเพนีย์ กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม

76	001311008715	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUTANTO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
77	001311008726	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S	5.000.000,00	- 5.000.000,00
78	001311008727	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KRESNA BHARA PUTR	5.000.000,00	- 5.000.000,00
79	001311008763	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GIYOTO WIRANTO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
80	001311008808	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. TUNAS AGRAPANA SENTOSA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
81	001311008809	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. GEO PRIMA PERSADA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
82	001311008871	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. HARTAMA MAKMUR ABADI	5.000.000,00	- 5.000.000,00
83	001311008910	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. EMPAT JAYA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
84	001311008913	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. DEWATA SARI PRIMA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
85	001311008925	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. GRAHA SEJAHTERA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
86	001311009018	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. CAKRAWALA SEMESTA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
87	001311009051	DINAS PUP ESDM DIY QQ CV. ADINDA PUTRA PERKASA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
88	001311009064	DINAS PUP ESDM DIY QQ CV. WALUYO LESTARI	5.000.000,00	- 5.000.000,00
89	001311009065	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. GAWI MAJU KARSA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
90	001311009083	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. GERBANG MENOREH	5.000.000,00	- 5.000.000,00
91	001311009086	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. SEDEKAH BUMI PUTRA MANDIRI	5.000.000,00	- 5.000.000,00
92	001311009089	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT ARSA KAYANA PROGO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
93	001311009094	DINAS PUP ESDM DIY QQ EDY MULYANTO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
94	001311009250	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
95	001311009382	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
96	001311009404	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
97	001311009443	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
98	001311009472	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HIDAKA PUTRA JAYA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
99	001311009495	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
100	001311009510	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV DAENDELS INDONESIA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
101	001311009572	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P	5.000.000,00	- 5.000.000,00
102	001311009582	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA MUDA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
103	001311009600	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BANGUN JAYA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
104	001311009611	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI PAJANG NUSANTARA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
105	001311009632	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAUJANA PASIR SEJAHTERA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
106	001311009640	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INSAN CITA MERDEKA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
107	001311009742	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI	5.000.000,00	- 5.000.000,00
108	001311009792	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ANUGERAH BERKAH MATARAN	5.000.000,00	- 5.000.000,00
109	001311009799	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT INDOKARYA MITRA SEJAHTERA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
110	001311009809	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BOEMI BHAKTI PRATAMA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
111	001311009812	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT INDOKARYA MITRA SEJAHTERA	5.000.000,00	- 5.000.000,00
112	001311009824	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PONDASI KUAT	5.000.000,00	- 5.000.000,00
113	001311009826	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKSES KETIBAN MULYO	5.000.000,00	- 5.000.000,00
114	001311007412	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	4.500.000,00	- 4.500.000,00
115	001311007564	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL	4.500.000,00	- 4.500.000,00
116	001311007571	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO	4.076.000,00	- 4.076.000,00
117	001311006205	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANCA MITRA BUANA	3.675.000,00	- 3.675.000,00
118	001311006139	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI KALIMASADA	3.500.000,00	- 3.500.000,00
119	001311006566	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BATU PRIMA M	3.500.000,00	- 3.500.000,00
120	001311006986	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	3.500.000,00	- 3.500.000,00
121	001311006995	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA	3.500.000,00	- 3.500.000,00
122	001311007156	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI	3.350.000,00	- 3.350.000,00
123	001311006985	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	3.250.000,00	- 3.250.000,00
124	001311006517	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P	3.200.000,00	- 3.200.000,00
125	001311005880	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B	3.132.000,00	- 3.132.000,00



กลายเลาเลาเล่าเล่าเล่าเล่าเลาเลาเลาเลาเลา

126	001311007104	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARJA	2.930.000,00	-	2.930.000,00
127	001311007262	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARIYADI	2.600.000,00	-	2.600.000,00
128	001311005919	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WIDYA SEGARA K	2.550.000,00	-	2.550.000,00
129	001311007014	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KENCONO BUWONO	2.500.000,00	-	2.500.000,00
130	001311007337	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SARI BHUMI K	2.350.000,00	-	2.350.000,00
131	001311006206	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SIWI ARYANI	2.250.000,00	-	2.250.000,00
132	001311007126	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PUTRA DIAFAN JAYA	2.100.000,00	-	2.100.000,00
133	001311006680	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGERAH S D A	1.750.000,00	-	1.750.000,00
134	001311007047	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JULIUS ADI SAPUTRA	1.750.000,00	-	1.750.000,00
135	001311006440	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT AGUNG BARA C	1.600.000,00	-	1.600.000,00
136	001311006994	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA	1.500.000,00	-	1.500.000,00
137	001311006642	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI	1.400.000,00	-	1.400.000,00
138	001311006632	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARMAN	1.000.000,00	-	1.000.000,00
139	001311007364	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO	924.000,00	-	924.000,00
140	001311005917	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	700.000,00	-	700.000,00
141	001311005926	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO	700.000,00	-	700.000,00
142	001311005927	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS JOKO LEGOWO	700.000,00	-	700.000,00
143	001311006710	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR	700.000,00	-	700.000,00
144	001311006858	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GUNUNG MULIA	700.000,00	-	700.000,00
145	001311006969	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K	700.000,00	-	700.000,00
146	001311007007	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K	700.000,00	-	700.000,00
147	001311007010	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ERNAWAN FAUZY	700.000,00	-	700.000,00
148	001311006406	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B	650.000,00	-	650.000,00
149	001311006709	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR	650.000,00	-	650.000,00
150	001311007056	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KELOMPOK SIDO KOPEN	650.000,00	-	650.000,00
151	001311007131	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GUNUNG SEJAHTERA	650.000,00	-	650.000,00
152	001311007210	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C	650.000,00	-	650.000,00
153	001311007211	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C	650.000,00	-	650.000,00
154	001311005962	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEJAHTERA INDRA P	630.000,00	-	630.000,00
155	001311007149	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ANDES LEO PURNAMA	600.000,00	-	600.000,00
156	001311005961	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TIRTA REJA	594.300,00	-	594.300,00
157	001311005952	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARDI	550.000,00	-	550.000,00
158	001311005965	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UMAR SYAMSUDIN H	550.000,00	-	550.000,00
159	1311005890	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADINDA PUTRA P	500.000,00	-	500.000,00
160	001311005915	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV RIMBA SARANA	500.000,00	-	500.000,00
161	001311005918	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	500.000,00	-	500.000,00
162	001311005920	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG Q CV SELO MANDIRI S	500.000,00	-	500.000,00
163	001311005934	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT HELIZA MANDIRI S	500.000,00	-	500.000,00
164	001311005943	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ DJIDUL	500.000,00	-	500.000,00
165	001311005949	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HERI SUWARNO	500.000,00	-	500.000,00
166	001311005953	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WIDAYAT	500.000,00	-	500.000,00
167	001311005956	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MITRA GRAHA D	500.000,00	-	500.000,00
168	001311005957	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUMARYANTA	500.000,00	-	500.000,00
169	001311005975	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DAMAI MULIA P	500.000,00	-	500.000,00
170	001311005985	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DEWATA SARI PRIMA	500.000,00	-	500.000,00
171	001311005986	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUKIT BATU INDAH	500.000,00	-	500.000,00
172	001311005988	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT FIRST LIME I	500.000,00	-	500.000,00
173	001311005998	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	500.000,00	-	500.000,00
174	001311005999	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	500.000,00	-	500.000,00
175	001311006001	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MERPATI JAYA M	500.000,00	-	500.000,00



กลายเกาะสารเกาะสารแก้มๆเกาะสารแก้มๆเกาะสารเกา

176	001311006003	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT JAYA	500.000,00	-	500.000,00
177	001311006007	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ UD GUNUNG GEDE	500.000,00	-	500.000,00
178	001311006009	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GIRI KENCANA	500.000,00	-	500.000,00
179	001311006010	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GIRI KENCANA	500.000,00	-	500.000,00
180	001311006012	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INTI CALCIUM I	500.000,00	-	500.000,00
181	001311006213	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV AJI PRATAMA	500.000,00	-	500.000,00
182	001311006264	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANI	500.000,00	-	500.000,00
183	001311006265	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	500.000,00	-	500.000,00
184	001311006408	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUGIARTO	500.000,00	-	500.000,00
185	001311006428	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PANCA MANUNGGAL M	500.000,00	-	500.000,00
186	001311006593	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANDU DUMADI L	500.000,00	-	500.000,00
187	001311006594	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PANDU DUMADI L	500.000,00	-	500.000,00
188	001311006700	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DAMAI MITRA C	500.000,00	-	500.000,00
189	001311006827	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GOTSA RANGGA K	500.000,00	-	500.000,00
190	001311006862	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUMANTO	500.000,00	-	500.000,00
191	001311006863	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WALIDI	500.000,00	-	500.000,00
192	001311006899	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUPRAPTO	500.000,00	-	500.000,00
193	001311006904	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI	500.000,00	-	500.000,00
194	001311006915	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SISWO HADI SUTRISNO	500.000,00	-	500.000,00
195	001311006942	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURWANTO	500.000,00	-	500.000,00
196	001311006964	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA	500.000,00	-	500.000,00
197	001311007006	DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ CV PUSANG KEMBAR	500.000,00	-	500.000,00
198	001311007029	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ NGADIMIN	500.000,00	-	500.000,00
199	001311007071	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TIRTA MULYA S	500.000,00	-	500.000,00
200	001311007072	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV MITRA BANGKIT S	500.000,00	-	500.000,00
201	001311007073	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG RATMAKA Y	500.000,00	-	500.000,00
202	001311007094	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAKRAWALA G S	500.000,00	-	500.000,00
203	001311007114	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUSILA HARI	500.000,00	-	500.000,00
204	001311007229	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARTOYO	500.000,00	-	500.000,00
205	001311007234	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA	500.000,00	-	500.000,00
206	001311007240	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MAJU MANUNGGAL A	500.000,00	-	500.000,00
207	001311007241	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RUDHI HARSONO	500.000,00	-	500.000,00
208	001311007244	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUMPU HARAPAN	500.000,00	-	500.000,00
209	001311007245	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM	500.000,00		500.000,00
210	001311007372	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KARYONO	500.000,00	-	500.000,00
211	001311007379	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SURADAL	500.000,00	-	500.000,00
		Jumlah	674.811.300,00	-	674.811.300,00



กลา ผลาหูเพลางผลางผมผู้ๆผบทุพงาฦหาเพ

1	001221024261	DIALAS DUD ESDAA DIV OO DDS UL AMULVOMO	1 200 000 00	1 200 000 00
1	001221034261	DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG OO CV KAYON	1.206.969,00	1.206.969,00
2	001221034259	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KAYON -	1.206.078,00	1.206.078,00
3	001221034392	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. SAHABAT OSCAR U	1.085.787,00	1.085.787,00
5	001221033342	DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ PT CAKRA WIJAYA K	1.071.342,00	1.071.342,00
6	001221034804	DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ CV MALI MADAN S	1.031.199,00 999.428.00	
7		DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ CV MAJU MAPAN S - DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ SANTOSO TRU JABIONO -	992.440,00	999.428,00
8	001221035316	DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ SANTOSO TRI HARJONO -	†	992.440,00
9		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HM SLAMET RAHARJO - DINAS BUB ESDM DIY JAMSUNG QQ DWI JAYSONG	967.012,00	967.012,00
10	001221034740	DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ DWI LAKSONO -	942.974,00 922.318,00	942.974,00
	001221032926	DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ CV ANUGERAHS D A	† - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	922.318,00
11	001221033274	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ RATMI SETYO HADI - DINAS DUB ESDM DIY JAMSUNG QQ DABUNAN NUBHIDAYAT	895.706,00	895.706,00
-	001221035877	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DARUWAN NURHIDAYAT -	852.532,00	852.532,00
13	001221034205	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DESTI PUJILESTARI RR - DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DE MADDIA JE SAMUDDA	849.187,00	849.187,00
14 15	001221033345	DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ PT MARALAUT SAMUDRA -	830.552,00	830.552,00
\vdash	001221036069	DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ CV RISKY MANUNGGAL	796.909,00	796.909,00
16	001221035237	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. WATULANWEDHI	780.926,00	780.926,00
17	001221032837	DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ PT BATU PRIMA M	756.293,00	756.293,00
18	001221033840	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM - DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BUMI MATARAM -	754.206,00	754.206,00
19 20	001221033982	DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ KARYONO -	733.605,00	733.605,00
21	001221033814	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SARI MULIA DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SELO MANDIRI S -	732.002,00	732.002,00
22	001221031890	DINAS PUP ESDIM DIY JAMSUNG QQ CV SELO MANDIRI S	725.447,00 720.486,00	723.447,00
23	001221034212		· · ·	,
24		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ASMARA SENA -	716.595,00	716.595,00
25	001221034091	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKAJAYA SARANA -	715.525,00	715.525,00
26	001221034092	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GATOT SUBANDI - DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG OO YOHAN SCORPHY ASMARA -	715.525,00	715.525,00
27	001221034140	Silvior of Essilvation and Advisory and International Control	715.500,00	715.500,00
28		DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ ERFAN PRABOWO -	715.500,00 705.550,00	715.500,00
	001221032886	DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ CV JAYA REJEKI -	1	705.550,00
29 30	001221034282	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAAD SUDYARTO -	697.267,00	697.267,00
31	001221034284	DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ ASDIE FITRI NUGROHO - DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ CALANG PRAYEDIJA	697.267,00	697.267,00
32	001221034288	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GALANG PRAYEDHA -	697.250,00 696.856,00	697.250,00 696.856,00
33		DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ SURADAL -	†	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
34	001221033971 001221034339	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SAWAL RIYANDOKO -	695.712,00	695.712,00
	001221034339	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI MARWANTO -	684.381,00	684.381,00
35 36	001221034380	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ LUSIUS WIDIYANA - DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SETYOKO - DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG SETYOKO	684.017,00 683.861,00	684.017,00
37	001221034400		†	683.861,00 680.113,00
-		DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CAHAYA INDRA L	680.113,00	679.035,00
38 39	001221034365		679.035,00	
40	001221035740	DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ IRFAN NUGROHO - DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ CV CENTRAL STONE P	674.105,00	674.105,00
	001221031745	DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ CV CENTRAL STONE P	667.786,00	667.786,00
41	001221032357	DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ PT PANCA MITRA BUANA -	647.906,00	647.906,00
42	001221034625	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV CINTIA DEWATA M - DINAS DUB ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA	645.830,00	645.830,00
43	001221034632	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ WAHID MUSTOFA DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SARDI -	645.813,00 645.785,00	645.813,00 645.785,00
44	001221034640		1	
45	001221033812	DINAS PUP ESDM DIV JAMSUNG QQ CV SAHABAT SEJAHTERA - DINAS DUB ESDM DIV JAMSUNG QQ VINI ASTUTI	640.872,00	640.872,00
46	001221035514	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YUNI ASTUTI - DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT VUI QNDBQQQ PUMUS	637.748,00	637.748,00
47	001221034789	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KULONPROGO BUMI S DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BERKAH PUTRA MAJU -	629.336,00	629.336,00
48	001221034751		625.371,00	625.371,00
49 50	001221034758	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TAMBANG JAYTRASS I	625.355,00	625.355,00
30	001221034759	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ DONI BIMO SAPTOTO -	625.355,00	625.355,00



กก พยาหูขนะทางพะทางตุมูกุยเบกุพทาฦหาเต

51	001221032788	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT MATARAM CITRA P	-	614.375,00	614.375,00
52	001221034927	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARI EDI PAMBUDI	-	613.091,00	613.091,00
53	001221032191	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI KALIMASADA	-	601.951,00	601.951,00
54	001221035238	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT TUNGGUL JAYA	-	596.994,00	596.994,00
55	001221035251	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV NDEREK LANGKUNG	-	596.988,00	596.988,00
56	001221035392	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ AHMAD SHOKHEH	-	580.912,00	580.912,00
57	001221035261	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. ALAM CAHAYA K	-	579.270,00	579.270,00
58	001221035304	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUBANAR HARIMURTI	-	577.058,00	577.058,00
59	001221035313	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ALOYSIUS YUNIARTO	-	577.044,00	577.044,00
60	001221035314	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PETRUS CANISIUS APRI	-	577.044,00	577.044,00
61	001221035340	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BUDI UTOMO	=	575.940,00	575.940,00
62	001221035448	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKIJATMO	-	564.860,00	564.860,00
63	001221035480	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TUGIYONO	-	564.798,00	564.798,00
64	001221035481	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY DJUNARKO	-	564.798,00	564.798,00
65	001221035438	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ ARIS YULIANTO	-	559.862,00	559.862,00
66	001221035443	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YOYON SETIAWAN	-	559.830,00	559.830,00
67	001221035604	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PURYADI	-	548.785,00	548.785,00
68	001221035515	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ FIRMAN ARDESTA P	-	547.031,00	547.031,00
69	001221035533	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT PUTRA POTROGATEN	-	544.923,00	544.923,00
70	001221031849	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TRIKARSA REKA B	-	539.391,00	539.391,00
71	001221035685	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ANUGRAH BAGAS W	-	532.753,00	532.753,00
72	001221035673	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ TITIM DWI SISWANTI	-	527.729,00	527.729,00
73	001221031885	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ KRT JAYANINGRAT	-	525.220,00	525.220,00
74	001221035742	DINAS PUP ESDM JAMSUNG QQ PT. LINTANG BUMI S	-	514.930,00	514.930,00
75	001221035755	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. REKA TATA MEDIA	-	512.809,00	512.809,00
76	001221035888	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SEHAT SEHAT S	-	500.600,00	500.600,00
77	001221035816	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ BAMBANG KRISMIYANTA	-	498.875,00	498.875,00
78	001221035819	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EKO SANTOSO	-	496.781,00	496.781,00
79	001221037310	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV LEMBAH PROGO MULYO	-	469.338,00	469.338,00
80	001221036135	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ YULI RAHMAD WIDADA	-	455.616,00	455.616,00
81	001221036260	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KRESNA BHARA PUTR	-	441.093,00	441.093,00
82	001221031963	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT DEWATA SARI PRIMA	-	437.447,00	437.447,00
83	001221036248	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUTANTO	-	434.606,00	434.606,00
84	001221036444	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GIYOTO WIRANTO	-	420.127,00	420.127,00
85	001221037516	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT WAHYU ALAM PURNAMA	-	416.937,00	416.937,00
86	001221036648	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT. HARTAMA MAKMUR A	-	412.112,00	412.112,00
87	001221036507	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS AGRAPANA S	-	408.850,00	408.850,00
88	001221036508	DINAS PUP ESDM DIY QQ PT. GEO PRIMA PERSADA	-	408.850,00	408.850,00
89	001221033559	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SUKARJA	-	402.351,00	402.351,00
90	001221036733	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV EMPAT JAYA	-	397.717,00	397.717,00
91	001221036756	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV GRAHA SEJAHTERA	-	397.678,00	397.678,00
92	001221031889	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WIDYA SEGARA K	-	384.853,00	384.853,00
93	001221036942	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV ADINDA PUTRA P	-	368.808,00	368.808,00
94	001221036899	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT CAKRAWALA SEMESTA	-	362.350,00	362.350,00
95	001221033947	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SARI BHUMI K	-	356.325,00	356.325,00
96	001221036986	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ EDY MULYANTO	-	354.439,00	354.439,00
97	001221036951	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV WALUYO LESTARI	-	348.990,00	348.990,00
98	001221036952	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT GAWI MAJU KARSA	-	348.990,00	348.990,00
99	001221036974	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV. GERBANG MENOREH	-	347.914,00	347.914,00
100	001221036976	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SEDEKAH BUMI P M	-	347.914,00	347.914,00



กก พยาหูขนะทางพะทางตุมูกุยเบกุพทาฦหาเต

101	001221036978	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ARSA KAYANA PROGO	-	347.908,00	347.908,00
102	001221033357	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KENCONO BUWONO	-	323.971,00	323.971,00
103	001221033857	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ HARIYADI	-	312.458,00	312.458,00
104	001221032358	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ SIWI ARYANI	-	284.129,00	284.129,00
105	001221037594	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA	-	267.883,00	267.883,00
106	001221037701	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV DAENDELS INDONESIA	-	253.505,00	253.505,00
107	001221037660	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV HIDAKA PUTRA JAYA	-	247.015,00	247.015,00
108	001221037891	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PROGO JAYA MUDA	-	240.178,00	240.178,00
109	001221039575	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT INDOKARYA MITRA SEJAHTERA	-	235.442,00	235.442,00
110	001221033590	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PUTRA DIAFAN JAYA	-	230.459,00	230.459,00
111	001221036735	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	-	229.349,00	229.349,00
112	001221037962	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV SAUJANA PASIR SEJAHTERA	-	226.870,00	226.870,00
113	001221037982	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV INSAN CITA MERDEKA	-	226.861,00	226.861,00
114	001221037920	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV BANGUN JAYA	-	221.417,00	221.417,00
115	001221037932	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BUMI PAJANG NUSANTARA	-	220.372,00	220.372,00
116	001221039593	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ CV PONDASI KUAT	-	173.577,00	173.577,00
117	001221039594	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SUKSES KETIBAN MULYO	-	173.577,00	173.577,00
118	001221039564	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT ANUGERAH BERKAH MATARAN	-	168.123,00	168.123,00
119	001221039580	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT BOEMI BHAKTI PRATAMA	-	168.109,00	168.109,00
120	001221033384	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ JULIUS ADI SAPUTRA	-	165.164,00	165.164,00
121	001221032669	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT AGUNG BARA C	-	109.604,00	109.604,00
122	001221033328	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT KALI KUNING K	-	96.058,00	96.058,00
123	001221033010	DINAS PUP-ESDM DIY JAMSUNG QQ CV TUNAS MEKAR	-	95.850,00	95.850,00
124	001221033694	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ PT SAWALA C	-	72.997,00	72.997,00
125	001221033179	DINAS PUP ESDM DIY JAMSUNG QQ GOTSA RANGGA K	-	13.912,00	13.912,00
		Jumlah	-	68.167.349,00	68.167.349,00
		Jumlah Jamsung	674.811.300,00	68.167.349,00	742.978.649,00
BPD W	ATES	,			
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1	003.311.001635	Dinas PUP ESDM QQ UD. Putra Diafan	40.100.000,00	-	40.100.000,00
2	003.211.013076	Dinas PUP ESDM QQ UD. Putra Diafan	-	9.972.941,00	9.972.941,00
		JUMLAH JAMSUNG	40.100.000,00	9.972.941,00	50.072.941,00
		TOTAL JAMINAN KESUNGGUHAN	714.911.300,00	78.140.290,00	793.051.590,00



Tabel 5.126 Rincian Jaminan Reklamasi per 31 Desember 2020

BANK	PASAR KULON PROGO				
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1	4900/XI/D/12/00	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. CIPTA JAYA SAKTI	43.700.000,00	-	43.700.000,00
2	5227/V/D/13/118	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.BEDJOE OETOMO-KISIK	18.690.000,00	-	18.690.000,00
3	6375/IX/D/14/29	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.ELLYTA KARYA PRATAMA	51.500.000,00	-	51.500.000,00
4	5754/III/D/14/29	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.HANDIKA KARYA	150.700.000,00	-	150.700.000,00
5	6195/VIII/D/14/133	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.LAJU JAYA SAKTI	51.200.000,00	-	51.200.000,00
6	4822/X/D/12/00	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. DEWATA BUMI NUSANTARA	44.670.000,00	-	44.670.000,00
7	4912/XII/D/12/00	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. HARMAK INDONESIA	50.040.000,00	-	50.040.000,00
8	9832/VII/D/17/135	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG	92.000.000,00	-	92.000.000,00
		Jumlah	502.500.000,00	-	502.500.000,00
1	650601030579	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV. CIPTA JAYA SAKTI	-	25.282.744,00	25.282.744,00
2	650601031380	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.BEDJOE OETOMO-KISIK	-	19.117.824,00	19.117.824,00
3	650601035425	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.ELLYTA KARYA PRATAMA	-	22.656.812,00	22.656.812,00
4	650601032864	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.HANDIKA KARYA	-	120.380.046,00	120.380.046,00
5	650601035097	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ CV.LAJU JAYA SAKTI	-	23.038.526,00	23.038.526,00
6	650601030367	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. DEWATA BUMI NUSANTARA	-	26.350.455,00	26.350.455,00
7	650601030602	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. HARMAK INDONESIA	-	31.078.231,00	31.078.231,00
8	650601029861	DINAS PUP ESDM JAMREK QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG	-	22.147.138,00	22.147.138,00
		Jumlah	-	290.051.776,00	290.051.776,00
		JUMLAH JAMREK	502.500.000,00	290.051.776,00	792.551.776,00
BNI TRI	KORA				
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1	1101274754	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV CAHAYA	38.870.085,00	-	38.870.085,00
2	0799697895	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SURYO RAGIL MANDIRI	49.132.760,00	-	49.132.760,00
3	1107392466	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ TITO YUNANTO	110.064.780,00	-	110.064.780,00
4	0898052558	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR	26.435.895,00		26.435.895,00
5	0899114811	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR			
6		Division of Eddings Systems (QQ) and the Company and the Compa	26.435.895,00	-	26.435.895,00
	0899556699	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO	26.435.895,00 71.843.436,00	-	26.435.895,00 71.843.436,00
7	0899556699 0817378837			-	-
7		DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO	71.843.436,00	- - -	71.843.436,00
	0817378837	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARA SENA	71.843.436,00 69.289.957,00	-	71.843.436,00 69.289.957,00
8	0817378837 0725673406	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARA SENA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00	-	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00
8	0817378837 0725673406 1055756851	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARA SENA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG SUPROBO	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00	-	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00
8 9 10	0817378837 0725673406 1055756851 0823310417	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARA SENA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG SUPROBO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BINZAMIN	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00 49.021.616,00	-	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00 49.021.616,00
8 9 10 11	0817378837 0725673406 1055756851 0823310417 1101438534	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARA SENA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG SUPROBO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BINZAMIN DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV ADIA BIMALA	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00 49.021.616,00 40.279.882,00	-	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00 49.021.616,00 40.279.882,00
8 9 10 11 12	0817378837 0725673406 1055756851 0823310417 1101438534 0739192045	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARA SENA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG SUPROBO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BINZAMIN DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV ADIA BIMALA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV AJI PRATAMA	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00 49.021.616,00 40.279.882,00 75.427.454,00	-	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00 49.021.616,00 40.279.882,00 75.427.454,00
8 9 10 11 12 13	0817378837 0725673406 1055756851 0823310417 1101438534 0739192045 0949363770	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARA SENA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG SUPROBO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BINZAMIN DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV ADIA BIMALA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV AJI PRATAMA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV BAHTERA USAHA SEJATI	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00 49.021.616,00 40.279.882,00 75.427.454,00 60.639.778,00	-	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00 49.021.616,00 40.279.882,00 75.427.454,00 60.639.778,00 75.753.006,00
8 9 10 11 12 13 14	0817378837 0725673406 1055756851 0823310417 1101438534 0739192045 0949363770 0970258820	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARA SENA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG SUPROBO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BINZAMIN DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV ADIA BIMALA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV AJI PRATAMA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV BAHTERA USAHA SEJATI DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00 49.021.616,00 40.279.882,00 75.427.454,00 60.639.778,00 75.753.006,00	-	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00 49.021.616,00 40.279.882,00 75.427.454,00 60.639.778,00 75.753.006,00 38.500.000,00
8 9 10 11 12 13 14 15	0817378837 0725673406 1055756851 0823310417 1101438534 0739192045 0949363770 0970258820 1146473327	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARA SENA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG SUPROBO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BINZAMIN DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV ADIA BIMALA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV AJI PRATAMA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV BAHTERA USAHA SEJATI DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00 49.021.616,00 40.279.882,00 75.427.454,00 60.639.778,00 75.753.006,00 38.500.000,00	-	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00 49.021.616,00 40.279.882,00 75.427.454,00 60.639.778,00 75.753.006,00 38.500.000,00
8 9 10 11 12 13 14 15	0817378837 0725673406 1055756851 0823310417 1101438534 0739192045 0949363770 0970258820 1146473327 0775963061	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARA SENA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG SUPROBO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BINZAMIN DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV ADIA BIMALA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV AJI PRATAMA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV BAHTERA USAHA SEJATI DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV GIRI KENCANA	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00 49.021.616,00 40.279.882,00 75.427.454,00 60.639.778,00 75.753.006,00 38.500.000,00 74.213.437,00	-	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00 49.021.616,00 40.279.882,00 75.427.454,00 60.639.778,00 75.753.006,00 38.500.000,00 74.213.437,00 35.584.421,00
8 9 10 11 12 13 14 15 16	0817378837 0725673406 1055756851 0823310417 1101438534 0739192045 0949363770 0970258820 1146473327 0775963061 1144060446	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASDIE FITRI NUGROHO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ASMARA SENA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BAMBANG SUPROBO DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ BINZAMIN DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV ADIA BIMALA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV AJI PRATAMA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV BAHTERA USAHA SEJATI DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV EMPAT LIMA MUDA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV GIRI KENCANA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV GIRI KENCANA DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV KENCANA JAYA	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00 49.021.616,00 40.279.882,00 75.427.454,00 60.639.778,00 75.753.006,00 38.500.000,00 74.213.437,00 35.584.421,00	-	71.843.436,00 69.289.957,00 91.749.733,00 20.381.843,00 49.021.616,00 40.279.882,00 75.427.454,00 60.639.778,00 75.753.006,00 38.500.000,00 74.213.437,00



กลา ผลาหูเพลาเพลาเพนีย์ กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม

		 		1
21	0822179696	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SARANA JAYA MAKMUR	41.927.774,00	- 41.927.774,00
22	0798269848	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SENO WATU AJI	177.915.064,00	- 177.915.064,00
23	0757512882	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV SURYA DARMA	130.709.164,00	- 130.709.164,00
24	0723918871	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TIRTA REJA	44.838.446,00	- 44.838.446,00
25	0765207450	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TRIKARSA REKA BUWANA	62.621.414,00	- 62.621.414,00
26	0919126318	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV TUMPU HARAPAN	38.015.742,00	- 38.015.742,00
27	0864276294	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV WATULANWEDHI	24.164.159,00	- 24.164.159,00
28	1146369225	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ CV WATULANWEDHI	20.240.000,00	- 20.240.000,00
29	0986213177	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DAVID OKTA NUGRAHA	72.971.491,00	- 72.971.491,00
30	0860829051	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DONNY ARDANA	33.121.560,00	- 33.121.560,00
31	0828783138	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ DONNY ARDANA	24.488.869,00	- 24.488.869,00
32	0860712779	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ERNAWAN FAUZI	45.203.642,00	- 45.203.642,00
33	0916368634	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ HERU ISWADI	57.845.576,00	- 57.845.576,00
34	0833766455	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ICHSAN HADI YULIATNO	109.160.812,00	- 109.160.812,00
35	0828032272	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ IRFAN NUGROHO	142.505.408,00	- 142.505.408,00
36	0870553351	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ JUMARI	41.147.870,00	- 41.147.870,00
37	0953620883	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ KARYONO	49.328.726,00	- 49.328.726,00
38	0897831863	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ KRT JAYANINGRAT	53.597.482,00	- 53.597.482,00
39	0803709162	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ MIFTAH FARID	79.141.528,00	- 79.141.528,00
40	1044124213	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ MUJIYONO	69.226.769,00	- 69.226.769,00
41	0975971360	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PRAMUDYA AFGANI	50.860.605,00	- 50.860.605,00
42	0779126960	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT AMERTA GIRI LESTARI	42.448.469,00	- 42.448.469,00
43	0867920545	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT ARDIANTO KARYA MANDIRI	54.863.825,00	- 54.863.825,00
44	0976965968	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT ARDIANTO KARTA MANDIRI DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BALANGAN CITRA MANDIRI	72.788.531,00	- 72.788.531,00
-		DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BAROKAH SUMBER REZEQI	-	· ·
45	1136102503		51.174.500,00	
46	0805785619	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT BATU MULYO BERJAYA	48.890.923,00	- 48.890.923,00
47	0943838346	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT CITRA MATARAM KONSTRUKSI	65.761.382,00	- 65.761.382,00
48	1137096278	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT DEWATA SARI PRIMA	100.831.517,00	- 100.831.517,00
49	0835692649	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT JAGO JAYA CEMERLANG	33.046.637,00	- 33.046.637,00
50	0816170512	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT KALI GENDOL PERKASA	21.397.583,00	- 21.397.583,00
51	1136094556	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT KALI OPAK SEJAHTERA	42.599.812,00	- 42.599.812,00
52	0912125583	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT MALEKO	128.007.242,00	- 128.007.242,00
53	1144288281	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT MULTINTES	41.197.739,00	- 41.197.739,00
54	1146336028	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT PASI DANADIPA GAJENDRA	30.500.000,00	- 30.500.000,00
55	0802607128	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT PASIR ALAM SEJAHTERA	66.329.225,00	- 66.329.225,00
56	0841832227	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT SEMESTA INDONESIA ALAM RAY	318.002.480,00	- 318.002.480,00
57	0948180144	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT SUGIH ALAMANUGROHO	94.032.634,00	- 94.032.634,00
58	0837781786	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ PT SURYA WATU KENCANA	111.887.803,00	- 111.887.803,00
59	0720074133	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ R KHOIRUDIN	82.367.478,00	- 82.367.478,00
60	0795633595	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ RATMI SETYO HADI	183.949.731,00	- 183.949.731,00
61	0827790894	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ RIZKY PRATAMA PAKU DEWA	53.680.255,00	- 53.680.255,00
62	0880138593	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ ROSLAN	98.609.423,00	- 98.609.423,00
63	1146361431	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUJANMO	42.600.000,00	- 42.600.000,00
64	0733051871	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUKARTIJO	57.209.573,00	- 57.209.573,00
65	0839212344	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SUSENO	237.946.653,00	- 237.946.653,00
66	0858482385	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ SYACHIRUL AFIF	71.450.927,00	- 71.450.927,00
67	0880135309	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ TRI ASIH DESTARI	54.759.919,00	- 54.759.919,00
68	1114206371	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ TRIYANDI MULKAN ,SH.MM	52.468.562,00	- 52.468.562,00
69	0751120551	DINAS PUP ESDM DIY JAMREK QQ UD JATI PERKASA	44.476.951,00	- 44.476.951,00
70	0710409108	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Desti Pujilestari	87.802.682,00	- 87.802.682,00
71	0717680389	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Ghozin Asrori	42.782.745,00	- 42.782.745,00
72	0711289528	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Bangun Adhi Prasodjo	42.035.527,00	- 42.035.527,00
		JUMLAH JAMREK	4.956.430.275,00	- 4.956.430.275,00



กลา ผลาหูเพลาเพลาเพนีย์ กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม

	DITIRO		25220172		
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1		Dinas PUP ESDM Jamrek qq Aris Yulianto	53.755.726,00	-	53.755.726,00
2		Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Bumi Mataram	81.659.446,00	-	81.659.446,00
3		Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Lestari Karya	117.403.561,00	-	117.403.561,00
4		Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV Temon Sarana Perkasa	85.877.727,00	-	85.877.727,00
5		Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Central Stone Perkasa	128.917.816,00	-	128.917.816,00
6	0029.01.015757-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Muncul Karya	63.118.938,76	-	63.118.938,76
7		Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sahabat Sejahtera Group	112.969.776,00	-	112.969.776,00
8	0029.01.015816-40-2	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sarana Jaya Makmur	117.330.440,00	-	117.330.440,00
9	0029.01.015815-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Sari Mulia	121.256.273,00	-	121.256.273,00
10	0029.01.015742-40-9	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Selo Mandiri Sejahtera	47.216.885,00	-	47.216.885,00
11	0029.01.015837-40-8	Dinas PUP ESDM Jamrek qq CV. Widya Segara Karya	158.469.922,00	-	158.469.922,00
12	0029.01.015047-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Dedek Handoko	39.819.421,00	-	39.819.421,00
13	0029.01.015993-40-8	Dinas PUP ESDM Jamrek qq H Sukamto	36.947.214,00	-	36.947.214,00
14	0029.01.015202-40-9	Dinas PUP ESDM Jamrek qq H Umar Syamsudin	34.705.780,00	-	34.705.780,00
15	0029.01.015305-40-1	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Heri Suwarno (KUBE Sido Maju)	25.761.948,00	-	25.761.948,00
16	0029.01.015774-40-6	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Koperasi Petruk	165.525.424,00	-	165.525.424,00
17	0029.01.015792-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Muhammad Affan	62.124.986,00	-	62.124.986,00
18	0029.01.015990-40-0	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Nuri	40.765.148,00	-	40.765.148,00
19	0029.01.015443-40-3	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Parno	64.179.876,00	-	64.179.876,00
20	0029.01.015333-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq Petrus Joko Legowo	57.261.404,00	=	57.261.404,00
21	0029.01.016036-40-3	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT Citra Mataram Konstruksi	88.727.366,00	-	88.727.366,00
22		Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Anindya Mitra Internasional	63.111.194,00	-	63.111.194,00
23		Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Batu Prima Mandiri	239.231.467,00	-	239.231.467,00
24	0029.01.015843-40-9	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Caldomill Indonesia	85.875.088,00	_	85.875.088,00
25		Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Dewata Bumi Nusantara	125.182.686,00	_	125.182.686,00
26		Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Harmak Indonesia	286.047.159,00	_	286.047.159,00
27		Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Kali Gendol Perkasa	50.854.158,00	_	50.854.158,00
28		Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Maju Manunggal Abadi	128.970.676,00	_	128.970.676,00
29	0029.01.015833-40-4	Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Sari Bhumi Khatulistiwa	175.255.353,00	-	175.255.353,00
30		Dinas PUP ESDM Jamrek qq PT. Tirta Mulya Sarana	95.341.327,00	_	95.341.327,00
31		Dinas PUP ESDM Jamrek qq Purwanto	85.828.416,00		85.828.416,00
32		Dinas PUP ESDM Jamrek qq Sumanto	44.722.844,00		44.722.844,00
33		Dinas PUP ESDM Jamrek qq Tuwuh Rusdi Wuryanto	22.782.965,00	-	22.782.965,00
34			-		47.248.576,00
_		Dinas PUP ESDM Jamrek qq Wahyono	47.248.576,00		,
35		Dinas PUP ESDM QQ Anang Tri Hardiyanto Jaminan Reklamasi	19.156.607,00	-	19.156.607,00
36		Dinas PUP ESDM QQ CV Bedjoe Oetomo Jaminan Reklamasi	79.036.521,00	-	79.036.521,00
37		Dinas PUP ESDM QQ CV Cahaya Jaminan Reklamasi	11.699.618,00	-	11.699.618,00
38		Dinas PUP ESDM QQ CV Trikarya Jaminan Reklamasi	212.753.877,00	-	212.753.877,00
39	0029.01.014607-40.2	Dinas PUP ESDM QQ Giarto Jaminan Reklamasi	24.207.735,00	-	24.207.735,00
40		Dinas PUP ESDM QQ Nurdiyanto Jaminan Reklamasi	53.205.114,00	-	53.205.114,00
41	0029.01.014649-40-4	Dinas PUP ESDM QQ PT Agung Bara Cemerlang Jaminan Reklamasi	303.626.769,00	-	303.626.769,00
42		Dinas PUP ESDM QQ PT Bumi Kalimasada Jaminan Reklamasi	143.902.060,00	-	143.902.060,00
43		Dinas PUP ESDM QQ PT Gunung Sejahtera Temon Jaminan Reklamasi	42.886.374,00	-	42.886.374,00
44	0029.01.014234.40.3	Dinas PUP ESDM QQ PT Hargo Wilis Indonesia Jaminan Reklamasi	123.646.656,00	-	123.646.656,00
45		Dinas PUP ESDM QQ PT Jago Jaya Cemerlang Jaminan Reklamasi	166.263.227,00	-	166.263.227,00
46		Dinas PUP ESDM QQ PT Jogja Parahita Hutama Jaminan Reklamasi	144.700.666,00	=	144.700.666,00
47	0029.01.014232.40.1	Dinas PUP ESDM QQ PT Pasir Alam Sejahtera Jaminan Reklamasi	41.528.268,00	-	41.528.268,00
48	0029.01.014949-40-6	Dinas PUP ESDM QQ Sumaryanta Jaminan Reklamasi	33.790.478,00	-	33.790.478,00
49	0029.01.014958-40-5	Dinas PUP ESDM QQ Suwandi Jaminan Reklamasi	28.883.230,00	-	28.883.230,00
		JUMLAH JAMREK	4.583.534.186,76	-	4.583.534.186,76
		TOTAL JAMINAN REKLAMASI	10.042.464.461,76	290.051.776,00	10.332.516.237,7



การ พยาทินารพลารพลารพานิกุขพากพาการ

Tabel 5.127 Rincian Jaminan Pasca Tambang per 31 Desember 2020

BRI CAE	BRI CABANG CIK DITIRO					
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL	
1	0029.01.017398.40.0	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TRIKARYA	60.103.600,00	-	60.103.600,00	
2	0029.01.017352.40.4	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT AGUNG BARA CEMERLANG	69.613.220,00	-	69.613.220,00	
3	0029.01.015976-40-6	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Lestari Karya	219.175.538,00	-	219.175.538,00	
4	0029.01.015929-40-9	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Temon Sarana Perkasa	43.533.540,00	-	43.533.540,00	
5	0029.01.015707-40-9	Dinas PUP ESDM JamPas qq Aris Yulianto	45.963.053,00	-	45.963.053,00	
6	0029.01.015930-40-0	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Bumi Mataram	44.572.086,00	-	44.572.086,00	
7	0029.01.017317.40.4	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Muncul Karya	42.309.952,00	-	42.309.952,00	
8	0029.01.017316.40.8	Dinas PUP ESDM Jampas qq CV Widya Segara Karya	52.053.768,00	-	52.053.768,00	
9	0029.01.015862-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Central Stone Perkasa	10.749.194,00	-	10.749.194,00	
10	0029.01.015758-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Muncul Karya	15.327.054,18	-	15.327.054,18	
11	0029.01.015812-40-8	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sahabat Sejahtera Group	72.384.470,00	-	72.384.470,00	
12	0029.01.015817-40-8	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sarana Jaya Makmur	73.744.928,00	-	73.744.928,00	
13	0029.01.015814-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Sari Mulia	75.105.105,00	-	75.105.105,00	
14	0029.01.015741-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Selo Mandiri Sejahtera	40.925.065,00	-	40.925.065,00	
15	0029.01.015705-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Trikarya	40.652.386,00	-	40.652.386,00	
16	0029.01.015838-40-4	Dinas PUP ESDM JamPas qq CV. Widya Segara Karya	7.085.352,00	-	7.085.352,00	
17	0029.01.015046-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq Dedek Handoko	71.202.693,00	-	71.202.693,00	
18	0029.01.015992-40-2	Dinas PUP ESDM Jampas qq H Sukamto	44.082.360,00	-	44.082.360,00	
19	0029.01.015201-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq H Umar Syamsudin	98.435.378,00	-	98.435.378,00	
20	0029.01.015306-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq Heri Suwarno (KUBE Sido Maju)	148.734.739,00	-	148.734.739,00	
21	0029.01.015775-40-2	Dinas PUP ESDM JamPas qq Koperasi Petruk	147.943.254,00	-	147.943.254,00	
22	0029.01.015793-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq Muhammad Affan	22.503.372,00	-	22.503.372,00	
23	0029.01.015991-40-6	Dinas PUP ESDM Jampas qq Nuri	50.155.156,00	-	50.155.156,00	
24	0029.01.015442-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq Parno	5.231.103,00	-	5.231.103,00	
25	0029.01.015332-40-8	Dinas PUP ESDM Jampas qq Petrus Joko Legowo	38.024.371,00	-	38.024.371,00	
26	0029.01.016035-40-7	Dinas PUP ESDM Jampas qq PT Citra Mataram Konstruksi	55.159.374,00	-	55.159.374,00	
27	0029.01.015444-40-9	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Anindya Mitra Internasional	8.437.420,00	-	8.437.420,00	
28	0029.01.015636-40-4	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Batu Prima Mandiri	21.475.990,00	-	21.475.990,00	
29	0029.01.015844-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Caldomill Indonesia	7.120.443,00	-	7.120.443,00	
30	0029.01.015748-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Dewata Bumi Nusantara	85.024.830,00	-	85.024.830,00	
31	0029.01.015557-40-6	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Harmak Indonesia	112.427.569,00	-	112.427.569,00	
32	0029.01.015536-40-0	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Kali Gendol Perkasa	103.242.574,00	-	103.242.574,00	
33	0029.01.015618-40-6	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Maju Manunggal Abadi	116.936.105,00	-	116.936.105,00	
34	0029.01.015600-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Pasir Alam Sejahtera	26.571.244,00	-	26.571.244,00	
35	0029.01.015832-40-8	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Sari Bhumi Khatulistiwa	13.631.994,00	-	13.631.994,00	
36	0029.01.015804-40-5	Dinas PUP ESDM JamPas qq PT. Tirta Mulya Sarana	51.014.670,00	-	51.014.670,00	
37	0029.01.015721-40-3	Dinas PUP ESDM JamPas qq Purwanto	44.269.558,00	-	44.269.558,00	
38	0029.01.015801-40-7	Dinas PUP ESDM JamPas qq Sumanto	62.475.906,00	-	62.475.906,00	
39	0029.01.015654-40-2	Dinas PUP ESDM JamPas qq Tuwuh Rusdi Wuryanto	23.691.716,00	-	23.691.716,00	
40	0029.01.016129-40-0	Dinas PUP ESDM Jampas qq Wahyono	50.364.886,00	-	50.364.886,00	



กลา ผลาหูเพลาเพลาเพนีย์ กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม

41	0029.01.014220.40.4	Dinas PUP ESDM QQ Anang Tri Hardiyanto Jaminan Pasca Tambang	67.655.798,00	-	67.655.798,00
42	0029.01.014945-40-2	Dinas PUP ESDM QQ CV Bedjoe Oetomo Jaminan Pasca Tambang	77.588.527,00	-	77.588.527,00
43	0029.01.014393.40.1	Dinas PUP ESDM QQ CV Cahaya Pasca Tambang	5.849.816,00	-	5.849.816,00
44	0029.01.014413.40.5	Dinas PUP ESDM QQ CV Trikarya Pasca Tambang	Pasca Tambang 14.038.588,00 -		14.038.588,00
45	0029.01.014608-40.8	8 Dinas PUP ESDM QQ Giarto Jaminan Pasca Tambang 112.718.894,00 -		112.718.894,00	
46	0029.01.015044-40-3	Dinas PUP ESDM QQ Nurdiyanto Jaminan Pasca Tambang	58.154.661,00	-	58.154.661,00
47	0029.01.014650-40-5	Dinas PUP ESDM QQ PT Agung Bara Cemerlang Pasca Tambang	26.243.279,00	-	26.243.279,00
48	0029.01.014823-40-6	Dinas PUP ESDM QQ PT Bumi Kalimasada Jaminan Pasca Tambang	7.192.031,00	-	7.192.031,00
49	0029.01.014221.40.0	Dinas PUP ESDM QQ PT Gunung Sejahtera Temon Pasca Tambang	62.548.214,00	-	62.548.214,00
50	0029.01.014443-40.0	Dinas PUP ESDM QQ PT Hargo Wilis Indonesia Pasca Tambang	42.505.454,00	-	42.505.454,00
51	0029.01.014981-40-8	Dinas PUP ESDM QQ PT Jago Jaya Cemerlang Jaminan Pasca Tambang	8.329.181,00	-	8.329.181,00
52	0029.01.014243.40.2	Dinas PUP ESDM QQ PT Jogja Parahita Hutama Pasca Tambang	20.494.579,00	-	20.494.579,00
53	0029.01.014471.40.3	Dinas PUP ESDM QQ PT Pasir Alam Sejahtera Pasca Tambang	9.119.979,00	-	9.119.979,00
54	0029.01.014950-40-7	Dinas PUP ESDM QQ Sumaryanta Jaminan Pasca Tambang	53.953.997,00	-	53.953.997,00
55	0029.01.014959-40-1	Dinas PUP ESDM QQ Suwandi Jaminan Pasca Tambang	27.141.690,00	-	27.141.690,00
		JUMLAH JAMPAS	2.914.989.704,18	-	2.914.989.704,18
BANK P	ASAR KULON PROGO	•			
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1	13591/III/D/20/135	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT HARMAK INDONESIA	55.400.000,00	-	55.400.000,00
2	9834/VII/D/17/135	DINAS PUP ESDM JAMPASCATAMBANG QQ PT. MINERAL DAYA GEMILANG	7.326.000,00	-	7.326.000,00
3	11543/X/D/18/135	DINAS PUP-ESDM DIY JAMINAN PASCATAMBANG QQ CV BEDJOE OET	66.850.000,00	-	66.850.000,00
4	11544/X/D/18/135	DINAS PUP-ESDM DIY JAMINAN PASCATAMBANG QQ CV HANDIKA KA	358.929.675,00	-	358.929.675,00
		JUMLAH JAMPAS	488.505.675,00	-	488.505.675,00
BNI TRI	KORA				
NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	DEPOSITO	TABUNGAN	TOTAL
1	1114215456	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TRIYANDI MULKAN ,SH.MM	50.353.706,00	-	50.353.706,00
2	0799698458	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SURYO RAGIL MANDIRI	51.375.775,00	-	51.375.775,00
3	1107395047	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TITO YUNANTO	78.847.870,00	-	78.847.870,00
4	0898048927	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR	77.337.957,00	-	77.337.957,00
5	0899115463	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ANDI PATOTORI ARISMUNANDAR	72.880.137,00	-	72.880.137,00
6	0899557296	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ASDIE FITRI NUGROHO	37.321.264,00	-	37.321.264,00
7	0817379669	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ASMARA SENA	58.723.899,00	-	58.723.899,00
8	0725640437	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BAMBANG RATMAKA YULIANTA	44.183.874,00	-	44.183.874,00
9	1055758928	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BAMBANG SUPROBO	35.617.777,00	-	35.617.777,00
10	0823309332	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ BINZAMIN	34.198.662,00	-	34.198.662,00
11	1101433262	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV ADIA BIMALA	14.097.958,00	-	14.097.958,00
12	0739194814	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV AJI PRATAMA	33.879.809,00	-	33.879.809,00
13	0949364663	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV BAHTERA USAHA SEJATI	63.200.582,00	-	63.200.582,00
14	1101269063	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV CAHAYA	31.116.209,00	-	31.116.209,00
15	1146475653	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV EMPAT LIMA MUDA	31.000.000,00	-	31.000.000,00
16	0970259255	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV EMPAT LIMA MUDA	21.381.895,00	-	21.381.895,00
17	0775963538	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV GIRI KENCANA	60.641.749,00	-	60.641.749,00
18	1144061621	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV KENCANA JAYA	49.818.190,00	-	49.818.190,00
19	0896340059	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV KUSUMA ARGA MUKTI	58.366.314,00	-	58.366.314,00
20	0860876760	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA	28.538.706,00	-	28.538.706,00
21	0768378955	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV RIMBA SARANA	60.803.315,00	-	60.803.315,00
22	0822183080	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SARANA JAYA MAKMUR	43.039.496,00	-	43.039.496,00
23	0798267909	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SENO WATU AJI	177.915.064,00	-	177.915.064,00
24	0757513943	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV SURYA DARMA	74.389.924,00	-	74.389.924,00
25	0723921135	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TIRTA REJA	53.893.419,00	-	53.893.419,00



กลา ผลาหูเพลาเพลาเพนีย์ กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม

		TOTAL JAMINAN	18.723.790.474,94	368.192.066,00	19.091.982.540,94
		TOTAL JAMINAN PASCA TAMBANG	7.966.414.713,18	-	7.966.414.713,18
		JOHN MARKET	552515.557,000		
12	0/112332/0	JUMLAH JAMPAS	4.562.919.334,00	<u>-</u>	4.562.919.334,00
72	0717678733	Dinas PUP ESDM Jampas qq Gnozin asrori Dinas PUP ESDM Jampas qq PT. Bangun Adhi Prasodjo	65.522.748,00	<u> </u>	65.522.748,00
70	0710408820	Dinas PUP ESDM Jampas qq Desti Pujilestari	57.773.120,00	-	57.773.120,00
70	0751122219	Dinas PUP ESDM Jampas qq Desti Pujilestari	90.546.518,00	<u> </u>	90.546.518,00
69	0751122219	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TRI ASIH DESTARI DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ UD JATI PERKASA	53.458.910,00	<u> </u>	53.458.910,00
67 68	0858482793 0880136368	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SYACHIRUL AFIF DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ TRI ASIH DESTARI	69.471.964,00 71.177.503,00	-	69.471.964,00 71.177.503,00
66 67	0839213585	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUSENO DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SYACHIRUL AFIF	117.810.024,00	-	117.810.024,00
65	0733073827	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUKARTIJO	56.883.278,00	-	56.883.278,00
64	1146361941	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ SUJANMO	61.600.000,00	-	61.600.000,00
63	0880139392	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ROSLAN	36.368.063,00	-	36.368.063,00
62	0827790293	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ RIZKY PRATAMA PAKU DEWA	32.716.364,00	-	32.716.364,00
61	0795634022	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ RATMI SETYO HADI	55.068.374,00	-	55.068.374,00
60	0720073468	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ R KHOIRUDIN	73.639.795,00	-	73.639.795,00
59	0838015732	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SURYA WATU KENCANA	118.127.289,00	-	118.127.289,00
58	0948181477	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SUGIH ALAMANUGROHO	104.414.917,00	-	104.414.917,00
57	0841833048	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT SEMESTA INDONESIA ALAM RAY	23.258.937,00	-	23.258.937,00
56	0802606645	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT PASIR ALAM SEJAHTERA	47.423.790,00	-	47.423.790,00
55	1146337328	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT PASI DANADIPA GAJENDRA	41.500.000,00	-	41.500.000,00
54	1144288860	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT MULTINTES	57.636.740,00	-	57.636.740,00
53	0912126111	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT MALEKO	69.866.768,00	-	69.866.768,00
52	1136093234	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT KALI OPAK SEJAHTERA	86.408.400,00	-	86.408.400,00
51	0816171469	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT KALI GENDOL PERKASA	162.220.517,00	-	162.220.517,00
50	0835691816	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT JAGO JAYA CEMERLANG	32.415.171,00	-	32.415.171,00
49	1137097862	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT DEWATA SARI PRIMA	59.135.780,00	-	59.135.780,00
48	0945839940	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT CITRA MATARAM KONSTRUKSI	64.839.495,00	-	64.839.495,00
47	0805786395	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BATU MULYO BERJAYA	62.205.454,00	-	62.205.454,00
46	1136103903	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BAROKAH SUMBER REZEQI	108.248.548,00	-	108.248.548,00
45	0976977724	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT BALANGAN CITRA MANDIRI	58.169.913,00	-	58.169.913,00
44	0867922859	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT ARDIANTO KARYA MANDIRI	60.994.446,00	-	60.994.446,00
43	0779127294	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PT AMERTA GIRI LESTARI	166.489.072,00	-	166.489.072,00
42	0975972513	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ PRAMUDYA AFGANI	45.277.106,00	-	45.277.106,00
41	1044125217	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ MUJIYONO	38.661.733,00	-	38.661.733,00
40	0803710098	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ MIFTAH FARID	38.558.858,00	-	38.558.858,00
39	0897832302	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ KRT JAYANINGRAT	56.085.568,00	-	56.085.568,00
38	0953621231	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ KARYONO	47.490.387,00	-	47.490.387,00
37	0870554162	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ JUMARI	48.733.211,00	-	48.733.211,00
36	0828031675	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ IRFAN NUGROHO	99.737.288,00	-	99.737.288,00
35	0833766068	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ICHSAN HADI YULIATNO	56.261.070,00	-	56.261.070,00
34	0916377069	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ HERU ISWADI	44.694.182,00	-	44.694.182,00
33	0860713397	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ ERNAWAN FAUZI	33.121.560,00	-	33.121.560,00
32	0860830055	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DONNY ARDANA	82.699.759,00	-	82.699.759,00
31	0828782442	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DONNY ARDANA	136.742.746,00	-	136.742.746,00
30	0986213767	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ DAVID OKTA NUGRAHA	87.140.713,00	-	87.140.713,00
29	1146379823	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV WATULANWEDHI	43.460.000,00	-	43.460.000,00
28	0864277695	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV WATULANWEDHI	77.908.589,00	-	77.908.589,00
27	0919130324	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TUMPU HARAPAN	82.401.692,00	-	82.401.692,00
26	0765208307	DINAS PUP ESDM DIY JAMPAS QQ CV TRIKARSA REKA BUWANA	35.629.423,00	-	35.629.423,00



5.3.2 Kewajiban

Rp44.849.799.128,62

Rp41.219.264.667,61

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp44.849.799.128,62 merupakan Kewajiban Jangka Pendek dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rp44.849.799.128,62

Rp41.219.264.667,61

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp44.849.799.128,62 merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp19.091.982.540,94, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.623.129.778,68, Utang Belanja sebesar Rp2.413.635.867,00 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp21.721.050.942,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp19.091.982.540,94 Rp15.648.328.066,94

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.091.982.540,94 merupakan Utang Jaminan yang terdiri dari Jaminan Kesungguhan sebesar Rp793.051.590,00, Jaminan Reklamasi sebesar Rp10.332.516.237,76 dan Jaminan Pasca Tambang sebesar Rp7.966.414.713,18.

Jaminan tersebut dalam bentuk deposito dan tabungan atas nama Perusahaan Penambang qq. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM. Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Perusahaan Penambang apabila perjanjian penambangan telah berakhir, dan menjadi pendapatan Pemda DIY ketika Perusahaan Penambang melanggar kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Rp0,00

Rp0,00

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Rn0.00

Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Rp1.623.129.778,68

Rp4.493.192.975,67

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.623.129.778,68 merupakan penerimaan pembayaran dari pihak lain kepada Pemda DIY terkait dengan pemakaian aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31 Desember 2020 belum dikonsumsi/dimanfaatkan.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.128 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	-	6.000.000,00
2	Dinas Perhubungan	48.738.000,00	839.000.000,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	150.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	12.500.000,00
5	Dinas Pariwisata	15.689.041,10	2.708.333,33



กลา พยาหางพะ กางพามา คุณ พายางทุน พยามา พยามา พยามา พยามา พยามา พยามา พยามา พยามา พยามา พยามา พยามา พยามา พยามา

	Jumlah	1.623.129.778,68	4.493.192.975,67
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	962.826.565,59	3.452.862.191,57
7	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	491.070.485,84	-
6	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	104.805.686,15	179.972.450,77

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perhubungan merupakan penerimaan pembayaran sewa lahan parkir Bandara Adi Sucipto dari PT. Angkasa Pura namun sampai dengan per 31 Desember 2020 belum menjadi hak Dinas Perhubungan sebesar Rp48.738.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.129
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perhubungan

No	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	02-05-2020 s.d 01-05-2021	36.000.000,00	01-01-2020 s.d 01-05-2021	12.000.000,00
2	01-06-2020 s.d 31-05-2021	88.171.200,00	01-01-2020 s.d 30-05-2021	36.738.000,00
	Jumlah	124.171.200,00		48.738.000,00

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Pariwisata sebesar Rp15.689.041,10 merupakan penerimaan sewa sebagian bangunan pada TIC Jl. Malioboro dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat namun sampai dengan per 31 Desember 2020 belum menjadi hak Dinas Pariwisata DIY dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.130
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Pariwisata

No	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	01-06-2020 s.d 31-05-2023	19.500.000,00	01/01/2021 s.d 31/05/2023	15.689.041,10
	Jumlah	19.500.000,00		15.689.041,10

Pendapatan Diterima Dimuka pada pada Sekretariat Daerah (Biro Umum) sebesar Rp104.805.686,15 merupakan Sewa basement untuk server, namun sampai dengan per 31 Desember 2020 belum menjadi hak Biro Umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.131
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Biro Umum Sekda DIY

No	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	09-05-2017 s.d 08-05-2022	275.000.000,00	01-01-2020 s.d 08-05-2022	77.916.666,07
2	28-02-2019 s.d. 08-05-2022	65.541.985,00	28-02-2020 s.d 08-05-2022	26.889.020,08
	Jumlah	340.541.985,00		104.805.686,15

Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp491.070.485,84 merupakan penerimaan sewa galeri UKM di Yogyakarta International Airport namun



กลานางพะกางเมื่อแลกเกา

sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.132
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Koperasi dan UKM

No	Periode Sewa	Nilai Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	03-11-2020 s.d 22-11-2021	549.818.182,00	01/01/2021 s.d 22/11/2021	491.070.485,84
	Jumlah	549.818.182,00		491.070.485,84

Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKA sebesar Rp962.826.565,59 merupakan penerimaan sewa barang milik daerah pada BPKA dari pihak ketiga namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.133
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka BPKA

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Per	iode Sev	wa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai (Rp)
BPK	INDUK							
1.	Tanah dan Bangunan	PT. Formula Land Jl. Dr. Sutomo No 66 Yogyakarta	01/09/2020	s/d	31/08/2021	108.000.000,00	01-01-2021 s/d 31-08-2021	71.901.369,86
2.	Bangunan	BPD DIY	01/07/2017	s.d	30/06/2022	602.500.000,00	01-01-2021 s/d	-
			01/07/2017	s.d	30/06/2018	120.500.000,00	30-06-2021	-
			01/07/2018	s.d	30/06/2019	120.500.000,00		-
			01/07/2019	s.d	30/06/2020	120.500.000,00		-
			01/07/2020	s.d	30/06/2021	120.500.000,00		59.754.794,52
			01/07/2021	s.d	30/06/2022	120.500.000,00		20.500.000,00
3.	Tanah	PT. Selo Adi Karto	01/04/2020	s/d	31/03/2021	108.900.000,00	01-01-2021 s/d	26.852.054,79
			01/04/2021	s/d	31/03/2022	108.900.000,00	31-03-2021	08.900.000,00
4	Tanah	Pemdes Sumbermulyo	01/07/2019	s.d	30/06/2020	2.500.000,00	01-01-2021 s/d	-
		,	01/07/2020	s.d	31/06/2021	2.500.000,00	30-06-2021	1.239.726,03
5	Tanah dan	BUKP Gondokusuman	01/09/2019	s.d	31/08/2022	60.000.000,00	01-01-2021 s/d	-
	Bangunan		01/09/2019	s.d	31/08/2020	20.000.000,00	31-08-2021	-
			01/09/2020	s.d	31/08/2021	20.000.000,00		13.315.068,49
			01/09/2021	s.d	31/08/2022	20.000.000,00		20.000.000,00
6	Tanah	Yayasan Perguruan	20/11/2017	s.d	19/11/2021	14.000.000,00	01-01-2021 s/d	-
		Dharma Pala Sleman	20/11/2017	s.d	19/11/2018	3.500.000,00	19-11-2021	-
		Akta Notaris 26/2008	20/11/2018	s.d	19/11/2019	3.500.000,00		-
		tgl 28 November 2008	20/11/2019	s.d	19/11/2020	3.500.000,00		-
			20/11/2020	s.d	19/11/2021	3.500.000,00		3.097.260,27



กลา ผลาหูเพลาเพลาเพ่นๆผพาดพากหาเก

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Per	iode Se	wa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai (Rp)
7	Tanah	Pemkab Bantul	28/03/2020	s.d	27/03/2021	15.000.000,00	01-01-2021 s/d 27-03-2021	3.534.246,58
8	Tanah	dr. Soedarman	03/09/2018	s.d	02/09/2023	175.000.000,00	01-01-2021 s/d	-
		Jalan DI. Panjaitan No 66	03/09/2018	s.d	02/09/2019	35.000.000,00	02-09-2021	-
		Mantrijeron, Suryodiningratan,	03/09/2019	s.d	02/09/2020	35.000.000,00		-
		Yogyakarta	03/09/2020	s.d	02/09/2021	35.000.000,00		23.493.150,68
			03/09/2021	s.d	02/09/2022	35.000.000,00		35.000.000,00
			03/09/2022	s.d	02/09/2023	35.000.000,00		35.000.000,00
9	Tanah	Drs. Djuwardi	21/02/2019	s.d	20/02/2021	12.400.000,00	01-01-2021 s/d	-
		KPRI Śumber Rejeki Kulon Progo	21/02/2019	s.d	20/02/2020	6.200.000,00	20-02-2021	-
		,	21/02/2020	s.d	20/02/2021	6.200.000,00		866.301,37
10	Tanah dan Bangunan	Sri Andayani	01/06/2020	s.d	31/05/2021	13.700.000,00	01-01-2021 s/d 31-05-2021	5.667.671,23
11	Tanah	Tirto Manunggal	08/01/2019	s/d	31/7/2024	20.000.000,00	01-01-2021 s/d	-
			08/01/2019	s/d	31/7/2020	4.000.000,00	31-07-2021	-
			08/01/2020	s/d	31/7/2021	4.000.000,00		2.323.287,67
			08/01/2021	s/d	31/7/2022	4.000.000,00		4.000.000,00
			08/01/2022	s/d	31/7/2023	4.000.000,00		4.000.000,00
		Talenta Body	08/01/2023	s/d	31/7/2024	4.000.000,00		4.000.000,00
12	Tanah	Repair	25/03/2020	s.d	24/03/2022	53.600.000,00	01-01-2021 s/d 24-03-2021	-
			25/03/2020	s/d	24/03/2021	26.800.000,00	24-03-2021	6.094.246,58
			25/03/2021	s/d	24/03/2022	26.800.000,00		26.800.000,00
13	Tanah	Tien Setiantoro	01/09/2020	s/d	31/08/2021	10.000.000,00	01-01-2021 s/d 31-08-2021	6.657.534,25
		Aris Purnomo	01/09/2019	s.d	31/08/2021	5.000.000,00	01-01-2021 s/d	-
			01/09/2019	s.d	31/08/2020	2.500.000,00	31-08-2021	-
			01/09/2020	s.d	31/08/2021	2.500.000,00		1.664.383,56
		Sumartiningsih	01/09/2016	s.d	31/08/2021	12.210.200,00	01-01-2021 s/d	-
			01/09/2016	s.d	31/08/2017	2.442.040,00	31-08-2021	-
			01/09/2017	s.d	31/08/2018	2.442.040,00		-
			01/09/2018	s.d	31/08/2019	2.442.040,00		-
			01/09/2019	s.d	31/08/2020	2.442.040,00		-
			01/09/2020	s.d	31/08/2021	2.442.040,00		1.625.796,49
		Roos Ani	01/09/2016	s.d	31/08/2021	9.157.650,00	01-01-2021 s/d	-
			01/09/2016	s.d	31/08/2017	1.831.530,00	31-08-2021	-
			01/09/2017	s.d	31/08/2018	1.831.530,00		-
			01/09/2018	s.d	31/08/2019	1.831.530,00		-
			01/09/2019	s.d	31/08/2020	1.831.530,00		-
			01/09/2020	s.d	31/08/2021	1.831.530,00		1.219.347,37
	1							



กลายเมื่อเกา

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Per	iode Se	wa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai (Rp)
		Suka Astuti	01/09/2019	s.d	31/08/2021	7.200.000,00	01-01-2021 s/d	-
			01/09/2019	s.d	31/08/2020	3.600.000,00	31-08-2021	-
			01/09/2020	s.d	31/08/2021	3.600.000,00		2.396.712,33
14	Sebagian Tanah dan Bangunan	Badan Anti Korupsi Sarjuri	01/09/2020	s/d	31/08/2021	6.400.000,00	01-01-2021 s/d 31-08-2021	4.260.821,92
15	Tanah	YB Pratomo	01/02/2017	s.d	31/01/2022	109.891.800,00	01-01-2021 s/d	
			01/02/2017	s.d	31/01/2018	21.978.360,00	31-01-2021	
			01/02/2018	s.d	31/01/2019	21.978.360,00		
			01/02/2019	s.d	31/01/2020	21.978.360,00		
			01/02/2020	s.d	31/01/2021	21.978.360,00		1.866.655,23
			01/02/2021	s.d	31/01/2022	21.978.360,00		21.978.360,00
16	Tanah dan Bangunan	Aswin Kumala Darma Saputra	01/08/2019	s/d	31/07/2022	35.000.000,00	1-1-2021 s/d 31-	-
	(Rumah Daerah)		01/08/2019	s.d	31/07/2020	17.500.000,00	07-2021	-
			01/08/2020	s.d	31/07/2021	17.500.000,00		10.164.383,56
			01/08/2021	s.d	31/07/2022			
17	Tanah	Rohadi	01/10/2019	s/d	30/09/2021	3.000.000,00	01-01-2021 s/d 30-09-2021	-
			01/10/2019	s/d	30/09/2020	1.500.000,00		-
			01/10/2020	s/d	30/09/2021	1.500.000,00		1.121.917,81
18	Tanah dan Bangunan	Early Childhood Care and Development	01/04/2016	s.d	31/03/2021	72.500.000,00	01-01-2021 s/d 31-03-2021	-
	Dangunan	Resource Center	01/04/2016	s.d	31/03/2017	14.500.000,00	31-03-2021	-
		(ECCD-RC)	01/04/2017	s.d	31/03/2018	14.500.000,00		-
			01/04/2018	s.d	31/03/2019	14.500.000,00		-
			01/04/2019	s.d	31/03/2020	14.500.000,00		-
			01/04/2020	s.d	31/03/2021	14.500.000,00		3.575.342,47
19	Tanah dan	CV. Plainthing Group	08/04/2019	s.d	07/04/2021	42.000.000,00	01-012021 s/d	-
	Bangunan		08/04/2019	s.d	07/04/2020	21.000.000,00	07-04-2021	-
			08/04/2020	s.d	07/04/2021	21.000.000,00		5.580.821,92
20	Tanah dan	Lembaga Konsumen	01/06/2018	s.d	31/05/2021	9.075.000,00	01-01-2021 s/d	-
	Bangunan	Yogyakarta	01/06/2018	s.d	31/05/2019	3.025.000,00	31-05-2021	-
			01/06/2019	s.d	31/05/2020	3.025.000,00		-
			01/06/2020	s.d	31/05/2021	3.025.000,00		1.251.438,36
21	Tanah dan Bangunan	Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan	01/02/2019	s.d	31/01/2021	16.500.000,00	01-01-2021 s/d 31-01-2021	-
		Desaku	01/02/2019	s.d	31/01/2020	8.250.000,00		-
		(LP2 Desaku)	01/02/2020	s.d	31/01/2021	8.250.000,00		700.684,93
22	Tanah dan Bangunan	Abung Hidaya	10/01/2020	s/d	30/9/2021	7.500.000,00	01-01-2021 s/d 30-09-2021	5.609.589,04
		Uep Sumiarsih	10/01/2020	s/d	30/9/2021	3.200.000,00	01-01-2021 s/d 30-09-2021	2.393.424,66



กลา ผลาหูเพลาเพลาเพนีย์ กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม กลุ่ม

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Peri	iode Se	wa	Nilai Sewa (Rp)	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai (Rp)	
		Tatang Raharja	10/01/2020	s/d	30/9/2021	4.700.000,00	01-01-2021 s/d 30-09-2021	3.515.342,47	
		Zuljasrifon	10/01/2020	s/d	30/9/2021	4.500.000,00	01-01-2021 s/d 30-09-2021	3.365.753,42	
23	Tanah	Eks TKD Wates	05/07/2020	s/d	04/07/2021	275.202.132,00	01-01-2021 s/d 04-07-2021	39.486.012,11	
24	Tanah	SMK Citra Semesta Indonesia	08/01/2020	s/d	31/7/2021	16.875.000,00	01-01-2021 s/d 31-07-2021	9.801.369,86	
25	Rumah Dinas	Asmita	01/08/2020	s/d	01/08/2021	2.792.400,00	01-01-2021 s/d 01-8-2021	1.621.887,12	
		Umi Hartini	01/10/2020	s/d	31/3/2021	816.000,00	01-01-2021 s/d 31-03-2021	408.000,00	
		Ny. Djaenab Murniati	01/12/2020	s/d	31/3/2021	2.513.600,00	01-01-2021 s/d 31-03-2021	1.885.200,00	
		Hasan Khoiri	01/12/2020	s/d	28/2/2021	775.800,00	01-01-2021 s/d 28-02-2021	517.200,00	
		Sigit Arianta Wibowo	01/08/2020	s/d	01/08/2021	1.429.200,00	01-01-2021 s/d 01-08-2021	830.110,68	
		Sugiyanta	01/08/2020	s/d	28/2/2021	1.269.100,00	01-01-2021 s/d 28-02-2021	362.600,00	
		Dra. Sulistyaningsih	01/02/2020	s/d	01/02/2021	3.396.000,00	01-01-2021 s/d 01-02-2021	288.427,40	
			JL	JMLAH				810.488.295,04	
KPPD	KULON PRO	GO							
1	Bangunan	PT BRI (PERSERO) Cabang Wates (ATM)	01/08/2020) s.d 3 ⁻	1/07/2021	3.000.000,00	01/01/2021 s.d. 31/07/2021	1.742.465,75	
		PT BNI (PERSERO) Cabang UGM (ATM)	01/08/2020) s.d 3 ⁻	1/07/2021	3.000.000,00	01/08/2020 s.d 31/07/2021	1.742.465,75	
		Dhanang Budi Hermanto (Fotocopy)	01/08/2020) s.d 3 ⁻	1/07/2021	4.400.000,00	01/01/2021 s.d 31/07/2021	2.555.616,44	
		CV Pandean Baru Motor (Saptono Budi Raharjo)	01/08/2020) s.d 3 ⁻	1/07/2021	4.000.000,00	01/01/2021 s.d 31/07/2021	2.323.287,67	
		Koperasi Binangun Sejati (Bagiyo Prayitno/Parkir)	01/08/2020) s.d 3 ⁻	1/07/2021	15.750.000,00	01/01/2021 s.d 31/07/2021	9.147.945,21	
		Painem (Kantin)	01/08/2020) s.d 3	1/07/2021	4.400.000,00	01/01/2021 s.d 31/07/2021	2.555.616,44	
		PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (Sewa Kantor Kas BPD)	01/01/2017	7 s.d 3	1/12/2021	53.750.000,00	01/01/2021 s.d 31/12/2021	10.750.000,00	
		PT. BANK BPD DIY Cabang Wates (ATM BPD)	01/01/2017	7 s.d 3 ⁻	1/12/2021	15.000.000,00	01/01/2021 s.d 31/12/2021	3.000.000,00	
	JUMLAH 33.817.397,26								



က်မ်ာက်မှုနေကဲ့ ကောင်းသည်။ ကောင်သ

No	Jenis Aset	Pihak Penyewa	Periode Sewa	Periode Pendapatan Diterima Dimuka	Nilai (Rp)			
KPPD	SLEMAN							
1	Bangunan	PT BPD (PERSERO) Cabang Sleman (Kantor Kas)	01/01/2019 s.d 31/12/2023	95.000.000,00	01/01/2021 s.d. 31/12/2023	57.000.000,00		
		PT BPD (PERSERO) Cabang Sleman (ATM)	01/04/2019 s.d 31/03/2024	81.775.000,00	01/01/2021 s.d 31/03/2024	53.153.750,00		
			JUMLAH			110.153.750,00		
KPPD	BANTUL							
1	Bangunan	Bank BNI Cabang Yogyakarta	16/10/2020 s.d 15/10/2023	9.000.000,00	01/01/2021 s.d. 15/10/2023	8.367.123,29		
	JUMLAH							
			TOTAL			962.826.565,59		

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Rp2.413.635.867,00

Rp3.117.387.223,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.413.635.867,00 merupakan Beban Pemda DIY atas pemakaian barang atau jasa sampai dengan 31 Desember 2020 tetapi belum dibayar oleh Pemda DIY terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp21.534.281,00 serta Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.249.451.538,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.134
Rincian Utang Belanja per OPD

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	708.640.200,00	1.105.937.347,00
2	Dinas Kesehatan	311.362.346,00	199.198.814,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	418.539.915,00	475.433.021,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	9.443.295,00	12.158.807,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.852.671,00	10.359.252,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8.529.645,00	12.407.893,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.084.028,00	32.605.057,00
8	Dinas Sosial	76.409.211,00	80.175.754,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.403.040,00	52.863.388,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	14.156.894,00	22.044.634,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.706.538,00	35.586.000,00
12	Dinas Perhubungan	33.439.209,00	37.364.769,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.562.744,00	19.187.270,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	15.968.935,00	11.143.274,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	5.474.276,00	7.142.645,00
16	Dinas Kebudayaan	104.893.218,00	133.321.213,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	39.399.631,00	122.889.577,00



กลา พยาหญาพ๛ทางพาผูกของทุงพาทุนางท

No	Nama OPD	Nilai Per 31-12-2020 (Rp)	Nilai Per 31-12-2019 (Rp)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.520.307,00	72.935.773,00
19	Dinas Pariwisata	8.498.829,00	12.859.483,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	72.522.246,00	43.329.360,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.165.005,00	27.356.652,00
22	Sekretariat Daerah	8.744.944,00	193.137.888,00
23	Badan Penghubung Daerah	11.975.551,00	18.418.280,00
24	Sekretariat DPRD	55.554.217,00	68.153.023,00
25	Inspektorat	3.401.867,00	3.839.781,00
26	Paniradya Kaistimewan	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	491.269,00	721.375,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	259.606.795,00	244.996.426,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	24.896.544,00	30.368.027,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	27.392.497,00	31.452.440,00
	Jumlah	2.413.635.867,00	3.117.387.223,00

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Rp21.721.050.942,00

Rp17.960.356.402,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.721.050.942,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Utang tersebut timbul sebagai konsekuensi adanya penerimaan Pajak Daerah melebihi target yang telah ditetapkan. Rincian Utang Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Rp)
1	Kota Yogyakarta	1.602.395.078,00
2	Kabupaten Bantul	5.230.278.485,00
3	Kabupaten Kulon Progo	2.693.378.622,00
4	Kabupaten Gunungkidul	3.783.042.594,00
5	Kabupaten Sleman	8.411.956.163,00
	Jumlah	21.721.050.942,00

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rp0,00

Rp0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

5.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang

Rp0,00

Rp0,00

Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

5.3.3. Ekuitas

Rp11.290.686.277.272,40

Rp10.343.362.322.871,10

Saldo Ekuitas Pemda DIY sebesar Rp11.290.686.277.272,40 merupakan kekayaan bersih Pemda DIY yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemda DIY pada tanggal 31 Desember 2020.



การ การเกาะ

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.290.686.277.272,40 mengalami kenaikan sebesar Rp947.323.954.401,27 atau 9,16% dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.343.362.322.871,10.

5.4 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 Pendapatan - LO

Rp5.732.499.444.078,61

Rp5.976.451.390.819,34

Pendapatan LO Tahun 2020 sebesar Rp5.732.499.444.078,61 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO, Pendapatan Transfer - LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Rp1.909.691.645.242,38

Rp2.138.478.675.001,98

Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2020 sebesar Rp1.909.691.645.242,38 meliputi Pendapatan Pajak Daerah - LO, Pendapatan Retribusi Daerah - LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Rp1.646.507.580.363,00

Rp1.773.956.439.572,00

Pendapatan Pajak Daerah - LO sebesar Rp1.646.507.580.363,00 terdiri dari Pendapatan Pajak yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan tambahan Piutang Pajak pada Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.134

Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	846.841.503.400,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	333.511.934.000,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	225.462.302.459,00
4	Pajak Air Permukaan - LO	1.328.837.075,00
5	Pajak Rokok - LO	239.363.003.429,00
	Jumlah	1.646.507.580.363,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO R

Rp25.774.480.406,75

Rp31.824.694.405,91

Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebesar Rp25.774.480.406,75 terdiri dari Pendapatan Retribusi yang sudah diterima oleh Kas Daerah dan tambahan Piutang Retribusi pada Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:



การ พยาหญาพ๛ การเมาผู้ ๆ ยาเบา พาราทุการา

Tabel 5.135
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	72.875.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	5.048.830.320,05
3	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	839.782.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	2.754.859.000,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	6.247.831.420,70
6	Retribusi Terminal - LO	445.917.000,00
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	372.127.000,00
8	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LO	191.675.000,00
9	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	81.191.500,00
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	100.645.500,00
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	9.108.731.666,00
12	Retribusi Izin Trayek - LO	77.580.000,00
13	Retribusi Izin Perikanan - LO	825.000,00
14	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	431.610.000,00
	Jumlah	25.774.480.406,75

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

Rp147.442.541.655,78

Rp152.365.307.047,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO sebesar Rp147.442.541.655,78 merupakan pendapatan yang sudah menjadi hak Pemda DIY sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp147.343.223.644,78 (Metode Ekuitas) yang menambah Investasi Permanen dan yang diterima secara kas sebesar Rp99.318.011,00 (Metode Perolehan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PT. Taru Martani (Metode Ekuitas)	9.593.521.964,77
2	PT. BPD DIY (Metode Ekuitas)	124.429.821.936,63
3	PT. Anindya Mitra Internasional (Metode Ekuitas)	3.553.261.599,26
4	PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) (Metode Perolehan)	99.318.011,00
5	Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) (Metode Ekuitas)	9.766.618.144,12
	Jumlah	147.442.541.655,78

Penjelasan rincian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. PT. Taru Martani

Kepemilikan sahan Pemda DIY pada PT. Taru Martani sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 99,996%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Taru Martani menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi



กา

perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2020 PT. Taru Martani mencatat laba sebesar Rp9.593.905.721,00, dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,996% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp9.593.521.964,77 (99,996% x Rp9.593.905.721,00). Dengan demikian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2020 pada PT. Tarumartani adalah sebesar Rp9.593.521.964,77.

2. PT. BPD DIY

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. BPD DIY sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 51%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. BPD DIY menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2020 PT. BPD DIY mencatat laba sebesar Rp243.980.043.013,00, dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 51% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp124.429.821.936,63 (51% x Rp243.980.043.013,00). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan menambah nilai Investasi Permanen - Penyertaan Modal sebesar Rp124.429.821.936,63.

3. PT. Anindya Mitra Internasional

Kepemilikan saham Pemda DIY pada PT. Anindya Mitra Internasional sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 99,951%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada PT. Anindya Mitra Internasional menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode pelaporan Pemda DIY memiliki hak/kewajiban atas laba/rugi perusahaan pada periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2020 PT. Anindya Mitra Internasional mencatat laba sebesar Rp3.555.003.551,00, dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 99,951% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp3.553.261.599,26 (99,951% x Rp3.555.003.551,00). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan menambah nilai Investasi Permanen - Penyertaan Modal sebesar Rp3.553.261.599,26.

4. PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA)

Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp750.000.000,00 dengan prosentase kepemilikan sebesar 0,223%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi, nilai kepemilikan kurang dari 20% maka penilaian Investasi Permanen dalam bentuk penyertaan modal menggunakan metode harga perolehan, sehingga pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO adalah pada saat direalisasikan atau saat diterima pembayarannya. Pada Tahun 2020, Pemda DIY telah menerima Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO pada PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) sebesar Rp99.318.011,00 atas hak laba PT. Asuransi Bangun Askrida (PT. ABA) Tahun 2019.

5. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

Kepemilikan saham Pemda DIY pada BUKP sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar 83,140%. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi kepemilikan saham sebesar 20% - 50% atau lebih dari 50% maka penilaian Investasi Permanen pada BUKP menggunakan metode ekuitas dimana pada akhir periode berjalan dengan menambah atau mengurangi nilai Investasi Permanen. Pada Tahun 2020



^^ พยาหญาพ๛กางพลกางเพญายเกิดเกิดเกา

BUKP mencatat laba sebesar Rp11.747.195.265,96, dengan prosentase kepemilikan saham Pemda DIY sebesar 83,140% maka Pemda DIY mempunyai hak atas laba sebesar Rp9.766.618.144,12 (83,140% x Rp11.747.195.265,96). Hak atas laba tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO dan menambah nilai Investasi Permanen Modal sebesar Rp9.766.618.144,12.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

Rp89.967.042.816,85

Rp180.332.233.977,07

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO sebesar Rp89.967.042.816,85 terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO yang telah diterima oleh Kas Daerah dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.137

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	120.498.600,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	8.941.000,00
3	Penerimaan Jasa Giro - LO	21.541.249.683,40
4	Pendapatan Bunga - LO	4.401.193.283,62
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	10.475.000,00
6	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	452.947.912,00
7	Pendapatan Denda Pajak - LO	15.898.676.800,00
8	Pendapatan Denda Retribusi - LO	88.018.529,30
9	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	34.978.000,00
	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	68.000.000,00
10	Pendapatan dari Pengembalian - LO	552.597.840,00
11	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	5.592.948.484,85
12	Pendapatan BLUD - LO	35.712.390.011,00
13	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	5.484.127.672,68
	Jumlah	89.967.042.816,85

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Rp3.726.454.595.432,00

Rp3.608.013.435.006,00

Pendapatan Transfer - LO Tahun 2020 sebesar Rp3.726.454.595.432,00 meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO dan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO. Rincian Pendapatan Transfer - LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Rp2.371.044.354.021,00

Rp2.385.702.912.253,0

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2020 sebesar Rp2.371.044.354.021,00 meliputi Dana Bagi Hasil Pajak - LO, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO, Dana Alokasi Umum - LO, dan Dana Alokasi Khusus - LO dengan rincian sebagai berikut:



การ พยาหารพลารพลารพุทธภาพขาทุนาเกา

Tabel 5.138 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak - LO	114.252.471.928,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	24.870.747,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.227.647.676.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	1.029.119.335.346,00
	Jumlah	2.371.044.354.021,00

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Rp1.354.630.222.221,00

Rp1.221.604.487.443,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Tahun 2020 sebesar Rp1.354.630.222.221,00 meliputi:

- a. Dana Keistimewaan LO sebesar Rp1.286.576.228.221,00
- b. Dana Penyesuaian LO sebesar Rp68.053.994.000,00 merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pemda Lainnya - LO

Rp780.019.190,00

Rp706.035.310,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO sebesar Rp780.019.190,00 merupakan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta untuk sharing Biaya Pengelolaan IPAL sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 119/6646/2020 dan 12/PK/Bt/2020 dan 30/PK.KDH/A/2020 dan 14.PERJ.YK/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat beserta addendumnya. Rincian Bantuan Keuangan terdiri dari Pemda Kabupaten Bantul sebesar Rp91.448.260,00 (100%), Pemda Kabupaten Sleman sebesar Rp105.140.870,00 (100%) dan Pemda Kota Yogyakarta sebesar Rp583.430.060,00 (100%).

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Rp96.353.203.404,23 Rp229.959.280.811,36

Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO Tahun 2020 sebesar Rp96.353.203.404,23 merupakan Pendapatan Hibah - LO dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.139 Rincian Pendapatan Hibah - LO dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hibah dari Dealer Otomotif	3.006.443.000,00
2	Hibah dari Main Dealer	28.200.000,00
3	Hibah dari PT. Jasa Raharja	3.924.000.000,00
4	Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	35.346.337.914,23
5	Hibah Barang pada BPBD	16.645.230.370,00
6	Hibah Barang pada Dinas Sosial	20.700.000,00
7	Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.000.000,00
8	Hibah Barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika	456.058.490,00
9	Hibah Barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	476.812.123,00
10	Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan	8.849.478.100,00
11	Hibah Barang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	27.259.648.406,00
12	Hibah Barang pada Badan Kepegawaian Daerah	50.000.000,00
13	Hibah Barang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan	8.600.000,00
14	Hibah Barang pada Dinas Kesehatan	231.695.000,00
15	Hibah Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja	1,00
	Jumlah	96.353.203.404,23

Hibah Barang terdapat pada OPD berikut:

- 1. Hibah Barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp35.346.337.914,23 berasal dari Block Grant, dan Komite Sekolah.
- 2. Hibah Barang pada BPBD sebesar Rp16.645.230.370,00 berasal dari BNPB dan Pihak Lain terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 di DIY.
- 3. Hibah Barang pada Dinas Sosial sebesar Rp20.700.000,00 berasal dari Kementerian Sosial.
- 4. Hibah Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp50.000.000,00 berupa mushola berasal dari Takmir masjid.
- 5. Hibah Barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp456.058.490,00 berasal dari Pihak Ketiga.
- 6. Hibah Barang pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp476.812.123,00 berasal dari Perpustakaan Nasional.
- 7. Hibah Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp8.849.478.100,00 berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 8. Hibah Barang pada BPKA sebesar Rp27.259.648.406,00 berasal dari Kenterian PU, Kab.Bantul, Kab Kulon Progo, Kemenkes, dan Kementerian Pertanian.
- 9. Hibah Barang pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp50.000.000,00 berasal dari PT. BPD DIY
- 10. Hibah Barang pada Badan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp8.600.000,00 berasal dari peserta Diklat PKA dan PKP.
- 11. Hibah Barang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp231.695.000,00 berasal dari Kementerian Kesehatan.
- 12. Hibah Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1,00 berasal dari sumbangan PT. Borobudur yang tidak ada nilainya.



5.4.2 Beban

Rp4.663.624.192.027,54

Rp4.871.151.715.959,20

Realisasi Beban Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.663.624.192.027,54 merupakan penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran, dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2020, terdiri dari dari Beban Operasi dan Beban Transfer sebesar dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1 Beban Operasi

Rp3.574.026.798.490,91

Rp3.854.207.914.909,49

Realisasi Beban Operasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.574.026.798.490,91 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Rp1.558.830.493.941,39

Rp1.551.059.704.219,00

Beban Pegawai Pemda DIY Tahun 2020 sebesar Rp1.558.830.493.941,39 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp1.558.830.493.941,39 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.140
Rincian Beban Pegawai per Obyek Beban

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	904.295.719.330,39	795.081.963.553,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	521.178.068.065,00	440.567.196.757,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	12.414.000.000,00	12.905.294.694,00
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	40.103.069.151,00	46.177.496.341,00
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	735.073.630,00	968.441.119,00
6	Uang Lembur	-	359.856.000,00
7	Beban Honorarium PNS	19.650.131.575,00	82.511.790.075,00
8	Beban Honorarium Non PNS	49.767.059.072,00	155.085.927.362,00
9	Beban Pegawai BLUD	9.672.988.118,00	14.823.529.468,00
10	Beban Pegawai BOS	1.014.385.000,00	2.578.208.850,00
	Jumlah	1.558.830.493.941,39	1.551.059.704.219,00

Realisasi Beban Pegawai Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.558.830.493.941,39 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:



การและ การเกาะ การและ การเกาะ
Tabel 5.141
Rincian Beban Pegawai per SKPD

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	788.656.453.595,00	813.657.184.305,00
2	Dinas Kesehatan	53.715.751.478,00	57.757.958.385,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	37.996.529.077,00	41.496.345.368,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	3.709.973.472,00	14.196.342.575,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.528.709.183,00	5.960.942.350,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	10.300.671.493,00	12.281.646.101,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.011.737.101,00	7.320.087.724,00
8	Dinas Sosial	25.090.556.269,00	25.224.766.444,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.124.721.123,00	16.853.842.073,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2.825.714.691,00	4.713.165.478,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23.920.381.113,00	26.830.029.717,00
12	Dinas Perhubungan	7.563.269.251,00	10.384.464.831,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.497.046.086,00	5.099.742.016,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.805.751.297,00	5.447.516.316,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	3.513.691.348,00	4.073.131.260,00
16	Dinas Kebudayaan	18.694.256.056,00	27.198.683.357,00
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.302.029.961,00	8.392.682.926,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.617.069.139,00	9.781.735.981,00
19	Dinas Pariwisata	4.450.134.801,00	4.754.888.293,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	26.747.515.088,00	29.014.562.397,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.273.756.669,00	9.294.403.954,00
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	2.783.613.656,00	3.248.890.330,00
23	Sekretariat Daerah	27.944.523.081,00	38.356.701.409,00
24	Badan Penghubung Daerah	2.663.435.979,00	2.672.773.422,00
25	Paniradya Kaistimewan	5.313.350.691,00	2.360.113.735,00
26	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38.852.849.274,00	36.455.579.794,00
27	Sekretariat DPRD	5.291.885.813,00	9.264.487.168,00
28	Inspektorat	11.123.224.901,00	11.814.849.414,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.729.842.333,00	9.613.372.483,00
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	111.522.337.649,39	107.979.050.852,00
31	Badan Kepegawaian Daerah	277.606.294.436,00	184.231.004.529,00
32	Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.653.417.837,00	5.328.759.232,00
	Jumlah	1.558.830.493.941,39	1.551.059.704.219,00

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Rp775.568.864.314,21

Rp1.246.156.710.165,83

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp775.568.864.314,21 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2020 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset, dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 per obyek beban adalah sebagai berikut:



บอทิหูรูเพลทรเพลทรเตมีกูตอเทพเพาหาตา

Tabel 5.142 Rincian Beban Barang dan Jasa per Obyek Beban

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Bahan Pakai Habis	18.081.030.908,00	267.585.682.692,31
2	Beban Persediaan Bahan/Material	174.066.500,00	107.404.127.480,03
3	Beban Jasa Kantor	238.647.869.756,00	233.135.955.648,00
4	Beban Premi Asuransi	1.186.173.293,95	2.592.347.803,39
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	2.933.185.256,00	13.293.870.131,00
6	Beban Persediaan Cetak dan Penggandaan	108.515.450,00	35.685.089.829,00
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gedung Parkir	5.341.064.241,74	17.315.001.542,10
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	2.478.649.050,00	9.795.109.411,00
9	Beban Sewa Alat Berat	686.500.800,00	283.178.500,00
10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.198.089.911,00	34.910.883.209,00
11	Beban Makanan dan Minuman	44.725.856.560,00	101.669.856.297,00
12	Beban Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya	52.500.000,00	919.158.330,00
13	Beban Persediaan Pakaian Kerja	-	4.047.156.150,00
14	Beban Persediaan Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	10.000.000,00	4.613.839.350,00
15	Beban Perjalanan Dinas	31.713.432.937,00	95.272.402.957,00
16	Beban Pemeliharaan	75.420.050.225,03	85.440.166.287,00
17	Beban Jasa Konsultansi	26.774.820.165,00	49.240.061.136,00
18	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	8.226.300.065,00
19	Beban Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	2.211.489.695,00
20	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.984.630.000,00	25.204.232.000,00
21	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	1.885.017.115,00	6.060.286.119,00
22	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.198.196.041,00	125.834.340.534,00
23	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.266.200.000,00	15.416.175.000,00
24	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	1.536.600.000,00	-
25	Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS	22.092.740.000,00	-
26	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	112.397.000,00	-
27	Beban Persediaan Barang Pakai Habis	260.961.279.104,49	-
	Jumlah	775.568.864.314,21	1.246.156.710.165,83



000 พยาหญาพ๛กางพระกางพุฬุกุยเบกเพากุษก์เก

Realisasi Beban Barang dan Jasa Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp775.568.864.314,21 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.143
Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	261.996.564.596,79	307.644.288.346,00
2	Dinas Kesehatan	62.327.823.314,42	79.690.534.290,50
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	84.196.265.879,01	182.386.939.276,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5.456.562.606,00	29.964.773.416,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.916.384.224,00	4.582.967.915,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.152.570.656,00	4.122.847.883,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.092.188.242,00	16.642.986.137,00
8	Dinas Sosial	33.810.511.920,52	32.699.867.513,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.521.585.850,95	17.206.631.795,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	4.002.607.713,00	6.776.523.151,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.109.272.348,00	21.324.356.737,00
12	Dinas Perhubungan	12.638.149.955,00	15.321.633.394,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.007.020.710,00	11.783.009.045,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	12.069.042.922,00	8.130.319.600,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	1.772.978.112,00	5.314.761.334,00
16	Dinas Kebudayaan	74.558.916.708,00	252.381.208.790,31
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	13.291.891.879,00	16.311.802.955,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.816.809.321,69	18.133.497.921,00
19	Dinas Pariwisata	7.671.867.108,00	15.271.275.967,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12.790.867.601,28	15.227.359.945,53
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.893.211.310,00	11.052.193.450,00
22	Sekretariat Daerah	20.238.446.030,00	50.528.062.453,00
23	Badan Penghubung Daerah	1.699.351.155,00	2.695.608.675,00
24	Paniradya Kaistimewan	3.726.146.465,00	623.334.857,00
25	Sekretariat DPRD	48.311.424.674,50	53.173.467.718,00
26	Inspektorat	1.560.124.684,36	3.091.805.429,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.112.717.410,00	9.533.115.399,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	23.061.837.416,69	27.489.390.064,49
29	Badan Kepegawaian Daerah	7.770.868.383,00	14.096.281.500,00
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	3.994.855.118,00	12.955.865.209,00
	Jumlah	775.568.864.314,21	1.246.156.710.165,83

5.4.2.1.3 Beban Bunga

Rp0,00

Rp0,00

Realisasi Beban Bunga Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

5.4.2.1.4 Beban Subsidi

Rp78.044.846.317,00

Rp76.067.609.352,00

Realisasi Beban Subsidi Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp78.044.846.317,00. Beban Subsidi tersebut merupakan bantuan biaya produksi yang diberikan kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang diberi hak pengelolaan dan pengoperasian angkutan perkotaan bersubsidi Trans Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy The Service kepada PT. Anindya Mitra Internasional. Dalam melaksanakan pengoperasian Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja PT. AMI berhak atas subsidi, pendapatan dari tiket dan pendapatan lain-lain, dan mengusulkan tarif layanan angkutan.



5.4.2.1.5 Beban Hibah

Rp788.134.032.759,58

Rp638.980.684.355,00

Realisasi Beban Hibah Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp788.134.032.759,58 terdiri dari Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp111.661.470.559,58 dan Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp673.992.024.200,00 serta Beban Hibah kepada Partai Politik sebesar Rp2.480.538.000,00. Rincian Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp673.992.024.200,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.144

Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul	10.227.178.492,29
2	Beban Hibah Kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	28.030.027.361,88
3	Beban Hibah Kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	73.404.264.705,41
	Jumlah	111.661.470.559,58

Tabel 5.145
Rincian Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Hibah Urusan Pendidikan	559.513.725.000,00
2	Hibah Urusan Kesehatan	1.000.000.000,00
3	Hibah Urusan Sosial	417.500.000,00
4	Hibah Urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak	968.800.000,00
5	Hibah Urusan Pangan	230.000.000,00
6	Hibah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.185.000.000,00
7	Hibah Urusan Komunikasi dan Informatika	557.508.600,00
8	Hibah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	259.000.000,00
9	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	400.000.000,00
10	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	6.000.000.000,00
11	Hibah Untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	-
12	Hibah Urusan Keistimewaan	102.460.490.600,00
	Jumlah	673.992.024.200,00

Adapun rincian Beban Hibah kepada Partai Politik sebesar Rp2.480.538.000,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.146 Rincian Beban Hibah kepada Partai Politik

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Beban Hibah Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	253.759.200,00
2	Beban Hibah Kepada Partai Nasional Demokrat	161.514.000,00
3	Beban Hibah Kepada Partai Keadilan Sejahtera	283.305.600,00
4	Beban Hibah Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	785.576.400,00
5	Beban Hibah Kepada Partai Golongan Karya	227.136.000,00
6	Beban Hibah Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	269.019.600,00
7	Beban Hibah Kepada Partai Demokrat	94.432.800,00
8	Beban Hibah Kepada Partai Amanat Nasional	279.979.200,00
9	Beban Hibah Kepada Partai Persatuan Pembangunan	74.612.400,00
10	Beban Hibah Kepada Partai Solidaritas Indonesia	51.202.800,00
	Jumlah	2.480.538.000,00



กลา พยาหางพะกางพานั้น ๆ ยากางทางทางทาง

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

Rp1.492.000.000,00

Rp702.000.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.492.000.000,00 merupakan Beban Bantuan Sosial untuk program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan anak bermasalah sosial dan pelayanan dan perlindungan lanjut usia terlantar serta keluarga rentan dan miskin.

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp371.321.524.908,85

Rp341.047.688.355,47

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp371.321.524.908,85 dengan rincian Beban Penyusutan sebesar Rp371.321.524.908,85 dan Amortisasi Rp0,00 Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.147
Rincian Beban Penyusutan per Obyek Beban

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	170.507.700.707,48	147.758.261.904,45
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	74.322.205.800,66	75.065.156.045,80
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	124.689.846.695,47	114.682.427.493,64
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	800.784.977,17	1.242.994.950,78
5	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	1.000.986.728,07	2.298.847.960,80
	Jumlah	371.321.524.908,85	341.047.688.355,47

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortasi Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp371.321.524.908,85 dengan rincian pada masing-masing SKPD sebagai berikut:



การ เกลาหารและการเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสายเกาะสา

Tabel 5.148 Rincian Beban Penyusutan per SKPD

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	112.767.318.072,16	88.886.464.917,45
2	Dinas Kesehatan	14.944.361.531,36	15.273.006.006,93
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	101.016.697.439,95	110.379.071.667,59
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5.596.138.807,90	3.732.244.202,84
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	552.031.231,35	653.451.700,78
6	Satuan Polisi Pamong Praja	596.567.046,67	734.999.302,80
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.296.753.478,16	2.932.606.438,43
8	Dinas Sosial	3.528.439.928,42	3.816.156.625,21
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.492.800.660,60	3.584.604.149,15
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.101.660.527,87	1.089.283.959,33
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.296.937.442,29	6.912.720.980,56
12	Dinas Perhubungan	13.399.141.637,01	12.886.573.667,07
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.111.013.672,22	8.275.936.508,53
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.379.857.698,11	1.069.025.311,81
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	530.964.590,26	585.907.455,48
16	Dinas Kebudayaan	12.052.733.830,27	13.404.988.787,72
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	7.865.826.803,32	8.696.155.945,20
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.558.016.574,80	6.967.684.316,35
19	Dinas Pariwisata	2.206.053.407,97	2.772.054.731,18
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.004.867.324,24	7.076.313.933,98
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.408.047.333,41	1.215.422.726,64
22	Sekretariat Daerah	6.023.254.242,35	6.069.814.458,26
23	Badan Penghubung Daerah	620.556.198,44	586.573.263,45
24	Paniradya Kaistimewan	519.991.940,14	672.878.600,75
25	Sekretariat DPRD	10.384.448.648,35	11.619.910.884,20
26	Inspektorat	505.883.122,71	321.317.495,93
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	777.126.377,72	812.867.318,70
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	34.953.386.613,62	16.674.639.568,36
29	Badan Kepegawaian Daerah	1.526.571.583,07	1.606.419.444,72
30	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.304.077.144,11	1.738.593.986,07
	Jumlah	371.321.524.908,85	341.047.688.355,47

5.4.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang

Rp68.812.666,80

Rp125.793.687,19

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp68.812.666,80 terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp2.442.100,50, Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp33.372.674,20, dan Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp32.997.892,10.

Beban Penyisihan Piutang berada pada OPD berikut:

- 1. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp253.512,50 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
- 2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp33.114.927,02 pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
- 3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp32.193.307,60 pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
- 4. Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp257.747,18 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 5. Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp2.442.100,50 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
- 6. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp551.072,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset



5.4.2.1.9 Beban Lain-lain

Rp566.223.583,08

Rp67.724.775,00

Realisasi Beban Lain-lain Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp566.223.583,08 pada PPKD berupa Bebanj Penyisihan Dana Bergulir..

5.4.2.2 Beban Transfer

Rp1.089.597.393.536,63

Rp1.016.943.801.049,71

Realisasi Beban Transfer Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.089.597.393.536,63 terdiri dari Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.149
Rincian Beban Transfer

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	697.652.615.144,00	731.506.477.128,71
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	390.599.778.392,63	281.452.614.421,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.345.000.000,00	1.560.062.700,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	2.424.646.800,00
	Jumlah	1.089.597.393.536,63	1.016.943.801.049,71

5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO

Rp1.068.875.252.051.07

Rp1.105.299.674.860,14

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO sebesar Rp1.068.875.252.051.07 berasal dari Pendapatan - LO sebesar Rp5.732.499.444.078,61 dikurangi dengan Beban sebesar Rp4.663.624.192.027,54.

5.4.4 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional - LO

Rp3.339.152.986,53

Rp5.446.791.027,53

Surplus Non Operasional - LO sebesar Rp3.339.152.986,53 merupakan Surplus Non Operasional sebesar Rp6.376.401.624,00 dikurangi dengan Defisit Non Operasional sebesar Rp3.037.248.637,47. Surplus Non Operasional berasal dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sedangkan Defisit Non Operasional berasal dari Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO.

Surplus Non Operasional - LO sebesar Rp6.376.401.624,00 merupakan Surplus Non Operasional - LO yang berasal dari:

- Penjualan minyak kayu putih pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp6.367.955.715,00 berasal dari Nilai Penjualan sebesar Rp9.748.035.000,00 dikurangi Harga Pokok Produksi sebesar Rp3.380.079.285,00.
- 2. Penjualan benih tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp8.445.909,00 terdiri dari Surplus non operasional Rp4.145.075,00 (penjualan tanaman kedaluwarsa) sebesar Rp4.145.075,00 berasal dari Nilai Penjualan sebesar Rp69.536.500,00 dikurangi Harga Pokok Produksi sebesar Rp65.391.425,00 serta kenaikan nilai persediaan cadangan beras sebesar Rp4.300.834,00.



การและ การเกาะ การและ การเกาะ การและ การเกาะ
Defisit Non Operasional sebesar Rp3.037.248.637,47 berasal dari kerugian:

- 1. Penjualan Alat Teknologi Tepat Guna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp17.578.000,00 berasal dari nilai penjualan sebesar Rp45.500.000,00 dikurangi harga pokok produksi sebesar Rp63.078.000,00.
- Penjualan benih tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.672.205.540,75 (penjualan hortikultura al. sayur-sayuran, susu, dan semen beku) berasal dari nilai penjualan sebesar Rp1.556.289.000,00 dikurangi dengan harga pokok produksi sebesar Rp3.228.494.540,75.
- 3. Penjualan asset tetap yang sudah rusak berat dan using pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebesar Rp1.257.223.375,02 berasal dari nilai penjualan sebesar Rp886.549.556,00 dikurangi Harga Pokok Produksi sebesar Rp2.143.772.931,02.

5.4.5 Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa - LO

Rp1.072.214.405.037,60

Rp1.110.746.465.887,67

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa - LO sebesar Rp1.072.214.405.037,60 berasal dari Surplus/Defisit Kegiatan Operasional - LO sebesar Rp1.068.875.252.051,07 ditambah dengan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional - LO sebesar Rp3.339.152.986,53.

5.4.5.1 Pos Luar Biasa

Rp(237.777.858.847,04)

Rp0,00

Pos Luar Biasa Tahun 2020 digunakan untuk menyajikan semua penerimaan dan beban yang digunakan untuk penanganan pandemic Covid-19 baik yang berasal dari APBD melalui Belanja Tidak Terduga maupun sumber lain di luar Pemda DIY. Penyajian Pos Luar Biasa mengacu pada PSAP 12 Laporan Operasional yang mengatur adanya Kejadian Luar Biasa.

Pos Luar Biasa sebesar Rp(237.777.858.847,04) berasal dari Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp27.978.674.916,00 dikurangi dengan Beban Luar Biasa sebesar Rp265.756.533.763,04.

Pendapatan Luar Biasa-LO berasal dari sumbangan masyarakat untuk penanganan Pandemi Covid-19 dalam bentuk uang sebesar Rp1.390.856.513,00 dan dalam bentuk barang sebesar Rp26.587.818.403,00. Beban Luar Biasa terdiri realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp183.061.717.739,64 dan penggunaan barang dari penerimaan hibah sebesar Rp82.694.816.023,40.

5.4.6 Surplus/Defisit - LO

Rp834.436.546.190,56

Rp1.110.746.465.887,67

Surplus/Defisit - LO sebesar Rp834.436.546.190,56 merupakan selisih antara seluruh Pendapatan - LO baik Operasional, Non Operasional dan Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp5.766.130.939.327,61 dan Beban baik Operasional maupun Non Operasional dan Beban Luar Biasa sebesar Rp4.821.389.575.921,03.

5.5 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas berisi informasi tentang Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, serta Ekuitas Akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut:



การ เกาะ การ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกา

5.5.1 Ekuitas Awsal

Rp10.343.362.322.871,10

Rp9.095.978.154

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2020 sebesar Rp10.343.362.322.871,10 mengalami kenaikan sebesar Rp1.247.384.168.552,96 atau 13,71% dibandingkan dengan Ekuitas Awal Tahun 2019 yaitu sebesar Rp9.095.978.154.318,13. Rincian Ekuitas Awal sebesar Rp10.343.362.322.871,10 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.149
Rincian Ekuitas Awal

No	Uraian	Ekuitas Awal
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.557.422.076.509,61
2	Dinas Kesehatan	179.762.825.687,12
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	3.058.195.690.829,72
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	524.083.361.686,34
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.556.243.731,74
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.699.320.323,73
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72.009.703.135,58
8	Dinas Sosial	94.565.366.637,84
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	40.839.783.963,66
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	22.950.667.358,84
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	116.853.960.307,36
12	Dinas Perhubungan	161.692.715.906,93
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	43.749.482.969,38
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14.178.711.916,86
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	5.531.290.946,07
16	Dinas Kebudayaan	415.657.130.631,09
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	157.641.801.722,99
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	172.375.226.982,68
19	Dinas Pariwisata	52.052.629.791,66
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	229.930.924.085,77
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.894.325.491,44
22	Sekretariat Daerah	227.893.463.423,09
23	Badan Penghubung Daerah	25.674.229.162,28
24	Sekretariat DPRD	136.873.720.942,12
25	Inspektorat	16.917.483.561,61
26	Paniradya Kaistimewan	2.285.113.979,73
27	Badan Perencanaan Daerah	15.757.924.905,40
	·	



No	Uraian	Ekuitas Awal
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.196.011.323.389,32
29	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.721.481.369.198,80
30	Badan Kepegawaian Daerah	13.129.987.658,22
31	Badan Pendidikan dan Pelatihan	26.694.466.034,11
	Jumlah	10.343.362.322.871,10

5.5.2 Surplus/Defisit

Rp834.436.546.190,56

Rp1.110.746.465.887,67

Surplus/Defisit LO Tahun 2020 sebesar Rp834.436.546.190,56 merupakan Surplus/Defisit LO Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.150
Rincian Surplus (Defisit) – LO per SKPD

No	Uraian	Pendapatan LO	Beban	Surplus/Defisit
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.577.576.117,00	1.163.420.589.776,45	(1.160.879.949.726,05)
2	Dinas Kesehatan	34.199.327.394,00	130.987.936.323,78	(96.788.608.929,78)
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	7.944.031.617,30	223.274.800.630,58	(215.328.080.700,78)
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	-	14.762.674.885,90	(14.783.788.305,90)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	7.997.124.638,35	(7.997.124.638,35)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.317.000,00	14.049.809.195,67	(14.034.691.245,67)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.978.674.916,00	282.157.212.584,20	(254.348.487.668,20)
8	Dinas Sosial	532.200.000,00	62.429.508.117,94	(61.897.308.117,94)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.793.755.000,00	24.139.107.634,55	(22.747.323.738,99)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	-	7.929.982.931,87	(7.929.982.931,87)
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.289.238.539,05	47.326.848.650,47	(34.037.610.111,42)
12	Dinas Perhubungan	1.762.157.200,00	33.600.560.843,01	(31.839.547.958,03)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	27.615.080.468,22	(27.614.157.968,22)
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	106.978.987,16	17.254.651.917,11	(17.188.554.669,95)
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	512.415.000,00	5.817.634.050,26	(5.305.219.050,26)
16	Dinas Kebudayaan	413.104.500,00	105.305.906.594,27	(104.892.802.094,27)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	165.414.300,00	28.459.748.643,32	(28.296.447.343,32)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	836.388.400,00	27.991.895.035,49	(27.155.506.635,49)
19	Dinas Pariwisata	42.031.952,90	14.328.055.316,97	(14.286.023.364,07)



No	Uraian	Pendapatan LO	Beban	Surplus/Defisit
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	601.265.829,00	48.305.697.275,97	(47.704.431.446,97)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	174.287.165,00	17.592.593.312,41	(17.418.306.147,41)
22	Gubernur dan Wakil Gubernur	-	2.783.613.656,00	(2.783.613.656,00)
23	Sekretariat Daerah	116.866.764,62	54.206.223.353,35	(54.089.356.588,73)
24	Badan Penghubung Daerah	187.475.000,00	4.983.343.332,44	(4.795.868.332,44)
25	Sekretariat DPRD	-	63.987.759.135,85	(63.987.759.135,85)
26	DPRD	-	38.852.849.274,00	(38.852.849.274,00)
27	Inspektorat	-	13.189.232.708,07	(13.189.232.708,07)
28	Paniradya Kaistimewan	-	9.559.489.096,14	(9.559.489.096,14)
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	14.619.686.120,72	(14.619.686.120,72)
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.848.144.177.100,35	170.797.778.227,22	1.677.346.398.873,13
31	PPKD/BUD	3.822.807.798.836,23	1.957.834.496.196,29	1.975.954.723.199,52
32	Badan Kepegawaian Daerah	661.280.000,00	286.903.734.402,07	(286.246.859.862,07)
33	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1.991.259.000,00	9.952.350.099,11	(7.961.091.099,11)
	Jumlah	5.766.854.520.618,61	4.932.417.974.428,05	834.436.546.190,56

5.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Kesalahan Mendasar

Rp112.887.408.210,70

Rp136.637.702.665,29

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2020 sebesar <u>Rp</u>112.887.408.210,70 merupakan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.151
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyerahan Hibah	(1.001.010.358,00)
2	Penyesuaian Saldo Awal dan Koreksi	(171.025.323.887,67)
3	Penghapusan	(11.272.848.235,90)
4	Ekstrakomtabel	(3.761.174.745,34)
5	Akumulasi penyusutan Aset ke OPD Lain	12.610.171.187,22
6	Pencatatan persediaan dari hasil produksi	2.036.310.000,00
7	Koreksi Penyertaan Modal secara metode Ekuitas	8.670.342.751,31
8	Penyertaan Modal Berupa Barang ke BUMD	179.222.362.679,00
9	Koreksi jurnal penyesuaian	97.408.578.820,08
	Jumlah	112.887.408.210,70



การ เกลาหารพลารเมาผู้ ๆ ผถางพระการหาเก

Tabel 5.152 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar pada OPD

No	Uraian	Dampak Kumulatif
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	20.316.785.535,24
2	Dinas Kesehatan	672.546.151,96
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	(19.021.874.272,18)
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	46.416.882.795,47
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.107.085,99)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(78.929.069,01)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	270.025.507.818,00
8	Dinas Sosial	(82.398.133,63)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.223.393.326,24
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	(3.820.000,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.198.179.429,01
12	Dinas Perhubungan	2.647.028.755,13
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.565.270.321,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.097.280.081,00
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	6.174.300,00
16	Dinas Kebudayaan	(45.444.670.346,46)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.226.199.311,16
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.748.328.610,49
19	Dinas Pariwisata	(33.552.666,67)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.064.270.533,55
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.098.083.195,85
22	Sekretariat Daerah	(1.284.687.260,81)
23	Badan Penghubung Daerah	842.200.000,00
24	Sekretariat DPRD	(900.000,00)
25	Inspektorat	(25.431.851,88)
26	Paniradya Kaistimewan	(487.996.329,55)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(562.500,00)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	(123.318.043.499,88)
29	PPKD/BUD	(95.270.542.796,34)



Ī		Jumlah	112.887.408.210,70
	31	Badan Pendidikan dan Pelatihan	(21.391.000,00)
	30	Badan Kepegawaian Daerah	436.462.359,00

5.5.4 Ekuitas Akhir

Rp 11.290.686.277.272,30

Rp10.343.362.322.871,10

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2020 adalah sebesar Rp11.290.686.277.272,30 merupakan kekayaan bersih yang dimiliki Pemda DIY dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.153 Rincian Ekuitas Akhir per OPD

No	Uraian	Ekuitas Akhir
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.595.485.611.039,40
2	Dinas Kesehatan	180.741.797.301,30
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	3.360.334.349.499,27
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	597.256.552.669,91
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.276.280.381,39
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.221.303.531,05
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	106.468.913.907,02
8	Dinas Sosial	94.366.147.531,27
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.044.410.478,35
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	22.216.722.040,97
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	112.790.126.033,24
12	Dinas Perhubungan	155.838.261.770,05
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	66.930.398.599,16
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	18.610.301.293,91
15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	5.321.630.544,81
16	Dinas Kebudayaan	561.883.339.098,36
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	152.579.754.438,83
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	176.040.136.346,68
19	Dinas Pariwisata	54.237.375.689,92
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	245.058.488.170,35
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34.142.299.991,88
22	Sekretariat Daerah	226.299.666.053,55



กลา พยาหญาพ๛ทางพาผูกของทุงพาทุนางท

	Jumlah	11.290.686.277.272,30
31	Badan Pendidikan dan Pelatihan	26.188.034.808,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	12.550.846.117,15
29	PPKD/BUD	2.075.297.358.678,07
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1.160.171.298.390,96
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.354.676.673,68
26	Paniradya Kaistimewan	2.726.254.570,04
25	Inspektorat	17.602.119.235,66
24	Sekretariat DPRD	128.535.734.457,27
23	Badan Penghubung Daerah	26.017.628.880,84

5.6 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah peneriman kas dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya, dan Hibah dikurangi dengan pembayaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil Pajak dalam Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.1.1 Arus Masuk Kas

Rp5.610.329.020.732,71 Rp5.696.004.211.789,50

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.610.329.020.732,71 berasal dari:

Tabel 5.154
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	1.646.559.198.863,00	1.773.940.604.572,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	36.546.077.142,71	42.420.048.683,08
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	101.460.382.151,46	85.960.824.196,14
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.959.267.630,54	177.120.836.332,28
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	114.252.471.928,00	56.035.674.200,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	24.870.747,00	24.907.600,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.227.647.676.000,00	1.351.102.020.000,00



กลายเกาะสารเกาะสา

	Jumlah Arus Masuk Kas	5.610.329.020.732,71	5.696.004.211.789,50
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
15	Penerimaan Lainnya	-	-
14	Penerimaan Dana Darurat	-	-
13	Penerimaan Hibah	8.349.499.513,00	8.548.463.000,00
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	780.019.190,00	706.035.310,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	68.053.994.000,00	58.831.799.000,00
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	1.286.576.228.221,00	1.162.772.688.443,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.029.119.335.346,00	978.540.310.453,00

5.6.1.2 Arus Kas Keluar

Rp4.492.546.774.424,03

Rp4.509.447.244.845,17

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.492.546.774.424,03 dipergunakan untuk:

Tabel 5.155
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.562.236.884.707,39	1.553.763.754.881,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	707.629.279.470,01	1.072.294.764.575,00
3	Pembayaran Bunga	-	-
4	Pembayaran Subsidi	78.044.846.317,00	76.067.609.352,00
5	Pembayaran Hibah	744.149.764.252,00	735.398.604.386,46
6	Pembayaran Bantuan Sosial	9.009.947.911,00	51.143.429.903,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	391.944.778.392,63	285.437.323.921,00
8	Pembayaran Tidak Terduga	305.639.352.770,00	-
9	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	693.891.920.604,00	735.341.757.826,71
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
11	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
12	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-
	Jumlah Arus Keluar Kas	4.492.546.774.424,03	4.509.447.244.845,17

5.6.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Rp1.117.782.246.308,6 R

Rp1.186.556.966.944,33

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.117.782.246.308,68 berasal dari:



การ พยาหญาพ๛ การเมาผู้ ๆ ยาเขา ๆ เพาะ การเมาะการท

Tabel 5.156 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	5.610.329.020.732,71	5.696.004.211.789,50
2	Arus Keluar Kas	(4.492.546.774.424,03)	(4.509.447.244.845,17)
	Jumlah Arus Kas Masuk Bersih	1.117.782.246.308,68	1.186.556.966.944,33

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah peneriman kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin, Penjualan atas Aset Tetap Lainnya, Penjualan Aset Lainnya, dan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk perolehan atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset Lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen dalam Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.2.1 Arus Masuk Kas

Rp4.326.932.767,00

Rp6.016.930.667,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.326.932.767,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.157
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Penjualan atas Tanah	-	-
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	525.929.467,00	809.386.651,00
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	61.302.989,00	2.115.355.000,00
4	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	585.730.111,00	250.179.000,00
6	Penjualan atas Aset Lainnya	8.941.000,00	178.100.000,00
7	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
8	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	3.145.029.200,00	2.663.910.016,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	4.326.932.767,00	6.016.930.667,00

Penjelasan:

- 1. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp525.929.467,00 merupakan Arus Kas Masuk Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai sebesar Rp87.500.000,00, Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua sebesar Rp276.929.148,00 dan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat sebesar Rp161.500.319,00 . Aset yang dijual tersebut merupakan aset yang akan dihapuskan karena telah usang dan rusak berat.
- 2. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp61.302.989,00 merupakan penjualan bahan-bahan bekas bangunan.
- 3. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp585.730.111,00 merupakan Penjualan Hasil Pertanian sebesar Rp120.498.600,00, Penjualan Hasil Peternakan sebesar Rp299.317.100,00 dan Penjualan Air Curah sebesar Rp165.914.411,00.



การและ การเกาะ การและ การแ

- 4. Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Aset Lainnya sebesar Rp8.941.000,00 merupakan penjualan drum bekas sebesar Rp5.592.000,00, dan Penjualan Hasil Penebangan Pohon sebesar Rp3.349.000,00.
- 5. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen sebesar Rp3.145.029.200,00 merupakan penerimaan pembayaran dana bergulir dari masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.158
Rincian Penerimaan Kembali Dana Bergulir Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	DPM LDPM	3.000.000,00
	DPM LUEP	52.000.000,00
	Jumlah	55.000.000,00
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Program Ketahanan Pangan di 14 Kecamatan (Koperasi)	600.000,00
	Program Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi	1.088.429.200,00
	Dana BUKP	2.000.000.000,00
	Fasilitas Pemberdayaan Koperasi (Erupsi)	1.000.000,00
	Jumlah	3.090.029.200,00
	Total	3.145.029.200,00

5.6.2.2 Arus Keluar KAs

Rp1.058.223.924.931,64

Rp1.243.800.185.484,85

Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.058.223.924.931,64 dipergunakan untuk:

Tabel 5.159
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
2	Perolehan atas Tanah	696.800.024.901,00	469.142.424.222,00
3	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	137.484.204.942,00	159.857.330.876,00
4	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	52.613.388.365,00	138.986.381.949,17
5	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.021.109.346,64	242.118.840.886,68
6	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	15.382.208.041,00	23.907.706.051,00
7	Perolehan atas Aset Lainnya	332.989.336,00	1.190.501.500,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	113.590.000.000,00	198.597.000.000,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	4.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.058.223.924.931,64	1.243.800.185.484,85



กลายเกาะสารเกาะสารแก้งสายกากเกาะสารเกา

Penjelasan:

- 1. Arus Kas Keluar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp113.590.000.000,00 merupakan penyertaan modal PT. Bank BPD DIY sebesar Rp101.000.000,000, PT. Askrida sebesar Rp90.000.000,00, dan Perusda Air Bersih Tirtatama sebesar Rp12.500.000.000,00.
- 2. Arus Kas Keluar Pengeluaran Investasi Non Permanen sebesar Rp4.000.000.000,00 merupakan penambahan investasi non permanen dana bergulir melalui BUKP.

5.6.2.3 Arus Keluar Kas Bersih-Aktivitas Invetasi

Rp (1.053.896.992.164,64)

(Rp1.237.783.254.817,85)

Arus Keluar Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp(1.053.896.992.164,64) berasal dari:

Tabel 5.160
Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	4.326.932.767,00	6.016.930.667,00
2	Arus Keluar Kas	(1.058.223.924.931,64)	1.243.800.185.484,85)
	Jumlah Arus Kas Masuk Bersih	(1.053.896.992.164,64)	(1.237.783.254.817,85)

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah peneriman kas dari Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir, Pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah/Pemerintah Daerah Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.3.1 Arus Masuk Kas Rp0,00 Rp0,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp0,00.

5.6.3.2 Arus Keluar Kas Rp0,00 Rp0,00

Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

5.6.3.3 Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan/Pebiayaan Rp00,00

Rp0.00

Arus Keluar Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transtoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:



กลา พยาหางพะกางพานั้น ๆ ยากางทางทางทาง

5.6.4.1 Arus Masuk KAs

Rp1.651.525.349.291,00

Rp6.013.143.620.114,68

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.651.525.349.291,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.161
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	116.756.838.799,00	256.480.109.538,00
2	Pengembalian UP/GU/TU	74.140.737.793,37	42.781.245.870,37
3	Pengesahan SPJ UP/GU/TU	1.460.627.772.698,63	5.707.365.457.874,31
4	Sisa Uang Persediaan	-	6.516.806.832,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.651.525.349.291,00	6.013.143.620.114,68

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan arus masuk kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga oleh BUD sebesar Rp116.756.838.799,00, Pengembalian UP/GU/TU sebesar Rp74.140.737.793,37, dan Pengesahan SPJ UP/GU/TU sebesar Rp1.460.627.772.698,63.

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp116.756.838.799,00 terdiri dari:

Tabel 5.162 Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	52.059.250.128,00
2	PPh Pasal 21	6.040.736.691,00
3	Taperum	757.914.000,00
4	PPn	48.511.365.674,00
5	PPh Pasal 22	3.361.831.321,00
6	PPh Pasal 23	3.511.854.702,00
7	PPh Pasal 4 (2)	2.513.886.283,00
	Jumlah	116.756.838.799,00

Arus Masuk Kas juga berasal dari Pengembalian UP/GU/TU sebesar Rp74.140.737.793,37, dan Pengesahan SPJ UP/GU/TU sebesar Rp1.460.627.772.698,63, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.163 Rincian Perhitungan Sisa Kas

NO	SKPD	SP2D UP/GU/TU	SPJ UP/GU/TU	Pengembalian UP/TU/GU	Sisa uang persediaan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	106.246.927.970,00	97.229.763.307,00	9.017.164.663,00	-
2	Dinas Kesehatan	26.529.736.670,00	25.783.408.822,00	746.327.848,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	432.273.781.776,00	430.292.544.268,00	1.981.237.508,00	-
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	36.163.669.967,00	35.722.495.888,00	441.174.079,00	-
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.654.910.541,00	4.224.455.262,00	430.455.279,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.224.231.531,00	5.185.263.892,00	38.967.639,00	-



กลา เมื่อมาหารพระมารณ์ที่มายกามแบบใหม่

7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.527.053.928,00 4.121.736.079,00 405.317.849,00 8 Dinas Senaja 19.146.438.559,00 18.331.939.884,00 814.498.675,00 - 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5.375.899.565,00 4.967.860.278,00 408.009.287,00 - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penjendulanan 1.986.734.841,00 1.870.222.620,00 116.512.221,00 - 12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11.106.067.894,00 10.852.883.596,00 223.184.298,00 - 13 Dinas Kemunikasi dan Informatika 2.755.857.726,00 2.584.761.109,00 171.096.617,00 - 14 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 7.848.498.643,00 7.536.868.377,00 311.812.266,00 - 15 Dinas Perlijian dan Penanaman Modal 1.169.946.482,00 1.159.144.801,00 10.801.681,00 - 16 Dinas Kebudayaan 243.335.508.466,00 241.197.763.271,00 2.240.745.195,00 - 17 Dinas Perlijan dan Perikana 5.296.861.506,00 4.876.104.913,00	NO	SKPD	SP2D UP/GU/TU	SPJ UP/GU/TU	Pengembalian UP/TU/GU	Sisa uang persediaan
Dinas Sosial 19,146,448,559,00 4,967,860,278,00 408,009,287,00 -	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.527.053.928,00	4.121.736.079,00	405.317.849,00	-
Dinas lenga Keja dan Tansmigrasi 5.378.899.060,00 4.997.860278.00 4.907.860278.00	8	Dinas Sosial	19.146.438.559,00	18.331.939.884,00	814.498.675,00	-
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 1.986.734.841,00 1.870.222.620,00 116.512.221,00 -Penduduk 11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11.106.067.894,00 10.852.883.596,00 253.184.298,00 - 12 Dinas Perhubungan 3.708.792.993,00 3.479.842.790,00 228.950.203,00 - 13 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.755.867.726,00 2.584.761.109,00 171.096.617,00 - 14 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 7.848.498.643,00 7.536.686.377,00 311.812.266,00 - 15 Dinas Perjinan dan Penanaman Modal 1.169.946.482,00 1.159.144.801,00 10.801.681,00 - 16 Dinas Kebudayaan 243.438.508.466,00 241.197.763.271,00 2.240.745.195,00 - 17 Dinas Perjustskaan dan Arsip Daerah 5.161.692.044,00 4.876.104.913,00 285.587.131,00 - 18 Dinas Perjustskaan dan Perikanan 5.296.861.506,00 4.931.078.390,00 365.783.116,00 - 19 Dinas Perjustskaan dan Retahanan Pangan 9.008.502.705,00 8.706.147.409,00 302.355	9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.375.869.565,00	4.967.860.278,00	408.009.287,00	-
Dinas Perhubungan niciup dan Kenutahan 11.10c.067.894,00 10.852.863.595.00 233.184.995.00 -	10	Perlindungan Anak dan Pengendalian	1.986.734.841,00	1.870.222.620,00	116.512.221,00	-
13 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.755.857.726,00 2.584.761.109,00 171.096.617,00 -1	11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.106.067.894,00	10.852.883.596,00	253.184.298,00	-
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 7.848.498.643,00 7.536.686.377,00 311.812.266,00 -	12	Dinas Perhubungan	3.708.792.993,00	3.479.842.790,00	228.950.203,00	-
Menengah Menengah	13	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.755.857.726,00	2.584.761.109,00	171.096.617,00	-
Dinas Perinjian dan Penahaman Modal 1.169.946.482,00 1.159.144.801,00 10.801.681,00 -	14		7.848.498.643,00	7.536.686.377,00	311.812.266,00	-
Dinas Rebudayaan 243.438.508.466,00 241.197.763.271,00 2.240.748.199,00	15	Dinas Perijinan dan Penanaman Modal	1.169.946.482,00	1.159.144.801,00	10.801.681,00	-
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daeran 5.161.692.044,00 4.876.104.913,00 286.587.131,00 -	16	Dinas Kebudayaan	243.438.508.466,00	241.197.763.271,00	2.240.745.195,00	-
Dinas Relatitan dan Perikanan 5.296.861.506,00 4.931.078.390,00 365.783.116,00 -	17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.161.692.044,00	4.876.104.913,00	285.587.131,00	-
Dinas Pariwisata 7.521.325.696,00 6.862.318.470,00 659.07.226,00 -	18	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.296.861.506,00	4.931.078.390,00	365.783.116,00	-
Dinas Perlanian dan Ketanahan Pangan 9.008.502.705,00 8.706.147.409,00 302.335.296,00 -	19	Dinas Pariwisata	7.521.325.696,00	6.862.318.470,00	659.007.226,00	-
Substitute	20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.008.502.705,00	8.706.147.409,00	302.355.296,00	-
Subernur Subernur	21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.342.436.587,00	5.291.609.897,00	50.826.690,00	-
24 Paniradya Kaistimewan 5.330.603.050,00 5.139.267.325,00 191.335.725,00 - 25 Badan Penghubung Daerah 1.477.739.785,00 1.448.710.184,00 29.029.601,00 - 26 DPRD - - - - - - 27 Sekretariat DPRD 44.712.079.203,00 37.676.087.249,00 7.035.991.954,00 - 28 Inspektorat 6.289.179.861,00 6.150.711.268,00 138.468.593,00 - 29 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.881.831.743,00 4.592.524.256,00 289.307.487,00 - 30 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 89.518.848.900,00 88.846.458.250,00 672.390.650,00 - 31 PPKD 405.057.698.575,00 363.136.272.300,63 41.921.426.274,37 - 32 Badan Kepegawaian Daerah 7.944.588.587,00 6.945.968.198,00 998.620.389,00 - 33 Badan Pendidikan dan Pelatihan 2.333.364.458,00 2.235.712.045,00 97.652.413,00 -	22	Gubernur	-	-	-	-
25 Badan Penghubung Daerah 1.477.739.785,00 1.448.710.184,00 29.029.601,00 - 26 DPRD - <	23	Sekretariat Daerah	22.734.730.240,00	19.248.030.300,00	3.486.699.940,00	-
1.477.739.785,00 1.448.710.184,00 29.029.601,00 -	24	Paniradya Kaistimewan	5.330.603.050,00	5.139.267.325,00	191.335.725,00	-
DPRD 44.712.079.203,00 37.676.087.249,00 7.035.991.954,00 - 28 Inspektorat 6.289.179.861,00 6.150.711.268,00 138.468.593,00 - 29 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.881.831.743,00 4.592.524.256,00 289.307.487,00 - 30 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 89.518.848.900,00 88.846.458.250,00 672.390.650,00 - 31 PPKD 405.057.698.575,00 363.136.272.300,63 41.921.426.274,37 - 32 Badan Kepegawaian Daerah 7.944.588.587,00 6.945.968.198,00 998.620.389,00 - 33 Badan Pendidikan dan Pelatihan 2.333.364.458,00 2.235.712.045,00 97.652.413,00 -	25	Badan Penghubung Daerah	1.477.739.785,00	1.448.710.184,00	29.029.601,00	-
28 Inspektorat 6.289.179.861,00 6.150.711.268,00 138.468.593,00 - 29 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.881.831.743,00 4.592.524.256,00 289.307.487,00 - 30 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 89.518.848.900,00 88.846.458.250,00 672.390.650,00 - 31 PPKD 405.057.698.575,00 363.136.272.300,63 41.921.426.274,37 - 32 Badan Kepegawaian Daerah 7.944.588.587,00 6.945.968.198,00 998.620.389,00 - 33 Badan Pendidikan dan Pelatihan 2.333.364.458,00 2.235.712.045,00 97.652.413,00 -	26	DPRD	-	-	-	-
29 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.881.831.743,00 4.592.524.256,00 289.307.487,00 - 30 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 89.518.848.900,00 88.846.458.250,00 672.390.650,00 - 31 PPKD 405.057.698.575,00 363.136.272.300,63 41.921.426.274,37 - 32 Badan Kepegawaian Daerah 7.944.588.587,00 6.945.968.198,00 998.620.389,00 - 33 Badan Pendidikan dan Pelatihan 2.333.364.458,00 2.235.712.045,00 97.652.413,00 - 34.881.891.00 997.652.413.00 - 34.881.891.00 997.652.413.00 - 34.881.891.00 997.652.41	27	Sekretariat DPRD	44.712.079.203,00	37.676.087.249,00	7.035.991.954,00	-
30 Badan Perencanaan Permangunan Daeran 4.881.831.743,00 4.592.524.256,00 289.307.487,00	28	Inspektorat	6.289.179.861,00	6.150.711.268,00	138.468.593,00	-
31 PPKD 405.057.698.575,00 363.136.272.300,63 41.921.426.274,37 - 32 Badan Kepegawaian Daerah 7.944.588.587,00 6.945.968.198,00 998.620.389,00 - 33 Badan Pendidikan dan Pelatihan 2.333.364.458,00 2.235.712.045,00 97.652.413,00 -	29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.881.831.743,00	4.592.524.256,00	289.307.487,00	-
32 Badan Kepegawaian Daerah 7.944.588.587,00 6.945.968.198,00 998.620.389,00 - 33 Badan Pendidikan dan Pelatihan 2.333.364.458,00 2.235.712.045,00 97.652.413,00 -	30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	89.518.848.900,00	88.846.458.250,00	672.390.650,00	-
33 Badan Pendidikan dan Pelatihan 2.333.364.458,00 2.235.712.045,00 97.652.413,00 -	31	PPKD	405.057.698.575,00	363.136.272.300,63	41.921.426.274,37	-
33 Badan Pendidikan dan Pelatihan 2.333.364.458,00 2.235.712.045,00 97.652.413,00 -	32	Badan Kepegawaian Daerah	7,944,588,587,00	6.945.968.198,00	998.620.389,00	-
	33	Badan Pendidikan dan Pelatihan		2.235.712.045,00	97.652.413.00	-
		JUMLAH	1.534.768.510.492,00	1.460.627.772.698,63		-

5.6.4.2 Arus Kas Keluar Kas

Rp1.651.525.349.291,00 Rp6.013.143.620.114,68

Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.651.525.349.291,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:



Tabel 5.164 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	116.756.838.799,00	256.480.109.538,00
2	Penerbitan SP2D UP/GU/TU	1.534.768.510.492,00	5.756.663.510.576,68
	Jumlah Arus Kas Keluar	1.651.525.349.291,00	6.013.143.620.114,68

5.6.4.3 Arys Kas Bersih

Rp0,00

Rp0,00

Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp0,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.165 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Arus Kas Masuk	1.651.525.349.291,00	6.013.143.620.114,68
2	Arus Kas Keluar	(1.651.525.349.291,00)	(6.013.143.620.114,68)
	Jumlah Arus Kas Bersih	-	-

5.6.5 Kenaikan (Penurunan Kas)

Rp63.706.945.217,68

Rp(51.226.287.873,52)

Penurunan Bersih Kas milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp63.706.945.217,68 berasal dari:

Tabel 5.166 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	1.117.732.196.557,68	1.186.556.966.944,33
2	Aktivitas Investasi	(1.053.896.992.164,64)	(1.237.783.254.817,85)
3	Aktivitas Pendanaan	-	-
4	Aktivitas Transitoris	-	-
	Jumlah	63.885.254.144,04	(51.226.287.873,52)

5.6.6 Saldo Akhir Kas

Rp484.453.213.139,46

Rp433.555.460.454,42

Sisa Kas Daerah milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2020 sebesar Rp484.453.213.139,46 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp433.555.460.454,42 dengan rincian sebagai berikut:



การและ การเกาะ
Tabel 5.167
Rincian Kas Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Kas di BUD	441.671.236.637,40	385.653.593.288,36
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.518.460,00	7.145.501.321,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	52.675.210,00	54.694.388,00
4	Kas di BLUD	32.677.963.006,06	27.714.169.998,06
5	Kas di Bendahara BOS	10.044.731.811,00	-
6	Kas Lainnya di Rekening Sumbangan	88.015,00	-
	Jumlah Sisa Kas (SiLPA)	484.453.213.139,46	420.567.958.995,42
1	Kas Lainnya	-	12.987.501.459,00
	Jumlah Kas (Neraca)	484.453.213.139,46	433.555.460.454,42

Penjelasan:

Kas di Kasda sebesar Rp441.671.236.637,40 merupakan kas dalam penguasaan BUD di Rekening Giro Kas Daerah pada Bank BPD DIY nomor 001.111.000059 dengan rincian saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp439.850.345.019,04, Jasa Giro bulan Desember sebesar Rp1.692.632.443,00 dan Pengembalian Belanja SP2D LS masih di Pihak Ketiga sebesar Rp128.259.175,36.

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp52.675.210,00 merupakan penerimaan pendapatan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke rekening Kas Daerah pada :

- a. Dinas Perhubungan sebesar Rp4.127.000,00.
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp3.682.919,00.
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM sebesar Rp1.334.000,00.
- d. Dinas Koperasi sebesar Rp43.531.291,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.518.460,00 merupakan kelebihan Belanja Barang Jasa yang disetor ke rekening Kas Daerah, pada :

- a. Dinas Perpustakaan Arsip Daerah sebesar Rp2.113.000,00
- b. Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp4.405.460,00

Kas di BLUD sebesar Rp32.677.963.006,06 merupakan Sisa Anggaran Lebih Tahun Berjalan pada BLUD yang terdiri dari RS. Ghrasia, RS Paru Respira, Bapel Jamkesos, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Latihan Pendidikan dan Teknik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.168 Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	RS Grhasia, Dinas Kesehatan	9.362.753.244,15
	Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp9.360.340.315,15 dan Jasa Giro bulan Desember	
	2020 sebesar Rp2.412.929,00	
2	RS Paru Respira, Dinas Kesehatan	10.677.399.119,00
	Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp10.661.454.406,00 dan Jasa Giro bulan Desember	
	2020 sebesar Rp15.944.713,00	
3	Balai Pelayanan Jamkesos, Dinas Kesehatan	2.108.285.943,29



การ เกาะ การ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกาะ การ เกา

	Jumlah	32.677.963.006,06
	2020 sebesar Rp4.207.562,00	
	Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp2.653.005.348,00, dan Jasa Giro bulan Desember	
6.	BLPT, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.657.212.910,00
	sebesar Rp6.239.546,00	
	Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp4.619.400.751,62 dan Jasa Giro bulan Desember 2020	
5.	Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan	4.625.640.297,62
	sebesar Rp7.636.226,00	
	Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp3.239.035.266,00 dan Jasa Giro bulan Desember 2020	
4.	Balai Pelatihan Kesehatan, Dinas Kesehatan	3.246.671.492,00
	sebesar Rp3.507.713,00	
	Saldo giro per 31 Desember 2020 Rp2.104.778.230,29 dan Jasa Giro bulan Desember 2020	

Kas di Bendahara BOS sebesar Rp10.044.731.811,00 merupakan sisa dana BOS di rekening sekolah yang terdiri dari sisa dana BOS tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp614.183.396,00 dan sisa dana BOS tahun 2020 sebesar Rp9.430.548.415,00.

Kas Lainnya di Rekening Sumbangan sebesar Rp88.015,00 merupakan jasa giro di Rekening Sumbangan Covid 19 yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2020.



การและ การเกาะ
BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Perubahan Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah tersebut menggantikan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perubahan kelembagaan dilaksanakan berdasarkan efektifitas pemerintahan, efisiensi, manfaat, akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, dan pendayagunaan kearifan lokal. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 meliputi pembentukan perangkat daerah, jabatan pada perangkat daerah, dan *Parampara Praja*.

Perangkat daerah yang ditetapkan terdiri dari:

- 1. Sekretariat Daerah, meliputi:
 - a. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
 - 1) Biro Tata Pemerintahan
 - 2) Biro Hukum
 - 3) Biro Organisasi
 - 4) Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol
 - b. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - 1) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 2) Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
 - c. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
 - 1) Biro Bina Mental Spiritual
 - 2) Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
- 2. Paniradya Kaistimewan
- 3. Sekretariat DPRD
- 4. Inspektorat
- 5. Dinas Daerah
 - a. Dinas Pariwisata
 - b. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - f. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - h. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral
 - i. Dinas Perhubungan
 - j. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 1. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
 - m. Dinas Kesehatan
 - n. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
 - o. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah



- p. Dinas Sosial
- q. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
- r. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
- s. Satuan Polisi Pamong Praja
- 6. Badan Daerah
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset
 - c. Badan Kepegawaian Daerah
 - d. Badan Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 7. Badan Penghubung Daerah

6.2 Pelaksanaan Dana Keistimewaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan pengaturan keistimewaan DIY berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk:

- 1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis;
- 2. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
- 3. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. Menciptakan pemerintahan yang baik; dan
- 5. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Kewenangan Istimewa DIY berada di Provinsi. Kewenangan tersebut meliputi:

- 1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- 3. Kebudayaan;
- 4. Pertanahan; dan
- 5. Tata ruang.

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut atas kewenangan keistimewaan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Dana Keistimewaan dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Pengalokasian dan penyalurannya Dana Keistimewaan melalui mekanisme transfer ke daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 yang didanai dengan Dana Keistimewaan tersebut mengacu pada



การ การการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและการและกา

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Pengelolaan Dana Keistimewaan Tahun 2020 mengacu pada berbagai perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan hal-hal khusus diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan yang dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penugasan secara rinci terkait dengan pelaksanaan Dana Keistimewaan diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.

6.3 Informasi Non Keuangan Lainnya

Berdasarkan Surat KPK RI Nomor B/7163/KSP.00/10-16/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Percepatan Pembenahan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Para Gubernur/Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia, KPK mempunyai wewenang dalam melakukan tindakantindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya KPK dalam memerankan fungsi trigger mechanism adalah mendorong pembenahan pengelolaan BMD di seluruh Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah DIY diminta untuk melakukan percepatan pembenahan pengelolaan BMD dengan mengirimkan data Aset Tanah Bermasalah kepada KPK. Dalam menindaklanjuti surat dari KPK tersebut Pemda DIY telah mengirimkan secara berkala perkembangan Data Aset Tanah bermasalah ke Korwil V KPK . Berdasarkan Surat terakhir KPK dengan Nomor B/1663/KSP.00/10-16/04/2020 tanggal 1 April 2020 mengenai permintaan data tindak lanjut perkembangan konflik aset tanah bermasalah dapat kami sajikan perkembangan penyelesaian permasalahan Aset Tanah Bermasalah Pemda DIY sebagai berikut:

PERKEMBANGAN KONFLIK ASET DENGAN SWASTA/PERORANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Nama Aset Satuan/Luas Nilai	Nama Pihak Swasta/Perorangan	Permasalahan	Progress
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 15.000 m² Rp226.525.000	Murdiyanto Lurah Kedung Keris Nglipar Gunungkidul	Berdasarkan hasil pengukuran, saudara Murdiyanto selaku lurah Kedung Keris, Nglipar, Gunungkidul tidak mau menandatangai Gambar Ukur karena hasil ukur 20.000 m² sudah melebihi dari permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul seluas 15.000 m²; meskipun sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah DIY sejak tahun 1980 akan tetapi tanah tersebut juga masih tercatat dalam buku inventaris di Desa Kedung Keris, Nglipar, Gunungkidul. Berdasarkan Surat Keterangan mantan Carik bahwa Tanah Kas Desa yang terletak di Dusun Kedung Keris seluas 2 Ha, tanah tersebut pada tahun 1980/81/82 dibeli oleh Bappeda Provinsi DIY untuk Proyek Bangun Desa, adapun	Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Pemerintah Desa Kedung Keris; dan mengirim surat dari Sekda DIY yang ditujukan ke Kejaksaan Tinggi DIY dengan surat nomor 180/3977 tanggal 4 Maret 2020 untuk dilakukan permohonan pendampingan hukum



			tanah pengganti sudah bersertifikat atas nama Pemeritah Desa Kedungkeris sejumlah 5 bidang tanah yaitu: - SHP Nomor 00001 seluas 3.739 m²; - SHP Nomor 00002 seluas 4,713 m²; - SHP Nomor 00007 seluas 3,817 m²; - SHP Nomor 00008 seluas 1,658 m²; - SHP Nomor 00038 Seluas 4,228 m².	
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 10.327 m² Rp379.750.000,00	Pemerintah Desa Sumber Agung	Satu obyek tanah, SHP Pemda DIY dan Pemerintah Desa juga mempunyai sertifikat tanah tetapi sudah dibatalkan BPN/Kementerian ATR, sehingga yang berlaku hanya 1 sertifikat yaitu atas nama Pemerintah Daerah DIY; saat ini masih dikuasai Pemerintah Desa Sumber Agung dan disewakan kepada pihak ketiga untuk kios dan gudang.	Pemda DIY sudah berkoordinasi dengan Pemdes Sumber Agung, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Kantor Pertanahan Sleman. Saat ini Kepala Desa masih PJ, dimana PJ Kepala Desa tidak berani membuat kebijakan menunggu definitif Kepala desa melalui PILKADES pada bulan Desember 2020
3.	Tanah dan Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen 701 m ² Rp475.378.040,00	Setio Agus Samapto, SH	Tanah dan bangunan yang disewa sdr. Setio Agus Samapto, SH telah berakhir pada tanggal 30 November 2018, yang bersangkutan masih menghuni meskipun sudah ada surat peringatan ke-1,2, dan 3; Pihak penghuni rumah dinas tersebut mengajukan gugatan perdata ke PN Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2019 tentang sewa menyewa dan pengajuan Hak untuk tanah negara golongan III	Telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DIY dengan surat nomor 180/3826 tanggal 2 maret 2020 untuk dilakukan Permohonan Pendampingan Pengosongan; Penghuni mengajukan PK ke Mahkamah Agung, saat ini Pemda DIY menunggu keputusan MA
4.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan 5.104 m² Rp1.000.000,00	Warga RT 04 Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan	Perolehan tanah berasal dari P3D Kanwil Kesehatan, diatas Tanah tersebut terdapat rumah dinas yang dahulu dihuni oleh bapak Sudirman dan di sekitarnya terdapat banyak pemukiman warga. Mayoritas yang menguasai tanah eks. Prambusia adalah orang mantan pegawai Kanwil Kementerian Kesehatan eks prambusia. Saat ini ada beberapa yang sudah berpindah ke perumahan ngipik namun mereka juga masih memanfaatkan dan menguasai tanah di	Pemda DIY telah melakukan koordinasi dengan ketua RW 01 dan RT 04 Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan. Ada sekitar 23 rumah dan 29 kepala keluarga dan kurang lebih 87 orang penduduk yang



กลา ผลาหูเพลางผลางผมผู้ๆผพาพทางหา

	eks p	orambusia	tersebut	untuk	berada	diling	kungan
	disewak	an sebagai	kos-kosan	atau	tersebut	;	
	kontrak	an.			Telah	dil	akukan
					penguku		ulang
					oleh		Kantor
					Pertanal	nan	Kota
			Yogyaka	rta;	sudah		
			dilakuka	n	proses		
					penilaiar	ı	oleh
					appraisa	I	untuk
					nantinya	dil	akukan
				pemanfaatansewa			
					tanah ;		
				Dengan Adanya Covid			
						naka	
				pelaksanaannya			
					tertunda	l	karena
					belum		berani
					mengada	akan	rapat
					tatap n	nuka	dengan
				warga se	cara la	ngsung	



การ เมื่อมาห์ริเพลมริเพลมริเพลามาห์เมื่อเกา

BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 merupakan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 yang sangat dinamis sebagai dampak terjadinya Pandemi *Covid-19* sehingga perlu dilaksanakan beberapa kali refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penyediaan jarring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi akibat pandemic *Covid-19*. Laporan Keuangan Tahun 2020 selain disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan 39 Entitas Akuntansi pada Pengguna Anggaran dan 40 Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran. Laporan Keuangan tersebut disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan dalam hal ini oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Perencanaan anggaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2020 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2020 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X